

Siswanto
Ganewati Wuryandari
Mario Surya Ramadhan
Nanto Sriyanto
R. A. Rizka Fiani Prabaningtyas

Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok

Memperjuangkan Kepentingan Nasional
di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

Buku ini tidak diperjualbelikan

Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok

Memperjuangkan Kepentingan
Nasional di Tengah
Ketidakseimbangan Kekuatan

Diterbitkan pertama pada 2024 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Siswanto
Ganewati Wuryandari
Mario Surya Ramadhan
Nanto Sriyanto
R. A. Rizka Fiani Prabaningtyas

Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok

Memperjuangkan Kepentingan
Nasional di Tengah
Ketidakseimbangan Kekuatan

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

© 2024 Siswanto, Ganewati Wuryandari, Mario Surya Ramadhan, Nanto Sriyanto, & R. A. Rizka Fiani Prabanningtyas

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan/Siswanto, Ganewati Wuryandari, Mario Surya Ramadhan, Nanto Sriyanto, & R. A. Rizka Fiani Prabanningtyas–Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

xvii + 286 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-8372-58-4 (*e-book*)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Politik luar negeri | 2. Indonesia dan Tiongkok |
| 3. Hubungan Internasional | 4. Kerja sama |
| 5. Diplomasi | |

327.598051

Editor Akuisisi : Ayu Tya Farany
Copy editor : Sonny Heru Kusuma
Proofreader : S. Imam Setyawan & Martinus Helmiawan
Penata isi : Hilda Yunita & S. Imam Setyawan
Desainer Sampul : Hilda Yunita

Edisi Pertama : Juni 2024



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, anggota Ikapi

Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah

Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,

Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 Penerbit BRIN

 @penerbit_brin

 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Pengantar Penerbit.....	xiii
Prakata	xv
Bab 1 Merajut Hubungan Indonesia-Tiongkok di Tengah Ketimpangan Kekuatan: Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Hubungan Kekuatan yang Timpang dalam Bingkai Negara Kekuatan Menengah dan Negara Besar	17
C. Pembabakan.....	23
Bab 2 Arah Baru Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dan Implikasinya Di Indo-Pasifik.....	31
A. Latar Belakang.....	31
B. Dinamika Internal	33
C. Dinamika Eksternal.....	45
D. Arah Baru Kebijakan Luar Negeri: Dari Kooperatif ke Konfrontatif.....	52
E. Perubahan Perilaku Politik dalam Merespons Sistem Internasional.....	79

BAB 3	Dinamika Faktor Domestik dalam Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok.....	81
	A. Konteks Sejarah Politik Domestik Indonesia dan Implikasinya terhadap Hubungan Indonesia-Tiongkok	83
	B. Sumber-Sumber Internal sebagai Input dalam Penentuan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok.....	86
	C. Signifikansi Politik Domestik dalam Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok.....	108
BAB 4	Hubungan Indonesia-Tiongkok: Dinamika Kawasan dan Peranan Indonesia sebagai Kekuatan Menengah.....	109
	A. Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Dasawarsa Pertama Abad 21: Persilangan Isu Keamanan dan Isu Ekonomi.....	113
	B. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Abad Pasifik: Antara Indo-Pasifik dan <i>Belt Road Initiatives</i>	121
	C. Dinamika Regional dan “Middle Power Moment” dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok.....	144
BAB 5	Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada Era Reformasi: Orientasi Baru hingga Penguatan Fundamen Hubungan	151
	A. Dari B.J. Habibie hingga Megawati Soekarnoputri: Orientasi Baru	153
	B. Memperkokoh Fundamen Hubungan di Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014).....	165
	C. Fondasi Hubungan Indonesia-Tiongkok yang Lebih Kokoh.....	178
BAB 6	Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok pada Era Joko Widodo: Menguatkan Kemitraan, Menjaga Otonomi Strategis	181
	A. Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Jokowi.....	185
	B. Implementasi Kebijakan: Peluang dan Tantangan.....	198
	C. Kekuatan Menengah dan Kapitalisasi Kemitraan.....	212
	D. Memperkuat Kemitraan Tanpa Menjadi Ketergantungan	223

BAB 7	Ketimpangan Kekuatan dan Strategi Politik Luar Negeri	
	Indonesia terhadap Tiongkok.....	225
	A. Kondisi Umum	225
	B. Strategi Indonesia	230
	Daftar Singkatan.....	237
	Daftar Pustaka	239
	Tentang Penulis	277
	Indeks	283

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Realisasi Investasi Tiongkok ke Indonesia Tahun 2019–2022 (miliar dolar AS).....	10
Gambar 1.2	Neraca Perdagangan Non-migas Indonesia dengan Tiongkok Tahun 2019–2022 (miliar dolar AS).....	11
Gambar 2.1.	Peta Rute Perdagangan <i>Silk Road</i> dan Rute Perdagangan Lain.	70
Gambar 2.2.	Peta Rute Perdagangan <i>Silk Road</i> dan Jalur Rempah-Rempah.....	70
Gambar 4.1	Irisan FTAAP, TPP, dan RCEP.....	142

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kapasitas Diplomasi Global Indonesia dan Tiongkok Tahun 2019.....	6
Tabel 1.2	Kapasitas Militer Indonesia dan Tiongkok Tahun 2022	7
Tabel 1.3	Kapasitas Ekonomi Indonesia dan Tiongkok, 2014–2016	8
Tabel 2.1	Proyek Bantuan Luar Negeri Tiongkok Tahun 2009	65
Tabel 4.1	Perbandingan Perdagangan Barang Antara Negara Kekuatan Menengah di Asia Timur dengan Tiongkok dan AS (2017).....	136
Tabel 4.2	Keanggotaan Negara-Negara di Kawasan dalam Forum Multilateral Perdagangan Bebas.....	140

Buku ini tidak diperjualbelikan

Pengantar Penerbit

Tema hubungan luar negeri menjadi salah satu yang masih dengan rutin diterbitkan oleh Penerbit BRIN. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas untuk membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Perjalanan hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Buku *Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di tengah Ketidakseimbangan Kekuatan* ini menghimpun perjalanan hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Ditulis oleh para periset yang telah menekuni bidang politik dan kerja sama luar negeri, buku ini memaparkan dinamika hubungan luar negeri Indonesia dengan Tiongkok, yang dilihat dari bingkai kekuatan negara. Pembahasan diawali dengan latar belakang dan pemaparan terkait arah kebijakan luar negeri Tiongkok, kemudian dilanjutkan dengan dinamika hubungannya.

Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di tengah Ketidakseimbangan Kekuatan, yang ditujukan pada para periset, akademisi, dan pemangku kepentingan, diharapkan menjadi acuan dalam melihat dan mengkaji dinamika hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Prakata

Kebangkitan Tiongkok telah mendorong perubahan arah kebijakan luar negerinya. Kalangan akademisi memandang kebangkitan ini salah satunya ditandai oleh pesat dan relatif tingginya angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sejalan dengan itu, kebangkitan Tiongkok juga dibarengi oleh diplomasi aktif guna memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan di dunia. Dalam kiprah internasionalnya, Tiongkok senantiasa hadir dalam kerja sama ekonomi regional dan global. Melalui kebijakan bantuan luar negeri dan *Belt Road Initiative*, Tiongkok mengonsolidasi kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara sahabatnya dan mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan, termasuk di dalamnya mengembangkan kerja sama dengan Indonesia.

Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai mitra kerja sama ekonomi dan politik-keamanan, demikian halnya Tiongkok. Kondisi saling membutuhkan dan saling mendukung kepentingan nasionalnya ini menjadi pertimbangan utama terlaksananya kerja sama bilateral di berbagai bidang. Tiongkok sebagai negara besar dan Indonesia sebagai negara kekuatan menengah pada satu sisi berpotensi menuju kepada kerja sama saling menguntungkan kedua negara. Namun, pada sisi lain, kondisi ketidakseimbangan kekuatan ini juga berpotensi kepada kerja sama yang kurang adil dengan memberi keuntungan lebih besar

dan ketergantungan kepada Tiongkok. Oleh karena itu, perlu peran serta masyarakat untuk melakukan kajian kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok agar kerja sama bilateral ini minimal ada keseimbangan kepentingan dan maksimal lebih berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia.

Posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah secara umum mendorong untuk memilih strategi sebagai inisiator diplomatik dan bekerja sama dengan ASEAN dalam menghadapi Tiongkok. Secara eksternal kebijakan Indonesia terhadap Tiongkok tidak terlepas dari persaingan AS-Tiongkok, sedangkan secara internal berhubungan dengan kebutuhan Indonesia akan pengembangan sektor ekonomi, khususnya infrastruktur, perdagangan, dan investasi.

Kajian atas politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok ini dimaksudkan untuk memahami pola perilaku kedua negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tengah ketidakseimbangan kekuatan, yaitu Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dan Tiongkok sebagai negara kekuatan besar. Upaya ini untuk mendapatkan pembelajaran tentang pola interaksi politik luar negeri dan mengusulkan sejumlah formulasi strategi Indonesia dalam menghadapi Tiongkok.

Buku ini memiliki perspektif berbeda dengan buku-buku tentang hubungan Indonesia-Tiongkok yang sudah ada sebelumnya. Buku ini memfokuskan pada relasi kekuatan yang timpang antara Indonesia dan Tiongkok. Kekuatan nasional Indonesia yang meliputi elemen-elemen ekonomi, diplomasi, dan militer tingkatannya secara kualitatif dan kuantitatif berada di bawah Tiongkok sehingga relasi kekuatan Indonesia-Tiongkok cenderung lebih menguntungkan pihak Tiongkok. Negara ini akan lebih mudah memengaruhi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, sedangkan Indonesia perlu upaya ekstra dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok. Meskipun demikian, hasilnya kepentingan nasional kedua negara dapat diformulasikan dengan saling menguntungkan dalam berbagai kerja sama, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari strategi Indonesia yang

mengembangkan strategi tiga pilar dalam melakukan relasi kekuatan dengan Tiongkok, yaitu (1) pragmatisme ekonomi, (2) aliansi terbatas, dan (3) merapat kepada negara-negara besar. Strategi ini dinilai efektif dalam interaksi kekuatan yang tidak berimbang antara kedua negara tersebut.

Buku yang sumber utamanya berasal dari hasil penelitian Tim Politik Luar Negeri (Polugri) Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), selanjutnya dilengkapi dengan data perkembangan terbaru dari hubungan Indonesia-Tiongkok yang selalu mengalami dinamika. Harapannya tentu buku ini bisa menjadi bacaan dan rujukan bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Secara akademik, buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian politik luar negeri, khususnya politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok. Secara praktis, kajian ini juga diharapkan memberi informasi dan analisis sistematis mengenai dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok di masa Reformasi pada bidang politik-keamanan dan ekonomi.

Akhir kata, Tim Polugri PRP-BRIN sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesai dan terbitnya buku ini. Semoga Tuhan YME memberi balasan setimpal atas bantuan dan kerja sama tulus yang telah diberikan.

Jakarta, 18 Januari 2023

Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan

Merajut Hubungan Indonesia-Tiongkok di Tengah Ketimpangan Kekuatan: Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC), yang kemudian dikenal dengan sebutan Tiongkok,¹ pada Juli 1950. Hubungan kedua negara yang terjalin selama lebih tujuh dekade ini telah mengalami dinamika pasang naik dan turun. Ketika Presiden Soekarno melancarkan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia (1963–1966)² mengakibatkan Indonesia yang terkucil dari pergaulan internasional, kemudian mendorong orientasi politik luar negerinya

- 1 Perubahan nama China menjadi Tiongkok berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES. KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang penggantian istilah Tionghoa/Tiongkok menjadi Tjina. Sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok maka perlu memulihkan penggunaan istilah Tiongkok. Untuk penyebutan selanjutnya, buku ini menggunakan istilah Tiongkok yang merujuk pada China atau Republik Rakyat China (RRC).
- 2 Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, trans. Ramlan Surbakti (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 116.

mendekat ke Tiongkok.³ Hal ini terlihat dengan semakin kuatnya kerja sama kedua negara, seperti ratifikasi perjanjian dwi kewarganegaraan dengan Tiongkok tahun 1960, ratifikasi perjanjian persahabatan dengan Tiongkok pada Agustus 1961, saling kunjung pejabat tinggi, bantuan ekonomi Pemerintah Tiongkok kepada Indonesia sebesar 41 juta dolar AS pada tahun 1958, dan bantuan pembangunan gedung olahraga pada tahun 1959 sebagai bagian persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada tahun 1962. Hubungan erat kedua negara mencapai puncaknya pada saat realisasi Poros Jakarta-Peking melalui pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1965.⁴

Intensitas hubungan kedua negara selanjutnya mengalami penurunan ketika Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1966. Soeharto segera melakukan perubahan arah politik luar negeri Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan pembekuan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada bulan Oktober 1967⁵ karena dugaan adanya keterlibatan Tiongkok pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Indonesia memerlukan waktu kurang lebih selama 23 tahun untuk memulihkan kembali hubungan dengan Tiongkok. Lamanya masa pembekuan hubungan bilateral ini, menurut Franklin B. Weinstein (2007) dalam bukunya berjudul *Indonesia Foreign Policy and Dilemma of Dependence from Soekarno to Soeharto*, karena Indonesia masih menganggap Tiongkok sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Di samping itu, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional untuk menarik perhatian negara-negara Barat dengan membangun citra sebagai negara antikomunis. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik banyak bantuan dan pinjaman luar negeri mereka.⁶

3 Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia-China Relations," *Southeast Asia Affairs*, ISEAS, (2019): 145–162.

4 Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama," dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 107.

5 Zainuddin Djafar, *Rethinking the Indonesian Crisis*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2006), 45.

6 Franklin B. Weinstein, *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Soekarno to Soeharto*, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), 226–227.

Selama periode pembekuan hubungan diplomatik tersebut, hubungan Indonesia dan Tiongkok dijalankan pada tingkat yang sangat minimalis. Sekalipun kedua negara tidak melakukan kerja sama politik keamanan, tetapi hubungan dagang kedua negara masih berlanjut secara terbatas melalui perantara pihak ketiga, seperti Hong Kong. Hingga kesempatan pemimpin kedua negara membuka peluang untuk mencairkan kembali hubungan diplomatik,⁷ yaitu terutama terjadi pada saat Indonesia berkeinginan untuk menjadi ketua Gerakan Non-Blok pada tahun 1992. Pada saat pemakaman Kaisar Hirohito pada tahun 1989, kontak pertama yang membahas pencairan hubungan kedua negara akhirnya berlangsung antara Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Qian Qichen. Pertemuan tersebut menyepakati lima prinsip dasar, yaitu saling menghormati integritas masing-masing, tidak saling melakukan agresi, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, persamaan derajat dan kemanfaatan bersama, serta hidup berdampingan secara damai.⁸ Setahun kemudian, pada 8 Agustus 1990, penandatanganan nota kesepahaman tentang normalisasi hubungan diplomatik RI-RRC ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kedua negara di Istana Negara Jakarta, disaksikan oleh Presiden Soeharto dan Perdana Menteri (PM) Li Peng.⁹

Setelah normalisasi hubungan ditandatangani, kedua negara mulai kembali merajut hubungan yang sempat membeku selama 23 tahun melalui berbagai bidang kerja sama. Meskipun demikian, kedua negara pada tataran implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya masih berlanjutnya persepsi adanya ancaman Tiongkok, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan dan sensitivitas politik di dalam negeri. Hal ini diindikasikan antara

7 Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement," *Asia Survey* 49, No. 4 (2009): 591–608.

8 Greta Nebbs Keller, "Growing Convergence, Greater Consequence: The Strategic Implications of Closer Indonesia-China Relations," *Security Challenges* 7, No. 3 (2011): 23–41.

9 Wisnu Dewabrata, "Pencarian Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia," *Kompas*, 26 Juni, 2015.

lain dengan keberadaan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan dan Pembubaran PKI, yang masih berlaku hingga saat ini, dan kerusuhan Mei 1998 yang pada akhirnya menjadi kerusuhan anti-etnis Tionghoa.¹⁰

Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok kembali dirajut di tengah relasi kekuatan yang tidak berimbang di antara kedua negara tersebut. Secara ekonomi, pasca-Perang Dingin, Tiongkok menjadi negara yang sukses membangun perekonomiannya sehingga menjadi kekuatan ekonomi dunia. Di lain pihak, Indonesia, pasca-Perang Dingin atau di era Reformasi, justru sedang melakukan *recovery* ekonomi akibat krisis keuangan sistematis tahun 1998. Oleh karena itu, secara ekonomi, hubungan bilateral tersebut membuka peluang kerja sama ekonomi yang saling melengkapi karena Indonesia butuh investor, sedangkan Tiongkok dengan kekuatan ekonominya butuh tempat berinvestasi.

Sementara itu, secara politik, peningkatan hubungan bilateral tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik atau ketegangan antara Tiongkok–Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik, khususnya di Laut China Selatan (LCS).¹¹ Sekalipun Indonesia merupakan *non-claimant state* dalam konflik Laut China Selatan, Indonesia khawatir terhadap ancaman Tiongkok karena adanya tumpang tindih klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Kepulauan Natuna dengan *Nine-Dash Line* Tiongkok.¹² Terkait hal ini, Tiongkok dalam beberapa kesempatan memberikan pernyataan pengakuan atas kedaulatan wilayah Indonesia, tetapi tidak dalam konteks wilayah ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tetap mewaspadaai sikap agresif dan asertif Tiongkok di kawasan tersebut. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini, Tiongkok tidak ragu menempuh berbagai cara untuk meneguhkan klaimnya di LCS, termasuk antara lain membangun pulau-pulau yang statusnya

10 Keller, "Growing Convergence," 23–41.

11 Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-Engagement," *Asian Survey*, August (2009), 12

12 Zhao Hong, "China-Indonesia Economic Relations: Challenges and Prospects," *Perspective* 42, (2013), 3.

masih disengketakan serta melengkapinya dengan berbagai fasilitas pangkalan militer, dan mengerahkan ratusan milisi maritim di perairan tersebut.¹³

Sekalipun persepsi Indonesia terhadap Tiongkok masih didominasi perspektif ancaman, hubungan kedua negara relatif secara perlahan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan perubahan politik domestik, khususnya di era Reformasi. Hal ini terlihat dari inisiasi Presiden Abdurrahman Wahid membentuk *Southwest Pacific Dialogue*¹⁴ yang melibatkan Tiongkok, Australia, India, Papua Nugini, Timor Leste, dan Selandia Baru tahun 2000.¹⁵ Hubungan baik juga dapat dilihat dari intensitas dan frekuensi saling kunjung pejabat negara, kerja sama ekonomi, sosial budaya dan teknologi pertahanan.¹⁶ Menguatnya hubungan kedua negara terefleksikan dengan penandatanganan Kemitraan Strategis dan Kemitraan Strategis yang komprehensif, yang ditandatangani pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masing-masing pada 2005 dan 2013. Pada 2015, Kemitraan Strategis tersebut diperkuat pada masa Presiden Jokowi melalui *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia*.

Politik internasional pada dasarnya seperti kehidupan politik pada umumnya, berjuang untuk suatu kekuatan (*power*). Negarawan dan masyarakat ketika memperjuangkan kemerdekaan, keamanan, dan kesejahteraan, sesungguhnya sedang memperjuangkan kekuatan itu sendiri. Terdapat dua kesimpulan dari politik internasional, yaitu *pertama*, tidak semua aksi suatu negara terhadap negara lain bersifat politik; *kedua*, tidak semua negara terlibat dalam politik internasional,

13 Redaksi Asiatoday, "China Kerahkan Milisi Maritim, Unit Elite Militer dari Nelayan di Laut China Selatan," *Asia Today.id*, 10 Juni 2021, <https://asiatoday.id/read/china-kerahkan-milisi-maritim-unit-elite-militer-dari-nelayan-di-laut-china-selatan>,

14 Dhuroruddin Mashad, "Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi", dalam Wuryandari (ed.), *Format Baru Politik Luar Negeri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 119.

15 Hong, "China-Indonesia, 3.

16 Hong, "China-Indonesia, 3.

dan keterlibatan negara dalam politik internasional juga berbeda.¹⁷ Negara dengan kekuatan besar akan memperoleh kesempatan untuk terlibat lebih besar dalam politik internasional. Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang semakin membaik pada masa Reformasi sesungguhnya menggarisbawahi realitas bahwa ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetrical power*) yang dimiliki kedua negara tidak menghalangi mereka untuk menjalin dan memperkuat kerja sama.

Ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan Indonesia-Tiongkok ini dapat dilihat dari kapasitas diplomasi, militer, dan ekonomi mereka. Ketiga kapasitas tersebut merupakan unsur penting dari kekuatan nasional suatu negara karena dapat berdampak langsung dan atau tidak langsung pada kemampuan suatu negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Artinya, negara yang memiliki kapasitas lemah dalam hal diplomasi, militer, dan ekonomi akan berdampak dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang juga akan lemah, dan sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan kapasitas-kapasitas tersebut menjadi sangat strategis sebagai alat dalam perjuangan diplomasi suatu negara memenuhi kepentingan nasionalnya.

Ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam kapasitas diplomasi, militer, dan ekonomi yang dimiliki kedua negara secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Kapasitas Diplomasi Global Indonesia dan Tiongkok Tahun 2019

Indikator	Indonesia	Tiongkok	Total Negara/ Perwakilan	Rasio Per- bandingan
Peringkat Umum	21	1	42	1:7
Peringkat G-20	16	1	20	1:5
Perwakilan di Luar Negeri	132	276	5931	1:2

Sumber: Lowy Institute, *Global Diplomacy Index 2019*¹⁸

17 Hans J, Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A, Knopf, 1962), 27.

18 Lowy Institute, "Global Diplomacy Index 2019," *Lowy Institute for International Policy*, diakses pada 17 Januari 2022. <https://www.lowyinstitute.org/global-diplomacy-index/#>,

Tabel 1.1 secara jelas menggarisbawahi perbedaan kemampuan diplomasi global Indonesia dan Tiongkok yang cukup signifikan. Perbedaan kapasitas mereka yang paling besar terlihat di indikator peringkat umum,¹⁹ di mana Tiongkok lebih unggul tujuh kali lipat lebih besar (700%) dari kapasitas diplomasi global Indonesia, sedangkan perbedaan yang terkecil dari kapasitas diplomasi global kedua negara berada pada indikator perwakilan di luar negeri. Dalam indikator ini, kapasitas Tiongkok dua kali lipat lebih besar (200%) dari kapasitas Indonesia.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan diplomasi global kedua negara berbeda, yang secara umum kemampuan diplomasi global Tiongkok berada di atas Indonesia. Meskipun demikian, perbedaan mereka tidak terlalu mencolok, di mana kemampuan diplomasi global Tiongkok sebesar satu setengah kali lipat atau 150% dari Indonesia.

Tabel 1.2 Kapasitas Militer Indonesia dan Tiongkok Tahun 2022

Indikator		Indonesia	Tiongkok
Senjata	Pasukan		
Peringkat Umum		15	2
Pasukan aktif		400.000	2.000.000
Pesawat Udara (seluruh jenis)		445	3.285
Kekuatan Tank		314	5.250
Peluncur roket		63	3.160
Armada Laut		296	777
Kapal selam		4	79
Anggaran Pertahanan (per tahun dalam dolar)		9.300.000.000	250.240.000.000

Sumber: Global Fire Power (2022)²⁰

- 19 Peringkat umum di sini adalah indikator umum dari kapasitas diplomasi yang diukur berdasarkan beberapa sub-indikator, antara lain meliputi unsur diplomasi bilateral, regional, dan multilateral, serta unsur lain berdasarkan tema dan bentuknya diplomasi ekonomi, diplomasi publik, dan diplomasi personal.
- 20 Global Fire Power, “*Comparisons of China and Indonesia Military Strength (2022)*,” diakses pada 17 Januari 2022, <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=china&country2=indonesia>,

Data pada Tabel 1.2 secara jelas memperlihatkan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki perbedaan yang sangat besar dalam hal kapasitas militer yang dimilikinya. Perbedaan terbesar berada pada indikator anggaran pertahanan. Kemampuan Tiongkok untuk membiayai kapasitas militernya hampir 27 kali lipat (2.690%) daripada kemampuan Indonesia, sedangkan perbedaan terkecil dari kapasitas militer kedua negara berada pada indikator peringkat umum dan armada laut. Pada kedua indikator tersebut kapasitas militer Tiongkok adalah hampir tiga kali lipat atas Indonesia atau mencapai angka 2,625%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan militer Tiongkok secara umum berada di atas Indonesia, yaitu sebesar 62 kali lipat atau 6.200%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kekuatan sangat besar Indonesia-Tiongkok dalam hal kapasitas militer kedua negara.

Tabel 1.3 Kapasitas Ekonomi Indonesia dan Tiongkok, 2014–2016

Indikator	Indonesia	Tiongkok
Gross National Income (GNI) (\$US, 2014) ²¹	923.738.000	10.096.966.000.000
Cadangan Devisa Negara (\$US, 2016) ²²	102.100.000	3.230.000.000
Index Daya Saing Global ²³	Urutan ke-34	Urutan ke-28

Sumber: Diolah dari World Bank, *Trading Economic*, World Economic Forum.

Tabel 1.3 secara jelas menunjukkan adanya perbedaan besar kapasitas ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Jika kedua unsur dari kekuatan nasional, yaitu pendapatan nasional bruto (*gross national income*) dan cadangan devisa negara disandingkan, perbedaan kapasitas ekonomi kedua negara terlihat sangat mencolok. Perbedaan

21 World Bank, “Gross National Income 2014, Atlas Method”, diakses pada 11 Februari 2016, <http://data.worldbank.org/data-catalog/GNI-Atlas-method-table>,

22 “Cadangan Devisa,” Trading Economics, diakses pada 11 Februari 2016, <http://id.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves>,

23 “Global Competitiveness Report 2014,” World Economic Forum, diakses pada 27 Maret 2015, <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>, .

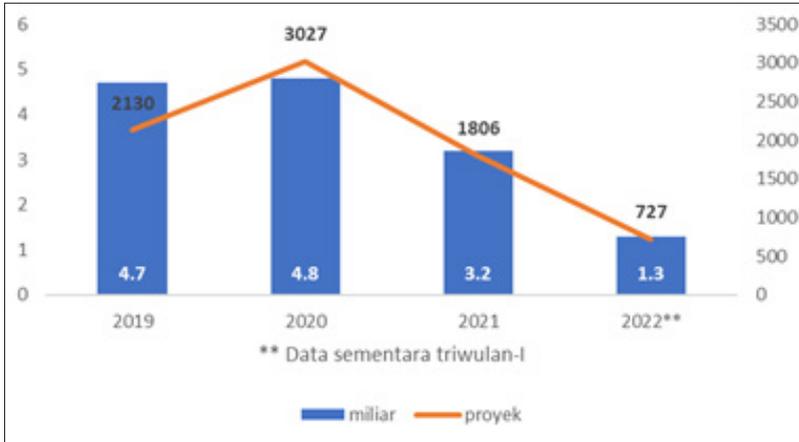
terbesar berada pada indikator pendapatan nasional bruto, yaitu sebesar 100.000 kali. Pendapatan nasional bruto Indonesia hanya pada kisaran ratusan juta, sementara Tiongkok ada pada kisaran puluhan triliun, sedangkan perbedaan kapasitas terkecil ada pada indikator daya saing global yang berada pada angka hampir sama, yaitu Indonesia dan Tiongkok masing-masing berada di urutan ke-34 dan ke-28.

Ketidakseimbangan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok juga tecermin dalam sektor investasi. Investasi Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan Indonesia, baik pada tataran global maupun bilateral kedua negara. Sejak menjalankan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) pada 1979, Tiongkok telah menjadi destinasi investasi modal global. Seiring keberhasilan kebijakan tersebut, Tiongkok tidak sekadar menjadi tujuan investasi, tetapi juga melakukan investasi ke negara lain, termasuk Indonesia. Pada 2009 misalnya, nilai investasi Indonesia di Tiongkok mencapai 111,7 juta dolar AS, angka ini hanya 2,4% dari nilai investasi enam negara anggota ASEAN di Tiongkok. Sebaliknya, komitmen Tiongkok untuk melakukan investasi asing ke Indonesia juga relatif lebih rendah dibandingkan investasi serupa di berbagai negara ASEAN.

Pada tahun yang sama, total investasi asing Tiongkok ke Indonesia relatif sangat sedikit hanya mencapai 592 juta dolar AS atau 10% dari total investasi asing Tiongkok ke ASEAN.²⁴ Pada kenyataannya, realisasi investasi Tiongkok ke Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2019–2022, yaitu dari 4,7 miliar dolar AS menjadi 1,3 miliar dolar AS (lihat Gambar 1.1). Meskipun demikian, investasi Tiongkok menduduki peringkat investor terbesar ketiga di Indonesia, setelah Singapura dan Hong Kong.²⁵

24 Pada tahun 2011, investasi asing Amerika Serikat (AS) ke Indonesia mencapai 930 juta dolar AS, yang membuat AS sebagai investor asing ketiga terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Inggris. Lihat Hong, "China-Indonesia Economic Relations", 6.

25 Luki Aulia. "Misi Ganda Diplomasi Jokowi ke China." *Kompas.id*, 26 Juli, 2022. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/25/misi-ganda-diplomasi-jokowi-ke-china>



Sumber: Aulia (2022)

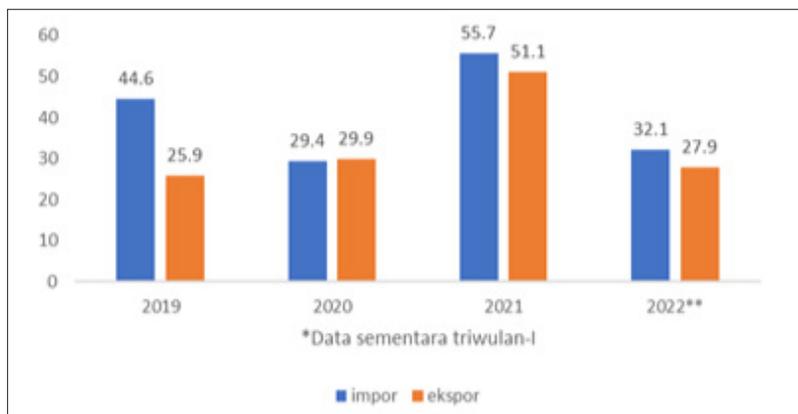
Gambar 1.1 Realisasi Investasi Tiongkok ke Indonesia Tahun 2019–2022 (miliar dolar AS)

Dalam kerja sama perdagangan Tiongkok-ASEAN, Indonesia adalah mitra terbesar Tiongkok setelah Vietnam dan Malaysia. Pada 2021, total nilai perdagangan kedua negara mencapai 124,3 miliar dolar AS atau naik 58,4% dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Indonesia tetap berada dalam posisi defisit sejak tahun 2019–2022 (Gambar 1.2)

Dengan mengacu pada data investasi dan perdagangan, dapat dikatakan bahwa kerja sama perdagangan Indonesia-Tiongkok lebih kuat dibandingkan kerja sama kedua negara pada sektor investasi yang masih rendah. Rendahnya realisasi investasi ini mungkin disebabkan oleh kondisi infrastruktur Indonesia yang belum baik dan Pandemi Covid-19. Kondisi ini terlihat dalam indeks infrastruktur Indonesia, di mana pada tahun 2011 misalnya, hanya menempati peringkat ke-76 untuk infrastruktur fisik, urutan ke-106 untuk kualitas pelabuhan, dan urutan ke-98 untuk ketersediaan jaringan listrik.²⁶ Meskipun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

26 Admin PU, "Infrastruktur di Indonesia," *Dinas PUPR Kab. Bantaeng*, 23 Januari, 2020 <https://dpupr.bantaengkab.go.id/article/infrastruktur-di-indonesia.html>

(2004–2014) pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas utama pemerintahannya melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada Mei 2011, namun ironisnya proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur justru turun 50% pada tahun anggaran 2011 dibandingkan awal 1990-an.



Sumber: Aulia (2022)

Gambar 1.2 Neraca Perdagangan Non-migas Indonesia dengan Tiongkok Tahun 2019–2022 (miliar dolar AS)

Kondisi infrastruktur yang buruk ini menjadi kendala utama dalam pembangunan di Indonesia karena pada gilirannya menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia. Buruknya infrastruktur telah mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal, yang pada gilirannya menyebabkan produk-produk Indonesia tidak kompetitif. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, Tiongkok memiliki posisi yang strategis sebagai sumber investor potensial di Indonesia, terutama terkait dengan realitas negara

tirai bambu ini menempati posisi kedua ekonomi terbesar di dunia. Peran serta Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur melalui aliran investasi modalnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apalagi pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi, baik pada periode pertama (2014–2019) maupun pada periode kedua (2019–2024).

Membina hubungan yang baik tidak hanya menjadi kepentingan Indonesia, tetapi juga menjadi kepentingan Tiongkok. Melalui kebijakan *Good Neighbour* dan *Charm Diplomacy*, Tiongkok mengutamakan hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN dan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.²⁷ Lebih jauh, Tiongkok melihat Indonesia punya posisi strategis dan bagian integral untuk keterlibatan Tiongkok di Asia Pasifik. Oleh karena itu, melalui kebijakan *One Belt One Road* yang selanjutnya dikenal istilah *the Belt Road Initiative* (BRI), terlihat upaya nyata Tiongkok untuk mengamankan kepentingan ekonomi globalnya. Kebijakan Tiongkok ini tampaknya juga terlihat sinergis dengan visi “Poros Maritim Dunia” yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok juga tidak terlepas dari perubahan-perubahan dalam politik luar negeri Tiongkok sendiri. Pada masa Perang Dingin, Mao Zedong (1949–1954) berusaha mengarahkan kebijakan luar negeri negara tirai bambu ini menjadi lebih revisionis, dengan mengampanyekan perang kebebasan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, Tiongkok selanjutnya menggalang solidaritas negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, dengan hadirnya Perdana Menteri Zhou Enlai pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.

Di era Deng Xiaoping (1978–1989), politik luar negeri Tiongkok menjadi lebih pragmatis, dengan menjalankan kebijakan “pintu terbuka”. Hal ini juga didukung oleh perkembangan politik

27 Nurjannah Abdullah, “Implikasi Kebijakan Tentang Baik (Good Neighbor Policy), China pada masa Presiden Hu Jintao di Great Menkong Sub-Region,” *Hassanuddin Journal of International Affairs* 1, No. 1 (2020), 101–113.

internasional, di mana terjadi *détente*²⁸ antara AS dan Uni Soviet. Pasca-Perang Dingin, penguasa Tiongkok berusaha menjalin kedekatan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini didorong oleh kekhawatiran akan potensi isolasi masyarakat internasional pascatragedi Tiananmen tahun 1989, dan sekaligus negara tirai bambu ini juga ingin memanfaatkan perubahan konstelasi politik internasional khususnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pasca-*détente* dan berakhirnya Perang Dingin AS, Tiongkok memberi perhatian lebih besar ke Asia dibandingkan Eropa. Di lain pihak, Tiongkok mengantisipasi pergeseran kebijakan global AS ini dengan cepat. Negara ini menjalin kerja sama dengan negara-negara di Asia-Pasifik sebelum AS lebih jauh meningkatkan pengaruhnya kembali di kawasan ini. Situasi *détente* tersebut mendorong Tiongkok melakukan pendekatan geoekonomi melalui *the Belt Road Initiative* (BRI) dalam membangun pengaruhnya di Asia Tenggara khususnya dan Asia-Pasifik pada umumnya guna mengimbangi pergeseran kebijakan global AS atau *Pivot to Asia* yang dilakukan oleh AS.²⁹ Belakangan hal ini kembali pertegas oleh kebijakan Indo-Pasifik yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump sebagai upaya merespons perilaku Tiongkok yang semakin agresif di Laut China Selatan.

Sementara itu, kebutuhan Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah mendorong negara ini bergabung dalam jejaring perdagangan global, melalui keterlibatannya di dalam WTO pada tahun 2001. Bergabungnya Tiongkok ke WTO berdampak pada fenomena melesatnya pertumbuhan ekonomi negara ini hingga mencapai dua digit dari tahun 2003–2007, sekitar 10%–14,2%. Kekuatan ekonomi Tiongkok yang sedang tumbuh tampaknya tetap

28 *Détente* adalah suatu istilah dalam hubungan internasional untuk menggambarkan perbaikan hubungan diantara dua negara yang sebelumnya bermusuhan dan saling curiga satu sama lain. *Détente* biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet di era Perang Dingin. Hal ini bisa dilihat pada Cambridge Dictionary melalui situsnya: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/detente>

29 Lai Ha Chan, “Can China’s the Belt and Road Initiative Build Peaceful Regional Order?,” dalam Michael Clarke (ed.), *The Belt and Road Initiative and the Future of Regional Order in the Indo-Pacific*, (New York: Lexington Books, 2020), 23.

kuat, sekalipun dunia sedang dilanda krisis global pada tahun 2008. Meskipun mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih lebih baik dari negara-negara maju lainnya, di atas 7% hingga tahun 2015.³⁰

Kemajuan ekonomi yang diraihny menyebabkan peningkatan kepercayaan diri Tiongkok untuk selanjutnya menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Tiongkok memahami bahwa tingkat kemajuan ekonomi yang sudah dicapai perlu terus dipertahankan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini mendorong Presiden Xi Jinping (2013–sekarang) mengeluarkan kebijakan ekonomi *new normal*, yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak lebih rendah dari 6,5% per tahun. Sasaran kebijakan ini adalah pencapaian kemakmuran masyarakat yang tingkat pendapatan per kapitanya sepertiga dari pendapatan per kapita Amerika Serikat.³¹ Untuk mencapai target tersebut dalam kongres nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 tahun 2013, Presiden Xi Jinping menegaskan pelaksanaan politik luar negeri Tiongkok harus menggunakan semua kekuatan, baik politik, diplomasi, ekonomi, hukum, budaya, maupun militer, untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri ini dimaksudkan untuk mewujudkan *Chinese dream*.³²

Sejalan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin terhubung dengan jejaring internasional, negara ini juga semakin memperlihatkan keaktifan dalam berbagai forum dan kerja sama regional maupun internasional. Hal ini tecermin dengan tingginya partisipasi Tiongkok di organisasi kawasan (Shanghai Cooperation Organization/SCO, ASEAN Plus Three, ASEAN Regional Forum/ARF, East Asia Summit/EAS), dan kesepakatan perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area/AFTA), Regional Comprehensive Economic Patnership/RCEP). Keterlibatan Tiongkok ke dalam organisasi

30 "Pertumbuhan Ekonomi China Terlamban dalam 25 Tahun Terakhir," *BBC*, 19 Januari 2016, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160118_majalah_China_pertumbuhan_ekonomi

31 Martin Wolf, "China's Struggle for a New Normal," *Financial Times*, 22 Maret 2016.

32 Lu Shi Wei, "China's Diplomacy in the New Period: Changes and Consistency," *China Institute of International Studies*, No. 3, 2006.

regional, seperti ARF, ASEAN Plus Three, dan EAS, berkontribusi positif terhadap eksistensi Tiongkok di kawasan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi regional tersebut. Namun, partisipasi ini tidak selalu diiringi dengan kepatuhan Tiongkok terhadap norma yang berlaku dalam mekanisme kerja sama tersebut. Hal ini tecermin kuat antara lain dalam kasus tumpang tindih klaim Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dengan empat negara lainnya (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) serta Taiwan.

Kebangkitan Tiongkok dipandang dengan kacamata yang beragam oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada satu sisi, negara-negara di kawasan melihatnya sebagai peluang sekaligus tantangan untuk mendapatkan kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok melalui kerja sama-kerja sama ekonomi yang dibangun. Tiongkok melakukan kerja sama ekonomi dengan Pakistan melalui China-Pakistan Economy Corridor (CPEC)³³ karena Pakistan punya nilai strategis dalam sengketa perbatasan Tiongkok dan India, maupun dalam persaingan global Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, pada sisi lain, negara-negara di kawasan juga melihat kebangkitan Tiongkok sebagai potensi ancaman bagi stabilitas keamanan di kawasan. Potensi ancaman Tiongkok terlihat dari peningkatan belanja militer dan juga agresivitas di Laut China Selatan. Pandangan ini berpijak pada argumen bahwa Tiongkok yang kuat menjadi ancaman stabilitas di Kawasan.³⁴

Kondisi tersebut menjadi sebagian alasan AS untuk terlibat dalam dinamika politik keamanan di kawasan Asia Pasifik melalui strategi pivot (*rebalancing*) pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama. Keterlibatan AS telah meningkatkan kompleksitas keamanan di kawasan. Konflik di kawasan selanjutnya tidak hanya melibatkan negara-negara yang berada di kawasan, namun bisa juga

33 James Schwemlein, "Strategic Implications of the China Pakistan Economic Corridor," United States Institute of Peace, Special Report, NO. 459 (2019), https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20244.pdf?refreqid=excelsior%3A168fb2f35dac0d8a73b0ad01e4de7d6b&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin=&ini

34 Denny Roy, "The China Threat Issue: Major Arguments," *Asian Survey* 36, No. 8 1 (1996), 758–771.

melibatkan kepentingan AS di kawasan. Apalagi AS sebagai negara adidaya berusaha untuk mempertahankan kekuatan hegemoninya di kawasan, yang juga menjadi ambisi Tiongkok. Sebagaimana halnya Obama, Presiden AS yang terpilih pada tahun 2017, Donald Trump, juga memiliki pandangan yang sama terkait kepentingan nasional AS untuk tetap mempertahankan Laut China Selatan sebagai jalur pelayaran internasional yang bebas, tidak saja untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga militernya. Untuk memperkuat stabilitas di kawasan tersebut seiring dengan perluasan pengaruh dan kekuatan militer Tiongkok, pada September 2021, AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden membuat pakta keamanan trilateral baru dengan Australia dan United Kingdom, yaitu AUKUS.³⁵

Indonesia perlu merespons kebangkitan Tiongkok dan kebijakan rebalancing AS dengan bijaksana karena tantangan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan adalah mencegah dominasi kedua negara besar tersebut dalam politik keamanan dan perekonomian kawasan. Sementara itu, untuk membangun arsitektur kawasan yang stabil dan damai merupakan *sine qua non*,³⁶ maupun pembangunan ekonomi nasional Indonesia, Indonesia perlu maksimalisasi strategi bebas-aktif, *rebalancing*, dan memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan menengah dalam hubungan bilateral dengan Tiongkok,³⁷ maupun Amerika Serikat.

35 Tommy Patrio Sorongan, "China dan Filipina Panas di LCS, Biden Siap Turun Tangan", *CNBC Indonesia*, diakses pada 21 Januari, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211119183633-4-292987/china-dan-filipina-panas-di-lcs-biden-siap-turun-tangan>.

36 *Sine qua non* adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam bidang politik yang menggambarkan kondisi yang harus tersedia dalam mencapai suatu tujuan dan tanpa kondisi tersebut maka tujuan tersebut tidak mungkin tercapai. Hal ini dapat dianalogikan dengan hubungan antara usaha, doa, sebagai variabel bebas dan cita-cita sebagai variabel tergantung. Suatu cita-cita tidak mungkin tercapai tanpa ada usaha dan doa. Hal ini bisa dilihat pada Cambridge Dictionary melalui situsnya ; <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sine-qua-non>.

37 Ann Marie Murphy, "Indonesia's Responds to China's Rise," dalam Bruce Gilley and Andrew O'Neil (eds.), *Middle Powers and the Rise of China*, (Washington DC: Georgetown University Press, 2014), 126.

B. HUBUNGAN KEKUATAN YANG TIMPANG DALAM BINGKAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH DAN NEGARA BESAR

Setiap negara dalam melakukan hubungan luar negerinya berupaya mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun, dalam menjalankan hubungan antarnegara tersebut ditandai dengan adanya distribusi sumber daya yang tidak merata. Negara dengan sumber daya yang besar lebih berpeluang memengaruhi sistem internasional dan lebih mudah memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap negara lain yang lebih kecil sumber dayanya. Sebaliknya, negara dengan sumber daya yang relatif kecil, lebih sulit memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap negara besar. Dalam konteks *asymetris power relations* hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, posisi Indonesia lebih sulit memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok dibandingkan upaya Tiongkok memperjuangkan kepentingannya terhadap Indonesia.

Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan kerangka pemikiran dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, dalam konteks memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dalam menghadapi Tiongkok, tentu saja Indonesia butuh strategi ditengah hubungan bilateral yang tidak berimbang (*asymetris power relations*). Strategi ini penting ketika Indonesia sedang memperjuangkan kepentingan nasionalnya kepada negara tersebut. Setidaknya, Indonesia bisa menggunakan strategi sebagai negara kekuatan menengah. Dalam posisi sebagai negara kekuatan menengah Indonesia dipandang punya pengaruh di tingkat regional maupun global. Pengaruh politik ini penting untuk mengimbangi pengaruh politik Tiongkok yang lebih besar. Selain dari itu, Indonesia juga bisa menggunakan strategi tiga pilar yang meliputi 1) Pragmatisme ekonomi, 2) Aliansi terbatas, 3) Merapat ke negara-negara besar. Strategi tiga pilar ini juga dipandang bisa meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok yang tidak seimbang tersebut. Lagi pula, strategi tiga pilar ini dinilai sangat sejalan dengan

prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia karena memberi kebebasan untuk menjalin kerja sama dengan semua negara di dunia demi tercapainya kepentingan nasional.

Negara-negara di dunia memiliki perbedaan tingkat kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. David R. Mares (1988) membagi empat kategori negara dalam hubungan internasional.³⁸ *Pertama* adalah negara kekuatan besar. Sebuah negara masuk dalam kategori kekuatan besar karena negara tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan aturan dan mengontrol dalam sistem internasional, baik bipolar, multipolar, maupun hegemonik. *Kedua* adalah negara kekuatan sekunder. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori sekunder ini memiliki kemampuan untuk mengganggu sistem internasional melalui tindakan unilateral, namun tidak bisa mengubah sistem internasional tersebut. *Ketiga*, negara kekuatan menengah. Negara-negara dengan kekuatan menengah ini tidak mampu memengaruhi sistem internasional melalui tindakan individual negaranya, tetapi memiliki sumber daya yang mencukupi untuk beraliansi dengan negara lain dalam jumlah yang kecil sehingga dapat memengaruhi sistem internasional. *Keempat* adalah negara kekuatan kecil. Negara-negara yang masuk kategori kekuatan kecil memiliki karakter berupa tidak mampu memengaruhi sistem internasional melalui tindakan individual negaranya sehingga harus bersekutu dengan negara lain dalam jumlah besar, di mana keanggotaan negara ini dalam aliansi dengan negara lain, juga tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi aliansi tersebut.³⁹

Kategorisasi serupa mengenai kekuatan negara-negara dalam sistem internasional juga disampaikan oleh Robert Keohane (1969). Menurut Keohane, ada empat jenis negara, yaitu: (a) kekuatan besar adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menentukan norma internasional, membangun sistem internasional, dan mengontrol

38 David R. Mares, "Middle Powers under Regional Hegemony: To Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement?", *International Studies Quarterly* 32, No. 4 (December 1988), 456.

39 Steven E. Lobell, Neal G. Jesse, and Kristen P. Williams, "Why Secondary States Choose to Support, Follow or Challenge?", *International Politics* 52, No. 2 (2005).

sistem internasional; (b) kekuatan sekunder adalah negara yang mampu memengaruhi sistem internasional; (c) kekuatan menengah merupakan negara yang posisinya terpengaruh oleh dinamika perubahan dalam sistem internasional; dan (d) kekuatan kecil adalah negara yang nyaris tidak mampu memengaruhi sistem internasional.⁴⁰

Di samping kategorisasi tersebut, terdapat juga kategorisasi lain berdasarkan negara kuat dan negara lemah. Menurut Michael I. Handel (1990), kuat-lemahnya kekuatan negara-negara adalah relatif berdasarkan dua ukuran. *Pertama*, kapasitas internal yang berupa kekuatan militer dan letak geografis. *Kedua*, kapasitas eksternal yang berupa aliansi dengan negara lain secara formal dan posisi yang tidak seimbang dalam hubungan antara negara besar dan negara kecil.⁴¹ Dalam kenyataannya, hubungan yang tidak seimbang antara negara kekuatan kecil dengan negara kekuatan besar membuka peluang dominasi negara besar terhadap negara kecil yang relatif memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam menyusun kebijakan luar negerinya.

Pemahaman sarjana hubungan internasional yang didominasi pandangan bahwa perubahan dan kapabilitas untuk memengaruhi sistem internasional hanya dimiliki oleh negara besar dan negara adidaya tidaklah sepenuhnya bisa diterima (Gilpin 2003; Keohane 1969) Kajian yang dilakukan oleh Bruce Gilley dan Andrew O'Neil (2014) yang berjudul *Middle Power and the Rise of China* memberikan pemahaman yang berbeda. James Manicom dan Jeffrey Reeves yang menulis satu bab di buku yang diedit oleh Gilley dan O'Neil tersebut melihat negara dengan kekuatan menengah tidak selamanya dapat ditempatkan sebagai *policy takers*. Sebaliknya, Manicom dan Reeves menegaskan bahwa kelompok negara menengah dengan kemampuannya yang khas memiliki kemampuan untuk memengaruhi tatanan internasional. Konsekuensinya, kemampuan negara-negara ini untuk melakukan transisi kekuasaan menjadi tidak terbatas hanya

40 Robert O. Keohane, "Lilliputians's Dilemmas: Small States in International Politics," *International Organization* 23, no. 02 (1969).

41 Michael I. Handel, *Weak States in the International System*, (London: Taylor and Francis, 1990).

pada mengikuti (*bandwagoning*) atau menyeimbangkan (*balancing*) terhadap kekuatan besar atau adidaya.⁴² Dengan demikian, dalam pandangan mereka, kekuatan menengah adalah negara-negara yang memiliki pengaruh dalam sistem regional dan global meski memiliki kekuatan material di bawah kekuatan besar, dan kekuatan material di atas kekuatan kecil. Terkait hal ini, Bruce Gilley dan Andrew O'Neil (2014) berpendapat bahwa negara-negara kekuatan menengah dapat melakukan strategi yang berorientasi mediasi, fasilitator, melakukan perubahan moderat dan penguatan norma-norma hubungan antarnegara di forum multilateral dengan menggalang aliansi bersama negara lain.⁴³

Gilley dan O'Neill (2014) lebih lanjut memberikan pandangannya mengenai karakteristik negara kekuatan menengah, didasarkan pada tiga aspek, yaitu kepemilikan kapabilitas (*middlepowerhood*), perilaku (*middlepowermanship*), dan faktor identitas (*ideational*). Kepemilikan kapabilitas merujuk pada kepemilikan negara menengah atas sejumlah elemen material yang menjadi sumber daya utama, seperti populasi, geografi, kekuatan militer, dan kekuatan ekonominya. Kepemilikan kapabilitas material negara menengah itu lebih kecil dari kekuatan besar dan adidaya, namun lebih besar dari negara kecil. Namun, kategori sebagai negara menengah tidak hanya dilihat dari *power index*, tetapi juga dari perilaku dan identitas. Perilaku negara kekuatan menengah dapat dicatat dalam melakukan peran diplomasi, yaitu sebagai mediator konflik internasional maupun domestik, fasilitator perdamaian, dan inisiator norma-norma keamanan regional. Identitas sebagai negara kekuatan menengah ini mendapat pengakuan dari masyarakat internasional.⁴⁴

Di era pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi, Indonesia termasuk dalam kategori negara kekuatan menengah. Indonesia

42 James Manicom and Jeffrey Reeves, "Locating Middle Powers", 23.

43 Bruce Gilley and Andrew O'Neil, "China's Rise Through the Prism of Middle Powers", dalam Gilley and O'Neil (eds.), *Middle Powers*, 2.

44 Rizal Sukma, "MIKTA: What does it Want?" *The Jakarta Post*, 24 Oktober, 2013. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/mikta-what-does-it-want.html>

memiliki sejumlah peran yang mencerminkan sebagai keberadaan negara kekuatan menengah tersebut. Peran-peran tersebut meliputi, 1) mempromosikan demokrasi, Indonesia berbagi pengalaman melalui Bali Democratisation Forum, mendorong penegakan HAM dengan aktif menjadi anggota Dewan HAM PBB; dan 2) mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan dengan berinisiatif melakukan diplomasi untuk mempromosikan *Talk and Cooperation* melalui ASEAN atas konflik di Laut China Selatan.⁴⁵

Indonesia memiliki potensi kekuatan nasional yang besar jika dilihat dari beberapa segi, yaitu wilayah geografi, jumlah penduduk yang padat, dan peluang pasar domestik. Ekonomi Indonesia jika diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya merupakan peringkat ke-16 di dunia. Perkembangan ekonomi Indonesia memberikan harapan positif sebagaimana diprediksi oleh *McKinsey Global Institute* bahwa Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi ke-10 dunia pada tahun 2030.⁴⁶

Dalam dinamika hubungan dengan negara besar, Indonesia sebagai negara kekuatan menengah akan terpengaruh oleh keberadaannya. Dalam konteks hubungan negara menengah dengan negara besar, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah memperingatkan bahwa kebangkitan Tiongkok memiliki konsekuensi yang tidak hanya menuntut negara tetangganya untuk melakukan *tactical adjustment*, tetapi juga konsekuensi pada arsitektur keamanan global. Sebagaimana Lee Kuan Yew menyatakan secara jelas bahwa “the Chinese will want to share this century as co-equals with the U.S.”, dan selanjutnya Tiongkok memiliki “*intentio to be the great power in the world*”.⁴⁷ Oleh karena

45 Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Era Reformasi: Kebangkitan Indonesia Sebagai negara Kekuatan Menengah dalam Percaturan Regional dan Global*. Orasi Pengukuhan Profesor Riset. (Jakarta: Penerbit BRIN, 2022),15.

46 Didik Purwanto, “McKinsey: Lima Fakta Indonesia Bisa Jadi Negara Maju pada 2030.” *Kompas*, 13 November, 2012. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/13/11342834/McKinsey.Lima.Fakta.Indonesia.Bisa.Jadi.Negara.Maju.pada.2030>

47 Dikutip Richlward Javad Heydarian, *The Indo-Pacific: Trump, China, and the New Struggle for Global Mastery*, (Singapore: Springer Nature, 2020),1.

itu, Indonesia sebagaimana negara-negara lainnya juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kebangkitan Tiongkok. Meskipun demikian, Gilley dan O'Neil berpendapat bahwa negara kekuatan menengah, termasuk Indonesia, tetap memiliki peran strategis untuk menentukan keberlanjutan kebangkitan Tiongkok itu sendiri, yaitu melalui respons yang akan diberikan oleh negara kekuatan menengah. Negara kekuatan menengah ini, termasuk Indonesia, memiliki kekhasan dalam merespons kebangkitan Tiongkok, yakni tidak selalu beraliansi dengan negara tersebut tetapi dengan menampilkan diri sebagai mediator, fasilitator dan inisiator norma-norma baru dan penengah penyelesaian masalah. Meskipun hal ini mungkin berdampak kecil bagi Tiongkok, tetapi apa yang dilakukan oleh negara kekuatan menengah tersebut turut berkontribusi membentuk tatanan politik regional dan global.⁴⁸

Respons negara kekuatan menengah terhadap kebangkitan Tiongkok, selain dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, juga tidak bisa dilepaskan dari proses penyusunan politik luar negeri, yang terjadi di ranah domestik. Oleh karena itu, proses penyusunan politik luar negeri merupakan proses yang rentan dengan pertarungan kepentingan berbagai pihak yang terlibat di dalam negeri, baik yang mendukung maupun menentangnya. Politik luar negeri dalam hal ini dimaknai sebagai gambaran dinamika kebijakan politik dalam negeri yang dipantulkan melalui perilaku negara dalam politik internasional. Untuk mencapai kepentingan nasional, penyusunan dan pelaksanaan politik luar negeri memiliki beberapa komponen, yaitu rencana, target, dan aksi terhadap negara lain. Melalui pemahaman ini, politik luar negeri adalah rangkaian kebijakan negara mulai tahapan persiapan hingga tindakan yang direncanakan secara matang dan cermat. Pilihan strategi suatu negara, menurut Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne (2012) dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kepentingan nasional, yang telah direncanakan dan ditargetkan.⁴⁹

48 Gilley and O'Neil, "China's Rise Through," 2.

49 Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors and Cases*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 14.

C. PEMBABAKAN

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang mengulas mulai dari konteks hubungan asimetri Indonesia-Tiongkok hingga strategi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tengah kondisi tersebut. Secara singkat, intisari dari masing-masing bab disampaikan di bawah ini.

Pada **Bab Pertama** yang ditulis bersama oleh para penulis merupakan pendahuluan secara singkat, mengantarkan para pembaca akan konteks dinamika hubungan Indonesia dan Tiongkok sejak era Soekarno hingga Reformasi. Idealnya hubungan kedua negara akan baik bila ada hubungan seimbang. Namun, situasi ini tampaknya tidak berlaku sepenuhnya untuk Indonesia-Tiongkok. Ada ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetrical power*) yang dimiliki kedua negara, baik dilihat dari kapasitas diplomasi, militer, dan ekonomi, tidak menghalangi mereka untuk menjalin dan memperkuat kerja sama dalam berbagai aspek. Sementara itu, kebangkitan Tiongkok yang memberikan tantangan dan sekaligus peluang untuk memperkuat hubungan kedua negara. Realitas ini menyebabkan Indonesia perlu merumuskan politik luar negeri di tengah ketidakseimbangan kekuatan dan kebangkitan Tiongkok. Sekalipun kapasitas kekuatan yang dimiliki Tiongkok lebih memiliki daya pengaruh lebih besar, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai negara kekuatan menengah dan strategi tiga pilar dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kebangkitan Tiongkok telah menjadikan negara ini salah satu kekuatan global terbesar kedua di dunia. **Bab Dua** yang ditulis oleh Siswanto menganalisis soal kebangkitan Tiongkok dan bagaimana kaitan kebangkitan Tiongkok tersebut dengan arah baru kebijakan luar negerinya serta implikasinya di kawasan Asia Pasifik. Dinamika internal yang berkembang sejak Deng Xioping telah mendorong pemikiran akan arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok. Xioping adalah seorang pemimpin Tiongkok yang mencetuskan gagasan modernisasi dan ekonomi pasar pada tahun 1980an serta berhasil mendorong kebangkitan negara ini dari negara berkembang menjadi negara maju saat ini. Kebangkitan ini dilanjutkan oleh para pemimpin Tiongkok

berikutnya sehingga Tiongkok berhasil menjadi negara besar dan berpengaruh secara politik maupun ekonomi. Sayangnya, Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, kebijakan luar negerinya menimbulkan kecemasan negara-negara tetangganya karena arah baru kebijakan luar negerinya bersifat provokatif khususnya dalam konflik Laut China Selatan. Kebijakan luar negeri Tiongkok yang asertif ini dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya secara domestik antara lain pandangan dan sikap Xi Jinping terhadap masa depan negara ini dan secara internasional antara lain persaingan pengaruh global di Asia-Pasifik. Sebagai kesimpulan, arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok adalah respons terhadap sistem internasional dari kooperatif kepada asertif. Perubahan perilaku ini juga sebagai dampak perkembangan politik domestik, yakni komunikasi politik antaraktor, konstelasi elite, dan struktur baru pada sentra kekuasaan yang selanjutnya bermuara kepada kebijakan luar negerinya. Arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dengan negara sekitarnya, negara-negara ASEAN, dan Amerika Serikat.

Dalam merajut hubungan kedua negara, bab dua telah menggarisbawahi bahwa dinamika politik domestik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Tiongkok. Faktor domestik ini dibahas di **Bab Tiga** oleh R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas. Secara khusus menganalisis faktor-faktor domestik Indonesia yang memengaruhi perumusan politik luar negerinya terhadap Tiongkok. Pemahaman atas faktor-faktor domestik ini penting sebagai konteks dalam menganalisis lebih lanjut tentang dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok yang senantiasa diwarnai dengan konflik dan kerja sama. Ada beberapa sumber utama sebagai input internal yang menjadi determinan politik domestik dan menentukan orientasi dari kebijakan luar negeri yang diambil, seperti 1) sumber kepemimpinan nasional, 2) faktor pemerintahan, 3) persepsi dalam masyarakat, serta 4) peran pelaku bisnis. Keempat faktor internal tersebut berjaln kelindan dan membentuk dinamika politik domestik yang menentukan diskursus dan kebijakan yang terbentuk terhadap Tiongkok dalam tiga tingkat analisis aktor, yakni di tingkat pemerintahan, swasta (pelaku bisnis),

dan masyarakat. Di dalam setiap tingkatan terdapat dinamika masing-masing yang melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. Analisis yang dilakukan atas empat sumber utama tersebut tidak terlepas dari konteks sejarah bangsa dari berbagai periode pemerintahan yang berbeda mulai dari era Soekarno hingga era Reformasi. Pembahasan dalam bab ini menunjukkan faktor-faktor domestik membentuk orientasi politik luar negeri Indonesia secara global maupun secara khusus terhadap Tiongkok. Dinamika domestik Indonesia berdampak pada relasi Indonesia dan Tiongkok karena perubahan yang terjadi di dalam negeri akan menentukan prioritas kepentingan nasional dan posisi Tiongkok bagi Indonesia dalam upaya pencapaian kepentingan tersebut.

Selain faktor domestik, faktor dinamika kawasan memiliki pengaruh krusial terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok. Hal ini menjadi pembahasan Nanto Sriyanto di **Bab Empat** tentang hubungan Indonesia-Tiongkok dalam dinamika kawasan dan bagaimana peranan Indonesia sebagai kekuatan negara menengah. Sepanjang dua dasawarsa *millennium* baru dinamika kawasan Asia Timur mengalami perubahan akibat dari regionalisasi, regionalisme dan politik negara besar. Regionalisasi yang merupakan bentuk *bottom up* perkembangan kawasan lewat perdagangan dan jaringan produksi mengakibatkan perluasan kawasan dan membuka peluang Tiongkok menjadi sentra ekonomi kawasan, bahkan global. Perluasan kawasan juga terlihat dengan regionalisme yang semakin melibatkan banyak negara. Regionalisme ASEAN sebagai pusat forum multilateral mendapatkan tantangan dengan perkembangan kekuatan besar di kawasan. Politik negara besar menunjukkan pengaruh besar dalam mengubah kompleks keamanan kawasan dan persepsi ancaman yang berujung pada variasi *amity/enmity* di antara negara-negara yang berada di pesisir Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Kapabilitas asimetris tidak secara tunggal memengaruhi perilaku pengimbang (*balancing*) dan penyokong (*bandwagoning*), tetapi juga terpengaruh oleh perimbangan ancaman (*balance of threat*) yang membentuk persepsi ancaman. Perilaku negara besar turut andil besar

dalam membentuk persepsi tersebut. Amerika Serikat dalam rentang dua dasawarsa abad ke-21 memiliki persepsi ancaman yang fluktuatif terhadap Tiongkok. Sementara Tiongkok mengalami asertivitas yang terkait dengan perubahan kapabilitas relatif pasca-Global Financial Crisis dan naiknya Xi Jinping dalam kepemimpinan Tiongkok. Melalui BRI dan FOIPS, Tiongkok dan AS bersaing terutama dalam perimbangan kelembagaan (*institutional balancing*) kawasan yang memengaruhi eksklusivitas dan inklusivitas kelembagaan yang ada. Sementara negara-negara kekuatan menengah berupaya untuk menjaga perimbangan kelembagaan yang tetap inklusif. Di arsitektur ekonomi kawasan, hal itu terlihat dari TPP, RCEP, dan FTAAP. Meski terjadi peningkatan persepsi ancaman, perimbangan kelembagaan dan faktor personal dalam politik internasional, bab ini berpendapat bahwa turbulensi kawasan akibat politik negara besar dan perubahan arsitektur kelembagaan itu tetap berpeluang membentuk “*middle power moment*” bagi Indonesia. Baik melalui ASEAN maupun secara bilateral, momen itu dapat dipergunakan untuk mendorong kualitas hubungan bilateral yang sesuai dengan kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia sekaligus tetap menjaga perimbangan kelembagaan yang inklusif lewat AOIP.

Dinamika perubahan domestik dan lingkungan strategis global tidak bisa diabaikan dalam perannya turut memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia. Pada **Bab Lima** yang ditulis Mario Surya Ramadhan menganalisis perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada era Reformasi dan menganalisis efektivitasnya dalam memenuhi kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kekuatan menengah. Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada era Reformasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua fase. Fase pertama adalah pelaksanaan orientasi baru pada awal era Reformasi, mulai dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga Megawati Soekarnoputri. Orientasi baru politik luar negeri terhadap Tiongkok terlihat dari beberapa kebijakan progresif, baik di lingkup domestik maupun internasional, misalnya pengakuan hak sipil bagi masyarakat Tionghoa, menjadikan Konghucu sebagai agama

resmi di Indonesia, dan secara konsisten mempraktikkan kebijakan “One China Policy”. Fase kedua adalah fase penguatan fundamental hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fase ini ditandai dengan disepakatinya Strategic Partnership hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok pada 25 April 2005. Strategic Partnership tersebut menjadi dasar dalam peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, tidak hanya pada sektor perdagangan dan investasi, tetapi juga merambah sektor teknologi keamanan dan pertahanan. Orientasi baru dan penguatan fundamen dalam politik luar negeri Indonesia-Tiongkok berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Pada era Reformasi angka perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok meningkat secara signifikan, dan membuka peluang alternatif baru kerja sama di sektor pertahanan. Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di era Reformasi, khususnya di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menunjukkan karakter politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang berupaya mewujudkan “*a thousand friends- zero enemy*” dan menjaga posisi “*dynamic equilibrium*” Indonesia di tengah kompetisi negara-negara besar.

Pada bab selanjutnya, **Bab Enam** secara khusus menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok, khususnya pada masa pemerintahan Jokowi (2014–2022). Di samping mendeskripsikan arah kebijakan luar negeri Jokowi dan implementasinya, bab yang ditulis Ganewati Wuryandari ini juga membahas strategi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam mengapitalisasi kemitraannya dengan Tiongkok agar Indonesia dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Hasil analisis memperlihatkan hubungan hangat yang terjalin dengan baik antara Indonesia-Tiongkok sesungguhnya kurang memiliki fondasi kuat. Kemitraan Komprehensif Strategis yang seharusnya memberikan peluang lebar untuk semakin memperkokoh kemitraan dalam realitasnya belum optimal, di mana kerja sama ekonomi dan pertahanan keamanan belum signifikan. Ada relasi tidak berimbang. Ketidakseimbangan

hubungan keduanya diimbangi dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kapasitas material yang dimilikinya sebagai daya tawar menghadapi Tiongkok. Prinsip bebas aktif dan posisi awal Indonesia akan stabilitas dan keamanan kawasan dengan pendekatan inklusif agar terjadi keseimbangan dinamis antarnegara kekuatan besar di kawasan menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan yang tidak mungkin diabaikan dalam politik luar negeri Indonesia.

Pada bab akhir, **Bab Tujuh**, yang ditulis Siswanto, menganalisis berbagai kemungkinan strategi dalam politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sebagai kekuatan menengah untuk menghadapi asimetri kekuatan. Dalam hal ini, penulis menggambarkan kondisi umum strategi tersebut yaitu diawali oleh sikap mencair Presiden Soeharto terhadap Tiongkok setelah bertahun-tahun hubungan Indonesia-Tiongkok membeku. Secara internal, Soeharto berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai mitra untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia terlalu bergantung pada kerja sama ekonomi dan dukungan keuangan negara-negara “Barat.” Dengan kata lain, Presiden Soeharto mulai bersikap pragmatis dalam menyukseskan pembangunan nasional di Indonesia.

Selanjutnya, bagian ini juga menganalisis strategi politik luar negeri Indonesia dalam berinteraksi dengan Tiongkok. Strategi itu meliputi hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, pragmatisme ekonomi. Hal ini sebagai indikasi perubahan paradigma dalam interaksi Indonesia-Tiongkok yang selama ini didominasi oleh pengaruh ideologi berubah ke arah pragmatis. Hubungan bilateral yang didasarkan prinsip pragmatis ini oleh Indonesia dijalankan pada era Reformasi. *Kedua* adalah hubungan kerja sama kemitraan Indonesia-Tiongkok yang dibangun bersifat aliansi terbatas. Ini maknanya Indonesia pada periode awal normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok belum sepenuhnya membuka pintu secara terbuka karena masih menyimpan kecurigaan setelah peristiwa G-30 S PKI tahun 1965. Pada peristiwa ini Tiongkok diduga memberi dukungan secara tidak langsung kepada PKI yang telah melakukan makar kepada Pemerintah yang syah. *Ketiga* Indonesia juga perlu mendekat kepada

negara-negara besar. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya mencari “*balancer*”. Strategi ini dilakukan juga sebagai upaya untuk menghindari dominasi Tiongkok dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berpijak pada prinsip bebas dan aktif.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Arah Baru Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dan Implikasinya Di Indo-Pasifik

A. LATAR BELAKANG

Kebangkitan Tiongkok telah memberi arah baru pada kebijakan luar negerinya. Ada hubungan erat antara kebangkitan dan arah baru kebijakan luar negeri. Kebangkitan ini dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi luar biasa yang didukung diplomasi aktif, sementara arah baru kebijakan luar negeri dimaknai sebagai upaya Tiongkok turut serta dan berperan dalam dinamika politik, keamanan, dan ekonomi internasional. Kebangkitan Tiongkok juga memiliki ciri menguatnya struktur ekonomi nasional dan sistem pertahanan (militer). Ciri-ciri ini mendorong Tiongkok menjadi asertif dalam membela kepentingan nasional dan melakukan interaksi dengan negara lain, antara lain terlihat di isu Laut China Selatan.

Untuk mewujudkan arah baru kebijakan luar negeri tersebut, Tiongkok selanjutnya menyiapkan beberapa program, salah satunya *One Belt One Road* yang kemudian dikenal dengan sebutan *Belt Road Initiative* (BRI). BRI adalah ambisi strategi Geo-ekonomi Tiongkok yang fokus kepada pembangunan infrastruktur. Di bawah kerangka BRI, Pemerintah Tiongkok berjanji untuk melakukan investasi jutaan

dolar di sektor infrastruktur dan industri. BRI membenteng dari kawasan Asia Tengah hingga Indo-Pasifik. Investasi Tiongkok melalui BRI umumnya dilakukan di kawasan tempat Tiongkok dan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, sedang terlibat persaingan sehingga BRI punya nilai geo-strategis dalam persaingan politik global. Akibatnya, Amerika Serikat juga meluncurkan *Free and Open Indo-Pacific* untuk membendung BRI dalam persaingan global tersebut.⁵⁰

Tulisan ini mendiskusikan latar belakang dan implikasi dari kebijakan luar negeri Tiongkok yang baru ke Indo-Pasifik. Jika ditelisik lebih jauh, ada sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya orientasi baru kebijakan luar negeri tersebut. Hal ini terlihat, antara lain, pada Kongres Partai Komunis Tiongkok ke-18 tahun 2012, Xi Jinping meremajakan strategi besar nasional dan meningkatkan status Tiongkok dalam tatanan internasional.⁵¹ Selanjutnya, pada pertemuan pertama Komisi keamanan Nasional Pusat tahun 2014, Xi Jinping mengajukan gagasan yang menekankan pada pentingnya keamanan politik, keamanan budaya, dan keamanan ekonomi, maupun taktik tradisional yang dimiliki oleh kekuatan militer.⁵² Berbagai kebijakan baru yang dicanangkan Presiden Xi Jinping telah memperkokoh kebangkitan Tiongkok dan perilaku politiknya menjadi lebih asertif di kawasan. Akibatnya negara-negara sekitarnya, yakni di Asia Timur maupun Asia Tenggara atau Indo-Pasifik, melihat Tiongkok sebagai ancaman keamanan. Konsekuensinya, Jepang lebih mendekat ke Amerika Serikat (AS) guna menjaga perimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan dan mengantisipasi munculnya Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni di kawasan. Sikap Jepang tampak pada upayanya yang bergabung dengan AS dalam kerja sama Indo-Pasifik dan mengusulkan konsep *Free and Open in Indo-Pacific*⁵³, serta bergabung

50 Minjiang Li, "Belt and Road Initiative: Geo-economics and Indo-Pacific Security Competition," *International Affairs Contents* 96, No. 1 (2020).

51 Minjiang Li, "Belt and Road Initiative."

52 Minjiang Li, "Belt and Road Initiative."

53 Teruaki Arizawa, "Decoding Japan's Free and Open Indo-Pacific Concept," dalam Ash Rossiter & Brendon J. Cannon (Ed.), *Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific*. (New York: Routledge, t.t.), 40.

dalam *Quadrilateral Secularity Dialogue* (QUAD) bersama dengan AS, Australia, dan India. Di lain pihak, Tiongkok melihat kedekatan negara-negara di kawasan ini dengan AS sebagai ancaman terhadap eksistensinya. Jadi, saling curiga dan saling tidak percaya membuat interaksi politik Tiongkok dengan Jepang dan AS menjadi kurang harmonis, walaupun belum sampai pada tahap bermusuhan atau perang secara terbuka.

Di tengah-tengah hubungan yang kurang harmonis dengan Tiongkok, Jepang dengan cerdas memanfaatkan forum G7 untuk kepentingan politiknya menghadapi negara tersebut. Saat berlangsung pertemuan G7 di Jepang, 26 Mei 2016, Perdana Menteri Shinzo Abe menggiring opini politik negara-negara G7 untuk mengambil sikap atas kebijakan Tiongkok yang provokatif. Manuver Jepang berhasil dengan kesediaan G7 membuat pernyataan bersama. Negara-negara G7 dalam pernyataannya mendesak perlu sikap tegas terhadap kebijakan Tiongkok atas konflik wilayahnya dengan Jepang dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Pernyataan ini selanjutnya ditanggapi dengan keras oleh Tiongkok bahwa G7 tidak memiliki urusan dengan isu Laut China Selatan dan tidak perlu mencampuri isu tersebut.⁵⁴ Perang psikologi ini secara tidak langsung meningkatkan eskalasi konflik Tiongkok dengan Jepang.

B. DINAMIKA INTERNAL

Perkembangan politik di Tiongkok sangat ditentukan oleh arah kebijakan para pemimpinnya, seperti lazimnya pemerintahan otoriter umumnya. Setidaknya ada dua pemimpin besar di Tiongkok yang sangat berpengaruh di tubuh Partai Komunis Tiongkok, yakni Mao Zedong dan Deng Xiaoping, meskipun kemudian tidak berarti pemimpin-pemimpin lainnya tidak punya kontribusi penting kepada negara. Walaupun sudah meninggal, kedua pemimpin ini masih dihormati. Mao adalah pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang berhaluan

54 "Isu-Isu Politik Lebih Menonjol." *Harian Kompas*, 27 Mei, 2016.

Marxis pada tahun 1949, yaitu setelah berhasil memenangkan perang saudara melawan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok,⁵⁵ yang kemudian menyeberang ke kepulauan Formosa (Taiwan), sedangkan Deng adalah pencetus gagasan modernisasi dan ekonomi pasar yang berhasil mendorong kepada kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan ini selanjutnya diteruskan oleh para pemimpin Tiongkok berikutnya. Mao dan Deng dapat dianalogikan dengan Soekarno dan Soeharto. Keduanya sebagai pemimpin besar bangsa Indonesia secara umum juga dihormati oleh rakyatnya, walaupun ada juga yang tidak puas atas sepak terjang politik mereka. Soekarno sebagai pendiri Bangsa, sedangkan Soeharto sebagai bapak pembangunan.

Dalam rangka menata struktur sosio-ekonomi Tiongkok, tahun 1978, Deng Xiaoping mencanangkan program modernisasi atau reformasi Tiongkok.⁵⁶ Deng berpandangan bahwa Tiongkok perlu ditata kembali dengan tetap berpijak pada Marxisme dan Maoisme, tetapi dalam implementasinya disesuaikan kepada perkembangan zaman dan situasi di Tiongkok. Deng tertarik untuk melakukan kombinasi antara komunisme dan liberalisme, dan bercita-cita agar Tiongkok pada suatu saat menjadi negara komunis yang modern, sejahtera, serta kuat. Dalam upaya melakukan reformasi ini, Deng melakukan pembaruan di beberapa sektor, yaitu (1) pertanian; (2) industri; (3) pertahanan; dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat sektor ini dalam pandangan Deng merupakan instrumen untuk menuju Tiongkok yang sejahtera dan modern.

Untuk itu, Deng memulai langkah awal reformasinya dengan melakukan penataan kembali sektor industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Untuk mengembangkan sektor ilmu pengetahuan dan teknologinya, Tiongkok belajar dari negara-negara yang lebih maju dan “Barat” cukup unggul di sektor ini. Banyak ilmuwan Tiongkok yang selanjutnya menempuh studinya ke negara-negara “Barat,” khususnya

55 Liang Liji, “*Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*.” (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012).

56 Charles E. Morsion, *Asia Pacific Security Outlook*. (Washington D.C: Brooking Institution Press, 1998), 42.

AS. Setelah pulang, mereka diminta untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di dalam negerinya. Kebijakan semacam ini tidak terjadi sebelum era Deng karena pada masa Mao, Tiongkok adalah negara tirai bambu yang tertutup, seperti umumnya negara-negara komunis. Apalagi, situasi Perang Dingin mendorong sikap Tiongkok yang selalu curiga terhadap “Barat”. Investasi dan pendidikan “Barat” dipandang membahayakan ajaran Mao atau komunisme Tiongkok.

Setelah sektor iptek, Deng mengembangkan sektor-sektor lainnya. Di sektor industri, Deng mendatangkan investor dari luar negeri. Hal ini karena pada awal reformasi Tiongkok tidak memiliki cukup modal untuk membangun industrialisasi, dan “Barat” lah yang memiliki modal untuk investasi yang dibutuhkan tersebut. Sementara di sektor pertanian dan pertahanan, Pemerintah Tiongkok juga melakukan sejumlah langkah-langkah reformasi. Sektor pertanian di Tiongkok berkembang pesat, terutama sejak Deng mencangkan reformasi pertanian tahun 1978.⁵⁷

Mayoritas penduduk Tiongkok yang berprofesi sebagai petani menjadikan suatu kewajaran jika kemudian sektor pertanian mendapat perhatian penting dalam struktur ekonomi negara tersebut.⁵⁸ Melalui reformasi pertanian, pemerintah menetapkan kebijakan sistem pemilikan lahan kolektif di bawah sistem ekonomi pasar bebas. Sementara pemerintah melaksanakan sentralisasi terhadap kepemilikan lahan dan membentuk Kementerian Tanah dan Sumber Daya. Desa-desa juga diatur kepemilikan lahannya secara kolektif. Meski demikian, banyak pula lahan-lahan yang pada kenyataannya diduduki secara tidak syah oleh masyarakat. Bahkan pada tahun 2006–2011 terjadi 35.000 kasus pelanggaran tata guna lahan oleh masyarakat.⁵⁹ Pemerintah sudah menyelesaikan masalah-masalah ini dan sekitar 8.500 pelaku yang terlibat dalam masalah tersebut diberi

57 Xin Sun, “Selective Enforcement of Land Regulation; Why Large Scale Violator Succeed.” *The China Journal*. No. 74 (2015), 66–90.

58 China ABC-China Radio International-CRI Indonesia, diakses pada 8 April 2016 <http://www.Indonesia.cri.cn/duniaabc/chapter3/chapter30202.htm>,

59 China ABC-China Radio

sangsi hukum. Reformasi ini bertujuan mengoptimalkan struktur pertanian. Hasilnya sungguh menakjubkan, yaitu Tiongkok kemudian menjadi produsen utama sejumlah komoditas, seperti kapas, biji wijen, tembakau, daging telur, sayur mayur, dan hasil pertanian, serta tangkapan ikan air tawar maupun air laut.

Selain itu, Tiongkok juga melakukan reformasi atau modernisasi di sektor pertahanan. Dalam konteks ini, Tiongkok selanjutnya menaikkan anggaran militernya rata-rata 17% per tahun sejak tahun 1990. Sejalan dengan kenaikan anggaran belanja militer yang signifikan tersebut, Tiongkok juga melakukan perubahan doktrin militer, mengadopsi perkembangan teknologi baru dan mengidentifikasi persepsi ancaman.⁶⁰ Hal-hal tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari upaya Tiongkok meningkatkan efektivitas operasi militernya untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya di luar negeri.

Tiongkok selanjutnya dimodifikasi sedemikian rupa yang dalam rancangannya menuju pada komunis-pragmatis. Dalam hal ini, Deng melakukan liberalisasi ekonomi di tengah pemerintahan Tiongkok yang komunis (*Socialist Market Economy*).⁶¹ Artinya, Deng harus mengakhiri ekonomi yang selama ini dimonopoli oleh negara, dan selanjutnya memperbesar jumlah dan kekuatan wirausaha. Deng belajar dari kekuatan ekonomi “barat” yang didukung oleh jumlah interpreneur yang banyak sehingga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Deng selanjutnya membenahi sejumlah lembaga negara untuk menjadi *entrepreneur*, atau memberdayakan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mandiri dan kompetitif. Dalam struktur ekonomi yang baru, proses kebijakan ekonomi dilakukan melalui jalur Sekretariat Partai Komunis Tiongkok (PKT). PKT melakukan fungsi kontrol kebijakan ekonomi nasional, walaupun struktur ekonomi sudah berdasarkan mekanisme pasar bebas. Hal menarik yang perlu menjadi catatan

60 L. Maizland, “China’s Modernizing Military,” *Council on Foreign Relations* 5 Februari, 2020, <https://www.cfr.org/background/chinas-modernizing-military>

61 Gyorgy P. Szell. “Changing Labour Relation in China.” *Indian Journal of Industrial Relation* 45, No. 4 (April 2010), 554–565.

adalah bahwa jabatan pimpinan perusahaan masih dipegang oleh para fungsionaris PKT, bukan oleh seorang manajer profesional. Kondisi ini menunjukkan secara jelas kuatnya pengaruh atau kekuasaan elite komunis di negara dengan struktur ekonomi sosialisme pasar bebas ini.

Di sektor politik, Deng mengambil kebijakan yang sangat berbeda dengan di sektor ekonomi, yaitu bersikap *status quo*, sementara di sektor ekonomi memberlakukan kebijakan liberalisasi. Tiongkok tetap menjadi negara satu partai. Artinya Tiongkok belum membuka diri terhadap kekuatan-kekuatan politik lain di luar Partai Komunis. Konsekuensinya pemilu juga dilaksanakan dengan tidak demokratis,⁶² masyarakat hanya bisa memilih kader-kader dari Partai Komunis, di mana mekanisme pemilihan pemimpin juga bukan didasarkan pada pilihan rakyat. Sejalan dengan hal itu, kekuatan militer dijadikan tulang punggung kekuasaan dari Partai Komunis Tiongkok. Keberhasilan mengontrol pemimpin militer menjadi kunci kekuatan Partai Komunis Tiongkok. Militer menjadi pijakan Partai Komunis dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Militer menjadi andalan dalam menghadapi ancaman teror atau upaya-upaya disintegrasi bangsa. Militer juga menjadi alat pemerintah dalam menjalankan misi politik luar negeri Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya di luar negeri.

Di bawah Deng Xiaoping, Tiongkok faktanya mengembangkan model struktur politik kombinasi komunis dan liberal. Kombinasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Tiongkok merupakan negara pertama yang mengembangkan model demikian. Upaya ini ternyata memberi kesuksesan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dipahami karena negara masih tetap memiliki kewenangan besar untuk mengatur tatanan ekonominya yang liberal. Hal ini mengakibatkan dalam proses produksi suatu barang, misalnya, ongkos produksi bisa ditekan serendah mungkin karena buruh hanya mendapat upah murah dan mereka tidak memiliki hak berunjuk rasa untuk menyuarakan aspirasinya. Keberhasilan Tiongkok melakukan eksperimen politik

62 Szell, *Changing Labour*, 554–565.

ini selanjutnya ditiru oleh negara lain. Vietnam merupakan salah satu negara yang mengikuti jejak Tiongkok. Vietnam melakukan liberalisasi ekonomi, tetapi tetap memberlakukan tatanan komunis dalam bidang pemerintahan. Artinya, secara ekonomi Vietnam menerapkan ekonomi pasar yang merupakan ciri-ciri ekonomi di negara liberal, tetapi secara politik merefleksikan sistem otoriter karena berbasis pada model komunis.

Proses modernisasi yang dilakukan Deng pada kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Di tengah upaya modernisasi, Tiongkok juga dihadapkan pada masalah ketidakstabilan ekonomi dan korupsi. Masalah ini menjadi pencetus aksi protes oleh mahasiswa dan masyarakat Tiongkok yang berkembang menjadi isu politik. Puncaknya tahun 1989 telah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dan masyarakat di Tiannamen Square, Beijing. Namun, aksi protes ini direspons oleh Pemerintah Tiongkok dengan pendekatan keamanan yang berakibat jatuhnya banyak korban jiwa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlah angka korban, di mana menurut versi pemerintah hanya ratusan, sementara menurut mahasiswa ribuan. Pada tahun 2016, Pemerintah Tiongkok membebaskan tahanan politik terakhir peristiwa Tiannamen yang telah mendekam di penjara selama 27 tahun, atas nama Miao Denshun.⁶³

Setelah melalui perjalanan panjang, proses modernisasi yang dilakukan Tiongkok secara umum pada akhirnya dapat dikatakan membuahkan hasilnya, yaitu yang disebut kemudian dengan fenomena kebangkitan Tiongkok. Salah satu indikator kebangkitan Tiongkok ini adalah keberhasilannya di sektor pembangunan ekonomi yang mencapai pertumbuhan ekonomi pada posisi stabil angka dua digit pada satu dasawarsa terakhir, yaitu pada angka rata-rata 6,5 %–7 % per tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 6,9%. Guna mengontrol perkembangannya, negara ini

63 Maria Rita Hasugian, "Narapidana Terakhir Peristiwa Tiananmen 1989 Segera Bebas," *Tempo.co*, 4 Mei 2016, <https://dunia.tempo.co/read/768430/narapidana-terakhir-peristiwa-tiananmen-1989-segera-bebas>

menargetkan pertumbuhan ekonominya rata-rata berkisar 6,5% per tahun sampai dengan tahun 2020, meskipun sebagian memperkirakan hal tersebut sulit dicapai karena adanya kecenderungan perlambatan perekonomian global dan peningkatan upah buruh di negara tirai bambu.⁶⁴

Kebangkitan Tiongkok tersebut telah menimbulkan kekaguman masyarakat internasional. Sejumlah sarjana mempelajari dan berupaya memahami kebangkitan Tiongkok ini. Ikenberry (2008), misalnya, menggambarkan kebangkitan Tiongkok sebagai pertumbuhan ekonomi luar biasa yang didukung oleh diplomasi aktif dan prediksinya ke depan negara ini akan semakin kuat pengaruhnya di dunia.⁶⁵ Ilustrasi ini dapat dilihat, misalnya, dari lawatan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada kuartal pertama tahun 2016 ke Eropa Barat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjajaki investasi Tiongkok di kawasan tersebut. Realitas ini menggarisbawahi investasi Tiongkok yang saat ini sudah menyebar hampir di seluruh dunia.

Sementara itu, Ming Xia dalam artikelnya di *New York Time* menyatakan bahwa kebangkitan Tiongkok sesungguhnya merupakan proses politik oleh elite Partai Komunis Tiongkok yang berusaha memperkuat legitimasinya, terutama setelah kegagalan pelaksanaan Revolusi Kebudayaan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada ideologi komunis. Masyarakat bahkan mengalami krisis dukungan kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT), dan krisis kepercayaan kepada masa depan Tiongkok,⁶⁶ sedangkan Xiaoming (2006) melihat kebangkitan Tiongkok dari perspektif lain, yaitu hubungan internasional. Menurut Xiaoming, kebangkitan Tiongkok

64 Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Hingga 2020 Ekonomi China Diprediksi Sulit Tembus 6.5%," *Kompas.com*, 11 Januari, 2016, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/11/131824126/Hingga.2020.Ekonomi.China.Diprediksi.Sulit.Tembus.6.5.Persen>

65 John, G. Ikenberry, "The Rise of China and the future of the West: Can the Liberal System Survive?" *Foreign Affairs*, 1 Januari, 2008. <http://www.Foreignaffairs.com/article/asia/2008-01-01/rise-china-future-west>

66 Ming Xia, "China Threat or a Peaceful Rise of China"? diakses pada 11 Mei 2016, <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html?scp54&sq5china>

merupakan upaya negara tirai bambu ini untuk memperbesar peran dan pengaruhnya di kawasan. Namun, hal tersebut telah menimbulkan kecurigaan negara-negara di sekitarnya, kecurigaan yang berupa ancaman keamanan dari Tiongkok di kawasan. Xiaoming selanjutnya berasumsi bahwa kebangkitan Tiongkok telah mengubah politik luar negeri negara ini ke kawasan Asia Pasifik. Tiongkok menjadi lebih aktif dalam pergaulan internasional dibandingkan sebelumnya (era Mao).⁶⁷

Kebangkitan Tiongkok dan pertumbuhan ekonominya yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sejatinya berdiri di atas bangunan struktur ekonomi yang khas. Struktur ekonomi Tiongkok memiliki karakteristik khusus, yaitu bahwa liberalisasi ekonomi Tiongkok tetap berada di bawah kontrol PKT. Mekanisme pasar tidak sepenuhnya bebas, tetapi sewaktu-waktu PKT dapat melakukan intervensi jika dianggap perlu. Hal semacam ini sesungguhnya sesuatu hal yang umum dilakukan juga oleh negara yang menganut demokrasi liberal, tetapi biasanya dilakukan bukan oleh lembaga partai, melainkan oleh pemerintah. Di Tiongkok, pelaku ekonomi bukan hanya dilakukan oleh kalangan swasta, melainkan juga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam struktur politik, Tiongkok PKT merupakan institusi yang paling berkuasa, tetapi juga mengalami kecenderungan persoalan kehilangan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, fungsionaris PKT juga kemudian lebih berperan aktif membantu pemerintah dengan melakukan upaya-upaya khusus guna menunjang program pemerintah, misalnya upaya PKT menjalin kerja sama dengan partai-partai lain di dunia. Hal ini membuahkan hasil berupa saling tukar informasi tentang manajemen partai, bagaimana menangkap aspirasi dan membangun program ekonomi mikro untuk rakyat desa, dan bagaimana membangun sistem pemilu dengan berbasis digital, melalui *mobile phone*.⁶⁸ Dalam konteks ini, PKT juga melakukan kerja sama dengan partai-partai di Indonesia, seperti PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Saling kunjung

67 Zhang Xiaoming, "Rise of China and Community Building in East Asia," *Asian Perspective* 30, No. 3 (2006), 129–148.

68 Wawancara dengan Kepala Bidang Kerja Sama Internasional, Partai Komunis China, 17 Mei 2018 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

pejabat partai kedua negara juga pernah dilakukan, dan bahkan PKT membantu memfasilitasi kunjungan tersebut.⁶⁹

Ketika Li Peng berkuasa (1987–1998), salah satu kebijakan pentingnya adalah mengawal capaian modernisasi atau kebangkitan Tiongkok.⁷⁰ Upaya modernisasi di Tiongkok tidak diragukan membawa keberhasilan, khususnya dalam membangun struktur ekonomi. Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan eksese atau dampak negatif terhadap Tiongkok, yang terkait dengan masalah politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, Li Peng tidak menginginkan keberhasilan modernisasi atau kebangkitan Tiongkok terganggu prosesnya oleh sejumlah masalah tersebut. Sebelum masalah-masalah tersebut menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan pemerintahan dan rakyat Tiongkok, Li Peng selanjutnya mengambil langkah-langkah strategis untuk mengamankan keadaan dan menjaga kewibawaan pemerintah, khususnya PKT.

Oleh karena itu, pada tahun 1997, pemerintahan Li Peng mengumumkan sejumlah ancaman terhadap Tiongkok yang perlu diwaspadai. Ancaman serius ini terkait dengan aksi kriminalitas dan gangguan keamanan di dalam negeri yang jika tidak tertangani secara serius dikhawatirkan dapat menjadi ancaman serius terhadap integrasi dan eksistensi negara. Oleh karenanya, Li Peng kemudian menghimbau rakyat Tiongkok untuk melawan aksi-aksi yang bisa merongrong atau mengancam persatuan dan integrasi Tiongkok.⁷¹

Salah satu masalah yang diyakini sebagai ancaman potensial bagi integrasi Tiongkok adalah korupsi. Masalah korupsi ini membuat legitimasi kepemimpinan Tiongkok terancam. Di dalam birokrasi pemerintahan dan PKT, ada kecurangan atau salah urus sehingga perlu upaya serius untuk pencegahan sebelum rakyat hilang kepercayaannya terhadap negara. Kondisi ini yang selanjutnya yang mendorong pemerintah untuk menempuh kebijakan tegas terhadap para koruptor

69 Wawancara dengan Kepala Bidang Kerja Sama Internasional, Partai Komunis China, 17 Mei 2018 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

70 Xiaoming, "Rise of China and Community," 129.

71 Xiaoming, "Rise of China and Community," 129.

yang terbukti bersalah. Undang-undang yang berlaku di negara tirai bambu ini memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Suatu kebijakan yang perlu ditiru oleh negara lain, yakni penegak hukumnya berani memberi vonis maksimal (tinggi) kepada terdakwa korupsi. Hukuman mati ini dilaksanakan agar menimbulkan efek jera terhadap masyarakat.

Masalah lingkungan hidup juga menjadi ancaman serius di Tiongkok. Polusi udara, air, dan tanah sudah melampaui ambang batas. Langit di kota Beijing pada waktu-waktu tertentu menjadi tidak cerah karena tertutup polusi udara yang berasal dari asap-asap dari kawasan industri. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan energinya, Tiongkok mengandalkan batu bara karena dianggap sumber energi yang murah. Namun, konsekuensi atas pilihan sumber energi murah ini adalah batu bara memiliki zat buangan atau asap yang menjadi gangguan serius untuk terjadinya polusi udara. Menurut informasi,⁷² Pemerintah Tiongkok telah mulai meninjau kembali penggunaan sumber energi batu bara tersebut dan menggantinya dengan sumber energi lain yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Selanjutnya, masalah lain yang juga dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional Tiongkok adalah teror yang dilancarkan oleh kelompok minoritas. Adanya aksi teror ini sebagai bukti nyata bahwa isu nasionalisme atau integrasi masih belum selesai di Tiongkok. Di lain pihak, pemerintah pusat sangat sensitif terhadap aspirasi masyarakat yang berada di luar koridor pemerintah karena Tiongkok memang berdasarkan tatanan politik komunisme yang tidak menoleransi adanya perbedaan pendapat di masyarakat. Reaksi negatif kelompok minoritas kepada sistem Pemerintah Tiongkok merupakan indikator masih adanya ketidakpuasan yang bersumber pada rasa ketidakadilan. Tidak mengherankan jika solusi yang ditempuh atas aspirasi kaum minoritas bukan pendekatan politik (dialog), melainkan lebih ke arah pendekatan keamanan atau represif.

72 *Focus Group Discussion (FGD)* Tim Polugri PRP BRIN, di Chinese Academy of Social Science (CASS), Beijing, 17 Mei 2018.

Selanjutnya, Xi Jinping menyempurnakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Untuk melengkapi modernisasi Tiongkok yang digagas oleh Deng Xiaoping, Xi Jinping berpandangan bahwa Tiongkok memerlukan suatu mimpi yang akan memandu proses modernisasi lebih jauh lagi agar cita-cita dan harapan rakyatnya terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, pada tahun 2012, Xi Jinping selanjutnya mengumumkan sebuah visi untuk masa depan Tiongkok yang kemudian dikenal dengan istilah “Impian Tiongkok” (*Chinese Dream*).⁷³ Dalam visi ini, pada tahun 2020 digambarkan bahwa masyarakat Tiongkok sudah mencapai tahapan cukup baik, dan pada tahun 2049 sudah berhasil memasuki tahapan masyarakat maju.

Pesan yang ingin disampaikan Xi Jinping dalam visi tersebut bahwa Republik Rakyat Tiongkok sesudah 100 tahun berdiri mampu mengubah masyarakatnya dari tradisional menjadi modern. Proses modernisasi atau pembangunan nasional berjalan berkesinambungan. Dalam “Impian Tiongkok” ini terkandung semangat membangun perdamaian, pembangunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama tersebut tidak hanya memberi keuntungan kepada rakyat Tiongkok semata, tetapi juga memberi keuntungan kepada rakyat di wilayah lain di dunia.⁷⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerja sama Tiongkok dengan berbagai negara di dunia sesungguhnya merupakan strategi atau cara untuk mewujudkan visi Tiongkok tersebut, khususnya kerja sama di bidang ekonomi melalui program-program pembangunan yang saling menguntungkan.

Tiongkok dengan “Impian Tiongkok”-nya diprediksi akan mengubah lanskap dunia yang selama hampir dua abad pasca-Revolusi Industri ini didominasi “Barat”.⁷⁵ Jika “Impian Tiongkok” ini berhasil diwujudkan, lanskap global akan lebih ditentukan oleh Tiongkok.

73 “Chinese Dream to Shape Global Landscape: Experts,” *Chinadaily*, 7 Desember 2013, https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-12/07/content_17159585.htm

74 “Chinese Dream to Shape Global,” *Chinadaily*.

75 “Chinese Dream to Shape Global,” *Chinadaily*.

Dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dimilikinya, Tiongkok akan berusaha menjadi aktor penting dalam tatanan global. Sejauh mana prediksi ini menjadi kenyataan? Hanya sejarah yang akan membuktikan.

Ketika menjadi kekuatan global, Tiongkok berpotensi menjadi ancaman bagi Amerika. Hal ini sejalan dengan opini masyarakat Amerika yang menyatakan bahwa salah satu musuh besar Amerika Serikat adalah Tiongkok.⁷⁶ Diperkuat oleh tesis Samuel Huntington yang menyatakan bahwa ke depan akan terjadi aliansi antara Islam dan Confucius yang akan menghadapi “Barat.”⁷⁷ Tesis tersebut secara implisit menyatakan bahwa aliansi tersebut menjadi ancaman bagi Amerika. Tiongkok dengan kekuatan ekonominya diasumsikan akan menjadi kekuatan penyeimbang (*balancer*) Amerika Serikat di dalam struktur internasional. Pandangan ini tentu saja bisa diperdebatkan dan perlu diklarifikasi karena beberapa hal, misalnya Tiongkok masih tertinggal dari Amerika Serikat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas militer, dan pengaruh politik. Jadi, optimisme Tiongkok akan mengimbangi “Barat”, khususnya Amerika Serikat, sesungguhnya juga pada saat yang sama dibayangi oleh pesimisme.

Untuk merespons pandangan pesimistis akan “Impian Tiongkok” tersebut, pemerintah selanjutnya membuat prioritas dalam melakukan modernisasi atau pembangunan nasional. Modernisasi Tiongkok ditujukan pada pembangunan sektor-sektor tertentu yang dipandang strategis menuju “Impian Tiongkok”. Terkait hal ini, modernisasi Tiongkok selanjutnya dibagi ke dalam tiga klaster, yaitu sebagai berikut: (1) ekonomi, politik, iptek, militer; (2) peradaban Tiongkok, termasuk di dalamnya nilai-nilai keadilan, kemakmuran budaya, dan moral yang tinggi; (3) Tiongkok yang harmonis, yang mewujudkan keseimbangan kelas sosial dan suatu negeri Tiongkok indah yang

76 Jim Norman, “Four Nations Top U.S.’s Greatest Enemy List, 22,” *Gallup*, 22 Februari, 2016, <https://news.gallup.com/poll/189503/four-nations-top-greatest-enemy-list.aspx?version=print>

77 Xia, “China Threat or a Peaceful”, 1.

menganjurkan kelestarian lingkungan.⁷⁸ Pemerintah Tiongkok membangun pilar-pilar modernisasi yang berfungsi memberi arah dalam modernisasi atau reformasi. Sisi lain dari pilar-pilar modernisasi adalah upaya mengantisipasi eksekusi dari modernisasi tersebut terhadap perilaku sosial dan lingkungan hidup.

C. DINAMIKA EKSTERNAL

Arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok juga dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya, baik internasional maupun regional. Lingkungan strategis global Tiongkok di antaranya pergeseran struktur internasional dari unipolar ke multipolar. Amerika Serikat usai Perang Dingin menjadi kekuatan unipolar, walau demikian pada tahun-tahun terakhir ini kekuatan ekonominya tampak semakin melemah. Aksi pendudukan militernya ke Irak tahun 2003 dinilai sangat menguras sumber daya, khususnya sumber daya ekonomi negara ini. Ditambah lagi, krisis ekonomi internasional tahun 2008 semakin melemahkan struktur ekonomi politik Eropa dan Amerika Serikat. Namun, di lain pihak, krisis ekonomi internasional memberi peluang menguatnya eksistensi negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Tiongkok merupakan bagian dari kelompok negara-negara BRICS sehingga memiliki peluang lebih besar lagi untuk menjadi aktor penting dalam hubungan internasional. Tiongkok dengan keberadaannya dalam BRICS menjadi lebih kuat posisi tawarnya dalam menghadapi negara-negara “Barat” sehingga tidak mengherankan jika kemudian Tiongkok terlihat lebih agresif dalam melakukan aksinya dalam berbagai isu internasional.

Di samping itu, lingkungan strategis regional juga tidak kalah penting memengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok. Negara ini terlibat konflik teritorial dengan Jepang atas Laut China Timur untuk memperebutkan Pulau Diaoyu atau Senkaku. Kedua negara terlibat

78 Nawab, Q. (2023, 23 Februari). Chinese path to modernization: The way forward. *ChinaDaily.com*. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/23/WS63f6b857a31057c47ebb052f.html>

saling tumpang tindih klaim berdasarkan klaim sejarah. Tiongkok melakukan klaim atas dasar penguasaan pulau tersebut sejak abad ke-14 di masa Dinasti Ming, sedangkan Jepang mengklaim penguasaan pulau tersebut sejak abad ke-19 di masa pemerintahan Tokugawa. Tiongkok menyatakan pulau tersebut akan dikuasai dan meminta Amerika Serikat tidak mendukung Jepang dalam sengketa ini. Di lain pihak, Jepang juga berpandangan bahwa pulau tersebut adalah wilayah kedaulatannya yang harus dipertahankan.⁷⁹ Pulau ini punya nilai ekonomi dan strategis bagi kedua belah pihak. Di sekitar pulau ini merupakan wilayah laut yang kaya akan ikan, dan penguasaan pulau ini akan memperluas wilayah laut negara yang menguasainya.

Lingkungan strategis regional lainnya adalah konflik teritorial Tiongkok dengan sejumlah negara di Laut China Selatan. Konflik ini juga memengaruhi arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok. Konflik ini dilatarbelakangi oleh klaim historis dan motivasi penguasaan sumber daya alam. Tiongkok mengklaim kawasan ini atas dasar historis. Kawasan ini sudah menjadi teritorialnya sejak zaman dahulu karena ada buku-buku nelayan Tiongkok yang menggambarkan catatan dan panduan ke Pulau Huangyan. Kawasan yang diperkirakan memiliki cadangan gas dan minyak ini juga menjadi *pull factor* yang menyebabkan masing-masing negara tetap maju untuk memperebutkan kepulauan di kawasan tersebut. Sejumlah negara terlibat langsung dan tidak langsung dalam konflik ini, yaitu Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, Filipina, dan Amerika Serikat (AS). AS merupakan negara di luar area ini, tetapi punya kepentingan strategis atas kawasan ini, yaitu antara lain untuk mendapatkan jaminan akses bebas pelayaran internasional untuk melalui kawasan ini. Hanya saja, keterlibatan AS di dalam konflik ini tidak diinginkan oleh Tiongkok, tetapi negara-negara lain tidak mempermasalahkan keterlibatan AS dalam konflik ini. Bahkan, kehadiran AS dipandang oleh mereka berguna untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok yang berpotensi menjadi kekuatan hegemoni di kawasan ini.

79 K. He dan L. Mingjiang, "Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US-China strategic competition, regional actors, and beyond," *International Affairs* 96, (2020): 1-7. <https://doi.org/10.1093/ia%2Fiiz242>

Kebijakan regional dan global Tiongkok ditandai program kerja sama yang dikenal *Belt Road Initiative* (BRI). Program kerja sama ini sesungguhnya penyempurnaan dari program kerja sama sebelumnya yang dikenal dengan kerja sama perdagangan Jalur Sutra (*Silk Road*) yang akan didiskusikan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Kebijakan global Tiongkok ini beriringan dengan munculnya wacana kerja sama oleh sejumlah negara yang terkesan “tandingan”, walaupun hal ini sebenarnya belum tentu dimaksudkan demikian. Sejumlah negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, India, Australia, dan Indonesia punya harapan membangun kerja sama Indo-Pasifik walaupun konsepnya masih berbeda satu sama lain. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan pentingnya konektivitas antara Samudra Hindia dan Pasifik. Pada tahun 2013, Australia mengumumkan Buku Putih Pertahanan yang berisi pernyataan pentingnya perluasan kerja sama keamanan maritim Indo-Pasifik.⁸⁰ Pada tahun 2017, Presiden Trump menyatakan Indo-Pasifik sebagai bagian dari agenda kebijakannya dan dimaksudkan untuk membendung pengaruh Tiongkok⁸¹. Kemudian, tahun 2018, dia menginginkan sistem navigasi pelayaran, sistem pasar, dan perdagangan yang bebas dan terbuka di kawasan Pasifik, mulai dari Pantai Barat Amerika Serikat sampai dengan India. Trump menyebutnya kerja sama ekonomi Indo-Pasifik, dan ini dimaksudkan tidak untuk membendung China.⁸² Pada tahun 2018, Presiden Jokowi juga menyampaikan konsep Indo-Pasifik yang mengedepankan tiga pendekatan, yaitu (1) bebas dan terbuka, (2) mengutamakan dialog, dan (3) sentralitas ASEAN.⁸³ Semua gagasan atau wacana tentang Indo-Pasifik perlu direspons secara terbuka sehingga tidak mengarah kepada kerja sama yang inklusif dan mengundang kecurigaan negara

80 Shankari Sundararaman, “Understanding the Indo-Pacific: Why Indonesia Will Be Critical?”, dalam Satish Chandra dan Baladas Ghoshal, *The Indo-Pacific Axis: Peace and Prosperity or Conflict*, (London: Routledge, 2018), 12.

81 “Jokowi Melihat Indo Pasifik,” diakses pada 24 September, 2018, <http://pointerspolitik.com/jokowi-melihat.indo-pasifik-2/>.

82 “‘Indo-Pacific’ over ‘Asia-Pacific’ Reflects India’s Rise: US Official,” *The Economic Times*, 11 Juli, 2018, <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indo-pacific-over-asia-pacific-reflects-indias-rise-us-official/articleshow/61519684.cms?from=mdr>

83 ‘Indo-Pacific’ over ‘Asia-Pacific,’ *The Economic Times*.

tertentu dan mendorong timbulnya ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan.

Sebagai konsekuensi persaingan politik, bagi Amerika, kerja sama Indo-Pasifik sebagai pembendungan pengaruh Tiongkok di kawasan ini. Oleh karena itu, Amerika Serikat melibatkan sejumlah negara sekutunya dalam mengembangkan kerja sama Indo Pasifik. Negara-negara sekutunya itu meliputi Jepang. Negara ini merupakan sekutu Amerika Serikat, khususnya di era Perang Dingin. Sejalan dengan hal itu, Jepang mengembangkan konsep Indo Pasifik dalam kerangka Asia yang lebih luas (koiki Ajia).⁸⁴ Dalam hal ini, Jepang kerja sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Jepang bersama negara-negara tersebut dapat menghadapi ancaman Tiongkok dengan optimistis, sebaliknya demikian pula halnya Amerika Serikat. Akhirnya, Jepang dan negara-negara ini bergerak ke arah pengembangan kerja sama untuk menghadapi musuh bersama melalui forum Indo-Pasifik.

Di samping itu, Amerika Serikat juga melibatkan negara lain yang punya kesamaan kepentingan dengan dirinya. India memiliki masalah konflik perbatasan dengan Tiongkok. Oleh karena itu, negara ini berpeluang bergabung dengan Amerika Serikat dan sekutunya melalui forum Indo-Pasifik. Namun, India juga membangun kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Hal itu antara lain melalui *Shanghai Cooperation Organization* dan *Asian Infrastructure Investment Bank*.⁸⁵ India berupaya mengimbangi tumbuhnya aliansi Tiongkok dan Pakistan karena India juga memiliki konflik perbatasan dengan Pakistan di daerah Punyab. Jadi, keikutsertaan India dalam wadah Indo-pasifik dengan Amerika Serikat dan sekutunya menjadi sangat berhati-hati. Kehadiran India dalam forum Indo-Pasifik yang dikembangkan Amerika Serikat bisa mendorong hubungan Tiongkok dan Pakistan akan lebih mendekat. Hal ini tidak diinginkan oleh India karena bisa menjadi ancaman bagi dirinya.

84 Purnendra Jain dan Takenori Harimoto. "Japan and the Indo-Pacific," dalam Priya Chacko (Ed.), *New Regional Geopolitics in the Indo-Pacific*. (New York: Routledge, 2016),27.

85 Priya Chacko, "India and the Indo-Pacific from Singh to Modi: Geopolitic and Geoeconomic Entanglements," dalam Priya Chacko (Ed.), *New Regional Geopolitics in the Indo-Pacific*, (New York: Routledge, 2016)54.

Seperti diketahui bahwa kebijakan Amerika Serikat mengembangkan kerja sama Indo-Pasifik menekankan aspek keamanan tradisional. Kerja sama Indo-Pasifik versi Amerika Serikat adalah kerja sama politik dan keamanan.⁸⁶ Hal ini untuk membendung kemungkinan hegemoni Tiongkok di kawasan. Kebijakan Amerika Serikat tidak terlepas dari fenomena perilaku asertif Tiongkok, khususnya dalam konflik teritorial di Laut China Selatan. Dalam hal ini, Amerika Serikat berkepentingan agar Laut China Selatan tetap menjadi kawasan bebas. Kawasan ini menjadi jalur pelayaran internasional yang ramai digunakan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Sebaliknya, Tiongkok secara unilateral mengklaim wilayah itu adalah teritorialnya sehingga terjadi tumpang tindih klaim dengan beberapa negara anggota ASEAN dan Taiwan.

Upaya Amerika Serikat membendung perilaku asertif Tiongkok diperkuat lagi dengan membentuk kerja sama AUKUS (Australia, the United Kingdom, dan the United States) pada 15 September 2021. Konsekuensi dari berdirinya kerja sama ini, Australia jadi memiliki kapal selam bertenaga nuklir.⁸⁷ Hal ini membuat Indonesia menyatakan keprihatinannya karena dipandang bertentangan dengan semangat non-proliferasi senjata nuklir dan memicu perlombaan senjata. Oleh karena itu, untuk menjaga perimbangan kekuatan di kawasan, Indonesia memperkuat armada tempur matra udara dengan membeli pesawat Rafale buatan Prancis sejumlah 42 unit, namun dengan alasan normatif adalah untuk meremajakan armada tempur matra udara yang sudah tua, yaitu F-16, SU 27, dan SU 30.⁸⁸

Sementara itu, Tiongkok mengimbangi pengaruh kerja sama Indo-Pasifik Amerika Serikat dengan kerja sama keamanan non-

86 Jain dan Harimoto, "Japan and the Indo-Pacific", 39.

87 Tomy Trinugroho, "AUKUS Aliansi untuk Peran," Kompas, 20 September 2021, http://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/20/aukus-aliani-untuk-perang?track_source=baca&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2021%2F09%2F20%2Faukus-aliani-untuk-perang&status=sukses_login&status_login=login

88 "Jet Tempur Rafale Buatan Prancis dan Rencana Indonesia untuk Perkuat Alutsista, Apa Istimewanya?," *BBC News Indonesia*, 11 Februari, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60343367>.

tradisional dengan beberapa negara ASEAN.⁸⁹ Tiongkok berupaya mendekati negara-negara anggota ASEAN daratan (IndoChina). Kawasan ini bernilai strategis bagi kontrol Tiongkok ke Laut China Selatan. Tiongkok mengembangkan kerja sama pembangunan lembah Mekong dan wilayah kelautan, tujuannya untuk mencegah perluasan pengaruh kerja sama Indo-Pasifik yang dibangun oleh Amerika Serikat dan bercirikan *Free and Open Indo-Pacific* (FOPI).⁹⁰ Beberapa anggota ASEAN menjadi area perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini sesungguhnya tidak menguntungkan bagi persatuan ASEAN atau dapat memperlemah keutuhan ASEAN. Jika tidak disikapi dengan sungguh-sungguh oleh ASEAN, kehadiran Indo-Pasifik dan kehadiran pengaruh Tiongkok di beberapa anggota ASEAN dapat merusak persatuan organisasi kerja sama regional ini.

Dari sisi ekonomi, persaingan Amerika Serikat–Tiongkok diwujudkan dalam “perang dagang”. Dalam pidato pelantikan pada 21 Januari 2017, Presiden Trump menyatakan kebijakan *American first*. Presiden Trump berpandangan perdagangan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok selama ini merugikan rakyat Amerika. Oleh karena itu, Presiden Trump berpandangan perlu mengambil langkah-langkah perubahan. Apalagi hal ini sebagai janjinya waktu kampanye Presiden tahun 2016 lalu. Lebih lanjut kebijakan proteksi Presiden Trump yang diwujudkan melalui “perang dagang” sebagai implementasi dari konsep *American first*. Dalam hal ini, Presiden Trump berupaya melindungi kepentingan ekonomi Amerika yang akhirnya diwujudkan melalui “perang dagang” dengan Tiongkok.

Seperti disinggung sebelumnya, isu “perang dagang” tersebut sebagai manifestasi kebijakan proteksi dari Presiden Trump. Kebijakan proteksi sesungguhnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Masalahnya Amerika Serikat selama ini sering menyuarakan agar negara lain melakukan perdagangan bebas dengan membuka

89 Kai He dan Menjiang Li, “Understanding Dynamic of Indo-Pacific: US-China Strategy Competition, Regional Actor and Beyond.” *International Affairs Content* 96, No.1 (2020), 1–4.

90 He dan Li, “Understanding Dynamic”, 1–4.

pasar domestik bagi produk-produknya. Hal ini sesungguhnya dimaksudkan agar produk Amerika Serikat dapat memasuki pasar tersebut. Walaupun demikian, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump justru melakukan kebijakan proteksi dengan menaikkan tarif bagi produk-produk yang memasuki pasar Amerika Serikat, khususnya produk Tiongkok. Selama ini, Tiongkok dinilai oleh Presiden Trump telah menikmati keuntungan yang besar dalam kerja sama perdagangan, namun sebaliknya rakyat Amerika menderita kerugian. Hasil dari kebijakan proteksi ini, Presiden Trump mengklaim telah meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan buruh di Amerika Serikat.

Di era Presiden Biden, “perang dagang” AS-Tiongkok tetap berlangsung, bahkan AS justru memperluas tarif pajak produk medis Tiongkok. Sikap anti-Tiongkok bahkan semakin menguat, apalagi setelah Huawei masuk ke dalam produk daftar hitam karena dicurigai sebagai alat spionase. Bersamaan dengan itu, Senat AS mengesahkan UU Strategi Kompetisi. UU ini mendorong Pemerintah AS agar melawan bantuan keuangan Tiongkok ke Amerika Latin dan Afrika.⁹¹

Sebaliknya, Pemerintah Tiongkok juga merespons “perang dagang” dengan kebijakan serupa. Tiongkok merespons kebijakan proteksi Presiden Trump dengan menaikkan tarif produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke pasar domestiknya. Hal ini tentu saja menjadi pukulan ekonomi bagi industri di Amerika Serikat karena pasar Tiongkok punya arti penting. Pemerintah Tiongkok juga punya rujukannya yang sudah cukup memadai untuk melindungi industri dalam negerinya. Dalam hal ini, Presiden Xin Jiping pada tahun 2014 menyampaikan perlunya keamanan politik, keamanan budaya, dan keamanan ekonomi (*zongti guojia anquan guan*).⁹² Atas dasar keamanan ekonomi, Pemerintah Tiongkok dengan mudah dapat membalas kebijakan proteksi Presiden Donald Trump. Salah satu pelaksanaan

91 Unggul Wirawan. “Memprediksi Masa Depan Hubungan AS-Tiongkok”, *Berita Satu*, 1 Januari, 2022, <https://www.beritasatu.com/dunia/873809/memprediksi-masa-depan-hubungan-astionggkok>

92 Mingjiang Li, “The Belt and Road Initiative”. *International Affairs Content* 96, No.1 (2020), 177.

kebijakan proteksi Tiongkok yaitu negara ini membantu perusahaan Huawei dalam menghadapi pesaing-pesaingnya, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat.⁹³

Implikasi “perang dagang” memperlemah ekonomi kedua negara dan ekonomi internasional. Saat ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi dunia sudah melambat sehingga dunia sudah diambang resesi. “perang dagang” Amerika Serikat-Tiongkok berdampak kepada semakin memburuknya ekonomi dunia. Apalagi “perang dagang” ini juga terjadi di saat dunia sejak awal 2020 menghadapi pandemi virus Corona yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, penanganannya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, wabah ini semakin memperburuk perekonomian dunia yang memang kondisinya sudah melemah. Jadi “perang dagang” Tiongkok dan Amerika Serikat telah mendorong semakin melemahnya ekonomi kedua negara khususnya dan ekonomi dunia pada umumnya.

D. ARAH BARU KEBIJAKAN LUAR NEGERI: DARI KOOPERATIF KE KONFRONTATIF

Kebangkitan Tiongkok menjadi negara raksasa ekonomi menimbulkan kontroversi, tidak hanya memunculkan peluang, tetapi sekaligus tantangan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada satu sisi, kekuatan ekonomi Tiongkok yang besar dapat menjadi peluang, terutama sandaran pengembangan ekonomi negara lain di sektor perdagangan dan investasi. Pada sisi lain, kebangkitan Tiongkok juga menjadi tantangan karena memunculkan ketegangan dengan berbagai negara tetangga, terutama kebangkitan Tiongkok telah berpengaruh terhadap perilaku politiknya di kawasan.

Proses kebangkitan Tiongkok menuju negara besar, khususnya di bidang ekonomi, terlihat berbalik dengan arah kecenderungan melemahnya AS sebagai kekuatan global, khususnya setelah krisis keuangan tahun 2008. Gejala perubahan peta struktur internasional ini dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk mengambil alih hegemoni

93 Li, “The Belt and Road”, 177.

global dari kepemimpinan AS. Meskipun Tiongkok tampak “malu-malu” untuk mengakui hal ini, faktanya perilaku kebijakan luar negeri baru Tiongkok menunjukkan arah yang demikian. Jadi, strategi baru kebijakan luar negeri adalah respons rasional untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh global.⁹⁴

Seiring kebangkitannya menjadi negara besar, Tiongkok menjadi sangat percaya diri sehingga mendorong kepada perubahan perilaku politik dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri Tiongkok menjadi lebih asertif. Bahkan, bisa ditafsirkan negara ini sedang mengganggu *status quo* hubungan internasional di Asia Pasifik yang selama ini berada dalam hegemoni Amerika Serikat. Perubahan perilaku ini berpotensi menjadi ancaman keamanan dan perdamaian di kawasan, walaupun dalam diplomasinya Tiongkok selalu mengatakan bahwa negara ini tidak ingin memicu perang dengan negara lain.⁹⁵ Sebagaimana dikatakan oleh Xi Jinping dalam pidatonya tahun 2018,

China will get actively involved in global governance and stay committed to the vision of consultation, cooperation and benefit for all in global governance. China has all along played its part in promoting world peace and development and upholding the international order⁹⁶.

Perubahan perilaku politik Tiongkok yang ingin lebih berperan dalam tatanan internasional ini didukung oleh beberapa fakta dan argumentasi, seperti pernyataan Presiden Xi Jinping pada peringatan 75 tahun PBB.⁹⁷ Presiden Xi Jinping menyatakan berkaitan

94 Thomas J. Christensen, “More Actor, Less Coordination? New Challenges for the Leaders of Rising China,” dalam Gilbert Rozman (Ed.), *China’s Foreign Policy: Who Make it and How is it Made*, (Princeton: Plagrave Macmillan, 2012), 23.

95 Christensen, “More Actor”.

96 “President Xi Jinping’s speech at opening ceremony of 2018 FOCAC Beijing Summit,” Xinhua.net, diakses pada 21 Januari 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/03/c_137441987.htm,.

97 CGTN. “Full text: Xi Jinping’s speech at high-level meeting to mark UN’s 75th anniversary,” diakses pada 12 Oktober 2020, <https://news.cgtn.com/news/2020-09-22/Full-text-Xi-Jinping-addresses-high-level-meeting-for-UN-anniversary-TYvH4vvVDO/index.html>,

dengan kenyataan sejarah bahwa Tiongkok salah satu negara yang menandatangani Piagam PBB tahun 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat. Selanjutnya, Tiongkok adalah satu-satunya negara berkembang yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan sehingga kedudukan yang unik ini dipandang mewakili negara berkembang. Oleh karena itu, Tiongkok senantiasa akan mendukung kerja sama multilateral. Tiongkok akan aktif terlibat dalam reformasi dan pembangunan sistem pemerintahan global. Pendeknya, Tiongkok juga berkepentingan untuk mengambil peran strategis dalam dinamika internasional yang terjadi guna mengimbangi peran-peran strategis yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Eropa.

Seperti telah disinggung sebelumnya, perilaku politik didasarkan pada upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dalam berbagai *front* internasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional Tiongkok perlu dipahami agar bisa diantisipasi oleh pihak lain dalam menjalin hubungan dengan negara tirai bambu ini. Kepentingan nasional utama Tiongkok dewasa ini adalah mempertahankan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayahnya. Dua aspek ini penting karena keduanya memiliki nilai mendasar di hadapan rakyatnya. Artinya, legitimasi Pemerintah Tiongkok menjadi taruhan jika tidak bisa memenuhinya. Oleh karena itu, Pemerintah Tiongkok memberi perhatian besar atas hal ini.⁹⁸ Buku Putih Pembangunan Tiongkok tahun 2011 mencantumkan butir-butir kepentingan nasional, yaitu (1) kedaulatan nasional, (2) keamanan nasional, (3) keutuhan wilayah, (4) persatuan nasional, dan (5) sistem politik berdasarkan konstitusi dan mempertimbangkan ketertiban umum.⁹⁹

Untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya tersebut, Tiongkok akan mengarahkan dan menggunakan segala sumber daya atau kekuatan yang dimilikinya,¹⁰⁰ baik kekuatan politik, diplomasi, ekonomi, hukum, budaya, maupun militer.¹⁰¹ Tiongkok

98 Zhao Kui. "What are China's Core Interests", diakses pada 30 Maret 2016, [http://www.Chinaasfocus.com/foreign policy/what-are.china.core-interest-](http://www.Chinaasfocus.com/foreign%20policy/what-are.china.core-interest-)

99 Kui. "What are China's Core"

100 J. Zhang, *Rise of China and Community*. 8.

101 Pidato Presiden Xi Jinping pada Kongress PKT ke-18 tahun 2013

melakukan perubahan strategi dari waktu ke waktu. Pada suatu periode tertentu, Tiongkok, misalnya, memberikan penekanan pada kekuatan diplomasi dan politik atau disebut juga strategi kooperatif yang membuahkan hubungan damai dengan pihak lain. Namun, pada periode lain, Tiongkok dapat juga memberi tekanan pada kekuatan militer atau disebut juga strategi konfrontatif yang membuahkan kecemasan di pihak lain.

Demi mendukung strategi tersebut, Tiongkok melakukan peningkatan kekuatan militer dan peran diplomasinya. Pada Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19 tahun 2017, Xi Jinping dalam pidato resmi antara lain menyatakan kemajuan negaranya dari segi militer dan diplomasi. Tiongkok berhasil melakukan pembangunan sistem pertahanan dan modernisasi kemampuan militernya. Tiongkok juga menyesuaikan strategi militernya kepada perkembangan atau perubahan lingkungan strategisnya dan perkembangan ancaman yang baru. Di bidang diplomasi, Tiongkok berhasil menjalin kerja sama bilateral dan multilateral; antara lain dalam kerangka BRI, BRICS, G-20, dan APEC. Tiongkok menyumbangkan kepada perdamaian dunia dan pembangunan.¹⁰² Kemajuan di bidang militer dan diplomasi ini memiliki pengaruh signifikan kepada arah baru politik luar negara tersebut.

1. Periode Kooperatif dan Damai

Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, sejak reformasi ekonomi atau modernisasi tahun 1978, Tiongkok membuka diri terhadap dunia luar. Tiongkok membangun kerja sama dan jaringan dengan banyak negara serta lembaga internasional untuk membangun masyarakatnya. Kerja sama ini dimaknai sebagai reaksi terhadap konflik dan potensi konflik yang terjadi serta keberhasilannya dalam upaya mengatasi

102 Xi Jinping, *Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in all respects and Strives for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era*, pidato pada Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19, Beijing 18 Oktober 2017.

konflik.¹⁰³ Dengan mengutamakan aspek kerja sama, negara ini tampil sebagai negara percaya diri dan menjadi bagian dari masyarakat internasional yang disegani. Sejak pertengahan tahun 1980-an, Tiongkok menjalankan “Kebijakan Pintu Terbuka (*Open Door Policy*)”, dan tahun 1990-an memasuki tahap tinggal landas dalam program pembangunan nasionalnya, yang kemudian menjadi negara tujuan investasi bagi investor berbagai negara, khususnya AS.¹⁰⁴ Kebijakan ini berkontribusi besar terhadap keberhasilan Tiongkok membangun struktur ekonominya. Investor AS dengan kemampuan modal yang besar termotivasi untuk berinvestasi di negara ini. Investasi ini juga membawa ikutannya, yaitu alih teknologi dari AS dan negara-negara lainnya ke negara ini. Dengan kata lain, kebijakan investasi Tiongkok membuahkan dua keuntungan, yaitu mendatangkan kapital dan sekaligus alih teknologi. Pada akhirnya, akumulasi modal usaha dari para investor dan alih teknologi punya arti penting bagi pengembangan industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Tiongkok.

Sejarah diplomasi mencatat bahwa pada era tahun 1990-an, Tiongkok lebih bersahabat dengan negara-negara di sekitarnya sehingga dapat menyelesaikan konflik dengan damai atau melalui pendekatan *win-win solution*.¹⁰⁵ Pada era itu, pemimpin Tiongkok melaksanakan *Smile diplomacy*, artinya Tiongkok dalam politik luar negerinya diarahkan untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain dan menahan diri jika berinteraksi dengan negara-negara yang memiliki potensi konflik. Negara ini bersedia mengelola konflik dengan baik. Kepemimpinan Presiden Hu Jin Tao, Tiongkok masih konsisten menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan prinsip membangun dengan damai (*peaceful development*).¹⁰⁶ Oleh karena

103 Tang Shiping, “Introduction: Understanding Living with China”, dalam Tang Shiping, Mingjiang Li, Amitav Acharya, *Living with China; Regional States and China through Crises and Turning Points*, (New York: Pargrave Mac Millan, 2009), 3.

104 Yan Suetong, “The Rise of China in Chinese Eyes”. *Journal of Contemporary China* 10, No. 26 (2001), 33–39.

105 Brad Glosserman. “China’s Grand Strategy Disaster”, *The National Interest*, 20 Mei 2014, <https://nationalinterest.org/feature/chinas-grand-strategy-disaster-10492>

106 Glosserman. “China’s grand strategy”

itu, kebangkitan Tiongkok tidak sampai mengundang kecurigaan dari negara-negara tetangganya, kendatipun faktanya memiliki potensi konflik dengan negara tetangganya. Jadi, kebangkitan Tiongkok saat itu tidak menimbulkan keresahan negara-negara di sekitarnya.

Bahkan, ketika Presiden Hu Jin Tao melakukan kunjungan ke AS pada tahun 2011, pemimpin Tiongkok tersebut memperoleh penilaian positif dari AS. Kunjungan ini menggambarkan perilaku politik Tiongkok saat itu sebagai negara berperilaku positif dan moderat. Salah satunya terefleksikan melalui komitmen Tiongkok untuk membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Tiongkok meyakinkan Korea Utara agar tidak berperilaku yang mengarah kepada provokasi yang dapat mengakibatkan munculnya konflik terbuka di kawasan Asia Timur. Dengan demikian, Tiongkok pada masa itu justru ikut mewujudkan perdamaian dunia dengan menggunakan pengaruhnya atas Korea Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, pada masa itu, Tiongkok juga menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan negara-negara tetangganya di Asia Pasifik. Aksi Tiongkok tersebut dikenal dengan sebutan diplomasi tabur pesona (*charm offensive diplomacy*). Tidak hanya memperluas kerja sama ekonomi, investasi, dan perdagangan dengan negara-negara tetangganya, Tiongkok melalui diplomasinya tersebut juga menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga regional di kawasan. Pemimpin Tiongkok meredam kemungkinan munculnya kekhawatiran di negara-negara tetangganya dengan mengatakan bahwa negaranya mempunyai maksud damai dan kekuatan Tiongkok memberikan manfaat ke seluruh Asia.¹⁰⁷ Diplomasi Tiongkok ini merupakan gaya persuasif kepemimpinan Presiden Hu Jin Tao, khususnya dalam memperluas daerah pengaruhnya di kawasan agar negara-negara lain di sekitarnya menaruh kepercayaan kepada Tiongkok sehingga bersedia menerima kehadiran negara ini dengan damai dan suka cita.

107 Tony Tai-ting Liu, "Public Diplomacy: China's Newest Charm Offensive", *E-International Relations*, 30 Desember, 2018, <https://www.e-ir.info/2018/12/30/public-diplomacy-chinas-newest-charm-offensive/>

Kebijakan luar negeri Tiongkok yang aktif dan tidak menimbulkan gangguan kepada stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut dikenal dengan istilah aktif-kooperatif. Berlangsungnya aksi kebijakan luar negeri yang demikian dipandang ideal karena aktif berkontribusi pada berbagai isu internasional, tetapi tidak menimbulkan ancaman keamanan atau tidak menimbulkan konflik kawasan. Namun, perlu menjadi catatan, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks Tiongkok, dinamika internalnya telah mengubah arah atau karakter kebijakan luar negeri negara ini, dari kebijakan luar negeri yang mendasarkan pada *smile diplomacy and charm offensive diplomacy* menjadi kebijakan luar negeri yang asertif.

2. Periode Konfrontatif dan Asertif

Sejak tahun 2012, ketika dipimpin Presiden Xi Jinping, Tiongkok mengalami perubahan politik luar negerinya. Xi Jinping memiliki sejumlah kebijakan pembaruan yang berbeda dengan pendahulunya, tetapi tetap menjaga kesinambungan kepemimpinan dengan baik di Tiongkok, pembaruan itu meliputi: (1) Presiden Xi Jinping mengembangkan *new diplomacy (wai jiao xin zheng)* yang memiliki ciri aktif dan asertif dalam perilaku internasionalnya; (2) Sejak kepemimpinan Xi Jinping, pengambil keputusan masalah luar negeri dan sarjana di Tiongkok menjadi lebih vokal dalam mengekspresikan kepentingan nasional dan ambisinya untuk memainkan peran dalam masalah-masalah internasional.

Platform kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah pimpinan Xi Jinping merujuk pada dua isu strategis, yaitu mempertahankan integritas wilayah dan membangkitkan nasionalisme rakyat Tiongkok.¹⁰⁸ Keduanya tidak terpisahkan untuk mengembalikan legitimasi komunisme di Tiongkok. Sebagian rakyat Tiongkok mulai kurang respek terhadap komunisme sehingga kedua isu tersebut diharapkan mampu mengembalikan kecintaan rakyat terhadap

108 Glosserman, "China's Grand Strategy," 1.

negara dan termasuk di dalamnya ajaran komunisme. Jadi, bukan nasionalisme yang hanya merujuk pada ideologi nasionalis semata-mata seperti yang pernah hidup di masa lalu. Apalagi faktanya, di negara lain, pemerintahan komunis sudah banyak yang tumbang sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin Tiongkok. Pemimpin negeri tersebut juga punya kekhawatiran bahwa pemerintah komunis di negaranya juga akan tumbang atau memiliki nasib yang sama dengan di negara lain.

Perubahan perilaku yang bermuara kepada arah kebijakan luar negeri Tiongkok menimbulkan kecurigaan negara-negara tetangganya dan mengantarkan kepada ketegangan politik dengan Amerika Serikat. Sejumlah negara tetangganya khawatir menghadapi perilaku asertif dan kebangkitan Tiongkok menjadi raksasa ekonomi. Kekhawatiran mereka disebabkan dua hal. *Pertama*, perekonomian Tiongkok sangat kuat sehingga fluktuasi ekonominya akan berpengaruh kepada negara lain. Sistem ekonomi pasar di era globalisasi mendorong kepada interpedensi ekonomi antara negara satu dengan lain sangat kuat. Jadi, fluktuasi ekonomi dalam negeri Tiongkok berpotensi untuk berpengaruh buruk kepada ekonomi negara lain yang memiliki kerja sama dengan negara tersebut. *Kedua*, kekuatan komunis di Tiongkok sudah mulai kehilangan legitimasi sebagai ideologi pemberi motivasi di Tiongkok, bahkan kini hal itu diambil alih oleh nasionalisme Tiongkok yang sudah mulai bangkit.¹⁰⁹ Hal ini merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan tatanan komunis di negara itu. Oleh karena itu, para pemimpin Tiongkok, khususnya Presiden Xi Jinping, berjuang keras untuk mengembalikan legitimasi Partai Komunis Tiongkok di hadapan rakyat. Salah satu upaya adalah membangun rasa bangga rakyat Tiongkok akan negerinya, dengan melakukan provokasi dan sikap heroik dalam merespons negara-negara yang memiliki konflik kepentingan dengan negaranya.

Berpijak pada fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku Tiongkok yang asertif di kawasan tidak terlepas dari pengaruh dinamika internal dan eksternal lingkungan strategisnya.

109 Glosserman, "China's Grand Strategy" 1.

Dengan kata lain, sikap asertif Tiongkok dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan legitimasi pemerintahnya karena isu kedaulatan dan teritorial memiliki nilai sensitif bagi rakyatnya. Oleh karena itu, perjuangan Tiongkok dalam konflik di Laut China Selatan ataupun konflik kepulauan Diaoyu/Senkaku di Laut China Timur menjadi agenda-agenda penting dari Partai Komunis Tiongkok. Bahkan, klaim Tiongkok bahwa wilayahnya sampai kawasan ini sudah menjadi bagian dari pelajaran di sekolah dasar. Kondisi-kondisi semacam ini membuat Tiongkok menganggap perjuangan dalam konflik di Laut Diaoyu/Senkaku dan Konflik di Laut China Selatan sebagai bagian dari kepentingan nasional, karena sebagai upaya mempertahankan teritorial. Akibatnya, sulit bagi pemimpin Tiongkok saat ini untuk mundur atau kompromi atas konflik di kedua kawasan tersebut.

Posisi asertif Tiongkok dalam konflik-konflik teritorial tersebut menyebabkan suatu kondisi dilematis. Di satu sisi, posisi Tiongkok berkaitan dengan legitimasi para elit di negara ini. Jika mundur atau mengalah dalam konflik ini, pemerintah Tiongkok bisa dinilai gagal dalam memperjuangkan kepentingan nasional oleh rakyatnya. Para pemimpin mereka dipandang lemah dalam menghadapi negara lain dalam konflik tersebut. Lebih jauh lagi, legitimasi Partai Komunis yang sudah lemah menjadi semakin lemah di hadapan rakyat Tiongkok. Oleh karena itu, Partai Komunis Tiongkok merupakan pihak yang paling keras bersikap agar Tiongkok tidak mundur dari posisinya dalam sengketa-sengketa tersebut. Padahal dalam realitas politik, sebuah kompromi itu dibutuhkan agar diplomasi atau negosiasi berhasil dilakukan untuk mengatasi keadaan atau untuk menghindari terjadinya perang atau penyelesaian masalah secara militer.

Di lain pihak, sikap Tiongkok yang asertif dalam berbagai konflik ditafsirkan sebagai ancaman. Konflik di Laut China Timur ini menyebabkan hubungan Tiongkok dan Jepang cenderung melemah sebagai akibat adanya perang psikologi yang sering terjadi di antara kedua pihak. Demikian halnya konflik di Laut China Selatan, di Kepulauan Spratley, hubungan Tiongkok dengan beberapa negara yang terlibat konflik, khususnya Filipina, menjadi semakin memburuk.

Apalagi, setelah kekuatan militer Filipina melakukan latihan militer gabungan tahunan dengan kekuatan militer Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, yang melibatkan 9.000 personel pada awal tahun 2016.¹¹⁰ Dalam pandangan Tiongkok, langkah ini sebagai upaya provokasi. Ini dapat meningkatkan eskalasi konflik di Laut China Selatan. Sesuatu yang dikhawatirkan adalah jika eskalasi konflik berkembang menjadi perang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, pada tahun 2013, Tiongkok mengumumkan *East China Sea Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yang juga menjangkau kepulauan Diaoyu/Senkaku.¹¹¹ Kebijakan ini merupakan klaim sepihak dari Tiongkok atas kawasan yang disengketakan dengan Jepang. Situasi ini tentu saja mendapat reaksi keras dari Jepang. Bahkan, Amerika Serikat juga turut mengkritik klaim sepihak Tiongkok tersebut. Faktanya, Jepang di bawah perlindungan militer Amerika Serikat. Jika terjadi konflik militer antara Jepang dan Tiongkok, dapat dipastikan Amerika Serikat akan mendukung Jepang. Oleh karena itu, kedua konflik tersebut sewaktu-waktu bisa meletus dan melibatkan Amerika Serikat. Pada akhirnya jika dua raksasa ini terlibat perang, kawasan Asia Pasifik akan terjadi gangguan keamanan dan stabilitas yang berdampak pada perekonomian kawasan maupun dunia.

Pada BOAO forum untuk Asia tahun 2014, Xi Jinping sebagai Perdana Menteri Tiongkok menyatakan posisinya dalam konflik Laut China Selatan.¹¹² Secara eksplisit, Xi Jinping menjelaskan bahwa Tiongkok akan merespons setiap provokasi yang mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan ini. Negara ini juga akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan, sebaliknya, akan membalas kezaliman

110 "AS-Filipina Latihan Perang, China Berang," *Koran Tempo*, 5 April 2016, <https://koran.tempo.co/read/internasional/396759/as-filipina-latihan-perang-china-berang>

111 J. Zhang, "China's Foreign Policy," 13.

112 BOAO Forum adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba, dan berkantor di Hainan, Tiongkok. BOAU bertujuan mempermosikan kerja sama ekonomi regional yang terintegrasi dan menjadi forum untuk meningkatkan kerja sama sesama negara Asia. BOAU Forum berdiri 27 Februari 2001 diikuti oleh kepala negara, pimpinan perusahaan, pakar ekonomi, wartawan. Lihat "BOAU Forum for Asia cancels 2020 annual conference due to COVID-19 impact," *Xinshuanet.com*. diakses pada 30 Oktober 2020.

dengan kezaliman.¹¹³ Di samping itu, pihak Pemerintah Tiongkok juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan memulai konflik terbuka atau perang, tetapi jika didahului, pasti akan meresponsnya. Di sini tergambar sikap keras Tiongkok dalam sengketa di Laut China Selatan.

Tiongkok juga mengancam akan menindak tegas setiap ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Intinya, Tiongkok akan siap dengan berbagai cara untuk mempertahankan wilayah yang diklaimnya di Laut China Selatan. Bahkan, guna menjaga kepentingan strategisnya, Tiongkok menyiapkan 450 rudal jarak pendek yang diarahkan ke Taiwan dan Laut China Selatan.¹¹⁴ Artinya, Tiongkok bersungguh-sungguh dalam menghadapi konflik teritorial, baik di Laut China Timur maupun di Laut China Selatan. Tidak dapat dihindarkan bahwa kebijakan asertif Tiongkok tersebut selanjutnya memunculkan ancaman terhadap stabilitas di kawasan Asia Pasifik, khususnya terhadap negara-negara tetangganya di sekitar perairan Laut China Selatan.

Konflik wilayah di Laut China Selatan sebenarnya bisa dipecahkan, sejauh ada komunikasi politik yang sehat antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah jika memang ingin menuju ke meja perundingan, yaitu: (1) Tiongkok perlu membangun keterbukaan baik melalui diplomasi multilateral atau regional; (2) Negara-negara lain yang terlibat dalam konflik teritorial juga perlu memahami kepentingan nasional Tiongkok yang berkorelasi dengan legitimasi pemerintahnya; (3) Para pihak perlu berpikir dalam kerangka *win-win solution*; (4) Sengketa atas wilayah yang betul-betul *deadlock* penyelesaiannya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan (5) Keterlibatan AS dalam sengketa ini suatu yang realistis, karena negara ini sudah menggunakan jalur pelayaran di Laut China Selatan sejak dahulu.

Berkenaan dengan konflik tersebut tersebut, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada 12 Juli 2016 mengabulkan permohonan Filipina atas klaim zona ekonomi eksklusif yang diperebutkan melawan

113 Zhang, "China's Foreign Policy," 12.

114 Zhang, "China's Foreign Policy," 12.

Tiongkok. Mahkamah memberi kemenangan kepada Filipina, tetapi Tiongkok tidak mengakui keputusan Mahkamah tersebut. Keputusan ini tidak mengikat, karena yang mengajukan gugatan hanya sepihak yaitu hanya Filipina, sementara itu Tiongkok sejak awal tidak menginginkan. Akibatnya, kemenangan Filipina tidak cukup kuat menjadi pegangan atas klaim wilayah yang disengketakan, tetapi secara moral memang telah memberi pukulan kepada Tiongkok dalam konflik tersebut.

Indonesia sebagai kekuatan negara menengah memiliki peluang untuk mengisi posisi mediator perundingan dalam sengketa di Laut China Selatan. Hal ini karena selama ini Indonesia bukan negara yang partisan dalam konflik tersebut dan punya pengalaman dalam melakukan pekerjaan mediasi. Meskipun demikian, upaya menuju meja perundingan bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Faktanya, Tiongkok enggan melakukan perundingan atas sengketa tersebut. Kalaupun negara ini bersedia berunding, pola yang dipilih cenderung melalui jalur bilateral, sebaliknya negara-negara lain yang terlibat konflik lebih menginginkan pola penyelesaian diplomasi multilateral atau regional.

Di lain pihak, perkembangan terakhir hubungan Indonesia-Tiongkok terganggu oleh adanya tumpang tindih klaim di perairan Laut Natuna. Zona ekonomi eksklusif Indonesia atas perairan Natuna diklaim Tiongkok sebagai wilayah perairan tradisionalnya. Jika perairan Laut Natuna secara geografis dikategorikan bagian dari kawasan Laut China Selatan, artinya Indonesia juga punya konflik kepentingan dengan Tiongkok, Indonesia berarti bagian dari konflik di Laut China Selatan. Walaupun memang posisi Laut Natuna jauh di selatan dibandingkan dengan keberadaan gugusan pulau-pulau di Laut China Selatan, seperti pulau Spratley dan Parcell yang disengketakan. Dengan memahami persoalan ini, apakah kemudian perkembangan terakhir hubungan kedua negara karena sengketa perairan Natuna masih memungkinkan Indonesia menjadi mediator dalam konflik Laut China Selatan?

1) Masyarakat “Sepenanggungan” (Mingyun Gongtongti)

Konsep masyarakat sepenanggungan (*community of common destiny*) ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Tiongkok dengan negara di dunia pada umumnya dan negara tetangga pada khususnya.¹¹⁵ Tiongkok mengidentikkan dirinya senasib-sepenanggungan dengan sejumlah negara agar terbangun emosi/perasaan sehingga ada kedekatan hubungan persahabatan atau persaudaraan.

Sebenarnya konsep ini sudah dikenal sejak tahun 2007 berkenaan dengan Kongres PKT ke-17 ketika Tiongkok dipimpin oleh Presiden Hu Jintao. Saat itu, Presiden Hu menggunakan konsep ini untuk menggambarkan keunikan hubungan Tiongkok dan Taiwan, di mana mereka sesungguhnya bersaudara, tetapi karena soal ideologi menjadi berpisah kalau tidak ingin dikatakan “bermusuhan”. Melalui konsep ini, Presiden Hu ingin merangkul Taiwan agar kembali kepada Tiongkok. Konsep tersebut selanjutnya diperluas implementasinya. Dalam Buku Putih Pembangunan dengan Damai Tiongkok tahun 2011 secara jelas menggarisbawahi adanya hubungan saling tergantung antarnegara yang berbeda sistem politik dan tingkat kesejahteraannya di era ekonomi global. Fakta ini memperkuat keinginan agar konsep ini mendasari hubungan dengan negara lain guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, pada Konggres PKT ke-18 tahun 2012, Presiden Hu berpesan agar pemimpin Tiongkok mendatang menerapkan konsep ini dalam hubungannya dengan negara lain.

Dalam perkembangannya, konsep Masyarakat Sepenanggungan diimplementasikan secara lebih luas ke dalam bentuk kerja sama internasional, khususnya dalam bentuk bantuan luar negeri. Melalui bantuan luar negeri, Tiongkok melakukan konsolidasi hubungan persahabatan dan kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan sesama negara berkembang dan mempromosikan kerja sama selatan-selatan. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Tiongkok mulai memberikan sejumlah program bantuan luar negeri ke negara berkembang dalam berbagai sektor pembangunan, yaitu industri, pertanian, kebudayaan/

115 Zhang, “China’s Foreign Policy”, 12.

pendidikan, pemeliharaan kesehatan, komunikasi, energi, transportasi, dan lain-lain. Sektor bantuan ini digambarkan melalui Tabel 2.1 tentang proyek bantuan luar negeri Tiongkok.¹¹⁶

Tabel 2.1 Proyek Bantuan Luar Negeri Tiongkok Tahun 2009

SEKTOR		JUMLAH	TOTAL
Pertanian	Pertanian dan Perikanan	168	215
	Pengelolaan air bersih	47	
Fasilitas Umum	Gedung Konperensi	85	670
	Sarana Olah Raga	85	
	Theater dan Bioskop	12	
	Balai rakyat	143	
	Gedung Pemerintah	37	
	Mesin air	72	
	Iptek, pendidikan dan sarana kesehatan	236	
Infrastruktur Ekonomi	Transportasi	201	390
	Pembangkit listrik	97	
	Penyiaran dan telekomunikasi	92	
Industri	Lampu	320	635
	Tekstil	74	
	Radio dan elektronik	15	
	Industri mesin	66	
	Industri kimia	48	
	Kayu olahan	10	
	Bahan bangunan olahan	42	
	Industri Metal	22	
	Industri batu bara	7	
Industri minyak		19	
Eksplorasi mineral dan geologi		12	
Lain-lain			115
Total			2.025

Berdasarkan data tersebut, sektor-sektor bantuan Tiongkok dipandang sangat strategis bagi negara berkembang. Sektor pembangunan/proyek tersebut secara keseluruhan berjumlah 2.025

116 “Data: Chinese Global Foreign Aid,” Johns Hopkins China Africa Research Initiative, diakses pada 3 Februari, 2024, <http://www.sais-cari.org/data-chinese-global-foreign-aid#:~:text=Foreign%20aid%20data%20overview,US%24%203.18%20%20billion%20in%202021>

proyek yang antara lain meliputi: pertanian 215 proyek, pelayanan publik 670 proyek, infrastruktur ekonomi 390 proyek, industri 635 proyek, dan lain-lain 115 proyek.

2) The Belt and Road Initiative

Konsep masyarakat sepenanggungan tersebut, salah satunya juga diwujudkan dalam program kerja sama *One Belt One Road & Silk Road* yang kemudian dikenal dengan sebutan *Belt and Road Initiative* (BRI). BRI adalah gagasan tentang kerja sama pembangunan Tiongkok dengan berbagai negara di dunia yang di dasarkan prinsip saling percaya, integrasi ekonomi, dan menghormati keunikan budaya para pihak yang terlibat.¹¹⁷ Gagasan ini sudah dikampanyekan kepada berbagai negara di Asia, Eropa, dan Afrika, khususnya kawasan yang berada di sepanjang jalur tradisional *Silk Road*.

Seperti disinggung pada bagian sebelumnya, kebangkitan Tiongkok tidak saja menimbulkan ancaman bagi negara di sekitarnya, tetapi juga menimbulkan peluang, khususnya peluang kerja sama di bidang ekonomi. Tiongkok dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, *Silk Road* yang diinisiasi Tiongkok sesungguhnya dapat menjadi “pintu masuk” pengembangan kerja sama ekonomi antara negara tirai bambu ini dengan negara-negara lain di dunia, khususnya negara-negara yang menjadi bagian dari gagasan *Silk Road*.

Lebih jauh lagi, tawaran kerja sama juga sejatinya tercantum pada Impian Tiongkok (*Chinese Dream*). Dalam cita-cita atau Impian Tiongkok terkandung semangat membangun perdamaian, pembangunan, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Aksi kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memberi keuntungan kepada rakyat Tiongkok semata, tetapi juga memberi keuntungan kepada rakyat di wilayah lain di dunia. Dengan demikian, konsep kebangkitan Tiongkok dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk

117 Zhang Huaguang dan Luan Jianzhang, *Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21 st-Century Maritime Silk Road*, (Beijing: Foreign Language Press & Co., 2013), 9.

kemaslahatan masyarakatnya sendiri, tetapi diharapkan juga untuk masyarakat di negara lain. Oleh karena itu, untuk terwujudnya cita-cita kerja sama pembangunan ini, Pemerintah Tiongkok mencanangkan dan mengampanyekan *Belt and the Road Initiative*.

Dalam rangka mewujudkan *the Belt and Road Initiative*, Pemerintah Tiongkok melakukan sejumlah langkah strategis. Langkah-langkah strategis itu meliputi hal-hal berikut, yaitu: (1) mempromosikan koordinasi kerja sama dengan pemerintah negara-negara yang akan menjadi mitra kerja sama; (2) menyiapkan sarana untuk konektivitas Tiongkok dengan negara-negara yang menjadi mitra kerja sama di kawasan sub regional Asia, Eropa, dan Afrika; (3) mengatasi kendala perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan negara-negara mitra kerja sama; (4) memperkuat kerja sama keuangan yang terintegrasi antara lain dilakukan melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB); BRICS New Development Bank, lembaga keuangan Shanghai Cooperation Organization (SCO); dan (5) merajut persahabatan rakyat Tiongkok dengan rakyat di berbagai mitra kerja sama melalui sejumlah program, yaitu antara lain kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan jurnalistik.¹¹⁸ Dengan demikian, Pemerintah Tiongkok menyiapkan struktur tertentu untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam *the Belt and the Road Initiative*.

Untuk membangun *One Belt One Road* dan *Maritime Silk Road*, Tiongkok lebih lanjut juga mengembangkan mekanisme kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Kerja sama bilateral dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman atas *pilot project* kerja sama bilateral antara Tiongkok dan sejumlah negara. Hanya saja yang perlu diwaspadai kehadiran Tiongkok dalam proyek kerja sama yang disepakati yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan pada mitranya. Hal ini antara lain diakibatkan oleh keterlibatan Tiongkok dalam proyek kerja sama tersebut secara total, yaitu terlibat mulai dari *Joint Committee*, *mixed committee*, *coordinating committee*, *steering committee*, hingga *management committee*.¹¹⁹ Artinya, Tiongkok

118 Huaguang dan Jianzhang, *Vision and Action*, 9.

119 Huaguang dan Jianzhang, *Vision and Action*, 9.

dinilai sangat ikut campur tangan dalam pelaksanaan proyek kerja sama dengan mitranya. Dengan pola keterlibatan demikian, bukan tidak mungkin jika Tiongkok juga dapat mendikte proses pengambilan keputusan terkait dengan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, negara mitra perlu mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan MOU kerja sama yang isinya dapat menjamin kepentingan nasionalnya dengan meminimalisasi keterlibatan Tiongkok terlalu jauh dalam proyek-proyek kerja sama tersebut.

Selain kerja sama bilateral tersebut, Pemerintah Tiongkok juga mendukung sejumlah kerja sama regional dan multilateral melalui kelembagaannya, seperti misalnya SCO, ASEAN + 1, APEC, *Asia Cooperation Dialogue*, *Boau Forum for Asia*,¹²⁰ *China-ASEAN Expo*, *the Silk Road International Culture Expo*, *International Summit Forum on the Belt and Road Initiative*, *Silk Road International Film Festival*, *Silk Road International Book Fair*. Kerja sama tersebut merupakan gambaran Tiongkok melakukan langkah-langkah penting dalam rangka mewujudkan “rencana besarnya” untuk negara maju.

Untuk melicinkan jalan menuju cita-citanya tersebut, Presiden Xi Jinping bahkan tidak ragu mencanangkan model “diplomasi tingkat tinggi” (*Head of state diplomacy*). Maksudnya adalah diplomasi yang dilakukan oleh para pimpinan negara agar Tiongkok memiliki jaringan kerja sama yang luas dengan berbagai negara di dunia dalam beberapa dekade mendatang.¹²¹ Diplomasi ini tentu untuk saja untuk mendukung *the Belt and Silk Initiative* karena tidak semua negara mudah diyakinkan oleh Tiongkok untuk mendukung begitu saja rencana-rencana negara tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok berpandangan pada kasus-kasus tertentu kepala negara dipandang perlu untuk turun tangan melakukan langkah-langkah diplomasi guna mewujudkan kepentingan nasionalnya. Keseluruhan ilustrasi ini sebagai gambaran bahwa Tiongkok sangat serius dalam mewujudkan rencananya, sampai-sampai kepala negara perlu terlibat aktif dalam diplomasi.

120 BOAU Forum tahun 2020 dilaksanakan 24–27 Maret dengan tema.” A World in Change: Bond Together for a Shared Future.” diakses pada 30 Oktober 2020, <http://english.boauforum.org/en/index.html>.

121 Zhang, “China’s Foreign Policy,” 8.

Terkait dengan Indonesia, Tiongkok berpandangan bahwa negara ini memiliki posisi strategis dalam mewujudkan *Silk Road*. Hal ini dipahami sebagai komitmen Tiongkok untuk menggali nilai-nilai sejarah dan kebudayaan yang terkandung dalam rute perdagangan *Silk Road* di masa lalu dan kesadaran untuk memperluas persahabatan Tiongkok dengan negara-negara tetangga.¹²² Guna mewujudkan komitmen itu, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan ke ASEAN tahun 2013, dan Indonesia adalah negara pertama yang dikunjunginya. Pada kesempatan itu, Xi Jinping menandatangani kemitraan strategis dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyempatkan diri berpidato di hadapan anggota DPR-RI. Pidato ini punya makna tersendiri bagi Tiongkok dan masyarakat internasional. Makna yang ingin disampaikan bahwa Indonesia diharapkan menjadi mitra penting bagi negara tersebut dalam membangun kembali jalur perdagangan *Silk Road* yang sempat jaya di masa lalu.

Kerja sama ini tampaknya berlanjut, apalagi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki program pengembangan sumber daya laut yang dikenal dengan Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia adalah “gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.”¹²³ Sementara itu, Tiongkok memandang *Silk Road* dan Poros Maritim Dunia bisa bersinergi.¹²⁴ Indonesia bisa mendukung program *Silk Road*, sebaliknya Tiongkok juga bisa mendukung program Poros Maritim Dunia. Kedua program mengandung persamaan kepentingan sehingga kerja sama untuk saling mendukung program masing-masing menjadi suatu keniscayaan. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran kritis atas rencana kerja sama Tiongkok- Indonesia ini juga berkembang di kalangan masyarakat.

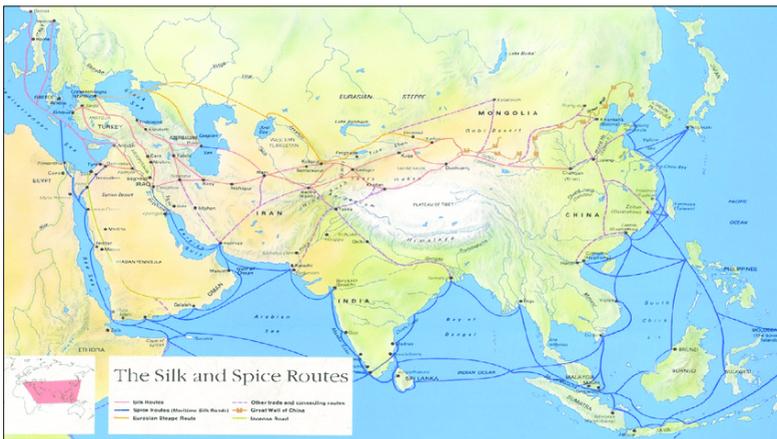
122 Shannon Tiezzi, “China Silk Road Vision Revealed,” *The Diplomat*, 9 Mei 2014, <https://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/>

123 “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” diakses pada 27 Juli 2016, <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>.

124 Wawancara Tim Polugri dengan Kosuler Politik Tiongkok, Kedutaan Tiongkok di Jakarta pada tgl.10 Juni 2016



Gambar 2.1 Peta Rute Perdagangan *Silk Road* dan Rute Perdagangan Lain.¹²⁵



Gambar 2.2 Peta Rute Perdagangan *Silk Road* dan Jalur Rempah-Rempah¹²⁶

Gambar 2.1 menggambarkan rute perdagangan *Silk Road* dan rute perdagangan lain Tiongkok. Garis tebal adalah rute perdagangan *Silk Road*, sementara garis putus-putus adalah rute perdagangan

125 Wawancara Tim Polugri dengan Kosuler Politik Tiongkok,

lain.¹²⁶ Gambar tersebut merupakan peta rute perdagangan *Silk Road* Tiongkok pada abad ke-2 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-14 Masehi. Ruang lingkup dari rute perdagangan ini meliputi kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, kawasan Teluk Parsi, dan Mediterania. Selanjutnya, jalur ini diteruskan oleh jalur perdagangan lain menuju ke utara sampai ke Eropa Selatan. Selanjutnya kembali menuju ke selatan sampai ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Rute perdagangan ini sampai menembus batas sejumlah negara dari empat penjuru angin, yaitu berawal dari Timur di kota Xi'an dan kota Lan Zhou di Tiongkok, menuju ke utara sampai ke kota Almaty di Kyrgyztan, lalu menuju ke selatan sampai ke kota New Delhi di India, akhirnya sampai ke Barat ke kota Istanbul di Turki.

Sementara Gambar 2.2 menunjukkan rute jalur perdagangan rempah-rempah yang merupakan bagian dari perdagangan *Silk Road*. Jalur perdagangan rempah-rempah ini menggunakan jalur laut. Jalur perdagangan rempah-rempah ini membentang lebih ke arah selatan dibandingkan jalur *Silk Road* tersebut. Jalur ini dari kota-kota di pantai timur Tiongkok, kota-kota pantai di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia yang meliputi kota-kota pantai di Sumatra, Jawa, Kalimantan, lalu membentang ke barat menuju kota-kota di selatan India, kota-kota di Afganistan bagian selatan, dan merambah terus ke kota-kota di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

Penguatan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok penting terkait dengan kondisi hubungan bilateral ekonomi kedua negara yang menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: soal kontroversi investasi kereta api cepat Jakarta-Bandung Tiongkok, pencurian ikan dan penenggelaman kapal nelayan Tiongkok, dan masuknya pekerja-pekerja Tiongkok ke Indonesia. Tahun 2016, *reshuffle cabinet* dilakukan oleh Jokowi sebagai salah satu cara mengatasi kendala dalam kinerja kerja sama bilateral. Di samping itu, pemerintahan Jokowi juga melakukan reposisi menteri-menterinya. Dalam *reshuffle* ini dan reposisinya, pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan sebagai

126 *Silk Road. Net.Trade & Travel enclypedia*. diakses pada 14 Oktober 2016, <http://www.silkroutes.net/orient/mapsilkroutestrade.htm>,

berikut: (1) Menteri Ignasius Jonan diganti Budi Karya;¹²⁷ (2) Menko Polkam Luhut B. Panjaitan digeser menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya menggantikan Rizal Ramli; (3) Presiden Jokowi juga meminta Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan; (4) Jenderal (Purn). Wiranto dipercaya menjabat Menko Polkam.

3) The Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Seperti disinggung pada bagian sebelumnya bahwa untuk mewujudkan *Belt and Road Initiative*, Tiongkok membentuk lembaga keuangan terintegrasi atau yang disebut *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB). Lembaga ini lahir atas inisiatif Presiden Xi Jinping saat melakukan kunjungan ke Asia Tenggara tahun 2013. Persiapan berdirinya melalui beberapa putaran pertemuan, yaitu pertemuan pertama di Kunming, Tiongkok (2014), kedua di Mumbai, India (2015), ketiga di Almaty, Kazastan (2015), keempat di Beijing (2015), dan kelima di Singapura (2015). Pada pertemuan di Singapura ini akhirnya disepakati berdirinya AIIB.¹²⁸

AIIB bertujuan membangun kerja sama ekonomi antar-berbagai negara. Hal ini meliputi beberapa target, yaitu: (1) terkoneksi jaringan ekonomi berbagai negara; (2) terintegrasi potensi ekonomi sejumlah negara; dan (3) adanya kerja sama antar bank-bank pembangunan multilateral.¹²⁹ Melalui AIIB ini, Tiongkok memanfaatkan keunggulan ekonominya untuk memberdayakan kapasitas ekonomi negara-negara lain. Keberadaan AIIB difokuskan untuk pembangunan beberapa sektor dasar yang merupakan kebutuhan khas negara berkembang. Sektor-sektor itu meliputi beberapa hal yaitu: infrastruktur, energi, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur desa/pertanian, penyediaan

127 Pal/Erd, "Sejarah Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi di Periode 2014-2019," diakses pada 19 Oktober 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5073294/sejarah-reshuffle-kabinet-presiden-jokowi-di-periode-2014-2019>.

128 AIIB. "History of AIIB", diakses pada 22 Agustus 2016., <http://www.aiib.org/html/aboutus/introduction/history/?show=0>, .

129 AIIB, "History"

air bersih/sanitasi, kelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan kawasan urban/logistik. Sektor-sektor ini merupakan sesuatu yang fundamental bagi negara-negara berkembang dimana umumnya belum terkelola dengan baik dan membutuhkan kucuran dana yang besar, di lain pihak negara-negara ini umumnya tidak memiliki sumber dana yang memadai untuk membiayai beberapa sektor pembangunan tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok berpandangan bahwa AIIB menjadi solusi atas masalah yang dihadapi negara-negara berkembang tersebut.

Sejak pertemuan pertama di Kunming tahun 2014, Indonesia dan 21 negara lainnya sudah dinyatakan sebagai calon anggota pendiri AIIB. Selanjutnya, negara-negara tersebut menandatangani keanggotannya dalam AIIB di Beijing pada akhir 2014.¹³⁰ Dengan demikian, Indonesia dan sejumlah negara lainnya resmi menjadi anggota pendiri AIIB yang dipimpin oleh Tiongkok. Ke depan, Indonesia dan sejumlah negara memiliki harapan memperoleh sumber pendanaan baru dalam melakukan pembangunan nasional, khususnya dalam beberapa sektor pembangunan tersebut.

Sementara itu, hubungan Indonesia-Tiongkok juga tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan lembaga ekonomi lainnya, seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Pada tahun 2012, para pimpinan negara-negara ASEAN dan mitra perdagangan bebasnya, yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Jepang, di Kota Phnom Penh, Kamboja, mendeklarasikan dimulainya negosiasi-negosiasi menuju RCEP. Munculnya gagasan ini didasarkan pada rekomendasi para pakar yang mengusulkan perlu kawasan kerja sama ekonomi dan perdagangan bebas di Asia Timur (*East Asia Free Trade Area* /EAFTA dan *Comprehensive Economic Partnership in East Asia*/CEPEA).

Sebagian masyarakat memandang keberadaan RCEP sebagai kerja sama ekonomi alternatif dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP)

130 The Economic Times. "Indonesia to Join China-led Asia Infrastructure Investment Bank", The Economic Times, <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/indonesia-to-join-china-led-asian-infrastructure-investment-bank/articleshow/45048899.cms?from=mdr>

yang jauh lebih dulu berdirinya. TPP adalah perjanjian perdagangan negara-negara di kawasan tepian Samudra Pasifik yaitu Brunei, Chile, Singapura, dan Selandia Baru yang berdiri tahun 2005. Keanggotaannya bertambah luas dengan bergabungnya sejumlah negara, yaitu Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Amerika Serikat, dan Vietnam, pada tahun 2008 sehingga jumlah anggota menjadi 12 negara.

Indonesia sudah menjadi bagian dari RCEP karena menjadi bagian dari ASEAN, tetapi belum menjadi TPP. Seperti diketahui bahwa Indonesia awalnya sudah menyatakan akan bergabung dengan TPP. Saat melakukan lawatan ke AS tahun 2015, Presiden Jokowi sudah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan TPP, tetapi sampai hari ini hal itu belum direalisasi atau diwujudkan secara nyata. Wacana keanggotaan Indonesia di TPP masih mengundang perdebatan. Jika bergabung dengan organisasi ini, Indonesia harus siap mengikuti segala aturan-aturan yang ada secara konsisten, di mana aturan-aturan tersebut belum tentu sejalan dengan realitas sosial ekonomi di Indonesia. Misalnya anggota TPP harus menghormati peraturan tentang HAKI, hak-hak buruh, dan kaidah-kaidah lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Di satu sisi, hal bergabung kepada bisa mendorong masyarakat untuk belajar memperhatikan kaedah-kaedah tersebut. Sementara itu, di sisi lain, ketidaksiapan masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan agar tidak menjadi kendala dalam melakukan kegiatannya dalam wadah TPP.

4) Hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat

Pengembangan pola hubungan Tiongkok-AS tertuang dalam Peta Jalan Konggres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 tahun 2012. Dalam Dokumen ini terdapat prinsip-prinsip hubungan antarnegara besar yang didalamnya tentu saja termasuk pola hubungan Tiongkok-AS, sebagai berikut: (1) *“Equality and mutual trust, (2) Tolerance and learning each other, and (3) Cooperation and win-win result.”* Ini adalah seperangkat prinsip atau norma yang diinginkan oleh Tiongkok ketika berhubungan dengan negara besar. Oleh karena itu, saat Presiden Xi

berkunjung ke AS tahun 2013 dan bertemu dengan Presiden Obama, Xi mengusulkan konsep baru hubungan Tiongkok dan AS di masa datang berdasarkan konsep tersebut.¹³¹

Sementara itu, Tiongkok juga memiliki prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan luar negerinya secara umum, yaitu: “(1) *Mutual respect for sovereignty and territorial integrity*, (2) *mutual non-aggression*, (3) *non-interference in each other’s internal affairs*, (4) *equality and mutual benefit*, and (5) *peaceful coexistence*”.¹³² Apakah negara ini konsisten melaksanakan lima prinsip tersebut atau sebaliknya. Hal ini bisa dilihat dari perilaku politik Tiongkok.

Sebagai ilustrasi perilaku politik Tiongkok bisa dilihat dalam konflik Laut China Selatan. Kapal pengawal pantai lengkap dengan senjatanya berlayar jauh dari pantai di Tiongkok untuk melindungi kapal nelayannya mencari ikan. Salah satu kasus adalah mereka memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tiongkok berpandangan Laut Natuna Utara masuk ke dalam sembilan garis putus-putus. Dalam hal ini, Tiongkok mengklaim kawasan tersebut secara sepihak. Akibatnya, aksi ini menimbulkan insiden dengan Angkatan Laut Indonesia di ZEE dekat Laut Natuna Utara dan ketegangan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia. Perilaku Tiongkok jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Seiring dengan kebangkitannya menjadi negara besar, Tiongkok ingin menjadi kekuatan dominan dan berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Tiongkok berupaya menjadi kekuatan strategis dan disegani di kawasan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan ambisinya Tiongkok harus berhadapan dengan bayang-bayang kekuatan AS,¹³³ negara ini selalu hadir untuk mengimbangi perilaku politik Tiongkok di Asia Pasifik.

Dengan demikian, secara evolusi, Tiongkok membangun perimbangan kekuatan baru di Asia Pasifik untuk melawan hegemoni

131 J. Zhang, “China’s Foreign Policy,” 14.

132 *Keterangan Dasar Republik Rakyat Tiongkok*, 2015, KBRI Beijing

133 Robert G. Sutter, “China’s Rise in Asia-Promise, Prospect and Implication for United States of America”, *Asia-Pacific Center for Security Studies*, No. 5 (2005), 5.

AS yang sudah lama menjadi hegemon di kawasan ini, walaupun hal ini tentu saja tidak diakui dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang tidak mengherankan jika AS selalu hadir untuk mengimbangi Tiongkok dalam berbagai konflik kawasan, yaitu di Laut China Selatan, di Selat Taiwan, di Laut Diaoyu/Senkaku, dan di Semenanjung Korea. Keterlibatan AS tersebut mengindikasikan negara adi daya ini sangat peduli dengan perkembangan perilaku Tiongkok. Fakta Tiongkok yang berambisi menjadi kekuatan hegemon dunia dan ideologinya yang tidak selaras dengan “Barat” diyakini berpotensi menjadi ancaman. Apalagi jika keyakinan ini diprovokasi oleh tesis Huntington tentang *the clash of civilization*, di mana koalisi Islam dan *Confucian* merupakan ancaman fundamental bagi “Barat.”¹³⁴

5) Hubungan Tiongkok dan ASEAN

Dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, kawasan Asia Tenggara memiliki kedudukan penting. Oleh karena itu, Tiongkok membina hubungan lebih dekat dengan ASEAN. Tiongkok sangat berharap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara bersedia untuk bekerja sama dalam kerangka konsep “masyarakat sepenanggungan” seperti dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesungguhnya mencerminkan maksud negara tirai bambu ini untuk membentuk tatanan regional bercorak Tiongkok sentris.¹³⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa negara tirai bambu ini berupaya mengubah tatanan regional yang ada, di mana kawasan ini sebelumnya bisa dibilang bercorak ASEAN sentris atau AS sentris.

Walaupun demikian, upaya Tiongkok sentris tersebut secara tidak langsung mengancam eksistensi ASEAN. Seperti diketahui bahwa sejumlah negara ASEAN yang berada di kawasan IndoChina, terkecuali Vietnam, memiliki hubungan relatif dekat dengan Tiongkok, kalau tidak ingin dikatakan berada di bawah pengaruh negara tersebut. Akibatnya, sering kali Kamboja dan Laos menjadi alat kepentingan Tiongkok dalam berbagai isu internasional. Misalnya saja ASEAN

134 Xia, “China’s Threat or a Peaceful,” 1.

135 Zhang, “China’s Foreign Policy,” 12.

tidak bisa menyampaikan sikapnya dalam konflik Laut China Selatan karena negara-negara anggota ASEAN yang berada di bawah pengaruh Tiongkok kerap kali memveto suatu rencana komunikasi bersama ASEAN tentang isu tersebut. Kondisi ini membuat ASEAN sulit untuk memiliki sikap bersama dalam isu tersebut sehingga merugikan ASEAN dalam upaya diplomasi, bahkan bisa memicu perpecahan di tubuh ASEAN.

Berpijak pada kondisi tersebut, pertanyaannya apakah saat ini mekanisme konsensus di ASEAN masih relevan? Sesuatu yang tidak adil kerap terjadi dalam proses pengambilan keputusan ketika sikap minoritas mengalahkan sikap mayoritas. ASEAN sudah waktunya untuk merevisi mekanisme konsensus dan menggantikannya dengan mekanisme veto dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini perlu dilakukan sejalan dengan dinamika sosial politik masyarakat ASEAN yang sudah banyak mengalami perubahan sejak berdirinya tahun 1967. Mekanisme veto dipandang lebih realistis dengan kebutuhan ASEAN untuk bergerak cepat dan keluar dari problematikanya yang semakin kompleks.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian bahwa Tiongkok aktif berdiplomasi dan berpotensi menjadi hegemoni di Asia Tenggara. Dengan kekuatan ekonomi dan politiknya, Tiongkok memperluas pengaruhnya melalui berbagai forum diplomasi di kawasan ini. Beberapa fakta terkait dengan diplomasi Tiongkok, tahun 1992 berdiri *Greater Mekong Subregion-Economic Cooperation Program (GMS-ECP)* yang terdiri dari Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan, meningkatkan daya saing, dan menjaga persatuan (harmoni) di lembah Sungai Mekong. Organisasi regional ini sebagai instrumen Tiongkok melakukan diplomasi dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di kawasan ini. Disusul pada tahun 1995 berdiri Komisi Sungai Mekong (*the Mekong River Commission/MRC*) yang bertujuan mempromosikan pemanfaatan sungai Mekong dengan memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan. Secara formal, Komisi ini bertujuan untuk kepentingan lingkungan hidup, namun di balik itu Tiongkok tentu

punya target-target kepentingan nasional yang hendak dicapainya. Komisi ini beranggotakan Laos, Kamboja, Vietnam, dan Thailand, serta Tiongkok berperan menjadi mitra dialog dari Komisi ini. Walaupun tidak menjadi anggota, keberadaannya sebagai mitra dialog cukup strategis untuk memberi arah kepada Komisi ini dan kepada perilaku politik anggotanya. Oleh karena itu, guna mengimbangi diplomasi Tiongkok di daerah aliran Sungai Mekong, 1996 ASEAN mendirikan *ASEAN Mekong Basin Development Cooperation* (AMBDC). Indonesia sebagai negara yang “dituakan” di ASEAN punya kepentingan lahirnya AMBDC karena untuk mengimbangi diplomasi dan kepemimpinan Tiongkok yang semakin besar di Asia Tenggara. Jika ini tidak dibendung, hal ini punya pengaruh buruk pada ASEAN.

Sementara itu, peran Indonesia di ASEAN di era Presiden Jokowi terlihat relatif menurun dibanding era Presiden SBY.¹³⁶ Apalagi jika dibandingkan peran Indonesia di ASEAN pada masa Orde Baru sangat besar kontribusinya kepada ASEAN. Saat itu Indonesia banyak menghasilkan prakarsa/insiatif diplomasi bersifat strategis dan punya kontribusi nyata pada permasalahan internal di ASEAN maupun kepada masyarakat internasional. Walaupun demikian, pandangan tersebut terbantahkan dengan inisiatif Indonesia yang mengajukan konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Dalam hal ini, AOIP diusulkan oleh Indonesia agar menjadi konsep ASEAN dalam merespons diskursus tentang kerja sama Indo-Pasifik. Di samping itu, Indonesia bersama ASEAN juga aktif membantu konflik di Myanmar, yaitu antara Pemerintah dan etnis Rohingya, dengan mengajukan resolusi konflik yang dikenal dengan *the Fifth Concensus*. Konflik ini menyebabkan pelanggaran HAM dan menimbulkan gelombang pengungsi ke negara lain, termasuk Indonesia.¹³⁷

136 Darwis, dan B. A. Putra, “The decline of Indonesia’s leadership role in ASEAN: Systemic and domestic constraints of Jokowi’s foreign policy alterations,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 1 (2022): 115–126. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0010>

137 “Konflik di Myanmar Makin Tidak Manusiawi, Anak-Anak Dibantai Secara Keji.” *JPNN.com*, 25 Desember 2021, <https://www.jpnn.com/news/konflik-di-myanmar-makin-tidak-manusiawi-anak-anak-dibantai-secara-keji?page=2>.

E. PERUBAHAN PERILAKU POLITIK DALAM MERESPONS SISTEM INTERNASIONAL

Arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok adalah perubahan perilaku politik dalam merespons sistem internasional dari kooperatif kepada asertif atau sebaliknya. Perubahan perilaku ini sebagai dampak perkembangan politik domestik; yakni komunikasi politik antar aktor; konstelasi elite, struktur baru pada sentra kekuasaan yang selanjutnya bermuara pada kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Tiongkok dari waktu ke waktu mengalami perubahan, yaitu terkadang bersifat kooperatif, tetapi pada waktu yang lain bersifat non-kooperatif. Perubahan ini sejalan dengan dinamika internal dan eksternal negara tersebut. Arah baru kebijakan luar negeri di era Presiden Xi Jinping memiliki ciri, yaitu bersikap asertif khususnya di Laut China Selatan dan mengembangkan kerja sama dengan banyak negara lain, terutama negara berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Arah baru kebijakan luar negeri Tiongkok lebih banyak ditentukan oleh para elite partai komunis Tiongkok bersama-sama dengan Presiden. Pimpinan tertinggi Tiongkok, khususnya mereka yang tergabung di elite PKT, sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Tiongkok. Proses pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri di Tiongkok ditentukan oleh Komite Tetap Polit Biro dan Komisi Militer di mana keduanya dipimpin oleh Xi Jinping.

Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping semakin meningkat ambisinya untuk menjadi pengimbang Amerika Serikat dalam percaturan politik di Indo-Pasifik dan dunia. Kebangkitan Tiongkok membuat negara ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Di lain pihak, AS dewasa ini sedang mengalami kemuduran ekonomi. Pergeseran kekuatan ekonomi ini berpengaruh pada perimbangan kekuatan politik Tiongkok dan AS. Pasca-Perang Dingin, Tiongkok ingin tampil menggantikan Uni Soviet yang menjadi penyeimbang AS di masa lalu. Tiongkok di era Presiden Xi Jinping berharap menjadi bagian dari penyeimbang kekuatan baru (*new balance of powers*) pasca-Perang Dingin setidaknya di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, kehadiran

kekuatan Tiongkok pada konflik di Laut China Timur maupun Laut China Selatan sesuatu yang niscaya atau tidak terelakkan dan sulit untuk dibendung.

Dinamika Faktor Domestik dalam Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok

Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok sangat erat kaitannya dengan perkembangan situasi domestik kedua negara. Jika dilihat dari perspektif Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok, baik yang berkaitan antarnegara secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam negeri, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Faktor statis merupakan faktor-faktor yang sifatnya tidak bisa atau tidak mudah berubah. Sedangkan faktor dinamis adalah hal-hal yang bersifat non statis atau dapat berubah dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian tim Politik Luar Negeri LIPI pada tahun 2007 menyebutkan bahwa Pancasila, UUD 1945, dan doktrin Politik Luar Negeri Bebas Aktif dapat dikategorikan determinan statis atau tetap. Sedangkan determinan dinamis atau non-statis lebih merupakan faktor yang tingkat kestabilannya lebih rendah seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, militer, ekonomi, perilaku pembuat kebijakan, modalitas, dan lain-lain.¹³⁸

138 G. Wuryandari, ed., *Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007), 18.

Faktor-faktor dalam negeri yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok yang senantiasa diwarnai konflik dan kerja sama. Salah satu gambaran dari pentingnya unsur domestik ini dapat dilihat dari awal mula terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pada tahun 1950. Keputusan kedua negara untuk menjalin hubungan diplomatik pada saat itu tidak hanya didasari pada kepentingan nasional untuk mencari pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia, tetapi juga ada faktor persepsi internal para pejuang kemerdekaan Indonesia mengenai persamaan aspirasi anti-kolonialisme dan sejarah perjuangan kemerdekaan.¹³⁹ Persepsi personal yang positif terhadap Tiongkok juga dimiliki Presiden Soekarno dalam memahami proses kepemimpinan Mao Zedong di Tiongkok.

Analisis dalam bab ini membahas faktor domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi Tiongkok. Pembahasan akan difokuskan pada masa reformasi tanpa meninggalkan konteks historis dari pengaruh faktor-faktor domestik di era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Hal ini dikarenakan dua era kepemimpinan tersebut merupakan masa-masa penting dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Kepemimpinan Soekarno menjadi tanda masa awal dibukanya hubungan diplomatik (1950–1967), sedangkan selama 32 tahun era kepemimpinan Soeharto terjadi dinamika pembekuan hubungan pada tahun 1967 hingga normalisasi hubungan kedua negara pada tahun 1990. Oleh karena itu, pembahasan menganalisis bagaimana faktor-faktor domestik tersebut dapat dikaitkan secara relevan dengan kebijakan politik Indonesia terhadap Tiongkok di era Reformasi. Lebih lanjut, argumentasi utama yang dibangun dalam tulisan ini adalah faktor-faktor domestik ini bisa berperan positif maupun negatif terhadap perkembangan hubungan Indonesia-Tiongkok.

139 B. Soeharto, dan S. S. Gitosardjono, *Pendobrak Kebekuan Hubungan Diplomatik RI-RRT* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 4.

Tulisan ini menyoroti faktor domestik dalam tiga tingkat analisis aktor, yakni di tingkat pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Di dalam setiap tingkatan terdapat dinamika masing-masing yang melibatkan unsur sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. Analisis aktor dan perilakunya ini menjadi penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok karena pada kenyataannya, banyak momentum diplomatik yang terjadi dalam konteks peran aktor tertentu pada kondisi politik domestik yang berbeda-beda.

A. KONTEKS SEJARAH POLITIK DOMESTIK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK

Pemahaman terhadap konteks historis dalam perpolitikan Indonesia menjadi titik mula yang krusial dalam mengkaji lebih dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Hal ini karena dinamika yang terjadi dalam beberapa periode kunci sejarah politik Indonesia berimplikasi terhadap bagaimana Indonesia memandang Tiongkok dan pendekatan yang digunakan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Sub-subbab ini akan menjabarkan bagaimana konteks sejarah politik Indonesia, khususnya di tingkat domestik, pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap dinamika perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok.

1. Era Soekarno dan Soeharto: Warisan Cara Pandang terhadap Hubungan Indonesia-Tiongkok

Hubungan Indonesia dan Tiongkok merupakan salah satu fitur utama dalam politik luar negeri Indonesia sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Beberapa peneliti, seperti Hong Liu misalnya, menyoroti pengaruh persepsi Soekarno tentang Tiongkok terhadap sistem perpolitikan di Indonesia. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia sebelum tahun 1956, kedekatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia

dan Tiongkok terjalin pada level personal dan kenegaraan karena adanya kedekatan visi nasionalis dan aspirasi independensi bangsa.¹⁴⁰ Eksistensi Tiongkok sebagai negara nasionalis di mata Soekarno sangat krusial bagi strateginya untuk mengonstruksikan bentuk baru sistem perpolitikan di Indonesia yang dinilai tidak cocok mengadopsi demokrasi parlementer.

Kecenderungan Soekarno untuk lebih tertarik pada model sistem politik dan pembangunan di Tiongkok daripada Amerika Serikat atau Rusia tidak terlepas dari pemahamannya tentang ide Pan-Asianisme yang memosisikan negara-negara di Timur sebagai *moral leader* yang lebih tepat bagi dunia.¹⁴¹ Meskipun demikian, pandangan Soekarno ini tidak lantas menghilangkan persepsi ancaman terhadap Tiongkok dan diaspora Tionghoa (*overseas Chinese*) di kalangan elite politik dan militer lainnya. Dalam konteks Malaysia, misalnya, banyak figur politik selain Presiden (dari kalangan militer maupun politisi moderat seperti Mohammad Hatta) yang meyakini bahwa kesetiaan etnis Tionghoa akan selalu melekat pada Tiongkok saat itu sehingga penggabungan Sarawak dan Sabah ke Malaysia pasti akan mengarah pada penguatan luar biasa dari posisi penduduk China di kedua wilayah Borneo tersebut.¹⁴² Hal ini berarti akan ada dominasi China di Malaya sehingga berpotensi mengancam kepentingan pertahanan dan keamanan jangka panjang dari Indonesia. Persepsi terhadap China ini kemudian turut mewarnai dinamika pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Narasi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapatkan dukungan dari Tiongkok segera terakumulasi dengan sentimen publik terhadap etnis Tionghoa dan persepsi ancaman politik keamanan dari dominasi Tiongkok sehingga berdampak pada relasi Indonesia-Tiongkok yang memburuk pada masa pemerintahan Orde Baru.

140 H. Liu, "Constructing a China Metaphor: Soekarno's Perception of the PRC and Indonesia's Political Transformation," *Journal of Southeast Asian Studies* 28, no. 1 (1997): 31. <https://doi.org/10.1017/S0022463400015162>

141 Liu, "Constructing a China," 34.

142 G. McT. Kahin, "Malaysia and Indonesia," *Pacific Affairs* 37, no. 3 (1964): 264–265.

2. Reformasi dan Transisi Demokrasi

Era reformasi merupakan titik balik dari sejarah perpolitikan Indonesia karena pada era inilah terjadi transisi demokrasi besar-besaran yang berdampak pada kultur politik di Indonesia. Pasca Orde Baru, iklim politik yang dibangun hingga kemudian memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri adalah terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi publik untuk memberikan penilaian dan kritik, meningkatkan jumlah aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta situasi ekonomi dan politik domestik.¹⁴³ Kondisi ini berdampak pada meningkatnya tuntutan transparansi baik dari *civil society* maupun di dalam tubuh lembaga eksekutif dan legislatif sendiri.

Pada masa transisi demokrasi dan dengan adanya instabilitas politik domestik, tentu tidak mudah bagi pembuat keputusan untuk menyusun prioritas kepentingan nasional sebagai tujuan utama dari pelaksanaan politik luar negerinya. Yani telah mengkaji adanya perubahan situasi domestik dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia serta kecenderungan orientasi politik luar negerinya secara umum.¹⁴⁴ Yani lebih lanjut menyebutkan ada tiga konteks domestik utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu nasionalisme, perkembangan ekonomi, dan politik domestik. Pada awal masa reformasi, Indonesia masih mencari bentuk stabilitas politiknya sendiri. Dari faktor nasionalisme, Indonesia harus menyelesaikan persoalan separatisme dan disintegrasi nasional. Sedangkan dari konteks perkembangan ekonomi, keterpurukan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Habibie baru mulai teratasi pada masa pemerintahan Megawati pada tahun 2001-2004. Terakhir, perubahan politik domestik juga menjadi signifikan dalam proses reorientasi politik luar negeri Indonesia karena era reformasi merupakan titik balik dari menurunnya peran militer dalam perpolitikan Indonesia, penerapan sistem multipartai, hingga mencapai bentuk pelaksanaan demokrasi sipil. Hal ini berdampak pada semakin bervariasinya aktor dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia.

143 Y. M. Yani, "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy," *Jurnal Sosio Humaniora* 11, no.1 (2009): 4.

144 Y. M. Yani, "Change and Continuity", 4.

B. SUMBER-SUMBER INTERNAL SEBAGAI INPUT DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK

Dalam studi hubungan internasional, faktor domestik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan luar negeri adalah pemenuhan kepentingan nasional dan tujuan negara yang merupakan refleksi dari situasi domestiknya. Berdasarkan teori Rosenau tentang sumber utama sebagai input dalam politik luar negeri, sebagian besar mencakup sumber-sumber internal yakni sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), sumber pemerintahan (*governmental sources*), dan sumber masyarakat (*societal sources*).¹⁴⁵ Namun, teori Rossenau ini belum memasukkan unsur pelaku bisnis secara komprehensif dan sebagai satu unsur sumber input yang signifikan. Padahal, dalam konteks hubungan dengan Tiongkok, pelaku bisnis memiliki peran yang sangat penting. Aktivitas para pengusaha dalam sektor swasta memberikan dinamika tersendiri dalam relasi Indonesia-Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi, di mana para pelaku usaha ini di satu sisi dapat mendukung terciptanya hubungan ekonomi yang baik,¹⁴⁶ sementara di sisi lain mereka justru malah memunculkan persepsi tersendiri tentang ancaman Tiongkok terhadap bisnis di Indonesia.¹⁴⁷

1. Figur Kepemimpinan Nasional/Idiosinkretik

Politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh figur pemimpin dalam menghadapi situasi domestik tertentu. Rosenau menjelaskan faktor ini merupakan salah satu input kebijakan luar negeri yang

145 J. N. Rosenau, G. Boyd, dan K. W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), 18.

146 J. M. van der Kroef, "Normalizing" Relations with China: Indonesia's Policies and Perceptions," *Asian Survey* 26, no. 8 (1986): 922.

147 Y. Fukuoka, "Indonesia-China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges", dalam *Chinese Global Production Networks in ASEAN*, Springer International Publishing, ed. Y. Kim (Switzerland: Springer 2016), 53-75.

menyoroti karakteristik elite politik dilihat dari nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian yang berpengaruh terhadap perilakunya terhadap kebijakan luar negeri. Selain itu, persepsi seorang pemimpin nasional terhadap kepentingan nasional dan konstelasi hubungan internasional juga mencerminkan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin nasional tersebut. Hal ini mengakibatkan arah dan desain kebijakannya sering kali mencerminkan keyakinan dan pandangan dari para pembuat kebijakan.¹⁴⁸ Secara lebih khusus, pemerintah yang berkuasa pada periode waktu tertentu di suatu negara akan menentukan prioritas kepentingan nasional yang harus dicapai sebagai tujuan dari pelaksanaan kebijakan luar negeri.¹⁴⁹

Pemerintah berkuasa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses perumusan politik luar negeri karena adanya alasan keterbatasan dalam situasi krisis. Sebagaimana dijelaskan oleh Nester, salah satu dari tiga jenis dasar kebijakan luar negeri adalah *crisis policy making*.¹⁵⁰ Pengambilan keputusan kebijakan pada situasi mendadak dan krisis sering kali harus dilakukan dalam waktu singkat namun harus merespons permasalahan dengan cepat dan tepat. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya keterlibatan pihak-pihak yang bisa ikut berkontribusi. Proses perumusan kebijakan hanya bisa melibatkan pimpinan politik dan elite politik yang ada di lingkaran kekuasaannya sehingga ruang interaksi politik menjadi lebih sempit.

Hubungan diplomatik yang terjalin dengan romantis pada masa Soekarno tidak terlepas dari ideologi politik yang diyakini Soekarno akan memajukan Indonesia pasca kemerdekaan. Indikasi romantisme hubungan masa Soekarno dapat dilihat sejak hubungan diplomatik resmi dibuka pada tahun 1950. Secara lebih spesifik, periode bulan madu dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok terbilang singkat, yakni selama tahun 1963 – 1965, salah satunya ditandai dengan adanya

148 Y. M. Yani, "Change and Continuity", 4.

149 M. Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), 184.

150 S. Mushtaq, dan I. A. Choudhry, "Conceptualization of Foreign Policy an Analytical Analysis", *Berkeley Journal of Social Science* 3, (2013): 5.

Poros Jakarta-Peking. Dalam periode ini, kedua negara membuka perwakilan diplomatik di masing-masing negara. Kedekatan hubungan ini sering kali dikaitkan dengan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia saat itu. Pada masa pemerintahan Soekarno saat itu, Indonesia berada pada fase pembuktian diri terhadap dunia internasional demi menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan di dunia internasional. Rizal Sukma menjelaskan kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok pada saat itu sangat lekat dengan motif ambisi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno pascakeluar dari PBB:

It was only during 1963–1965 that Indonesia and China enjoyed a relatively close relationship.... During this period, Indonesia withdrew unilaterally from the United Nations (UN) which affected its international standing; a decision to which the government in Beijing—still outside the body—enthusiastically lent its support. President Soekarno was then in sole effective charge of Indonesia's foreign policy. He won China's support for an ambitious plan to set up a rival body called the Conference of New Emerging Forces (CONEFO) as opposed to the UN which was represented as serving the interests of the Old Established Forces (OLDEFOS) of imperialism, colonialism and neo-colonialism. For President Soekarno and his communist supporters, the diplomatic liaison with China was seen as a way of reinforcing Indonesia's identity as an anti-imperialist and anti-colonialist state, as well as of strengthening Soekarno's legitimacy at home as the Pemimpin Besar Revolusi Indonesia (the Great Leader of Indonesia's Revolution).¹⁵¹

Dukungan diplomatik yang diberikan Tiongkok pada saat itu sangat tepat waktu bagi Soekarno yang sedang memerlukan dukungan negara lain untuk pembuktian diri dalam melawan neokolonialisme pasca diterimanya Malaysia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

151 R. Sukma, *Indonesia and China: The Politics of Troubled Relationship* (London: Routledge, 1999), 2.

Di sisi lain, kepemimpinan Soeharto dan ideologi pembangunannya pada masa Orde Baru ternyata sangat berpengaruh terhadap sikap yang diambil Indonesia dalam menjalin hubungan luar negeri dengan Tiongkok. Ada kebutuhan untuk membangun identitas sebagai rezim yang anti-komunis. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi Soeharto dalam meningkatkan posisi tawarnya terhadap negara Barat. Proses pengambilan keputusan normalisasi hubungan dengan Tiongkok di era Orde Baru dapat menjadi contoh yang tepat untuk menggambarkan besarnya pengaruh elite politik dalam lingkaran pemerintahan terhadap kebijakan luar negeri yang diambil. Selama lebih dari dua dekade, isu normalisasi hubungan dengan Tiongkok menjadi perdebatan internal yang berdampak pada terhambatnya proses perbaikan relasi diplomatik kedua negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya kekhawatiran ancaman terhadap stabilitas internal dan keamanan nasional apabila Indonesia menjalin hubungan yang dekat lagi dengan Tiongkok. Para elite politik mencoba menjustifikasi kekhawatiran ini dengan membangun pernyataan tegas terkait normalisasi hubungan Jakarta-Beijing yang dianggap masih terlalu dini, belum mendesak, atau belum perlu.¹⁵² Di sisi lain, ada ambisi Soeharto sebagai pemimpin nasional yang ingin merevitalisasi posisi Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok sehingga dukungan dari Tiongkok sebagai salah satu kekuatan negara yang juga tengah memperjuangkan kebangkitan negara-negara Asia menjadi sangat signifikan.¹⁵³

Perbedaan pendekatan antara Soekarno dan Soeharto dalam memandang hubungan luar negeri dengan Tiongkok sebagai negara mitra juga dapat dilihat dari persepsi keduanya dalam menghadapi dilema bantuan asing versus independensi yang dialami kedua pemimpin di era berbeda tersebut.¹⁵⁴ Bagi Soekarno, bantuan asing harus digunakan untuk menyokong citra Indonesia di mata

152 R. Sukma, *Indonesia and China*, 2.

153 Robert C. Horn, "Indonesia's response to changing big power alignments," *Pacific Affairs* 46, no. 4 (1973): 515–533. <https://doi.org/10.2307/2755326>

154 F. B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Soekarno to Soeharto* (Singapura: Equinox Publishing Edition, 2007), 242.

internasional sebagai negara yang tengah berkembang menjadi salah satu negara berpengaruh di dunia. Di sisi lain, Soeharto menghadapi dilema antara menerima bantuan asing untuk mendukung rencana pembangunan ekonomi besar-besaran dengan ketergantungan terhadap negara Barat. Selain itu, faktor ideologis juga membuat kedua pemimpin negara tersebut membawa politik luar negeri Indonesia ke arah yang berbeda. Soekarno membangun kedekatan hubungan dengan Tiongkok karena adanya kecenderungan ideologi kiri (Sosialisme-Komunis) dalam pemikiran politiknya. Sementara Soeharto, dalam rangka menghapus jejak-jejak kepemimpinan sebelumnya, bersikeras membangun citra negara antikomunis sehingga hubungan yang dekat dengan Tiongkok bukan merupakan pilihan strategis secara politik.

Perubahan kondisi domestik terbukti secara signifikan memengaruhi politik luar negeri Indonesia. Perubahan kepemimpinan nasional sejak Presiden Soekarno (1945-1967) hingga Joko Widodo (2014–sekarang) jelas memperlihatkan adanya perubahan dalam arah, agenda, dan bahkan substansi politik luar negeri Indonesia. Masing-masing kepemimpinan memiliki perbedaan dalam gaya dan pola sendiri-sendiri. Perubahan gaya dan pola tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas perubahan yang terjadi pada lingkungan domestik, baik dalam aspek isu-isu domestik yang berkembang maupun agenda utama untuk menyikapi isu-isu yang berkembang.¹⁵⁵

Pemimpin nasional juga sangat berpengaruh dalam menentukan seberapa besar konstelasi politik internasional dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pertimbangan ini dibuat tidak hanya melihat perkembangan situasi politik internasional pada masa tertentu, namun juga sangat tergantung pada bagaimana pemimpin nasional melihat prioritas kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia di tingkat internasional, bagaimana pemimpin tersebut memproyeksikan visi dan misi nasional dalam suatu rumusan orientasi politik luar negeri, serta pengaruh karakteristik pemimpin nasional itu sendiri. Anwar

155 G. Wuryandari, ed., *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 239–240.

bahkan berpendapat bahwa dalam politik luar negeri Indonesia, pertimbangan domestik sering kali menjadi prioritas dibandingkan dengan pertimbangan regional atau internasional.¹⁵⁶ Hal ini bisa dilihat dari jejak historis perubahan fundamental dalam rezim pemerintahan, seperti perubahan kebijakan garis kiri Soekarno ke kebijakan anti-komunis Soeharto, yang memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia secara signifikan.¹⁵⁷ Perubahan fundamental terhadap orientasi politik luar negeri Indonesia juga terjadi pada masa dimana situasi domestik Indonesia telah cukup stabil. Peralihan kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014) ke era kepemimpinan Joko Widodo menunjukkan perubahan signifikan pula dalam arah politik luar negeri secara umum maupun secara khusus terhadap Tiongkok.

Pada masa pemerintahan SBY, pendekatan yang dipilih adalah memperluas *exposure* Indonesia di mata internasional melalui keterlibatan aktif di berbagai forum dan aktivitas internasional, misalnya representasi di sidang-sidang PBB dan peningkatan keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Tidak hanya itu, SBY juga mengawal perumusan jargon-jargon yang menunjukkan pendekatan *outward-looking* Indonesia, seperti misalnya "million friends, zero enemy". Hal ini bisa terjadi karena SBY sebagai pemimpin nasional sedari awal telah memiliki citra kepiawaian dalam urusan hubungan luar negeri serta karakteristiknya lekat dengan upaya penjagaan citra diri yang baik di mata publik. Hal ini terefleksikan jelas dalam orientasi politik luar negerinya yang terkesan fokus pada menjaga citra Indonesia di mata internasional.

Pada saat kekuasaan berpindah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014, arah politik luar negeri Indonesia tentu sangat bergantung pada bagaimana Jokowi memandang posisi Indonesia dalam konstelasi internasional, serta bagaimana mengadaptasikan karakter kepemimpinan nasionalnya dengan tujuan-tujuan pelaksanaan politik

156 D. F. Anwar, *Indonesia at Large: Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratisation*, (Jakarta: The Habibie Center, 2005), 138–176.

157 D. F. Anwar, *Indonesia at Large*, 85–86.

luar negeri yang ingin dicapai. Sejak awal masa kampanyenya pada tahun 2014, Jokowi telah menunjukkan ketertarikannya pada agenda domestik dibandingkan agenda politik luar negeri. Fokus utama beliau adalah memperoleh keuntungan yang nyata (*tangible output*) bagi kepentingan nasional Indonesia dari setiap keputusan yang dilakukan. Hal ini kemudian menjadi acuan utama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam merumuskan prioritas politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Keterlibatan Indonesia secara bilateral, regional, dan multilateral harus dilandaskan pada pemikiran tersebut. Fokus domestik ini juga tidak terlepas dari kecenderungan Jokowi untuk merevitalisasi gaya kepemimpinan Soekarno, khususnya terkait cara pandang nasionalisme dan kedaulatan yang membentuk kepentingan nasional Indonesia sebagai mandat utama diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.¹⁵⁸

Dalam konteks hubungan luar negeri dengan Tiongkok, penetapan visi misi sebagai kekuatan maritim dunia atau *Global Maritime Fulcrum* (GMF) oleh Presiden Joko Widodo pada periode kepemimpinannya yang pertama merupakan pintu masuk utama bagi Tiongkok untuk kembali mendekatkan diri secara bilateral dengan Indonesia. Saat ini, ambisi Indonesia untuk menjadi GMF menjadi sangat penting dalam konteks hubungan bilateral dengan Tiongkok. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari Jokowi dan Xi Jinping selaku pemimpin nasional dari Indonesia dan Tiongkok. Dalam wawancaranya dengan South China Morning Post sebelum kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok pada 26 Maret 2015, Presiden Jokowi menyatakan kesiapan membuka diri untuk bekerja sama intensif dengan Tiongkok khususnya dalam bidang infrastruktur dan *manufacturing developments* meskipun beliau juga menyatakan bahwa “Until now, I don’t know the details of the Silk Road agenda. But if the cooperation can give benefit to my people and can give benefit to our national interest and also to China, OK.” Ternyata, kedua pemimpin negara tersebut menemukan kecocokan visi dalam pertemuan 26 Maret tersebut dan mereka memperjelasnya dalam

158 I. G. W. Wicaksana dan A. Wardhana, “Populism and foreign policy: The Indonesian case,” *Asian Politics & Policy* 13 (2021): 415.

“Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia.” Kedua pemimpin negara membuat pernyataan bersama bahwa “the initiative of the 21st-Century Maritime Silk Road proposed by President Xi Jinping and the strategy of the Global Maritime Fulcrum initiated by President Joko Widodo are highly complementary to each other....”¹⁵⁹

Pernyataan yang menegaskan keselarasan visi *Global Maritime Fulcrum* dengan *Maritime Silk Road initiative* ini menjadi penanda kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok pada masa pemerintahan Jokowi dalam rangka membangun kemitraan maritim berbasis kerja sama ekonomi guna mewujudkan ambisi poros maritim dunia Indonesia. Kerja sama kedua negara ini semakin dimungkinkan karena Tiongkok memberi Indonesia akses terhadap bantuan finansial berupa proyek investasi untuk mendukung realisasi visi GMF ini. Jokowi juga dengan lugas menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinsiasi oleh Tiongkok, dengan menekankan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendorong ide AIIB. Hal itu juga merupakan salah satu tindakan pertama saya ketika menjabat sebagai Presiden RI pada 2014 lalu.”¹⁶⁰

Antusiasme Jokowi terhadap AIIB ini sesungguhnya tidak mengagetkan karena inisiasi AIIB ini sejalan dengan agenda domestik Jokowi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Adanya lembaga yang memfasilitasi dukungan finansial terhadap proyek infrastruktur tentu bersinergi dengan karakteristik Jokowi yang menginginkan pada *outcomes* yang konkrit dari kerja sama luar negeri Indonesia dengan negara lain. Selama kerja sama dengan

159 “Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia,” *Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China*, 26 Maret, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201503/t20150327_679397.html

160 A. Aditya, “Jokowi: ‘Bank Dunia’ China Sukses Dukung Infrastruktur RI,” *CNBC*, 12 Maret, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180312100040-4-6901/jokowi-bank-dunia-china-sukses-dukung-infrastruktur-ri>

sebuah negara memberikan keuntungan *tangible*, kerja sama tersebut penting untuk diakomodasi, meskipun ada konsekuensi-konsekuensi politik yang harus dihadapi. Terlepas dari adanya konflik politik di Laut Natuna pada tahun 2016 pasca *joint statement* tersebut, Presiden Jokowi tetap menyebutkan bahwa beliau meyakini the Belt and Road initiatives akan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, khususnya karena Indonesia juga sedang fokus kepada pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk menjadi poros maritim.¹⁶¹

2. Sumber Pemerintahan

Sumber pemerintahan berasal dari struktur politik pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai politik, dan tingkat kemampuan pembuat keputusan dalam merespons tuntutan eksternal secara fleksibel. Dalam konteks situasi politik domestik Indonesia, input internal yang berasal dari pemerintahan ini juga dapat dilihat dari tarik-menarik kepentingan antara elite negara di dalam institusi kelembagaan yang terlibat dan memengaruhi dalam orientasi politik luar negeri dan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Pembahasan dalam sub-bab ini akan mengelaborasi peran lembaga negara yang selama ini dominan dalam memengaruhi orientasi politik luar negeri Indonesia, diantaranya institusi militer, partai politik, dan peran kementerian luar negeri.

Peran militer dalam politik praktis di Indonesia merupakan warisan dari dominasi kekuatan militer yang sempat terjadi di era Orde Baru. Dominasi peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa tersebut dijustifikasi dengan kondisi politik domestik pada saat itu. Pascatragedi 30 September 1965 dan pergantian kepemimpinan terjadi di Indonesia, ada celah terbuka untuk keterlibatan militer di ranah politik dan sipil. Konsolidasi kekuatan ABRI dengan rezim Soeharto direvitalisasi melalui empat tugas utama, yakni reorganisasi untuk memperkuat ABRI sebagai

161 "President Jokowi Discusses Infrastructure Projects with President Xi Jinping," Sekretariat Kabinet RI, 15 Mei, 2017. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-discusses-infrastructure-projects-with-president-xi-jinping/>

kesatuan unit, memperkuat justifikasi dan legitimasi ABRI sebagai aktor yang memegang kekuasaan, mencari format politik yang baru untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mendukung rezim berkuasa untuk menciptakan mesin politik bagi dirinya sendiri, serta menciptakan mesin birokrasi dan administrasi yang memungkinkan implementasi kebijakan-kebijakan Orde Baru.¹⁶²

Pengaruh militer dalam membangun persepsi anti-komunis terhadap Tiongkok tampak jelas pada periode tahun 1966–1970. Masa tersebut adalah masa konsolidasi kekuasaan antara Soeharto dan ABRI dengan rakyat sebagai modal utama untuk pengembangan kebijakan-kebijakannya.¹⁶³ Kombinasi hubungan ABRI dengan teknokrat ekonomi yang mendukung Soeharto ini baru sedikit bergeser ketika Soeharto juga mulai memanfaatkan keberadaan mesin politik baru yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya yang terbentuk tahun 1964, yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Golkar. Munculnya Golkar ini seakan pertanda berakhirnya masa bulan madu ABRI dan rakyat. ABRI sebagai bagian rezim Soeharto mulai semakin masuk dalam politik melalui Dwi Fungsi ABRI. Kekuatan ABRI, kekuasaan birokrasi, dan Golkar menjadi instrumen penyokong utama kekuasaan Soeharto selama menjalankan rezim Order Baru.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada proses pembuatan kebijakan luar negeri pun Soeharto meletakkan kepercayaan kepada militer dan hanya sedikit memberikan porsi otoritas kepada departemen luar negeri (Deplu) sejak 1966 hingga akhir masa pemerintahan Soeharto. Dalam konteks hubungan dengan Tiongkok, hal inilah yang mempersulit proses normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok pada awal masa Orde Baru. Rizal Sukma dan Leo Suryadinata menyebutkan bahwa superioritas militer terhadap Deplu sangat terlihat dan mengalahkan peran Deplu dalam hal perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.¹⁶⁴ Proses pembatasan peran Deplu pada era Soeharto oleh militer digambarkan oleh Nabs-Keller sebagai berikut:

162 R. Sukma, *Indonesia and China*, 74.

163 G. Wuryandari, *Politik Luar Negeri*, 131-139.

164 Y. M. Yani, "Change and Continuity," 13-14

By early 1966, backed by a series of presidential decrees and legislative bills, military authorities embarked on a process of “purifying and cleansing” the government bureaucracy. The foreign ministry, known then as the Department of Foreign Affairs (Deplu), had been widely viewed as the ideological fulcrum of the country’s revolutionary foreign policy under Foreign Minister Subandrio, and was thus targeted for pervasive intervention by ABRI’s leaders. In April 1966, through a foreign ministerial decree, a Team for Restoring Order (Tim Penertib) was established within Deplu, which evolved into the Special Executive Foreign Affairs (Laksus Luar Negeri). Although the Laksus was chaired nominally by the Foreign Minister, within Deplu however, the Laksus unit was headed by an army Brigadier-General — with a Lieutenant-Colonel as his deputy — who reported directly to the commander of the Restoration of Security and Public Order Commander (Pangkopkamtib). The Laksus was tasked specifically with “countering guerrilla politics associated with the 30 September coup movement and their sympathisers abroad”. In addition, Laksus personnel were posted at Indonesia’s overseas diplomatic missions, where they oversaw the “mental development” (pembinaan mental) of overseas Indonesian students and the screening of staff so as to “remove extremist and subversive elements”. Such intrusive measures by military authorities translated into a “confusing and frightening” time for Deplu staff.¹⁶⁵

Seiring runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, proses demokratisasi di Indonesia semakin menekan posisi militer untuk “keluar” dari ranah perpolitikan Indonesia. Reputasi militer yang semakin buruk di mata masyarakat pada saat itu akibat preseden semasa Orde Baru dan konflik di Timor Timur diikuti dengan keputusan reformasi ABRI melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000. Ketetapan ini memutuskan pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan tujuan menghilangkan fungsi sosial-politik dari kesatuan militer

165 G. Nabs-Keller, “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,” *Contemporary Southeast Asia*, 35, no. 1 (2013): 58–59.

Indonesia yang semula tercantum dalam doktrin dwi fungsi ABRI.¹⁶⁶ Reformasi ini merupakan tuntutan publik yang menginginkan TNI tetap fokus kepada fungsi utamanya dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Hal ini berdampak pada menguatnya kembali peran Deplu dan menteri luar negeri dalam setiap periode pasca reformasi. Meskipun begitu, hal ini juga tidak serta merta meningkatkan performa Deplu sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia. Hal ini utamanya disebabkan oleh situasi domestik Indonesia pasca reformasi yang menuntut perhatian pemimpin negara lebih kepada penyelesaian masalah disintegrasi nasional, upaya pemulihan kondisi ekonomi dalam negeri, serta mencari bentuk perwujudan demokrasi yang dapat dilakukan dengan keterbatasan kapabilitas nasional yang ada. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan Deplu menjadi tertunda dan pelaksanaan tugas yang bertumpu pada menteri luar negeri sangat rentan untuk menjadi tidak stabil, seperti halnya yang terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.¹⁶⁷ Barulah pada saat Hasan Wirajuda menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Megawati, reformasi institusi kementerian luar negeri menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan Dekrit Presiden 119/2001.¹⁶⁸

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, beberapa kementerian berada dalam posisi sentral dalam mendukung realisasi visi misi Poros Maritim Dunia. Salah satu terobosan birokrasi yang ditetapkan Jokowi adalah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya RI pada tahun 2014, yang kini menjadi Kementerian

166 H. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1978), 24–25.

167 Alwi Shibab sebagai Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dibebani tugas ganda, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Menteri Luar Negeri dan asisten pribadi Presiden. Dengan latar belakang dan pengalaman diplomatik resmi yang kurang memadai, politik luar negeri pada masa ini lebih banyak didominasi oleh kehendak Abdurrahman Wahid yang dinilai oleh sebagian ahli sebagai “*erratic leadership style*” dan “*unorthodox approach to foreign-policy making*”. Lihat H. Crouch, *The Army*, 63.

168 H. Crouch, *The Army*, 56–67.

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di bawah komando Luhut Binsar Panjaitan. Inisiatif ini merupakan revitalisasi dari Kementerian bidang Maritim yang pernah ada di Indonesia pada masa Kabinet Dwikora 1 (1964–1966) dan Ampera 1 (1966–1967) sebelum kemudian dialihfungsikan di bawah Kementerian Perhubungan.¹⁶⁹ Kementerian ini menjadi *leading agency* untuk pengembangan sektor kemaritiman Indonesia dan mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia.

Posisi Menteri dalam kementerian strategis ini semakin menjustifikasi eksistensi Luhut dalam *inner circle* pemerintahan Jokowi. Selain jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut—yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan—juga telah sering kali dipercaya Jokowi untuk merangkap jabatan, baik yang untuk isu di bawah naungan koordinasi Kemenko Maritim maupun non-maritim, seperti ditunjuk sebagai pejabat sementara Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Menteri KKP, menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dan Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali.¹⁷⁰

Oleh karena itu, pandangan Luhut terhadap relasi Indonesia dan Tiongkok juga krusial untuk dicermati. Salah satunya melalui kecenderungan Luhut untuk bersikap lebih terbuka terhadap investasi Tiongkok dan kerja sama Kementerianya dengan Tiongkok. Dalam isu tenaga kerja asing yang berdatangan pada masa pandemi dan mengundang protes dari masyarakat, misalnya, Luhut menganggap masyarakat cenderung asal bicara dan seharusnya tidak terus

169 Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi RI, “Siaran Pers: Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, 28 Juli 2016”, 30 Juli, 2016. <https://maritim.go.id/serah-terima-jabatan-menteri-koordinator-bidang-kemaritiman-jakarta-28-juli-2016/>

170 F. Rozie. “Deretan Jabatan Luhut Binsar Panjaitan Sepanjang Pemerintahan Jokowi.” *Liputan 6*. 9 April 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4934574/deretan-jabatan-luhut-binsar-panjaitan-sepanjang-pemerintahan-jokowi>

mempersoalkan kedatangan TKA karena mereka sudah datang dengan prosedur yang jelas.¹⁷¹ Luhut juga pernah diminta Jokowi untuk melakukan mediasi dengan Tiongkok guna meredam ketegangan kedua hubungan kedua negara pasca penenggelaman kapal Tiongkok pada Maret 2016.¹⁷² Menariknya, posisi Luhut yang lebih kooperatif terhadap Tiongkok ini sering kali berseberangan dengan Menteri yang lain. Dalam isu penindakan tegas terhadap kapal asing ilegal (termasuk kapal Tiongkok) di perairan Indonesia, Luhut dan Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti, berbeda pendapat karena Luhut mendesak Menteri KKP untuk menghentikan kebijakan penenggelaman kapal dan fokus pada tugas KKP yang lain seperti peningkatan ekspor.¹⁷³ Isu penindakan tegas terhadap kapal Tiongkok pun hingga tahun 2020 masih menimbulkan persoalan antar-menteri terlepas dari mandat Presiden Jokowi yang sudah tegas menyatakan tidak ada negosiasi untuk kedaulatan Indonesia. Kali ini, pernyataan Luhut dinilai berseberangan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah menyatakan 4 sikap resmi pemerintah Indonesia atas insiden pelanggaran di perairan Natuna pada Desember 2019, yakni¹⁷⁴

- 1) telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia;
- 2) wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982);

171 D. Nurita, "TKA China Jadi Polemik, Luhut: Jangan Asal Ngomong Kalau Enggak Ngerti Masalahnya", *Tempo*, 6 Juli, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1480420/tka-china-jadi-polemik-luhut-jangan-asal-ngomong-kalau-enggak-ngerti-masalahnya>

172 T. D. Putra, "Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran China di Natuna," *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019): 323-331

173 M. Sitepu, "'Kegaduhan' timbul antara Menko Luhut dan Menteri Susi soal penenggelaman kapal", *Tempo*, 9 Januari, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42616683>

174 "Soal Natuna, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Tawar-Menawar Soal Kedaulatan," Sekretariat Kabinet RI, 5 Januari 2020. <https://setkab.go.id/soal-natuna-presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada-tawar-menawar-soal-kedaulatan/>

- 3) Tiongkok sebagai salah satu partisipan dari UNCLOS 1982 wajib merupakan kewajiban menghormati implementasi dari UNCLOS 1982;
- 4) Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Dalam menanggapi isu yang sama, Luhut justru berharap insiden ini tidak dibesar-besarkan, karena “soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita”.¹⁷⁵

3. Sumber Masyarakat

Eksklusivitas etnis China di Indonesia mungkin sedikit berbeda dengan fenomena yang terjadi di negara lain, misalnya Thailand, dimana proses asimilasi berjalan dengan lebih baik.¹⁷⁶ Revida menjelaskan proses integrasi etnis China di Indonesia yang tidak mudah dengan mengutip pernyataan Tungadi Tahir mengenai faktor penghambat integrasi, seperti perbedaan orientasi, struktur ekonomi, agama, bahasa, adat, dan keterlibatan politik.¹⁷⁷ Kedudukan penduduk masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia pernah menjadi problematika besar karena adanya peranan ekonomi mereka yang menonjol dan berpengaruh ketika Indonesia masih di bawah rezim kolonial Belanda.

175 Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dalam D. Nurita, “Tiga Pernyataan Menteri Jokowi soal Polemik Kapal China di Natuna,” *Tempo*, 5 Januari, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1291270/tiga-pernyataan-menteri-jokowi-soal-polemik-kapal-china-di-natuna>

176 Review mengenai hasil penelitian G. William Skinner mengenai proses asimilasi etnis Tiongkok di Thailand dapat dilihat di C. Keyes, “G William Skinner and The Study of Chinese in Thailand and The Study of Thai Society” (Presentasi makalah, Workshop “The Legacy of G. William Skinner’s Field Research: China and Southeast Asia”, University of Washington, Amerika Serikat, 27 Mei, 2011), 7.

177 E. Revida, “Interaksi Sosial Masyarakat Etnik China dengan Pribumi di Kota Medan Sumatera Utara,” *Jurnal Harmoni Sosial* 1, no. 1 (2006): 23

Etnis Tionghoa menjadi kelompok masyarakat non-pribumi di Indonesia yang secara khusus didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk bekerja di perkebunan tembakau.¹⁷⁸ Pada saat itu, sudah ada kekhawatiran bahwa etnis Tionghoa bisa membentuk organisasi subversif rahasia bagi Tiongkok di wilayah Indonesia.¹⁷⁹ Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kurang baik dan diwarnai kecurigaan serta ketidaksukaan bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

Selain sentimen ekonomi yang ada, sentimen sosial politik juga terbentuk pada masa Orde Baru yang melekatkan identitas komunis Tiongkok terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pemerintah Orde Baru berperan besar terhadap konstruksi sosial tentang etnis Tionghoa tersebut. Sebagai akibat dari tuduhan Pemerintah (khususnya militer) Indonesia keterlibatan Tiongkok terhadap PKI pada saat Gerakan 30 September 1965 (G30S), Tiongkok dianggap sebagai ancaman keamanan nasional oleh pemerintah (khususnya militer) Indonesia. Tiongkok dikhawatirkan akan mendukung aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Soeharto melalui anggota PKI yang tersisa pasca-tragedi G30S dan etnis minoritas Tionghoa di Indonesia.¹⁸⁰ Sentimen ini tidak hanya menimbulkan resistensi di pihak pemerintah, namun juga memunculkan gejolak di masyarakat.

Pada awal era Reformasi, pemerintahan Habibie (1998–1999) tidak hanya memperoleh mandat untuk merestorasi kondisi ekonomi negara, tetapi juga memulihkan hubungan-hubungan sosial yang menjadi cacat akibat kerusuhan dan konflik sosial yang memuncak di akhir era Orde Baru. Salah satu upaya menarik yang dilakukan Habibie adalah kunjungan *high-profile* yang dilakukannya terhadap area etnis Tionghoa di Jakarta untuk berdialog dengan warga mengenai penghentian rasisme di Indonesia serta menghimbau pada semua etnis

178 E. Revida, "Interaksi Sosial Masyarakat", 23.

179 M. Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989), 58–59.

180 R. Sukma, "Indonesia's response to the rise of China: Growing comfort amid uncertainties," dalam *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, ed. Tsunekawa J. (Tokyo: The National Institute for Defense Studies, 2009), 139–155.

Tionghoa yang melarikan diri dari kekerasan anti-China tahun 1998 untuk dapat kembali ke Indonesia. *Human Rights Watch* melihat ini sebagai catatan sejarah yang penting namun masih meninggalkan persoalan mendalam dari segi membangun kembali kepercayaan antara etnis Tionghoa dengan pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam laporan berikut:

President Habibie's visit to the ethnic Chinese district of Jakarta was an important step, but it leaves unresolved the question of how Indonesia begins to win back the trust of this part of its population. Anti-Chinese sentiment remains dangerously high, and it may get worse as the economic situation deteriorates. Some of the solutions proposed are frightening: a group in North Sumatra urged the government to do more to encourage ethnic assimilation, a phrase that has been a code word in the past to justify discrimination. A member of parliament in Jakarta has said in the last two days that by fleeing abroad to Singapore and Malaysia (when their homes and shops were being attacked), ethnic Chinese showed a lack of a sense of nationalism, and the assets of all who fled abroad should be investigated. President Habibie himself, instead of promising better protection from the Indonesian security forces at times of unrest, suggested that the ethnic Chinese form their own vigilante squads for self-defense. ... It is imperative for the Habibie government and any aspirants to national leadership to tackle the question of how to end discrimination and make Indonesia a safe place for people of all ethnic backgrounds to live. Appointment of a national commission to examine this issue, from the standpoint of equal opportunity and ending discrimination, might be a good place to start. Not only social harmony but also economic recovery depend on finding a solution.¹⁸¹

Satu hal menarik yang terjadi kemudian pasca-pemerintahan Habibie adalah peran penting Abdurrahman Wahid dalam meletakkan landasan fundamental sebagai upaya reformasi posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Wahid memberikan banyak hak-hak untuk etnis Tionghoa dalam rangka melestarikan budayanya. Presiden Wahid juga mengizinkan perayaan Tahun Baru

181 "Indonesia Post Soeharto Crisis". Human Rights Watch. 4 Juni, 1998. <https://www.hrw.org/news/1998/06/04/indonesia-post-Soeharto-crisis>

Imlek (Imlek) dan bahkan mengakui Konghucu sebagai agama resmi ke enam di Indonesia.¹⁸² Dimulai pada masa pemerintahan Wahid, penampilan budaya Tiongkok oleh etnis Tionghoa menjadi hal yang mulai lazim di tengah masyarakat Indonesia. Awal pengakuan negara terhadap etnis Tionghoa ini berjalan seiring dengan kelanjutan upaya pemerintahan Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk secara aktif memperbaiki hubungan dengan Tiongkok (active reengagement).¹⁸³

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo, ada indikasi meningkatnya sentimen terhadap etnis Tionghoa secara khusus maupun terhadap negara Tiongkok secara umum. Hal ini sebenarnya bukan semata-mata berakar dari rasisme dan diskriminasi sosial politik dalam internal masyarakat Indonesia sebagaimana yang terjadi pada era-era pemerintahan sebelumnya. Ada beberapa konteks yang melandasi terjadinya peningkatan persepsi negatif masyarakat terhadap kedekatan hubungan Indonesia dengan Tiongkok saat ini. *Pertama*, citra global Tiongkok sebagai sebuah negara dengan ambisi “One Belt One Road”nya serta agresivitasnya di kawasan Laut China Selatan saat ini tidak dipungkiri berdampak pada kekhawatiran atas kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman baru. Media pemerintah China, *Global Times*, pada tahun 2013 mengadakan survei persepsi tentang Tiongkok di 14 negara untuk mengetahui atribusi masyarakat terhadap negara Tiongkok dan mencari tahu alasan terbentuknya persepsi tertentu terhadap Tiongkok. Hasil survei tersebut menunjukkan hanya 13% yang mengasosiasikan Tiongkok dengan kata “damai”, responden lainnya menggambarkan Tiongkok gemar berperang, arogan, dan percaya diri.¹⁸⁴ Salah satu penyebab dari persepsi negatif ini adalah kemungkinan terbatasnya pengaruh

182 N. Sriyanto, “65 years of bilateral relations between Indonesia and China: strengthening and building constructive relations through people to people relations (volume 2)”, Pusat Riset Politik, 4 Desember, 2015. <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/65-years-of-bilateral-relations-between-indonesia-and-china-strengthening-and-building-constructive-relations-through-people-to-people-relations-volume-2/>

183 R. Sukma, “Indonesia’s Response,” 145-149.

184 “China Mendapat Banyak Persepsi Buruk”, *Kompas*. 11 Desember, 2013. <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/11/0825579/China.Mendapat.Banyak.Persepsi.Buruk>

internasional media massa Tiongkok sehingga opini publik lebih banyak terbentuk dari hasil paparan pemberitaan global media Barat maupun koran nasional.

Kedua, kekhawatiran dominasi Tiongkok berasal dari isu tentang relasi ekonomi Indonesia dengan Tiongkok yang semakin erat. Dari sisi investasi, pada tahun 2015, Tiongkok untuk pertama kalinya berhasil menjadi satu dari 10 negara dengan investasi terbesar di Indonesia.¹⁸⁵ Meskipun dalam realisasi investasinya pada 2016 belum menunjukkan presentase yang menjanjikan karena masih berkisar 6% dari rencana total 52,77 miliar dolar AS sejak 2011¹⁸⁶, ada tren peningkatan komitmen investasi yang terlihat dari pertumbuhan investasi yang mencapai 27% pada tahun 2017¹⁸⁷. Itu baru data yang tercatat secara resmi oleh BKPM. Padahal, investasi Tiongkok kadang-kadang dilakukan melalui anak perusahaan yang berbasis di negara-negara lain (*proxy countries*), seperti Singapura dan Hongkong. Misalnya, investor dari Sokonindo Automobile, berasal dari *Chinese Mainland*, tetapi terdaftar di Hong Kong. Sayangnya, BKPM memiliki keterbatasan dalam melakukan monitor terhadap investasi melalui *proxy countries* tersebut.¹⁸⁸ Justifikasi dari keterbukaan Indonesia terhadap investasi Tiongkok yang meningkat drastis dalam waktu singkat adalah investasi ini merupakan bagian dari dukungan Tiongkok terhadap realisasi proyek-proyek infrastruktur Indonesia dalam rangka menjadi Poros Maritim Dunia. Tiongkok saat ini tengah gencar mendekati Indonesia guna menyelaraskan inisiatif

185 P. Parameswaran, "China is Now One of Indonesia's Top Ten Investors", *The Diplomat*, 29 April, 2015. <http://thediplomat.com/2015/04/china-is-now-one-of-indonesias-top-ten-investors/>

186 S. Primadhita, "Investor China Hanya Pintar Janji, Minim Realisasi Investasi", *CNN Indonesia*, 26 Oktober, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161026160658-92-168171/investor-china-hanya-pintar-janji-minim-realisisi-investasi>

187 "Mengejar Investasi Negeri Tirai Bambu," Kementerian Investasi/BKPM, diakses pada 11 September, 2016. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/mengejar-investasi-negeri-tirai-bambu>

188 A. Hermansyah, "China Likely Biggest Investor in Indonesia", *The Jakarta Post*, 25 Januari, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/25/china-likely-biggest-investor-indonesia.html>

Maritime Silk Road nya dengan visi *Global Maritime Fulcrum* yang dicanangkan Jokowi. Hal ini tampaknya sempat direspons positif oleh Jokowi dengan menyebutkan bahwa kedua inisiatif tersebut saling melengkapi dan selaras.¹⁸⁹ Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa diplomasi ekonomi Tiongkok yang sangat masif ini akan mengintervensi lebih jauh ke ranah-ranah strategis Indonesia serta melemahkan posisi tawar Indonesia terhadap Tiongkok. Sebagai contoh, masuknya ribuan buruh Tiongkok yang ramai diberitakan menimbulkan wacana keresahan masyarakat terhadap migrasi buruh asing ke Indonesia, meskipun Menteri Ketenagakerjaan telah berupaya mengklarifikasi perihal tersebut.¹⁹⁰

Menguatnya narasi sentimen terhadap kebangkitan Tiongkok pada masa pemerintahan Jokowi ini harus disikapi dengan bijak mengingat dukungan publik sangat krusial bagi eksistensi dan legitimasi kepemimpinan Jokowi. Jokowi dianggap sebagai representasi suara masyarakat modern Indonesia¹⁹¹ sehingga pemerintahannya harus mampu meredam kegaduhan publik atas keputusan dan kebijakan pemerintah untuk menjalin kerja sama yang erat dengan Tiongkok. Upaya yang dilakukan adalah dengan menjaga citra pemerintahan nasionalis yang berorientasi pada kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari sikap Jokowi dalam merespons sengketa Laut China Selatan (LCS) yang bersinggungan dengan kepentingan Indonesia.

Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim (*non-claimant state*) dalam sengketa tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar sehingga pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran kapal Tiongkok yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif

189 M. Piesse, "The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean", *Future Direction International*, 30 January, 2015. <https://navalinstitute.com.au/indonesian-maritime-doctrine-realising-potential-of-the-ocean/>

190 "Ribuan Buruh China Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Menaker", *Tempo*, 31 Agustus, 2015. <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/31/093696421/ribuan-buruh-china-masuk-indonesia-ini-penjelasan-menaker>

191 R. L. Pattiradjawane, "The Indonesian perspective toward rising China: Balancing the national interest," *Asian Journal of Comparative Politics* 1, no. 3 (2016): 2.

(ZEE) Indonesia tanpa ijin.¹⁹² Respons keras pemerintah Indonesia ini sebenarnya telah terlihat sejak penenggelaman kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ilegal di Natuna pada tahun 2015, peningkatan kehadiran personel militer di Natuna, hingga penggantian nama LCS menjadi Laut Natuna Utara dalam peta baru kepulauan Indonesia.¹⁹³ Kebijakan nasionalis yang menjadi sorotan publik ini dalam jangka pendek mungkin bisa sedikit membantu menaikkan kembali citra pemerintahan nasionalis Jokowi yang berpihak pada rakyat, namun berisiko pula menjadi bagian dari pencitraan belaka jika tidak diimbangi dengan bukti konkret kepemimpinan Jokowi dalam mengarahkan kabinetnya untuk sinkronisasi respons kelembagaan atas intervensi Tiongkok dalam urusan dalam negeri Indonesia.

4. Pelaku bisnis sebagai penggerak hubungan Indonesia-Tiongkok

Pelaku bisnis telah melalui masa-masa yang sangat suram sebagai dampak dari pembekuan hubungan Indonesia-Tiongkok yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto pada kurun waktu Oktober 1967–1990. Pemutusan hubungan diplomatik Tiongkok-RI pada saat itu menandakan hubungan politik kedua negara berada pada titik yang terendah pasca-prasangka Indonesia terkait keterlibatan Tiongkok pada tragedi 30 September 1965. Namun, satu hal yang menarik adalah bagaimana kalangan pengusaha Indonesia tetap berperan dalam menjalin hubungan non-politik dengan Tiongkok melalui aktivitas Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Para pengusaha ini melihat adanya potensi mengembangkan hubungan dagang dengan Tiongkok. Hal ini terkait dengan perkembangan domestik Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiao Ping.

192 “Konflik di Perairan Natuna, Arahan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomati Damai”, Sekretariat Kabinet RI, 5 Januari 2020. <https://setkab.go.id/konflik-di-perairan-natuna-arahan-presiden-pemerintah-tegas-sekaligus-prioritaskan-diplomatik-damai/>

193 I. G. W. Wicaksana dan A. Wardhana, “Populism”, 416.

Salah satu faktor terbukanya peluang kontribusi sektor bisnis dalam hubungan Indonesia-Tiongkok adalah meningkatnya peranan aktor swasta (pengusaha) di Tiongkok dalam politik ekonomi negaranya pasca-reformasi ekonomi Tiongkok 1979. Pada akhir tahun 1978, Deng Xiao Ping mengembangkan ideologi sosialisme yang merefleksikan upaya untuk menjalankan ekonomi terencana. Ekonomi terencana ini membuka jalan bagi masuknya nilai-nilai kapitalisme dalam menjalankan perekonomian di Tiongkok. Tiongkok mengemas perubahan signifikan ini sebagai *economic reforms* untuk mengatasi kontradiksi kondisi ekonomi yang terjadi di Tiongkok. Kondisi kontradiktif tingkat kekuatan produksi dan tingkat kebutuhan masyarakat di Tiongkok berbanding terbalik yang memberikan dorongan semangat bagi kader Partai Komunis China (PKC) untuk menerapkan ekonomi pasar.¹⁹⁴

Kepentingan kelompok bisnis di Indonesia menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan kerja sama Indonesia dan Tiongkok baik secara bilateral maupun dalam konteks regional. Penolakan dari kelompok bisnis terhadap pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreements (ACFTA) di tahun 2010 berdampak pada proses renegotiasi aturan-aturan perdagangan yang pada waktu itu difasilitasi oleh Kadin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perekonomian.¹⁹⁵

C. SIGNIFIKANSI POLITIK DOMESTIK DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK

Pengaruh faktor domestik dalam perumusan politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dapat dilihat dari beberapa sumber-

194 R T. N. M. E. Muas, *Diplomasi Tanpa Kehilangan Muka* (Jakarta: Serat Alam Media, 2015), 167-169.

195 L. C. Sinaga, "The Dynamics of Indonesia-China Relations in Politics, Defence-Security, and Economy in Southeast Asia: An Indonesian Perspective", dalam *Six Decades of Indonesia-China Relations*, ed. L.C. Sinaga (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. and Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Press, 2018), 11.

sumber utama sebagai input internal, seperti sumber kepemimpinan nasional, faktor pemerintahan, persepsi dalam masyarakat, serta peran pelaku bisnis. Indonesia tidak dapat melepaskan determinan politik domestik dalam perumusan politik luar negerinya. Keempat faktor internal tersebut secara kontinu berjaln kelindan dan membentuk dinamika politik domestik yang menentukan diskursus dan kebijakan yang terbentuk terhadap Tiongkok baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Ulasan dari berbagai periode pemerintahan yang berbeda mulai dari era Soekarno hingga era Reformasi menunjukkan pengaruh signifikan politik domestik dalam membentuk orientasi politik luar negerinya secara global maupun secara khusus terhadap Tiongkok.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul berikutnya adalah apakah kuatnya pengaruh domestik ini kemudian lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam konteks hubungan internasional dengan negara lain, atau justru dipandang sebagai pendekatan luar negeri yang *inward-looking* dan tidak kooperatif dengan perkembangan hubungan internasional di tingkat regional dan global.

Hubungan Indonesia-Tiongkok: Dinamika Kawasan dan Peranan Indonesia sebagai Kekuatan Menengah

Bab ini menganalisis hubungan Indonesia-Tiongkok sebagai sebuah pengaruh dari dinamika kawasan Asia Timur, yang belakangan diikuti dengan diskursus kawasan Indo-Pasifik.¹⁹⁶ Dalam konteks ini, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok bukan sekadar manifestasi dari aspirasi domestik, melainkan terpengaruh oleh faktor-faktor kompleksitas keamanan kawasan yang bersifat historis-struktural.¹⁹⁷

196 Kawasan Asia Timur yang menjadi cakupan dalam tulisan ini merujuk pada gabungan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, yang secara umum merujuk pada kerja sama ASEAN+3 yang terbentuk dan menguat karena faktor Krisis Finansial Asia di akhir dasawarsa 1990an. Indo-Pasifik sendiri yang merupakan gagasan yang diusung oleh sejumlah negara, seperti Jepang, Australia, AS, dan ASEAN dalam dokumen ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Tiap gagasan masih memiliki garis batas geografis yang berbeda. Walau begitu, rentangannya merujuk pada batas-batas pesisir timur benua Afrika hingga mencakup pesisir barat Benua Amerika.

197 Kompleks keamanan (*security complex*) di sini mengacu pada konsepsi Buzan dan Wæver (1998) yang mendefinisikannya sebagai '*a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another*'. Pendefinisian tersebut mengacu pada aspek konstruksi keamanan yang saling terkait antara aktor-aktor internasional di suatu geografi tertentu. Penekanannya di sini adalah adanya faktor geografis dan saling terkait konstruksi keamanan.

Selain faktor struktural merujuk pada aspek perimbangan kapabilitas material, faktor historis yang bersifat dinamis turut melandasi persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) di antara negara-negara di lingkungan strategis yang berdekatan.¹⁹⁸ Kombinasi kedua faktor tersebut menjadi elemen penting dalam melihat hubungan Indonesia-Tiongkok yang turut mengalami pergeseran persahabatan/permusuhan (*amity/enmity*). Faktor itu utamanya adalah kebangkitan Tiongkok dengan program Inisiatif Sabuk Jalan (*Belt and Road Initiatives*, selanjutnya disingkat BRI) dan juga intensitas kehadiran Amerika Serikat (selanjutnya AS) di kawasan ini melalui wacana Indo-Pasifik.

Selain mengupas dinamika kawasan yang memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam rentang dua dasawarsa terakhir, bab ini juga mengupas peranan Indonesia sebagai kekuatan menengah. Seperti yang dikemukakan di bab pertama terkait adanya perimbangan kekuatan yang asimetris, tim penulis sejalan dengan pendapat Manicom dan Reeves (2014) melihat bahwa Indonesia sebagai kekuatan menengah sepatutnya tidak terjebak antara penyokong (*bandwagoning*) dan penyeimbang (*balancing*).¹⁹⁹ Gagasan *dynamic equilibrium* dan sentralitas ASEAN dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam penjematan (*bridge building*) dan menjaga *sense of agency* kekuatan setempat.

Uraian selanjutnya dalam bab ini terdiri dari paparan mengenai dinamika kawasan yang tergambarkan melalui perubahan perimbangan kekuatan dan rivalitas kekuatan besar (*great power politics*) melalui strategi mereka di kawasan. Kebangkitan Tiongkok dengan BRI dan penguatan kehadiran AS melalui gagasan Indo-Pasifik sebagai penguatan strategi *hub-and-spoke* menjadi isu sentral dalam membentuk kompleksitas keamanan dan dinamika *amity/enmity*. Kawasan Asia Timur tidak lepas dari dinamika kekuatan

198 B. Buzan dan O. Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 4.

199 J. Manicom dan J. Reeves, "Locating Middle Powers in International Relation Theory," dalam *Middle Powers and the Rise of China*, ed. B. Gilley dan A. O'Neil (Washington: Georgetown University Press, 2014). <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.6>.

besar yang salah satu jangkarnya adalah kehadiran AS sejak Perang Dunia II hingga Perang Global melawan Terorisme (*Global War on Terrorism*, selanjutnya GWOT). Namun begitu, memasuki abad ke-21, kebangkitan Tiongkok menjadi wacana tersendiri yang dipersepsikan beragam oleh banyak negara di kawasan. Perubahan perimbangan kekuatan AS dan Tiongkok oleh karenanya akan dikupas secara mendalam terkait dengan ragam persepsi terhadap rivalitas kedua negara besar itu.

Pada bagian penutup, bab ini menganalisis peluang peranan Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam kontribusinya terhadap hubungan bilateral kedua negara. Pasca-Tragedi Tiananmen di awal dasawarsa 1990-an, saat Tiongkok terancam isolasi oleh banyak negara-negara Barat, Indonesia, dan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) melihat peluang untuk dapat merangkul dan menyosialisasikan Tiongkok dalam norma kawasan. Saat kebangkitan Tiongkok dengan tingkat pertumbuhan dua digit, Indonesia ikut merasakan ledakan ekspor sumber daya yang turut menjadi fondasi stabilitas ekonomi di dasawarsa abad ke-21.

Meskipun begitu, tantangan Indonesia untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai *penjembatan* (*bridge builder*) di dasawarsa kedua mengalami tantangan yang semakin kompleks. Krisis finansial global (*global financial crisis*, selanjutnya GFC) yang menerjang AS dan negara-negara Barat mengubah konstelasi dan persepsi ancaman. GFC mengguncang kepercayaan terhadap kekuatan finansial negara-negara maju dan mendorong Tiongkok sebagai penjamin stabilitas finansial AS dan negara Eropa.²⁰⁰ Pada saat yang bersamaan, krisis di tahun 2008 itu menjadi penanda bagi kemunculan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), serta kehadiran G-20 yang

200 US Department of Treasury/Federal Reserve Board, pada Oktober 2018 melaporkan Tiongkok menjadi pemegang US Treasury Bills senilai 1.165,1 miliar dolar AS. Amit Gupta, "Global Strike vs. Globalization: The US-China Rivalry and the BRI," dalam ed. F.J.B.S. Leandro dan P.A.B. Duarte, *The Belt and Road Initiative: An Old Archetype of a New Development Model* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2020), 50. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2564-3_3

melibatkan negara-negara yang lebih beragam sebagai forum dialog ekonomi global.²⁰¹

Di sisi lain, Tiongkok yang juga terdampak memasuki era yang dikenal dengan *Kenormalan Baru* yang ditandai pertumbuhan ekonomi satu digit, meskipun tetap tergolong tinggi. Di era kepemimpinan Xi Jinping yang terpilih sebagai Presiden pada 14 Maret 2013, Tiongkok menggelar gagasan BRI yang menunjukkan ambisi untuk tetap memimpin pertumbuhan dan menjadikan negaranya poros penting dalam jejaring suplai global dan sekaligus membangun institusionalisasi yang mendukung ambisinya Impian Tiongkok (*China Dream*).²⁰² Di saat yang bersamaan, strategi pengambil kebijakan di Washington terhadap kawasan ini mengalami perubahan dinamis, dari konteks *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di era 1990-an, meningkat pada bentuk Abad Pasifik, hingga era Indo-Pasifik. Perubahan nomenklatur penyebutan kawasan itu dibarengi dengan perubahan atas strategi *hub-and-spoke* yang berlandaskan pada kemitraan strategis tradisional, peran aktif dan sokongan atas multilateralisme kawasan yang berpusat pada ASEAN sebagai forum utama, hingga pada titik nadir era kebijakan *America First*.²⁰³

Dengan lanskap kawasan demikian, tantangan Indonesia sebagai negara kekuatan menengah harus mampu menjembatani intensitas kehadiran AS dan sekutu tradisionalnya di tengah asertivitas Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Indonesia sebagai negara kekuatan menengah baru (*emerging middle power*) yang berbeda dari peran negara kekuatan menengah tradisional (*traditional middle power*), seperti Kanada dan Australia yang tergolong pendukung dan bergantung terhadap Amerika.²⁰⁴

201 A. Kent, "China's Changing Influence on the Multilateral System: From Adaptation to Assertion," dalam *Assessing China's Power*, ed. J. H. Chung (New York, Palgrave Macmillan, 2015), 141. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137534613_7

202 W. J. Norris, "China's Post-Cold War Economic Statecraft: A Periodization," *Journal of Current Chinese Affairs* 50, No.3 (2021): 304. <https://doi.org/10.1177/18681026211058186>.

203 T. J. Pempel, "Asia's Lesser Powers Confront US-China Threat to the Regional Order," *Issues & Studies*, 56, No. 02 (2020): 2040005-11. <https://doi.org/10.1142/S1013251120400056>

204 A. Patience, *Australian foreign policy in Asia: Middle power or awkward partner?* (New

A. RIVALITAS AMERIKA SERIKAT-TIONGKOK DI DASAWARSA PERTAMA ABAD 21: PERSILANGAN ISU KEAMANAN DAN ISU EKONOMI

Cakupan geografis kompleks keamanan regional Asia Timur terus berkembang. Semula hanya mencakup kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, namun peningkatan kehadiran India membuat kawasan ini berpeluang menjadi Indo-Pasifik. Pertumbuhan dan perluasan kawasan itu terjadi melalui dua proses besar yang bersifat *bottom-up* dalam bentuk regionalisasi dengan aktor-aktor swasta dan kepentingan bisnis menjadi motor utamanya dalam pengembangan jejaring suplai produksi. Proses itu berkembang dengan kekuatan *top-down* melalui regionalisme yang menempatkan negara-negara setempat sebagai motor utamanya. ASEAN meratifikasi regionalisme melalui penambahan jumlah anggota hingga 10 negara pada akhir dasawarsa 1900-an, hingga pembentukan East Asian Summit (EAS) pada 2005. Berangkat dari *ASEAN plus Three* (APT), EAS menjadikan ASEAN bermitra strategis dengan India, Australia, dan Selandia Baru, hingga akhirnya menjadi ASEAN+8 saat Rusia dan AS bergabung di dalamnya. Gagasan utamanya adalah menjaga otonomi strategis negara-negara ASEAN dengan menjaga perimbangan keterlibatan mitra-mitra strategis yang secara kapabilitas lebih besar. Puncaknya adalah ASEAN tetap sebagai pemegang kendali (*driver seat*) regionalisme di kawasan.²⁰⁵

Meski perimbangan kekuatan asimetris antarnegara terlihat jelas, perluasan partisipasi regionalisme kawasan ini menunjukkan besarnya pengaruh faktor persepsi dalam menentukan derajat persahabatan/permusuhan. Perimbangan ancaman, bukan semata perimbangan kekuatan yang menjadi penentu penting dalam mendinamisasi hubungan antarnegara di kawasan. Konstruksi persepsi ancaman

York: Palgrave Macmillan, 2018). <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-69347-7>

205 D. Camroux, "Regionalism in Asia as Disguised Multilateralism: A Critical Analysis of the East Asia summit and the Trans-Pacific Partnership," *The International Spectator* 47, No.1 (2012): 101, <https://doi.org/10.1080/03932729.2012.655010>

di antara elite di negara-negara kawasan ini yang membuat pilihan strategi itu tidak hanya dibedakan antara pengimbang (*balancing*) dan pengikut (*bandwagoning*).²⁰⁶ Pendekatan perimbangan kekuatan semata pada konteks Asia Timur Raya berpotensi membuat analisis terjerumus pada pengabaian faktor ekonomi sebagai faktor krusial.²⁰⁷

Kombinasi faktor ekonomi dan keamanan itu juga berkelindan dengan faktor sejarah dan norma internasional yang berkembang di kawasan ini. Ulasan Beeson dan Breslin (2014) menegaskan negara pembangunan (*developmental states*)—suatu gagasan tentang hubungan erat antara negara dan pasar—merupakan norma khas di kawasan Asia Timur yang membedakan perkembangan regionalisme dan regionalisasi dibandingkan kawasan lain di dunia.²⁰⁸ Praktik negara pembangunan menempatkan negara bukan sekadar pengatur (*regulatory states*) yang membedakan pola ekonomi klasik model AS, bahkan di era pasca-Washington Consensus yang menuntut negara hadir. Robert Gilpin (2003) mencatat perbedaan praktik dan pandangan hubungan negara dan pasar ini menjadi sumber konflik bahkan antara AS dan Jepang sebagai sekutu tradisional pada tahun 1990an.²⁰⁹ Ulasan Gilpin atas perbedaan model negara pembangunan Jepang dan model ekonomi AS itu mendahului pandangan sarjana-sarjana yang belakangan melihat ketegangan AS dan Tiongkok melalui prisma dikotomi *Washington Consensus* (1990) versus *Beijing Consensus* (2004).²¹⁰ Dari pada sekedar membedakan antara kedua paradigma

206 D. Novotny, “Indonesian Foreign Policy: a Quest for the Balance of Threats. The Role and Relevance of Elite Perceptions in Explaining Indonesian Foreign Policy Outcomes,” (Disertasi, University of New South Wales, 2007), 20–24. <https://unsworks.unsw.edu.au/bitstreams/568aefd6-7eba-4ed9-a3e2-a7d97781f4d4/download>

207 S. Chan, *Looking for balance: China, the United States, and power balancing in East Asia*. (California, Stanford University Press, 2012), 5. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqsdp1m>

208 M. Beeson dan S. Breslin, “Regional and global forces in East Asia’s economic engagement with international society,” dalam *Contesting international society in East Asia*, ed. B. Buzan dan Y. Zhang (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139939447>

209 R. Gilpin, “Sources of American-Japanese economic conflict,” dalam *International relations theory and the Asia-Pacific*, ed. J.G. Ikenberry dan M. Mastanduno (New York: Columbia University Press, 2003).

210 Istilah Washington Consensus dicetuskan pertama kali oleh John Williamson melalui artikel berjudul ‘What Washington means by policy reform’, dalam *Latin American*

pembangunan ekonomi, penulis melihat perbedaan itu lebih pada perbedaan pandangan praktik dan paradigma lokal dalam melihat hubungan negara dan pasar dalam menjalankan pembangunan.

Meskipun mulanya praktik itu berangkat dari model Jepang,²¹¹ namun praktik serupa banyak diemulasi oleh negara-negara lain dikenal dengan negara-negara industrial baru (*new industrial countries*, NICs) di tahun 1980/1990-an.²¹² Belakangan dengan kebangkitan Tiongkok, model pembangunan tersebut mendapatkan aksentuasi baru dengan adanya perbedaan antara negara pembangunan model Tiongkok sebagai varian dari model Jepang yang sudah klasik.²¹³ Robert Wade (2014; 2017) bahkan menyebutkan adanya Paradox Amerika, untuk menggambarkan praktik intervensi negara terhadap pasar juga lazim dilakukan oleh pengambil kebijakan di AS meskipun masih terselubung jargon ekonomi liberalisme.²¹⁴ Praktik negara pembangunan meski belakangan dikaitkan dengan penurunan demokrasi di sejumlah negara,²¹⁵ namun pada dasarnya adalah bentuk variasi kapitalisme yang menekankan keragaman model pembangunan.²¹⁶

Adjustment: How Much Has Happened? Ed. J. Williamson (Washington, D.C: Institute for International Economics, 1990). Sedangkan istilah kedua dikemukakan oleh Joshua Cooper Ramo yang berjudul "The Beijing Consensus" (London: The Foreign Policy Centre, 2004).

- 211 C. Johnson, *MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-1975*. (California: Stanford University Press, 1986).
- 212 S. Haggard dan R. R. Kaufman, *Development, Democracy, and Welfare States*. (Princeton: Princeton University Press, 2020), 67, <https://muse.jhu.edu/book/75002>
- 213 M. Beeson, "Developmental states in East Asia: A comparison of the Japanese and Chinese experiences," *Asian Perspective* 33, No. 2, (2009): 5–39. <http://www.jstor.org/stable/42704671>.
- 214 R. H. Wade, "The American paradox: ideology of free markets and the hidden practice of directional thrust," *Cambridge Journal of Economics* 41, No. 3, (2017): 859–880.; J.M. Salazar-Xirinachs, I. Nübler, dan R. Kozul-Wright, "Transforming economies Making industrial policy work for growth, jobs and development (Geneva: ILO, 2014). https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_242878/lang-en/index.htm
- 215 J. Van der Westhuizen dan S. Grimm, "South Africa's Middle Power Ambitions: Riding the Dragon or being Its Pet?" dalam *Middle powers and the rise of China*, ed. B. Gilley dan A. O'Neil (Washington: Georgetown University Press, 2014), 180. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.13>
- 216 R. Peerenboom dan B. Bugaric, "The Emerging Post Washington, Post Beijing Consensus: Prospects and Pitfalls," *UCLA Journal International Law & Foreign Affairs* 11

Keragaman acuan pembangunan itu juga menjadi landasan elite ASEAN saat menimbang keanggotaan EAS, bahkan di internal elite di negara-negara besar, seperti Tiongkok dan AS dalam rentang dua dasawarsa abad ke-21. Malaysia, Kamboja, dan Vietnam pada mulanya memiliki pandangan restriktif dalam isu penambahan keanggotaan EAS, bahkan cenderung membatasi pada ASEAN plus Three. Pandangan itu berlawanan dengan posisi Indonesia, Singapura dan Thailand yang lebih melihat keterlibatan negara-negara besar lainnya, seperti India, Australia, dan Selandia Baru. Malaysia berada dalam satu posisi dengan Tiongkok dan terlihat ingin mengangkat gagasan *East Asian Economic Caucus* (EAEC) yang pernah digadang Mahathir pada tahun 1990-an. Gagasan itu cenderung menguatkan kohesi internal kekuatan negara-negara Asia Timur dan mengeksklusi kekuatan luar.²¹⁷ Berseberangan dengan pendapat itu, Indonesia bersama Singapura dan Jepang menganggap gagasan itu berpeluang bagi dominasi Tiongkok. Oleh karena itu, keterlibatan mitra-mitra Strategis lebih luas, termasuk AS, menjadi isu penting sebelum sidang pertama EAS di tahun 2005. Meskipun begitu, kedua kelompok yang berseberangan tersebut sepaham dalam menimbang penting sentralitas ASEAN di kawasan. Dengan dasar pemikiran untuk tetap menjaga sentralitas ASEAN, semua anggota ASEAN menyepakati tiga prasyarat keterlibatan dalam EAS, yaitu: (1) menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation*, selanjutnya TAC), (2) menjadi mitra dialog ASEAN, dan (3) memiliki hubungan yang substantif dengan ASEAN. Kai He (2009) menilai kesepakatan itu membuat ASEAN menjadi pemenang terbesar dalam menjaga sentralitas organisasi di tengah perseteruan gagasan dari kekuatan besar di kawasan, seperti Jepang dan Tiongkok.²¹⁸

Keberhasilan ASEAN dalam menjaga sentralitas pada paruh pertama dasawarsa milenium baru itu tidak lepas dari posisi

June 2013. <https://ssrn.com/abstract=2277427>.

217 S. Haggard, *The Political Economy of the Asian Financial Crisis*. (Washington: Peterson Institute, 2000), 79.

218 K. He, *Institutional Balancing in the Asia Pacific: Economic Interdependence and China's Rise* (New York: Routledge, 2009), 44–45.

kekuatan besar di kawasan. AS pada paruh pertama abad ke-21 masih disibukan dengan GWOT. Pada awal 2000-an, pemerintahan George W. Bush mengkritik kebijakan Presiden Clinton yang menyebut Tiongkok sebagai mitra strategis. Pemerintahan dari Partai Republik ini mengganti label tersebut menjadi kompetitor strategis. Tragedi Menara Kembar World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 mendorong elite di Washington mengubah kebijakan tersebut dan mengedepankan kerja sama dengan Beijing. Secara umum, kerja sama menjadi landasan umumnya hanya sekelompok kecil di bawah Kementerian Pertahanan AS yang bersikap lebih garang (*hawkish*), sedangkan kerja sama dikedepankan untuk menjaga stabilitas terkait titik panas di kawasan seperti persoalan Taiwan dan Semenanjung Korea.²¹⁹

Meskipun kebijakan Bush terkesan mengedepankan kampanye GWOT, bersamaan dengan itu AS menjaga intensitas perdagangan bilateral melalui Enterprise for ASEAN Initiatives (EAI). Perjanjian yang diumumkan pada 2002 pasca-Tragedi Bom Bali disebut Robert B. Zoellick selaku Deputy Menteri Perdagangan AS sebagai kebijakan melawan teror dengan perdagangan. Zoellick menarasikannya sebagai teroris tidak dapat menghancurkan fondasi perdagangan dunia meskipun mereka berhasil menghancurkan Menara Kembar WTC.²²⁰ AS menegosiasikan EAI awalnya dengan Singapura. Kemudian AS melakukan negosiasi serupa dengan Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kesepakatan antara AS-Singapura itu dinilai oleh Eul-Soo Pang (2007) sebagai pelibatan erat hubungan ekonomi dalam fondasi keamanan.²²¹ Meskipun kebijakan EAI hanya berhasil ditandatangani dengan Singapura, kebijakan tersebut pada masa

219 J. A. Bader, *Obama and China's rise: An insider's account of America's Asia strategy* (Washington DC: Brookings Institution Press, 2001), 20.

220 J. Dosch. "The United States in the Asia Pacific: still the hegemon?" dalam *The New Global Politics of the Asia-Pacific: Conflict and Cooperation in the Asian Century*, ed. M.K. Connors, R. Davison, dan J. Dosch (New York: Routledge, 2018), 40.

221 E. S. Pang, "Embedding Security into Free Trade: The Case of the United States—Singapore Free Trade Agreement," *Contemporary Southeast Asia* 29, no. 1 (2007): 2. <http://www.jstor.org/stable/25798812>.

pemerintahan Obama menjadi fondasi bagi Trans-Pacific Partnership (TPP).²²²

Kebijakan pelibatan (*engagement*) dengan Beijing masih berlanjut pada era kedua pemerintahan Presiden Bush Jr. Bahkan Deputy Menteri Luar Negeri Robert Zoellick mengundang Tiongkok untuk menjadi “pihak yang turut andil” dalam menanggulangi persoalan global dan kawasan. Walaupun ada “kebuntuan” dalam soal Taiwan dan transparansi militer, AS di era kedua pemerintahan Bush terlibat aktif dengan Tiongkok dalam Perundingan Enam Negara (*Six Party Talks*).

Pada periode ini dapat dikatakan AS bergeser dari memandang Tiongkok sebagai kompetitor strategis menjadi penerimaan bersyarat atas kebangkitan Tiongkok. Pertemuan Deputy Menlu AS-Tiongkok terjadi pada era ini dibarengi dengan peningkatan 13% anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS—terbesar dari pos anggaran lain—yang menandai menguatnya upaya diplomasi dalam politik luar negeri AS. Meskipun diwarnai oleh gambaran kegarangan politik luar negeri, era Bush Jr. mampu meredam kekhawatiran kebangkitan Tiongkok dengan tidak memandang negara Tirai Bambu itu semata dari kaca mata ketakutan.²²³ Walaupun begitu, anggapan positif elite di Washington itu, menurut Christopher Layne (2009), tidak lepas dari asumsi atas makna “pihak yang turut andil” yang didefinisikan sebagai integrasi Tiongkok ke dalam tatanan yang dikembangkan oleh AS.²²⁴ Asumsi serupa juga diterapkan negara-negara ASEAN dengan menganggap keterlibatan Tiongkok dalam pengembangan arsitektur kawasan di tengah penurunan unilateralisme AS dan peningkatan saling-ketergantungan di kawasan ini yang begitu tinggi.²²⁵

222 J. Dosch, *The United States*, 41

223 A. Warren dan A. Bartley, *US Foreign Policy and China: Security Challenges During the Bush, Obama, and Trump Administrations* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021), 49, <https://edinburghuniversitypress.com/book-us-foreign-policy-and-china.html>

224 Chan, *Looking*, 200.

225 K. He, “Institutional balancing and international relations theory: Economic interdependence and balance of power strategies in Southeast Asia,” *European Journal of International Relations* 14, No. 3 (2008): 500–501. <https://doi.org/10.1177/1354066108092310>

Di lain pihak, pemerintahan Hu Jintao di awal dasawarsa 2000an melakukan Diplomasi Tebar Pesona (*charm diplomacy*). Tiongkok begitu aktif dalam mendukung perluasan arsitektur kawasan yang disokong oleh ASEAN. Mulai dari mendukung kebangkitan ekonomi negara-negara yang terimbas krisis finansial Asia, hingga mendukung dan menandatangani TAC (2003), yang berkelanjutan dengan penandatanganan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement, 2004). Penandatanganan tersebut menurut Malcolm Cook (2008) menunjukkan “faktor Tiongkok” dari sisi negara-negara ASEAN, yang menunjukkan kekhawatiran ASEAN atas ketimpangan kekuatan ekonomi dengan negara Tirai Bambu itu. Pada periode awal tahun 2000an, Tiongkok merupakan negara penerima investasi langsung terbesar dari Jepang dibandingkan enam negara ekonomi besar ASEAN lainnya. Penandatanganan FTA dengan Tiongkok tersebut merupakan strategi kooptasi atas kemungkinan dominasi dan persaingan dengan Tiongkok selain upaya untuk mendapatkan akses pasar domestik Tiongkok.²²⁶ Di sisi Beijing, elite pengambil kebijakan melihat kawasan Asia Tenggara bukan semata penyuplai bahan mentah dan pasar bagi produksi domestiknya. Persepsi Beijing terhadap ASEAN secara strategis juga terbentuk dari pengalaman sejarah yang menjadikan Asia Tenggara sebagai batu loncatan Barat sejak Perang Opium. Oleh karenanya, Strategi Kebangkitan Damai (*Peaceful Rise*) di era pemerintahan Hu Jintao berupaya memberikan jaminan strategis dan pengaruh diplomatik di kawasan terhadap kebangkitan Tiongkok serta membuka kemungkinan kerja sama. Kedua pihak, baik ASEAN dan Tiongkok, pada era dasawarsa 2000-an mengedepankan saling tawar-menawar dalam menempatkan sosialisasi terhadap norma yang berkembang di kawasan.²²⁷

226 M. Cook, “Southeast Asia’s developing divide” dalam *International Relations and Asia’s Southern Tier: ASEAN, Australia, and India*, ed. G. Rozman dan J.C. Liow (Singapore: Springer, 2018), 69, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3171-7_5

227 A.M. Murphy, “China’s Grand Strategy toward Southeast Asia Assessing the Response and Efficacy,” dalam *China’s Grand Strategy: A Roadmap to Global Power?*, ed. David BH Denoon (New York: NYU Press, 2021), 123, <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479804085.003.0006>

Pada dasawarsa pertama abad ke-21, arsitektur keamanan kawasan terpengaruh oleh hubungan yang saling menahan diri di antara AS dan Tiongkok. Hal tersebut terjadi karena fokus utama Washington masih pada perang melawan terorisme, sedangkan Beijing terlihat kecenderungan membangun kepercayaan strategis melalui diplomasi tebar pesona yang lebih ofensif. Pada periode ini dapat dikatakan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok juga terjalin karena adanya hal-hal tersebut. Indonesia menikmati tingginya permintaan sumber bahan mentah Tiongkok yang sedang lapar energi guna memenuhi pertumbuhan ekonominya, terutama pada tahun 2000–2011.²²⁸ Perdagangan dan dukungan terhadap arsitektur yang ramah dengan negara tetangga menjadi ujung tombak Tiongkok yang berhasil di paruh pertama dasawarsa abad ke-21. Meskipun begitu, diplomasi yang bersandar pada perdagangan intra kawasan itu masih dinilai lemah dan tidak serta merta meminimalkan peran AS sebagai penjamin keamanan kawasan.²²⁹

Ironisnya, saat kepemimpinan Bush Jr. sibuk dengan konflik di Afganistan dan Irak, AS justru mengabaikan peran yang diharapkan itu. Salah satu indikasi kuatnya adalah ketidakhadiran Menlu Condoleeza Rice di pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF), yang merupakan absensi pertama Menlu AS di pertemuan tersebut.²³⁰ Penekanan AS masih terpusat pada pendekatan keamanan yang membuat instrumen ekonomi hanya menempati posisi sekunder. Selain itu sikap elite di Washington terhadap praktik diplomasi di kawasan masih belum seluwes Tiongkok yang menikmati ASEAN Way dalam membutuhkan proses panjang untuk mencapai konsensus.

228 R. Garnaut, "Indonesia's resources boom in international perspective: policy dilemmas and options for continued strong growth," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, No. 2 (2015): 191. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061910>

229 R. Sutter, "China's Rise, Southeast Asia, and the United States: Is a China-centered Order Marginalizing the United States?," dalam *China, the United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics*, ed. R. Sutter, E. Goh, dan S. Simon (New York: Routledge, 2008), 100. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203946060-16/china-rise-southeast-asia-united-states-china-centered-order-marginalizing-united-states-robert-sutter>

230 M. Beeson, *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and beyond* (New York: Routledge, 2008), 115.

B. RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK DI ABAD PASIFIK: ANTARA INDO-PASIFIK DAN BELT ROAD INITIATIVES

Paruh kedua dasawarsa abad ke-21, perubahan dinamika politik kekuatan besar di kawasan mengalami perkembangan menuju wacana Indo-Pasifik. Hubungan rivalitas strategis antara AS-Tiongkok mengalami intensitas baru terkait dengan perimbangan kekuatan dan persepsi ancaman pasca-GFC. Berbarengan dengan itu, asertivitas Tiongkok mengemuka pada kisaran 2009–2010.²³¹ Tiongkok juga tampil lebih aktif di panggung diplomasi global melalui kelembagaan internasional, baik kelembagaan yang bersandar pada kepemimpinan AS atau yang dikembangkan sendiri melalui program BRI. Secara umum, relokasi kapabilitas dan perhatian di era pemerintahan Obama dan intensitas politik luar negeri Tiongkok menjadi faktor krusial dinamis lingkungan strategis di kawasan.

Rivalitas AS dan Tiongkok pada paruh kedua ini terkait erat dengan pergantian kepemimpinan domestik di kedua negara besar tersebut. Presiden Obama sebagai pengganti Presiden Bush Jr. menunjukkan arah baru dengan menekankan pada peningkatan hubungan diplomatik, baik itu landasan tradisional hubungan bilateral AS dengan negara aliansinya maupun sekaligus penguatan relasi dengan kelembagaan setempat. Hal itu disampaikan Presiden Obama saat EAS di Bali pada tahun 2011, “saya ingin semua pihak tahu sejak awal, pemerintahan saya berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan tiap negara di kawasan, sekaligus juga dengan

231 Tulisan awal yang mengulas tema asertivitas Tiongkok adalah tulisan A.I. Johnston “How New and Assertive Is China’s New Assertiveness?,” *International Security* 37, No. 4, (2013). Tulisan sinology asal Harvard itu mengupas peningkatan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi global dan juga media internasional yang mengesankan peningkatan asertivitas Tiongkok dengan melihat pada sejumlah kasus yang dijadikan rujukan seperti kasus penyelesaian sengketa perbatasan di Laut China Selatan dan Laut China Timur yang melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara tetangga. Artikel Johnston itu menjadi rujukan utama (lebih dari 700 sitasi) dan menegaskan adanya faktor diskursif antara konstruksi asertivitas dan posisi relatif AS dan Tiongkok pasca-GFC (2008).

organisasi kawasan”²³² Pernyataan itu menguatkan pidato Obama di Canberra sebelumnya yang menegaskan penguatan aspek persilangan ekonomi dan keamanan, sekaligus relasi antar warga negara (*people-to-people*).²³³ Pernyataan Presiden Obama yang menyebut dirinya sebagai Presiden Pasifik Pertama itu seakan menjawab ketimpangan yang selama ini dirasakan dalam dualisme wajah Atlantik-Pasifik AS. Negara adidaya itu menurut analisis mendalam dari Hemmer dan Katzenstein (2002) meletakkan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan kebijakan luar negeri dua pesisir (*bi-coastal*) antara trans-Atlantik dan trans-Pasifik. Di kawasan pesisir yang menghubungkan AS dengan Eropa, Washington begitu mengedepankan pendekatan multilateralisme, sementara di pesisir Pasifik wajah utama Washington lebih menampakkan sisi pendekatan bilateralisme.²³⁴ Sejak tahun pertama pemerintahannya, Obama menguatkan sisi Pasifik yang banyak terabaikan dalam politik luar negeri AS. Bukan hanya dalam tingkat strategis, namun juga personal dan peran migran Asia bagi pertumbuhan ekonomi AS. Pada pidato di Tokyo tahun 2009, Obama menyampaikan:

The United States of America may have started as a series of ports and cities along the Atlantic Ocean, but for generations we have also been a nation of the Pacific. Asia and the United States are not separated by this great ocean; we are bound by it. We are bound by our past -- by the Asian immigrants who helped build America, and the generations of Americans in uniform who served and sacrificed to keep this region secure and free. We are bound by our shared prosperity -- by the trade and commerce upon which millions of jobs and families depend. And we are bound by our people -- by

232 J. Calmes, “Obama’s Trip Emphasizes Role of Pacific Rim,” *The New York Times*, 18 November 2011, http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/asia/obamas-trip-sends-message-to-asian-leaders.html?_r=0, diunduh 12 Agustus 2016.

233 The White House, “Remarks By President Obama to the Australian Parliament,” Washington D.C.: Office of the Press Secretary, 2011, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>

234 C. Hemmer dan P.J. Katzenstein, “Why is there no NATO in Asia? Collective identity, regionalism, and the origins of multilateralism,” *International Organization* 56, No. 3 (2002): 575–607. <https://doi.org/10.1162/002081802760199890>

the Asian Americans who enrich every segment of American life, and all the people whose lives, like our countries, are interwoven.

My own life is a part of that story. I am an American President who was born in Hawaii and lived in Indonesia as a boy. My sister Maya was born in Jakarta, and later married a Chinese-Canadian. My mother spent nearly a decade working in the villages of Southeast Asia, helping women buy a sewing machine or an education that might give them a foothold in the world economy. So the Pacific Rim has helped shape my view of the world.

Pada pidato tersebut, Obama juga menyinggung hubungan AS-Tiongkok yang disebutnya “kami menyambut baik upaya Tiongkok untuk lebih berperan aktif dalam pentas dunia—sebuah peran yang setimpal antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tanggung jawab globalnya.” Obama juga menyebutkan sentralitas ASEAN sebagai forum penting dalam menjaga dialog antar-pemimpin di kawasan itu, serta menyebut kehadirannya di EAS sebagai bagian dari komitmen kehadiran AS secara formal di kawasan.²³⁵

Pergeseran ini juga diikuti dengan sejumlah langkah penguatan di level diplomatik. Hillary Clinton menjadi Menlu AS pertama yang mengunjungi sekretariat ASEAN dan menempatkan perwakilan AS di ASEAN, sekaligus Menlu pertama yang selalu menghadiri pertemuan ASEAN yang disebutnya “poros pertumbuhan arsitektur kelembagaan kawasan.”²³⁶ Pandangan AS pada awal pemerintahan Obama tampak masih melanjutkan pendapat Zoelick (2005) tentang pelaku yang bertanggung jawab (*responsible stakeholder*), terlihat dari pernyataan Menlu Clinton di Beijing pada Februari 2009 yang menyebutkan “kita harus melihat ke dalam isu domestik masing-masing untuk

235 The White House Office of the Press Secretary, “Remarks by President Barack Obama at Suntory Hall,” *The White House President Barrack Obama*, 14 November 2009, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-suntory-hall>

236 A. M. Murphy, “Indonesia Responds to China’s Rise,” dalam *Middle powers and the rise of China*, ed. B. Gilley dan A. O’Neil (Washington: Georgetown University Press, 2014), 139. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.11>.

mencari solusi, tetapi kita harus juga melihat sesama negara lain untuk mencari peran kepemimpinan dan merancang dan mengimplementasi respons global yang terkoordinir agar tercipta stabilitas ekonomi dunia dan memulai pemulihannya.²³⁷ Pernyataan Clinton terkait dengan pemulihan ekonomi pasca-GFC ini senada dengan pernyataan Presiden Obama di Tokyo pada tahun yang sama yang menekankan pada perubahan peran Tiongkok dan penerimaan hubungan yang sesuai dengan perubahan status dan peran Tiongkok itu.

Pada tahun pertama kepresidenannya (2009), Presiden Obama mengadakan lawatan kenegaraan ke Beijing. Lawatan itu menghasilkan pernyataan bersama yang di dalamnya terdapat paragraf yang menyebutkan saling menghormati kepentingan inti (*core interests*) masing-masing pihak.²³⁸ Penyantuman tersebut menurut ulasan diplomat yang pernah menjadi Duta Besar Swedia di Beijing merupakan ketidak-suksesan besar. Menurut diplomat tersebut, paragraf itu berarti mengamini klaim Beijing terhadap Tibet, Taiwan, dan bahkan Laut China Selatan yang dalam dokumen Tiongkok selalu disebut sebagai kepentingan inti.²³⁹ Namun, pendapat itu dibantah oleh Jeffrey A. Bader yang terlibat dalam perumusan 41 paragraf kesepakatan tersebut. Selain menegaskan bawa frasa kepentingan inti hanya pengulangan dari bahasa tradisional dalam komunikasi yang pernah ada sebelumnya, Bader (2012) menyatakan

237 Warren dan Bartley, *US Foreign*, 81.

238 Istilah "*Core interests*" atau kepentingan-kepentingan pokok pertama kali digunakan oleh media massa Tiongkok pada tahun 2004 untuk menyebut isu kedaulatan yang mencakup Taiwan, Tibet, dan Xinjiang. Pada tahun 2009, Dai Binggou, seorang *state councilor*, secara resmi mengartikan "kepentingan-kepentingan pokok Tiongkok" dalam tiga aspek: (i) system dasar dan keamanan negara; (ii) kedaulatan negara dan integritas teritorial; dan (iii) stabilitas pembangunan ekonomi dan masyarakat. Sejak saat itu, cakupan konsep ini terus meluas. Dokumen resmi pemerintah Tiongkok (2011 White Paper) menambahkan "pembangunan yang damai" dan "reunifikasi nasional" sebagai bagian dari "China's core interests." Lihat J. Zhou "China's Core Interests and Dilemma in Foreign Policy Practice." *Pacific Focus* 34, No. 1 (2019): 32. <https://doi.org/10.1111/pafo.12131>

239 B. Ljunggren, "From Obama to Trump, and beyond: Washington's painful search for a credible China policy," dalam *The United States in the Indo-Pacific: Obama's Legacy and the Trump Transition*, ed. O. Turner dan I. Parmar (Manchester: Manchester University Press, 2020), 197. <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00021>

komunike bersama tersebut merupakan bagian penting, bukan saja menyangkut hubungan bilateral kedua negara, melainkan mencakup juga konteks kepentingan dengan sekutu dan mitra keamanan strategis AS di kawasan. Komunike Obama-Hu itu juga secara eksplisit mencantumkan sikap terbuka Tiongkok atas AS di kawasan dalam kalimat “[China]... *welcome(s) the United States as an Asia-Pacific nation that contributes to peace, stability and prosperity in the region.*”²⁴⁰ Kalimat penting itu merupakan langkah diplomatis dari kedua belah pihak untuk meminimalisir saling eksklusif masing-masing pihak. Bader (2012) juga menuliskan soal penegasan personal Presiden Obama saat berdiskusi empat mata dengan Presiden Hu Jintao bahwa peningkatan kehadiran AS di kawasan bukan untuk membendung dan menghalangi kemajuan yang tengah diraih Tiongkok.

Upaya pemerintahan Obama untuk menguatkan narasi kebijakan AS sebagai kekuatan setempat (*resident power*) di kawasan Asia Pasifik tidak lepas dari relokasi kekuatan militer AS akibat GWOT yang penggelaran kekuatan berlebih (*overstretch*). Tak dapat dipungkiri, relokasi itu menguatkan kesan pendekatan Asia pivot atau Asia Rebalance merupakan pendekatan politik-keamanan yang utamanya adalah untuk membendung kekuatan Tiongkok di kawasan.²⁴¹ Namun, sesungguhnya ada tiga elemen utama dari Asia Rebalance, yaitu: 1) elemen keamanan; 2) elemen diplomasi bilateral dan multilateralisme, serta 3) elemen ekonomi. Elemen pertama yang banyak mengundang diskusi ini sesungguhnya berperan sebagai respons atas keterkaitan kepentingan keamanan dan ekonomi AS dengan perkembangan kawasan. Kutipan langsung dari dokumen Departemen Pertahanan AS menyebutkan:

240 J. A. Bader, *Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia Strategy* (Washington DC: Brookings Institution Press, 2012), 54–56. <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt6wpd6d>.

241 H. Meijer, “Introduction: The Reconfiguration of American Primacy in World Politics: Prospects and Challenges for the US Rebalance toward Asia,” dalam *Origins and evolution of the US rebalance toward Asia: Diplomatic, Military, And Economic Dimensions*, ed. H. Meijer (New York: Palgrave MacMillan 2015), 1. <https://link.springer.com/book/10.1057/9781137440372>

Kepentingan ekonomi dan keamanan AS terkait erat dengan perkembangan yang membentang dari Pasifik Barat dan Asia Timur hingga kawasan Samudra Hindia dan Asia Selatan, menciptakan perpaduan antara tantangan dan peluang yang terus berkembang. Oleh karena itu, sementara militer A.S. akan terus berkontribusi pada keamanan secara global, kita perlu menyeimbangkan kembali ke kawasan Asia-Pasifik.²⁴²

Poin penting dari pernyataan tersebut adalah konstruksi kawasan Asia Pasifik yang juga mencakup wilayah Samudra India. Meskipun dokumen Dephan (2012) itu tidak menyebut satu pun kata “Indo-Pasifik”, namun tidak bisa dipungkiri konstruksi kawasan Asia Pasifik yang dimaksud dalam dokumen itu sesuai dengan konstruksi yang pada tahun 2007 disebut oleh PM Shinzo Abe sebagai tempuran dua samudra (*confluence of two seas*) dan belakangan ramai dengan sebutan Indo-Pasifik.²⁴³

Elemen kedua memberikan dukungan positif terhadap keberadaan arsitektur kawasan yang berpusat pada sentralitas ASEAN, sedangkan elemen ekonomi adalah hal yang penting namun kerap kurang mendapat ulasan yang memadai. Hugo Meijer (2015) melihat aspek ekonomi ini berangkat dari kenyataan pertumbuhan kawasan ini dan pentingnya bagi perekonomian AS. Perdagangan AS dengan kawasan Asia Timur-Pasifik bertumbuh sebanyak 22% pada tahun 2008 dan 2012, melampaui pertumbuhan perdagangan global AS yang mencapai 13%. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa ke kawasan yang sama mencapai nilai 555 miliar dolar AS, yang meningkat 31% dari angka tahun 2008. Oleh karenanya, Scot A. Marciel (2013) dalam

242 US Department of Defense, *Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense* (Washington: US Department of Defense, 2012), 2. *Italic sesuai dengan asli.*
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/defense_guidance-201201.pdf

243 Ministry of Foreign Affairs of Japan, “‘Confluence of the Two Seas’ Speech by H. E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India.” Ministry of Foreign Affairs of Japan 22 August 2007. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>

rapat dengar pendapat dengan Senat menilai pemanfaatan dinamika ekonomi Asia Timur-Pasifik sangat penting bagi kepentingan AS.²⁴⁴

Secara mendalam, Marciel selaku Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacific Affairs Kemenlu AS memaparkan bahwa pendekatan AS di kawasan juga melibatkan aspek hubungan ekonomi bilateral, seperti FTA dengan Singapura, FTA dengan Korea Selatan, FTA dengan Jepang, dan FTA dengan Australia. Selain mendorong kerja sama melalui APEC yang disebutnya telah berkembang lebih mapan, Marciel pada kesempatan yang sama menguraikan tentang kerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui skema *Expanded Economic Engagement* (E3) pada tahun 2012. Skema tersebut bertujuan menjadi fondasi dan persiapan negara-negara ASEAN untuk dapat terlibat dalam skema yang lebih “berstandar tinggi” di TPP (*Trans-Pacific Partnership*).²⁴⁵ Skema kerja sama perdagangan bebas “berstandar tinggi” ala TPP ini ditekankan oleh Menlu John Kerry sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan dari pendekatan keamanan dan diplomatis. Kerry (2013) dalam kolom opini di *LA Times* menuliskan, “stabilitas dan kemakmuran membutuhkan lebih dari sekadar keamanan. Komitmen bersama untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi adalah bagian dari mengapa kesepakatan Trans-Pacific Partnership adalah landasan kebijakan ekonomi presiden di Asia.”²⁴⁶ TPP juga menunjukkan keterkaitan dari penjangkaran hubungan AS di kawasan sekaligus nexus kepentingan ekonomi-keamanan. Kesan itu kuat pada pernyataan Menhan Ash Carter (2015) yang menyatakan, “... [memaknai] kebijakan perimbangan secara umum, penetapan TPP merupakan hal penting bagi saya yang sebanding dengan pengeluaran kapal induk. Kebijakan itu akan

244 U.S. Senate, Subcommittee On East Asian And Pacific Affairs, Committee On Foreign Relations, “Rebalance To Asia Iv: Economic Engagement In The Asia–Pacific Region,” (Washington DC: U.S. Government Printing Office; December 18, 2013), 7. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/121813_Transcript_Rebalance%20to%20Asia%20IV%20Economic%20Engagement%20in%20the%20Asia%20Pacific%20Region.pdf

245 U.S. Senate, *Rebalance*, 10.

246 J. F. Kerry, “John Kerry on Forging a Pacific Future.” *Los Angeles Times*, 18 Oktober, 2013. <https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-kerry-asia-20131018-story.html>

memperdalam aliansi dan kemitraan kita dengan negara-negara di kawasan, dan penegasan komitmen jangka panjang di Asia Pasifik. Selanjutnya, hal itu akan membantu kita dalam mempromosikan sebuah tatanan global yang sejalan dengan kepentingan dan nilai Amerika Serikat.”²⁴⁷

Meskipun dianggap sebagai batu pijakan bagi kebijakan ekonomi dari strategi Asia Rebalance, sesungguhnya TPP mulanya dibentuk oleh Singapura, Brunei, Chile dan Selandia Baru pada 2005 sebagai Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP). AS sendiri bergabung pada tahun 2008, dan Jepang pada tahun 2013 melengkapi 12 negara calon anggota. Kerja sama ini dianggap sebagai “*next Generation FTA*”²⁴⁸ atau bila diperbandingkan dengan Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP), pakar ekonomi politik Michael Mastanduno (2020) mengkategorikan TPP sebagai berstandar tinggi karena melampaui persoalan restriksi tarif dan mencakup 20 area pembahasan yang sebagiannya terdiri dari HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), perburuhan dan lingkungan hidup.²⁴⁹ Sebagai mana RCEP yang sering disalahpahami sebagai “FTA yang dipimpin Tiongkok” atau setidaknya “FTA yang disokong oleh Tiongkok”, TPP kerap dipersepsikan sebagai upaya AS membendung inisiatif Tiongkok untuk membangun tatanan kawasan yang mengorbit ke Tiongkok. Keduanya dianggap *proxy* bagi kedua kekuatan besar tersebut dalam memperebutkan pengaruh di kawasan.²⁵⁰

247 “Secretary of Defense Ash Carter Asia-Pacific Remarks McCain Institute, Arizona State University Monday, April 6, 2015,” *The White House President Barrack Obama*, 6 April, 2015, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/asia-pacific_speech_asu_asdelivered.pdf

248 G. de Rougé, “The Political Economy of the US Rebalance: Revisiting the ‘Web of Linkages’ between National Security and Economic Prosperity,” dalam *Origins and evolution of the US rebalance toward Asia: Diplomatic, Military, And Economic Dimensions*, ed. H. Meijer (New York: Palgrave MacMillan 2015), 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137440372_5

249 M. Mastanduno, “A Grand Strategic Transition? Obama, Trump and the Asia Pacific Political Economy,” dalam *The United States in the Indo-Pacific: Obama’s Legacy and the Trump Transition*, ed. O. Turner dan I. Parmar (Manchester: Manchester University Press, 2020), 181. <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00021>.

250 J. D. Wilson, “Mega-regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing between the TPP and RCEP?” *Journal of Contemporary Asia* 45, No. 2, (2015): 352.

Walau begitu, pernyataan pengambil kebijakan di Washington yang secara eksplisit memilih TPP dibandingkan RCEP menunjukkan perbedaan ambisi kerangka perdagangan.²⁵¹ Tidak bisa dipungkiri, ada kepentingan untuk menjaga pengaruh AS di kawasan melalui seperangkat aturan. Seperti yang ditegaskan Presiden Obama di depan Kongres pada Januari 2015 sembari meminta dukungan untuk membangun FTA,

China wants to write the rules for the world's fastest-growing region. That would put our workers and our businesses at a disadvantage. Why would we let that happen? We should write those rules. We should level the playing field. That's why I'm asking both parties to give me trade promotion authority to protect American workers, with strong new trade deals from Asia to Europe that aren't just free, but are also fair. It's the right thing to do.²⁵²

Selain menegaskan keterkaitan kepentingan konstituen domestik, Obama dalam pidato tersebut jelas menyebutkan persaingan itu dilakukan melalui pengerangkaan yang sesuai dengan kepentingan AS. Aaron L. Connelly (2015) menyebut hal tersebut sebagai indikasi merkantilisme dalam kebijakan ekonomi luar negeri,²⁵³ namun Mathew P. Goodman membantahnya saat berbicara di depan Senat AS. Goodman mengaskan bahwa TPP bukanlah sebuah upaya pembendungan ekonomi atas Tiongkok, namun, "TPP dirancang berlawanan dari tujuan untuk membendung mereka, tetapi tujuannya adalah untuk menarik mereka ke dalam tatanan global yang membuat mereka mengikuti aturan dari jalan yang sudah kita menangkan lebih dari setengah abad. Jadi, gagasan pembendungan tidak pernah selaras dengan konsep Strategi AS."²⁵⁴

251 Wilson, "Mega-regional, 349

252 The White House Office of the Press Secretary, "Remarks by the President in State of the Union Address, January 20, 2015," (Washington DC: Office of the Press Secretary, 2015), <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-address-january-20-2015>

253 A. L. Connelly, "Congress and Asia-Pacific Policy: Dysfunction and Neglect," *Lowy Institute for International Policy*, (2015): 12. <http://www.jstor.org/stable/resrep10140>

254 U.S. Senate, "Rebalance," 51.

Pandangan ini setidaknya mengindikasikan ambisi AS untuk mensosialisasikan Tiongkok dalam kerangka hubungan antar-negara yang sesuai dengan norma tatanan liberal, senada dengan sebutan “*responsible stakeholders*” yang disampaikan di era Bush Jr. (2005). Pemerintahan Obama berniat untuk menjalan kepemimpinan hegemoniknya dalam arsitektur keamanan kawasan, khususnya ekonomi kawasan. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah faktor historis dan semangat yang berbeda saat AS berhadapan dengan kawasan ini di periode-periode sebelumnya. Mastanduno (2020) menilai kondisi terkini AS saat berupaya melaksanakan kepemimpinan hegemoniknya melalui Asia Rebalance berhadapan dengan kondisi merawat hegemoni dengan prasarana yang lebih terbatas (*preserve hegemony with more limited means*) yang oleh karenanya spirit kebijakan Obama lebih tepat disebut sebagai *congaement-containment and engagement*.²⁵⁵ Keterbatasan AS tersebut tidak lepas dari penggelaran sumber daya yang berlebihan akibat GWOT dan juga tekanan sektor usaha domestik untuk menjaga *trade* defisit yang terjadi, yang oleh karenanya menurut Mastanduno (2020) merupakan tantangan langsung atas praktik ekonomi Tiongkok merupakan bentuk kapitalisme di bawah komando negara (*state led capitalism*).

Kontestasi gagasan dan rivalitas AS-Tiongkok tersebut merupakan intensifikasi atas strategi perimbangan kelembagaan (*institutional balancing*) yang sudah berkembang sejak dekade 1990an. Kelembagaan kawasan menjadi *proxy* dari kedua kekuatan besar itu untuk menegaskan supremasi gagasan terhadap negara-negara lain di kawasan. Perimbangan kelembagaan sendiri menurut Kai Hei (2009) dipengaruhi oleh polaritas yang merupakan gambaran dari distribusi kapabilitas material dan kuat lemahnya saling-ketergantungan ekonomi dalam suatu kawasan. Terdapat beberapa pola bentuk perimbangan kelembagaan yang dapat terjadi berdasarkan faktor determinan tersebut, yaitu: 1) perimbangan yang saling mengekslusi bila ada salah satu kekuatan besar yang mendominasi; 2) bentuk perimbangan kelembagaan yang saling koeksistensi karena adanya

255 Mastanduno, “A grand strategic,” 180–2

kepemimpinan kembar; dan/atau 3) perimbangan yang inklusif di mana ada penjemabatan oleh kekuatan menengah kawasan atau kelembagaan yang saling merangkul.²⁵⁶ Dalam konteks strategi Obama dalam merespons rivalitas AS-Tiongkok bentuk kedua dan ketiga lebih memungkinkan. Hal ini dikarenakan momen unilateralisme sudah pudar dan kedua kekuatan besar itu harus mempertimbangkan sikap negara-negara setempat dalam merespons tawaran bentuk kelembagaan yang ditawarkan baik oleh AS dan Tiongkok.

Berdasarkan bentuk variasi tersebut penting untuk melihat respons Tiongkok terhadap dinamika kawasan, baik di era Asia Rebalance yang digelar Obama maupun “America First” Donald Trump. Kebangkitan (*rising*) atau kebangkitan kembali (*resurgence*) Tiongkok menjadi persoalan yang tidak bisa mengabaikan keterkaitan aspek domestik dan internasional. Tanpa mengecilkkan pendapat penelitian yang melihat pasca-GFC merupakan titik balik yang menunjukkan asertivitas Tiongkok, kebangkitan Tiongkok harus juga memperhatikan dua faktor domestik. Dua hal yang penting itu adalah (1) ekonomi Tiongkok yang memasuki “*new normal*” pasca-GFC; dan (2) kepemimpinan Xi Jinping yang mengedepankan diplomasi negara besar ala Tiongkok (Great Power Diplomacy with Chinese Characteristics, 大国外交, daguo wajijiao) pada tahun 2013.²⁵⁷

Setelah hampir selama tiga dasawarsa mengalami pertumbuhan dua digit, ekonomi Tiongkok yang mengalami “*new normal*” mendorong pengambil kebijakan di Beijing untuk lebih aktif merespons pelambatan ekonomi. Faktor pertama ini menempatkan Tiongkok pada dilema antara membangun pasar ekonomi domestik sekaligus menjaga suplai ekspor melalui program yang kemudian dikenal sebagai *Belt and Road Intiatives* (BRI).²⁵⁸ BRI, sebelumnya

256 He, *Institutional*, 11.

257 Istilah ini (大国外交, daguo wajijiao) secara resmi diartikan sebagai diplomasi negara besar. Dikutip dari Zhimin Chen, “China’s Power from a Chinese Perspective (II): Back to the Center Stage,” dalam *Assessing China’s Power*, ed. Jae Ho Chung (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 282. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137534613_13

258 M. Lanteigne, *Chinese foreign policy: an introduction*, (New York: Routledge, 2015), 81. <https://doi.org/10.4324/9780429437908>

dikenal dengan OBOR (*One Belt One Road*), merupakan gabungan wajah maritim dan kontinental Tiongkok. Pengambil keputusan di Beijing berupaya menjaga keseimbangan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi di provinsi pesisir, sekaligus membangun distribusi ke provinsi pedalaman yang terhubung ke Asia Tengah dan Eropa yang dinarasikan sebagai Jalur Sutra Abad ke-21.²⁵⁹

BRI ini masih diperdebatkan sebagai sebuah strategi yang utuh dan solid,²⁶⁰ meskipun begitu, Jane Golley dan Michael Wesley (2020) melihat tiga hal sebagai karakteristik dari BRI. Pertama adalah pembangunan Tiongkok dengan fokus sektor infrastruktur; kedua adalah kapitalisme di bawah komando negara; dan ciri ketiga adalah mode finansial pembangunan yang khas Tiongkok.²⁶¹ Seiring perkembangannya, BRI terbentuk oleh rendahnya pertumbuhan konsumen di pasar domestik, overkapasitas dari BUMN Tiongkok, potensi instabilitas sistem finansial Tiongkok, dan upaya internasionalisasi Renminbi dalam perdagangan internasional seiring risiko ketergantungan terhadap dolar AS di tengah perang dagang yang belakangan meletus.²⁶² Secara pendanaan, BRI yang juga terkadang dibandingkan dengan Marshall Plan yang dilakukan AS di Eropa

259 N. Eto, "Japan-China Strategic Communications Dynamics under the Belt and Road Initiative: The Case of "Third Country Business Cooperation," *Asian Perspective* 45, no. 3 (2021): 543. doi:10.1353/apr.2021.0026.

260 Sebanyak 2 dari 4 temuan laporan penelitian dari Leiden Asia Center yang dieditori oleh Florian Schneider menyebut BRI ini merupakan "*a pluralist endeavour*" dan "*Old wine in new bottles*". Kedua temuan itu berdasarkan adanya keragaman tafsir dari setiap agensi dari Pemerintah Tiongkok dan landasan dari kegiatan yang dilabeli sebagai bagian dari BRI tidak selalu hal baru. Lihat F. Schneider, ed., *Global Perspectives on China's Belt and Road Initiative: Asserting Agency Through Regional Connectivity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021), 24–5. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/45948>

261 J. Golley dan M. Wesley, "The Geoeconomics of The Belt and Road Initiatives," dalam *The Belt and Road Initiative and the Future of Regional Order in the Indo-Pacific*, ed. M. Clark, M. Sussex, dan N. Bisley (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2020), 98.

262 F. Schneider, "Actors and agency in China's Belt and Road Initiative: an introduction," dalam *Global Perspectives on China's Belt and Road Initiative: Asserting Agency Through Regional Connectivity*, ed. F. Schneider, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021), 11.

Barat pasca-Perang Dunia kedua.²⁶³ Namun, pendanaan BRI jauh melebihi proyek serupa yang diinisiasi oleh AS di era Obama.

Perbandingannya pada tahun 2011, kebijakan konektivitas AS berbasis Jalur Sutra hanya memiliki dana 15 juta dolar AS, sedangkan BRI yang diresmikan pada tahun 2013 memiliki dana lebih dari 10 miliar dolar AS. Hingga tahun 2017, dana yang dialokasikan khusus untuk BRI mencapai 40 miliar dolar AS, disertai janji lebih dari 100 miliar dolar AS dengan pendanaan proyek melalui perbankan Tiongkok. Dengan pendanaan sebesar itu, BRI dalam usia empat tahun telah membiayai 900 proyek.²⁶⁴ Komentar atas jumlah proyek yang masif itu, baik Elisabeth Economy (2018) maupun Florian Schneider (2021), menerangkan bahwa proyek tersebut tidak semuanya baru pasca-pengumuman BRI tahun 2013. Proyek yang dilakukan sebelum 2013 tetap bisa diusulkan sebagai bagian dari BRI. Kenyataan yang disebut oleh Florian Schneider (2021) sebagai *old wine in a new bottle*.

Berbarengan dengan BRI sebagai sebuah mega-proyek konektivitas dan perdagangan, Tiongkok di era Presiden Xi Jinping menggelar diplomasi negara besar. Pada pidato di depan “the Central Foreign Affairs Work Conference” pada November 2014, Presiden Xi menegaskan adanya perubahan hubungan Tiongkok dan dunia. Oleh karenanya, ia menegaskan keterkaitan aspek internasional dan domestik, baik itu pasar, sumber daya dan regulasi. Persoalan itu juga dijawab oleh Xi dengan mengumumkan pentingnya Tiongkok untuk memiliki diplomasi negara besar ala Tiongkok (*daguo wajiao*).²⁶⁵ Salah satu karakteristik dari diplomasi negara besar yang dimaksud adalah kekuatan wacana kelembagaan (*institutional discourse power, huayuquan*).

263 J. Ling, “The New Silk Road Initiative: China’s Marshall Plan,” *China International Study* 50, (2015): 7.

264 E. Economy, *The third revolution: Xi Jinping and the new Chinese state*. (New York: Oxford University Press, 2018), 193.

265 Xinhuanet, “Xi Jinping attended the Central Foreign Affairs Work Conference and delivered an important speech,” www.xinhuanet.com 29 November 2014, http://www.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm.

Frasa yang pertama kali tercantum dalam The 13th Five Year Plan (2016–2020) yang mengamanatkan Tiongkok untuk mengalokasikan kapabilitas komprehensifnya dalam memengaruhi tata kelola ekonomi global. Secara khusus, *huayuquan* mendorong Tiongkok untuk lebih aktif dalam arah pembangunan, pengambilan keputusan dan implementasi ekonomi internasional. Fokus dari strategi ini adalah Tiongkok lebih aktif lagi dalam suplai barang publik (*public goods*) dan tata kelola ekonomi internasional.²⁶⁶ Implementasi dari diplomasi dan amanat kekuatan wacana kelembagaan itu adalah BRI yang menunjukkan adanya aspek geo-ekonomi dan geopolitik dari Tiongkok. Menlu Wang Yi (2017) pada konferensi Press Kongres Rakyat Nasional ke-12 di Beijing mengklaim BRI sebagai, “*the most popular public goods and the platform for international cooperation with the brightest prospects in the world.*”²⁶⁷

Berdasarkan pendekatan *public goods*, strategi diplomasi negara besar dan penguatan kekuatan wacana kelembagaan Tiongkok berhasil mengintrusi institusi keuangan internasional (IFIs) yang mapan di bawah dominasi AS, sekaligus membentuk kelembagaan baru yang diinisiasi langsung berdasarkan BRI, seperti AIIB (Asia Infrastructure and Investment Bank), BRICS Development Bank, Shanghai Cooperation Organization Development Bank, dan pendanaan-pendanaan terkait. Xing dan Xiaowen (2020) melihat potensi konflik paradigmatik dan tatanan ekonomi global antara strategi Tiongkok dan keamanan tatanan ekonomi global di bawah hegemoni AS. Keduanya memperinci dengan merujuk pada tiga hal, yaitu aspek perubahan distribusi kesejahteraan yang diciptakan oleh program BRI, atau setidaknya mengubah margin keuntungan yang selama ini dinikmati negara-negara maju; penyebaran norma pembangunan yang disokong Tiongkok dalam bentuk kepemimpinan negara dalam

266 China Daily, “制度性话语权 (zhiguxing huayuquan): Greater say in global governance,” *China Daily* 23 November 2015. http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-11/23/content_22510054.htm.

267 Xinhuanet, “Belt and Road Initiative the most popular public goods,” <http://www.xinhuanet.com>, 8 Maret 2017, http://www.xinhuanet.com/english/2017-03/08/c_136112178.htm

pembangunan ekonomi atau yang dikenal sebagai Beijing Consensus di negara-negara yang terlibat dalam proyek BRI; dengan BRI yang berupaya meningkatkan kekuatan wacana kelembagaan, Tiongkok melalui strategi kelembagaannya berhasil melakukan *double-track strategy*, yang artinya Tiongkok memiliki kemampuan memodifikasi dari dalam IFIs yang mapan berbarengan dengan lembaga keuangan baru yang dibentuknya sebagai penyokong BRI.²⁶⁸

Pada akhir periode kedua pemerintahan Obama dan terpilihnya Xi Jinping merupakan penanda penting bagi politik negara besar di kawasan Asia Pasifik. Pada periode ini juga mulai mengemuka mega-kawasan yang belakangan ramai disebut sebagai Indo-Pasifik. Meskipun terma kawasan baru itu diawali oleh Jepang dan kemudian lebih umum digunakan oleh negara-negara yang secara politik keamanan dekat dengan AS, sebagian pengamat Tiongkok sendiri menganggap BRI sebagai strategi *hedging* atas Asia Rebalance yang digadang pemerintahan Obama.²⁶⁹ Secara regional, perdagangan regional sendiri mengalami peningkatan narasi positif sejak GFC yang disokong bukan saja karena adanya BRI, melainkan juga oleh Jepang sebagai penyokong regionalisme yang relatif lebih mapan. Regionalisasi di kawasan menunjukkan kemungkinan pergeseran dari Angsa Terbang (*Flying Gees*) yang diusung oleh Jepang menuju Naga Berderap (*Galloping Dragon*) dengan Tiongkok sebagai pusatnya.²⁷⁰ Doyle dan Rumley (2019) mendasarkan pendapat tersebut berdasarkan neraca perdagangan negara-negara kekuatan menengah yang mengalami peningkatan dengan Tiongkok. Pada tahun 2017, perbandingan persentase perdagangan barang atas delapan negara kekuatan menengah di kawasan Asia Pasifik dengan Tiongkok dan AS,

268 X. Li dan X. Zheng, "Understanding China's "One Belt and One Road" Initiative: An 'International Public Goods' Approach," dalam *The Belt and Road Initiative: An Old Archetype of a New Development Model*, ed. F.J.B.S. Leandro dan P.A.B. Duarte (Singapura: Palgrave Macmillan, 2020), 103–4. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2564-3_5

269 T. Doyle dan D. Rumley. *The rise and return of the Indo-Pacific* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 156. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198739524.001.0001>

270 Doyle dan Rumley, *The rise*, 152.

menunjukkan Naga Asia itu merupakan mitra penting perdagangan bagi negara-negara kekuatan menengah tersebut.²⁷¹

Secara umum, Tiongkok menjadi pasar utama barang dari negara-negara itu dibandingkan ekspor ke AS, kecuali Vietnam (20,1%). Tiongkok lebih mendominasi sebagai sumber impor barang dari ke delapan negara itu, dengan Vietnam sebagai negara dengan persentase impor tertinggi (25,8%). Bila persentase itu dianggap menggambarkan neraca perdagangan, empat negara (Australia, Korea Selatan, Filipina, dan Singapura) yang mengalami surplus perdagangan dengan Tiongkok, di lain pihak Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam mengalami defisit neraca perdagangan. Sementara perdagangan negara-negara itu dengan AS hampir semua mengalami surplus, kecuali Australia dan Singapura. Surplus perdagangan dengan AS tertinggi diraih oleh Vietnam. Singapura memiliki persentase ekspor yang relative kecil (<3%), sedangkan ekspor terkecil ditempati oleh Indonesia (<5%) dan Vietnam (<2%).

Tabel 4.1 Perbandingan Perdagangan Barang Antara Negara Kekuatan Menengah di Asia Timur dengan Tiongkok dan AS (2017)

	Tiongkok (%)		AS (%)	
	Ekspor ke	Impor dari	Ekspor ke	Impor dari
Australia	33,2	22,4	4,1	10,9
Indonesia	13,7	21,9	10,6	<5
Malaysia	13,5	19,6	9,5	8,3
Philipina	13,7	13,1	15	10,9
Singapura	14,5	13,8	<3	10,5
Korea Selatan	24,8	20,5	12,	10,6
Thailand	12,5	19,9	11,2	6,7
Vietnam	14,5	25,8	20,1	<2

Sumber: Doyle dan Rumley (2019), 153.

271 Kedelapan negara yang dirujuk oleh Doyle dan Rumley (2020) adalah Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.

Di tengah kebangkitan regionalisasi yang berpusat ke Tiongkok dan belum sepenuhnya terlihat keberhasilan strategi geo-ekonomi yang dirancang Obama, kepemimpinan politik di Washington bergeser dengan kehadiran Donald Trump sebagai hasil pemilu 2016. Hubungan Tiongkok-AS di era Trump-Xi mengalami penurunan dari kepemimpinan hegemonik terbatas ala Obama menjadi kepemimpinan transaksionalitas di era America First. Strategi Trump ini bukan saja memunculkan perang dagang dengan Tiongkok, melainkan juga renegotiasi defisit neraca perdagangan dengan sekutu tradisionalnya. Revisi diplomasi AS di kawasan ala Trump ini berbarengan dengan penguatan Xi Jinping di dalam kepemimpinan PKC sebagai “pimpinan inti” di tahun 2016 dengan masa jabatan yang tidak terbatas. Zhou Jinghao (2019) menilai, “Jadi, partai/negara masih memainkan peran menentukan di dalam ekonomi Tiongkok, dan ekonomi Tiongkok Kembali menjadi sebuah ekonomi-politik... Performa ekonomi Tiongkok secara langsung menggambarkan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin Tiongkok. Intinya, kinerja ekonomi Tiongkok merupakan dampak dari proses politik”²⁷²

Personalisasi politik luar negeri juga terjadi di era America First di bawah Trump. Pada kolom opini yang dimuat di USA Today, 14 Maret 2016, Trump menegaskan sikap anti FTA dan menunjukkan sisi transaksionalismenya dengan mengklaim, “*TPP is the biggest betrayal in a long line of betrayals where politicians have sold out U.S. workers.*” Berbicara guna mendulang suara dari kelas menengah pekerja Amerika, Trump juga mengkritik rekan separtainya seperti Gubernur Ohio John Kasich, Senator Ted Cruz (Texas) and Senator Marco Rubio (Florida) yang menjadi pendukung TPP.²⁷³ Presiden Trump menepati janji anti-FTA ini dengan menandatangani pengunduran diri dari TPP pada minggu pertama masa jabatannya.²⁷⁴

272 Zhou. “China’s Core,” 39.

273 D. J. Trump, “Donald Trump: Disappearing Middle Class Needs Better Deal on Trade. Job-killing Trans-Pacific Partnership Must Be Stopped!” *The USA Today*, 14 Maret 2016. <https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/03/14/donald-trump-tpp-trade-american-manufacturing-jobs-workers-column/81728584/>

274 C. Harrington dan A. Waddan. *Obama v. Trump: The Politics of Presidential Legacy and Rollback* (Edinburg: Edinburg University Press, 2020), 103. <https://doi.org/10.1515/9781474447027>

Harrington dan Waddan (2020) menilai TPP yang dirancang Obama bukannya tidak berdampak, melainkan lebih pada kesepakatan multilateral semacam TPP, belum sepenuhnya dijalankan saat presiden yang lahir di Hawaii itu melepaskan jabatannya.²⁷⁵ Eric Bradner dari CNN menyebut langkah Trump itu sebagai, “*ends all hopes for a deal Obama wanted as a major part of his legacy.*”²⁷⁶ Pemerintahan Trump dianggap banyak pengamat sebagai keluar dari tradisi kebijakan luar negeri AS yang menempatkan perdagangan bebas dan kepemimpinan di bidang ekonomi sebagai yang tidak terpisahkan. Bahkan Trump dengan kebijakan “America First” tidak menghargai atau memahami keuntungan yang didapat AS dari sistem yang dibangunnya itu.²⁷⁷

Kesan pendekatan multilateralisme terlihat saat Trump meluncurkan *Free and Open Indo Pacific Strategy* (FOIPS) saat KTT APEC di Vietnam pada November 2017. Namun, inisiasi kebijakan itu didahului dengan mengubah Pacific Command yang bermarkas di Hawaii menjadi Indo-Pacom yang melingkupi kawasan pesisir barat Amerika hingga pesisir timur Afrika. Meski nuansa perdagangan bebas kerap dinarasikan dalam FOIPS versi Trump, adanya langkah pertama seperti itu menguatkan adanya strategi geoekonomi untuk membendung dominasi Tiongkok dengan BRI-nya. Dalam *National Security Strategy (NSS) 2017* jelas menyebut kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan revisionis, sedangkan dinamika di Indo-Pasifik digambarkan dalam dokumen itu sebagai, “[A] *geopolitical competition between free and repressive visions of world order is taking place.*”²⁷⁸ Senada dengan dokumen yang dikeluarkan Gedung Putih itu, *National Defense Strategy (2018)* yang dikeluarkan oleh Department of Defense

275 Harrington dan Waddan. *Obama*, 143.

276 E. Bradner, “Trump’s TPP Withdrawal: 5 Things to Know,” CNN, 23 Januari 2017. <https://edition.cnn.com/2017/01/23/politics/trump-tpp-things-to-know/index.html>

277 M. Beeson, “Middle Powers in the International Political Economy,” dalam *The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy*, ed. T. M. Shaw, L. C. Mahrenbach, R. Modi, dan Y. C. Xu (London: Palgrave Macmillan, 2019), 206. https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-45443-0_13

278 The White House, *National Security Strategy of the United States of America (NSS) 2017* (Washington DC: Office of the Press Secretary, 2017), 43. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>.

(DoD) menyebut Tiongkok dalam kalimat lugas, “*China is leveraging military modernization, influence operations, and predatory economics to coerce neighboring countries to reorder the Indo-Pacific region to their advantage.*”²⁷⁹

Oleh karenanya, jargon “free” dalam FOIPS yang mengesankan “perdagangan bebas” sulit dipenuhi. Kebijakan Trump terhadap persoalan defisit perdagangan lebih bersifat transaksionalisme yang mengedepankan dialog bilateral demi mencapai “*fair and reciprocal trade*”. Bukan saja Tiongkok yang menjadi sasaran perundingan bilateral yang sengit, Jepang yang merupakan sekutu tradisional dan berperan penting dalam strategi hub-and-spoke juga terkena imbas.²⁸⁰ Renegosiasi itu terjadi di hampir semua mitra dagang AS yang menyebabkan negara *superpower* itu mengalami defisit neraca perdagangan, bahkan termasuk Korea Selatan yang di penghujung jabatan Obama menyepakati KORUS FTA.²⁸¹ Kebijakan renegosiasi dan pengunduran diri Trump itu membuat AS justru semakin kehilangan momen pembangunan arsitektur ekonomi kawasan. Bila menimbang multilateralisme FTA di kawasan yang mengacu pada moda perimbangan kelembagaan terdiri dari FTAAP (*Free Trade Area on the Asia Pacific*) yang lahir dari APEC, RCEP, dan TPP. Sejak pemerintahan Trump menarik diri dari TPP, AS hanya terlibat dalam FTAAP sebagai forum kerja sama kawasan, yang ironisnya tidak melibatkan India yang menjadi mitra strategis di Indo-Pasifik yang dibangun Trump. Gambaran keanggotaan negara-negara kekuatan

279 J. Mattis, *Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America*. (Washington DC: Department of Defense, 2018). <https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>

280 T. Akaha dan K. Hirata, “US Bilateralism Under Trump, Power Shift in East Asia, and Implications for Regional Security and Prosperity: A Theoretical Analysis of Japan’s Strategic Adjustment,” dalam *Trump’s America and International Relations in the Indo-Pacific*, ed. T. Akaha, J. Yuan, dan W. Liang (Cham: Springer International Publishing, 2021), 24. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75925-4_2

281 J. F. Paradise, “Changing Power Dynamics in Asia: Implications for the US-ROK Alliance,” dalam *Trump’s America and International Relations in the Indo-Pacific*, ed. T. Akaha, J. Yuan, dan W. Liang (Cham: Springer International Publishing, 2021), 53. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75925-4_1

besar dan menengah dalam kerja sama perdagangan bebas di kawasan ini diuraikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Keanggotaan Negara-Negara di Kawasan dalam Forum Multilateral Perdagangan Bebas

	FTAAP	RCEP	TPP
Tiongkok	√	√	X
India	X	√	X
Jepang	√	√	√
Rusia	√	X	X
AS	√	X	X
Australia	√	√	√
Indonesia	√	√	X
Malaysia	√	√	√
Philipina	√	√	X
Singapura	√	√	√
Korea Selatan	√	√	X
Thailand	√	√	X
Vietnam	√	√	√

Sumber: DFAT Australia dikutip dari Doyle dan Rumley (2019), hlm. 154.

Ironi lain dari Tabel 4.2 adalah posisi AS setara dengan Rusia bila dilihat dari partisipasinya dalam forum multilateral kawasan. Pun keberadaan AS di FTAAP akan berdampingan dengan Tiongkok dan Jepang dalam sebuah kesepakatan perdagangan. FTAAP bila berhasil dirumuskan akan mencakup 57% total GDP global dan 46% nilai perdagangan global. Sebagai perbandingan, TPP saat AS masih menjadi peserta negosiasi, setara dengan 40% dan 26% dari hal tersebut.²⁸²

Perkembangan gagasan FTAAP sangat menarik karena melibatkan beragam pihak. Pertama kali diusulkan oleh AS pada KTT APEC di Bogor 1994, kemudian ASEAN mengangkat gagasan itu pada KTT APEC di Hanoi (2006), lalu Presiden Xi Jinping mengangkat kembali

282 VietnamNet, "Businesses believe APEC's free trade agreement will bring few benefits," 9 November 2014, <https://www.bilaterals.org/?businesses-believe-apec-s-free>

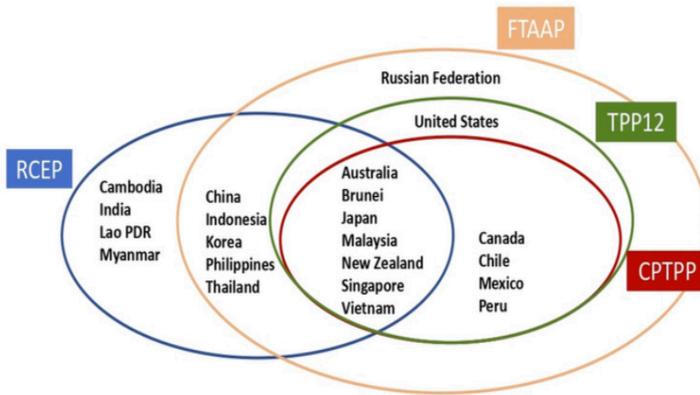
itu pada tahun 2014 dan mengusulkan negosiasi sebaiknya segera dimulai pada tahun 2020. Usulan Tiongkok itu tercantum dalam dokumen berjudul “The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of the FTAAP.”²⁸³ Walaupun masih terlalu dini untuk berkesimpulan, proyeksi Tiongkok dengan meletakkan FTAAP sebagai sebuah ancangan kekuatan wacana kelembagaannya akan bertemu dengan sikap AS yang terhadap kesepakatan multilateral yang ikut dibidannya itu, sekaligus kontribusi dan peran aktif ASEAN di dalamnya. Gambaran irisan “*spaghetti bowl*” dari tiga skema itu terlihat dalam gambar berikut yang memperlihatkan AS masih menjadi peserta negosiasi TPP. Dengan pengunduran AS, gambar di bawah ini terkoreksi dan memosisikan Paman Sam bersama Rusia di FTAAP tanpa terlibat dalam CPTP (TPP 11) dan RCEP.

Secara bilateral, Trump pada tahun pertama pemerintahannya banyak melakukan pertemuan personal dengan sederet pemimpin Asia. PM Abe dari Jepang bahkan sudah bertemu dengan Trump saat ia masih menjadi kandidat-terpilih di New York pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Trump sudah bertemu dengan PM Malcolm Turnbull (Mei 2017) setelah sebelumnya menelpon langsung dan mengundang pemimpin dari Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Pada tahun yang sama delegasi pemimpin Vietnam juga mengunjungi Washington. Disusul kunjungan Presiden Korea Selatan guna membahas sistem rudal pertahanan THAAD yang sempat menimbulkan friksi dengan Tiongkok.

Penting untuk dicatat bahwa lawatan kenegaraan di era Trump sepertinya bergeser dari era Obama yang tetap memandang penting kepatutan normatif seperti Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Pada pertengahan Mei 2017, PM Malaysia Najib Razak menjadi objek penyelidikan terkait skandal korupsi oleh Departemen Kehakiman AS, namun isu miring itu tidak menghalangi lawatannya ke Washington.²⁸⁴

283 APEC, “Annex A - The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of the FTAAP,” www.apec.org 2014 https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa,

284 R. Sutter, “Obama, Trump and US Politics and Diplomacy Towards Asia,” dalam *The United States in the Indo-Pacific: Obama’s Legacy and the Trump Transition*, ed. O. Turner



Sumber: Ferrantino (2020)

Gambar 4.1 Irisan FTAAP, TPP, dan RCEP

Beberapa pemimpin bahkan memperhatikan faktor “*managing Trump*” sebagai bagian penting menjaga stabilitas hubungan bilateral dan kawasan.²⁸⁵ Dalam konteks hubungan bilateral dan personal itu, seolah menguatkan adagium feminis bahwa “*personal is political*”, Trump dapat dikatakan mengedepankan “*emotional geopolitic*”.²⁸⁶ Bila kebijakan ekonomi Tiongkok seperti disebutkan sebelumnya menjadi sangat personal dengan penguatan “*core leader*”, kebijakan luar negeri AS secara umum menjadi “*personal is geopolitical*” di era Trump.

“*Personal is geopolitical*” di era Trump semakin menguat dengan penguatan kembali QUAD antara AS dengan tiga negara lainnya,

dan I. Parmar (Manchester: Manchester University Press, 2020), 153–5. <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00021>.

285 T. Hikutani, “Trump’s Gift to Japan: Time for Tokyo to Invest in the Liberal Order,” *Foreign Affair* 96, No. 5, (2017): 27.

286 R. Pain, “Globalized fear? Towards an Emotional Geopolitics,” *Progress in Human Geography* 33, No. 4, (2009).

yaitu Australia, Jepang, dan India. QUAD dimulai tahun 2006 pada mulanya terbentuk guna merespons persoalan keamanan maritim pasca-tsunami Asia 2004. PM Shinzo Abe kembali mengangkat ide ini pada tahun 2012 dengan menuliskan opini bertajuk “*Asia’s Democratic Security Diamond*”.²⁸⁷ Imbuhan identitas demokrasi dari keempat anggotanya membuat forum minilateral ini disebut “*maritime democracies*”,²⁸⁸ namun seiring dengan perkembangan FOIPS di era Trump kembali dihidupkan lagi pada 12 November 2017 di sela-sela pertemuan EAS di Manila. Meski digadang sebagai Quad 2.0, pertemuan pertama ini tidak menghasilkan pernyataan bersama. Hanya ada empat pernyataan pers terpisah dengan tujuan dan preferensi. Dalam tiap pernyataan itu terdapat kesamaan dalam menekankan isu keamanan Semenanjung Korea, penegakan tatanan internasional berdasarkan aturan (*rule based order*) dan promosi terhadap FOIP. Di keempat pernyataan terpisah itu, masing-masing pihak memberikan penekanan dan definisi berbeda dari setiap isu termasuk tekanan dalam FOIP itu. Berdasarkan indikasi itu, Jagannath P. Panda skeptis terhadap perkembangan Quad 2.0 dan menakarnya hanya sebagai forum konsultasi bagi masing-masing anggotanya.²⁸⁹ Hal itu dapat dipahami dengan masih lemahnya hubungan perdagangan antara masing-masing ketiga diamond yang selain AS menjadi kendala utama,²⁹⁰ selain tentunya perbedaan konsepsi FOIP AS dengan lainnya yang masih kurang menekankan aspek ekonomi.²⁹¹ Dengan kondisi

287 S. Abe, “*Asia’s Democratic Security Diamond*,” Project Syndicate, 27 Desember 2012, <https://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accessreg>.

288 A. Shearer, “Quad Redux: A New Agenda for Asia’s Maritime Democracies” *The Interpreter* 10, (2017), <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/quad-redux-new-agenda-asia-maritime-democracies>.

289 J. P. Panda, “India’s Approach to the “Quad” and the Salience of China,” dalam *Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific: New Geopolitical Realities*, ed. A. Rossiter dan B. J. Cannon (New York: Routledge, 2020), 16.

290 Shearer, “Quad redux.”

291 J. Yuan, T. Akaha, dan W. Liang, “Conclusion,” dalam *Trump’s America and International Relations in the Indo-Pacific*, ed. T. Akaha, J. Yuan, dan W. Liang (Cham: Springer International Publishing, 2021), 187. <https://link.springer.com/content/pdf/bbm:978-3-030-75925-4/1>

seperti itu, Feng Liu (2020) dari Tsinghua University menilai Quad lebih merupakan wajah dimensi keamanan dari FOIP yang bersandar pada ketiga negara anggota lainnya, dengan India sebagai titik terlemah.²⁹² FOIP yang bersandar pada Quadrilateral Security Dialogue (dikenal sebagai Quad) itu dilabeli oleh Doyle dan Rumley (2019) sebagai “*The Trumpian Turn*”: strategi geopolitik yang bercirikan aliansi daripada pembangunan kawasan.²⁹³

C. DINAMIKA REGIONAL DAN “MIDDLE POWER MOMENT” DALAM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-TIONGKOK

Bab ini telah mengupas pasang-surut itu dari sisi perubahan kapabilitas material yang berdampak pada perimbangan kekuatan. Kebangkitan Tiongkok menjadi faktor utama yang mendorong perubahan rivalitas kekuatan besar dan juga arsitektural ekonomi dan keamanan regional. Perubahan relatif kapabilitas material itu tidak hanya terjadi karena faktor produktivitas Tiongkok, namun bab ini juga mencatat perubahan itu terjadi karena faktor eksternal, seperti GFC dan regionalisasi pasar di Asia Timur Raya. Kebangkitan Tiongkok telah membuka spekulasi dan peluang sentralitas Tiongkok yang menggeser sentralitas ASEAN sebagai forum utama multilateralisme kawasan. Namun, bentuk sentralitas Tiongkok itu sendiri masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut guna memperjelas bentuknya. Variasi sentralitas itu dapat berupa (i) “Sinic-world”, di mana Tiongkok akan menjadi pusat bukan saja ekonomi, namun juga tatanan global, bahkan kebudayaan seperti yang digadang di era kepemimpinan Xi Jinping; atau (ii) “semata” pusat ekonomi yang berpusat di Tiongkok (*China-centered*),²⁹⁴ pada pilihan

292 F. Liu, “The recalibration of Chinese assertiveness: China’s responses to the Indo-Pacific challenge.” *International Affairs* 96, No. 1, (2020): 19, 23. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz226>

293 Doyle dan Rumley. *The rise and*. 77

294 N. Bisley, “Infrastructure, Order, and Contested Asia: How BRI Will Influence Asia’s Emerging International Order,” dalam *The Belt and Road Initiative and the Future of Regional Order in the Indo-Pacific*, ed. M. Clark, M. Sussex, N. Bisley (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2020), 17.

kedua ini secara ekonomi tetap diakui akan mendominasi seperti ungkapan “*all roads lead to Beijing*” bila BRI berhasil menjadi program yang menggglobal, namun persoalan friksi akibat pelaksanaannya akan tetap menjadi ganjalan bagi Tiongkok.

Di tengah massif dan agresifnya diplomasi Tiongkok, AS sebagai negara adidaya baru memperhatikan kawasan ini secara intens di era Obama. Rentang dua dasawarsa abad ke-21 yang terdiri dari 3 presiden dan sekarang memasuki era Presiden Joe Biden sebagai presiden ke-4, elite di Washington melihat kawasan ini dan khususnya Tiongkok dengan intensitas yang tidak berubah, mempersiapkan kondisi di mana Tiongkok tidak terbendung untuk mendominasi. Namun yang berbeda adalah persepsi ancaman terhadap perubahan itu, dari “*responsible stakeholder*” di era Bush Jr, hingga secara eksplisit disebut sebagai kekuatan revisionis di masa pemerintahan Trump. Secara tradisional AS menikmati posisi kepemimpinan hegemonik dan menempatkan perdagangan bebas sebagai jargon utama diplomasinya, meski intensi ekonomi di kawasan ini selalu diposisikan sekunder pada awalnya.

Kebangkitan Tiongkok sendiri mendorong Obama untuk merespons dengan kebijakan yang tidak semata bersandar pada aliansi tradisional dengan model *hub-and-spoke*, bahkan berupaya mewarisi pendekatan multilateralisme yang belum pernah dicoba di era sebelumnya. Presiden Pasifik Pertama ini secara terbuka merangkul ASEAN, dan sempat memiliki hubungan relasi khusus dengan Tiongkok. TPP yang disokong pemerintahan Obama sempat memberikan banyak pihak dan tetap berupaya untuk dapat melibatkan Tiongkok dalam tatanan ekonomi yang “berstandar Amerika”. AS di masa kepemimpinan Obama terlihat berupaya melakukan kontestasi norma bahkan percaya Tiongkok dapat menjadi mitra strategis dalam skema hegemoni yang terbatas. Namun upaya yang diharapkan menjadi legasi itu gagal berdampak pada arsitektur kawasan, begitu Trump memegang tampuk pemerintahan. Relasi dengan Tiongkok, dan juga negara-negara sekutu tradisionalnya menjadi sangat transaksional. Sebuah deviasi yang mendegradasi kredibilitas AS yang sudah terpuruk karena GFC.

Pada titik ini, persoalan rivalitas Tiongkok-AS di kawasan bukan semata perubahan perimbangan kekuatan (*balance of power*). Perilaku perimbangan dan pengikut tidak semata ditentukan oleh kekuatan yang asimetris, melainkan oleh persepsi ancaman (*balance of threat*). Kebangkitan Tiongkok dipersepsikan oleh elite di Washington sebagai bentuk ancaman yang akan mengubah tatanan perdagangan bebas (*liberal international order*) yang telah dibangunnya secara global. Aktivitas dan agresivitas Tiongkok pasca-GFC seperti menjawab kecemasan ini. Tiongkok bukan saja membentuk lembaga tandingan bagi IFIs yang mapan di bawah dominasi AS, bahkan mengintrusi lembaga-lembaga tersebut yang kerap disebut sebagai dapur dan penyokong Washington Consensus.

Rivalitas sengit tersebut juga seolah menemui jalan buntu pilihan hitam-putih yang mengulang masa Perang Dingin. Namun justru lemahnya keterbukaan Tiongkok dan mundurnya kepemimpinan Trump membuat peluang pilihan jalan ketiga oleh kekuatan negara-negara menengah (*middle power moment*).²⁹⁵ Fenomena regionalisasi yang dikenal dengan “factory Asia” telah mengubah dan memperluas kompleks keamanan kawasan (*regional security complex*). Bukan saja Asia Tenggara dan Asia Timur Laut menjadi satu kompleks Asia Timur seperti yang diprediksi sejak tahun 1980an, regionalisasi itu telah melibatkan India sebagai bagian penting pertumbuhan kawasan sejak Look East dicanangkan pasca-runtuhnya Uni Soviet. Kehadiran India itu menjadi penting bagi imajinasi Indo-Pasifik yang hadir belakangan. Namun regionalisasi itu tidak serta merta dibarengi dengan regionalisme yang solid. Indo-Pasifik masih jadi ajang pertarungan persepsi ancaman yang beragam sebagai akibat dari persaingan Tiongkok dan AS. Arsitektur kawasan memberikan peluang besar bagi ASEAN untuk memegang kendali forum diplomasi kawasan, namun rivalitas negara besar jelas membuat relasi *amity/enmity* yang berangkat dari persepsi ancaman kerap meningkat.

295 M. Beeson dan R. Higgott, “The changing architecture of politics in the Asia-Pacific: Australia’s middle power moment?” *International Relations of the Asia-Pacific* 14, No. 2, (2014): 223. <https://doi.org/10.1093/irap/lct016>

Peluang momen kekuatan menengah hadir karena perubahan arsitektur kawasan itu terjadi karena masih rendahnya kredibilitas kepemimpinan Tiongkok dan defisit kepercayaan di tengah “personal is geopolitical” yang dibangun Trump. Pada Periode ini dapat dilihat keberhasilan penandatanganan RCEP pada November 2020, meskipun tanpa keikutsertaan India. ASEAN merupakan inisiator RCEP dalam rangka menjembatani gagasan Tiongkok dan Jepang, namun pasca-penandatanganan kecemasan yang melihat potensi Tiongkok mendominasi kesepakatan itu masih terlihat.²⁹⁶

Hal serupa dengan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), rancangan deklarasi yang didorong Indonesia ini merupakan sebuah jalan tengah dari persetujuan gagasan antara infrastruktur BRI dan FOIP yang masih menekankan pendekatan keamanan dan aliansi. Dewi Fortuna Anwar (2020) menilai AOIP merupakan pengakuan kepemimpinan informal Indonesia di ASEAN, peningkatan bagi kredensial Indonesia sebagai negara kekuatan menengah, sekaligus penegasan kemampuan Indonesia dalam mendorong “jalan ketiga” guna meredakan ketegangan akibat rivalitas AS-Tiongkok.²⁹⁷ Di balik pengakuan positif itu dan lepas dari respons positif dari Tiongkok dan negara-negara QUAD seperti Australia, Jepang, dan India,²⁹⁸ AOIP masih menyisakan proposal kebijakan yang dapat segera diimplementasikan.²⁹⁹ Penekanan AOIP pada aspek infrastruktur yang beririsan dengan gagasan Tiongkok, seharusnya dapat menjadi penekanan awal dari kesepakatan rencana kerja itu. Salah seorang elite Kemenlu pernah menyampaikan secara tertutup bahwa AOIP

296 O. Mie, “Signing of the RCEP and the Future Asian Order,” *The Diplomat*, 20 Desember 2020, <https://thediplomat.com/2020/12/signing-of-the-rcep-and-the-future-asian-order/2>

297 D. F. Anwar, “Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” *International Affairs* 96, Issue 1, (2020): 111–129, <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.

298 I. G. B. D. Agastia, “Understanding Indonesia’s Role in the ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific’: A Role Theory Approach.” *Asia & The Pacific Policy Studies* 7, No. 3, (2020): 9. <https://doi.org/10.1002/app5.308>

299 E. A. Laksmana, “Flawed Assumptions: Why the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific is Defective,” *AsiaGlobal Online* 19, (2019). <https://www.asiaglobalonline.hku.hk/flawed-assumptions-why-theasean-outlook-on-the-indo-pacific-is-defective/>

merupakan cara ASEAN beradu gagasan dengan Tiongkok sekaligus mencegah narasi keamanan mendominasi dan mengecilkan rencana ASEAN dengan konektivitasnya.”³⁰⁰ Pernyataan ini merupakan jawaban yang tepat dalam membawa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok di tengah pengaruh besar rivalitas kekuatan besar.

Uraian bab ini perlu dipungkasi dengan menimbang potensi pengaruh dinamika rivalitas strategis AS dan Tiongkok itu terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Lebih jauh dari itu, pentingnya Indonesia menjaga otonomi strategis yang menjadi isu penting dalam doktrin politik luar negeri bebas aktif. Faktor dinamika kawasan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok harus mampu keluar dari semangat eksklusif yang terbangun karena rivalitas itu. Secara faktual, Indonesia harus menyadari posisi strategisnya di tengah rivalitas itu. Posisi pivotal harus menjadi strategi kunci Indonesia. Meski berbeda dengan kekuatan menengah tradisional yang lebih menyandarkan pada peran suportif terhadap status quo,³⁰¹ Indonesia sebagai *emerging middle power* atau pivotal states yang kritis terhadap tatanan yang ada harus juga melampaui kecenderungan untuk terjebak dalam pola kekuatan revisionis.

Hingga capaian hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dapat diarahkan pada bentuk “*developmental peace*”,³⁰² di mana aspirasi pembangunan sebagai hak dan praktik negara pembangunan yang membedakan hubungan negara dan pasar dapat menjadi norma kawasan yang inklusif. Ledakan infrastruktur yang terjadi karena model pembangunan di Tiongkok dan diplomasinya itu dapat menjadi landasan bersama. Namun, landasan itu tentunya harus memperhatikan meski ada aspirasi pembangunan yang sama antara Tiongkok dan Indonesia, pada pelaksanaannya dengan sistem politik bernegara yang berbeda pelaksanaannya harus memperhatikan

300 Narasumber FGD, Tim Polugri LIPI, 6 Juni 2020.

301 T.S. Wilkins, “Australia: A traditional middle power faces the Asian century,” dalam *Middle powers and the rise of China*, ed. B. Gilley dan A. O’Neil (Washington: Georgetown University Press, 2014), 149. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.12>.

302 L. Wei, “Developmental peace in east Asia and its implications for the Indo-Pacific,” *International Affairs* 96, No. 1, (2020): 189–209. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz230>

konteks masing-masing negara. Pada saat yang sama kerja sama pembangunan itu tidak menghalangi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada Era Reformasi: Orientasi Baru hingga Penguatan Fundamen Hubungan

Politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan orientasi yang signifikan pasca-jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Walaupun tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif, namun semua presiden pada pasca-Orde Baru memiliki kekhasan masing-masing dalam interpretasi dan pelaksanaan politik luar negerinya. Hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok.

Pasca-1998, hubungan Indonesia-Tiongkok mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala dan dinamika, tetapi hubungan kerja sama kedua negara secara perlahan menuju arah yang lebih erat. Peningkatan hubungan kedua negara ini, tidak saja disebabkan oleh perubahan situasi politik domestik Indonesia melainkan juga kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kawasan Asia Tenggara. Kebijakan “*good neighbour policy*” Tiongkok terhadap kawasan Asia Tenggara, dalam kasus Indonesia ditunjukkan melalui peran positif Tiongkok pasca krisis ekonomi 1997 dan selama penanggulangan dan pemulihan bencana tsunami

di Aceh tahun 2004, menjadi faktor pengaruh penting dalam mengonsolidasikan kembali hubungan kedua negara.³⁰³ Dua kondisi tersebut meningkatkan kepercayaan dan kondusivitas dalam interaksi kedua negara.

Fokus bahasan pada bab ini adalah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada era Reformasi, mulai dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998–1999) hingga pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), sedangkan politik luar negeri pada masa pemerintahan presiden selanjutnya, yaitu Joko Widodo, dibahas tersendiri dalam Bab 6.

Analisis terkait politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada bab ini dilakukan dalam dua konteks. *Pertama*, mencermati perubahan-perubahan politik luar negeri Indonesia yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). *Kedua*, menganalisis efektivitas politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia pada era tersebut. Kedua konteks tersebut, khususnya ketika pemerintahan Presiden SBY, dipotret dalam bingkai posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan menengah (*middle power*).

Pembahasan pada bab ini diawali dengan analisis bagaimana arah baru politik luar negeri Indonesia, sebagai negara dengan kekuatan menengah, pasca Soeharto dan dampaknya pada politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok. Subbab selanjutnya secara lebih mendalam membahas politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden SBY yang memimpin Indonesia selama sepuluh tahun. Di dalamnya juga menganalisis pencapaian kepentingan nasional Indonesia pada masa pemerintahan SBY dengan mengkaji efektivitas penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok melalui penandatanganan *Strategic Patnership* pada 5 April 2005.

303 R. Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement," *Asian Survey* 49, no. 4 (2009): 592.

A. DARI B.J. HABIBIE HINGGA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: ORIENTASI BARU

Kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, yang diwarnai demonstrasi besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat, dan disertai kerusuhan serta aksi kekerasan, tidak hanya membawa perubahan pada konstelasi politik domestik, tetapi juga mengubah arah politik luar negeri Indonesia secara signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi, tidak hanya terkait dengan dinamika politik dalam negeri, tetapi juga dinamika politik internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia juga menemukan arah baru. Pada bagian ini, perubahan kebijakan luar negeri tersebut dibahas secara sistematis pada masing-masing pemerintahan di awal era Reformasi, yaitu mulai dari masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie (1998–1999), dan Abdurrahman Wahid (1999–2001), hingga Megawati Soekarnoputri (2001–2004).

1. Presiden B.J. Habibie (1998–1999)

Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto meletakkan fondasi dasar implementasi politik luar negeri dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang tersebut telah mengubah tata hubungan luar negeri yang dahulu aktornya hanya pemerintah, namun sejak adanya UU tersebut aktor-aktor non-negara, seperti organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan individu, juga dapat melakukan hubungan luar negeri. Perubahan ini berdampak pada perubahan dinamika perumusan kebijakan luar negeri yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingannya. Sekalipun demikian, presiden sebagai kepala pemerintahan tetap memegang peran kunci dalam aktivitas pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.³⁰⁴

304 Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>

B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia hanya dalam periode sangat singkat, yaitu 16 bulan, dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Masa tugasnya berakhir setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Semasa kepemimpinannya, pemerintahan Presiden B.J. Habibie fokus menyelesaikan tiga masalah utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) memulihkan stabilitas politik dalam negeri yang bergejolak akibat konflik vertikal dan horizontal; (2) menguatkan legitimasi pemerintahan dan memperbaiki reputasi Indonesia di mata dunia internasional yang memburuk, dan (3) mengembalikan kondisi ekonomi yang terpuruk. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami resesi ekonomi parah yang dampaknya, antara lain jatuhnya nilai rupiah dari Rp4.850/dolar AS ke level Rp17.000/dolar AS pada tahun 1997, utang luar negeri yang membengkak, pasar uang dan pasar modal yang anjlok, banyak perusahaan yang tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan secara massal, dan jumlah ekspor yang turun drastis.³⁰⁵

Presiden B.J. Habibie mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyelesaikan tiga permasalahan utama. *Pertama*, untuk memulihkan stabilitas politik nasional. Perbedaan fundamental kebijakannya dari pendahulunya adalah melakukan demokratisasi di berbagai sektor. Perwujudan demokratisasi yang diterapkan presiden ketiga Indonesia itu, antara lain memberikan kebebasan pers, melakukan desentralisasi kekuasaan ke daerah, menguatkan komitmen terhadap penghormatan atas hak asasi manusia, membebaskan tahanan politik pemerintahan Presiden Soeharto, dan membebaskan pembentukan organisasi masyarakat.

Kedua, untuk menguatkan legitimasi pemerintahan dan memperbaiki reputasi Indonesia di mata dunia internasional, Presiden B.J. Habibie melakukan kompromi dengan tuntutan dunia internasional. Secara progresif, B.J. Habibie menunjukkan komitmennya terhadap

305 F. N. Ulya, "Apa Saja yang Terjadi Saat Resesi Ekonomi 1998?," *Kompas.com*, 6 Agustus, 2020 <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/082004526/apa-saja-yang-terjadi-saat-resesi-ekonomi-indonesia-tahun-1998?page=all>

Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjadi sorotan dunia internasional, melalui ratifikasi enam kovenan internasional terkait hak asasi manusia, yaitu *Covenant Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* dan empat kovenan terkait hak-hak pekerja serta membentuk Komisi Nasional Perempuan. Dalam kasus konflik Timor Timur, Presiden B.J. Habibie merestui diadakannya jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, yang berujung pada disintegrasi dan konflik kekerasan pasca-referendum. Kepercayaan dari dunia internasional tidak hanya dibutuhkan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, tetapi juga untuk menangani krisis ekonomi dan politik.

Ketiga, untuk mengembalikan kinerja ekonomi Indonesia, kebijakan Presiden B.J. Habibie adalah melakukan restrukturisasi perbankan dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan unit pengelola aset negara yang dilanjutkan dengan melikuidasi beberapa bank bermasalah, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan *International Monetary Fund* (IMF), dan mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁰⁶ Langkah-langkah tersebut berhasil menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang sempat mencapai Rp16.800 menjadi Rp6.500 di akhir masa pemerintahannya. Kepercayaan internasional berhasil diraih, IMF mengucurkan bantuan dana 43 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk pemulihan ekonomi.³⁰⁷

Dalam konteks hubungan bilateral dengan Tiongkok, peristiwa Mei 1998 sangat krusial bagi hubungan Indonesia-Tiongkok, tidak hanya ketika pemerintahan Presiden B.J. Habibie, tetapi juga hingga

306 Y. Pratomo, "Sepak terjang Habibie mampu turunkan harga dolar hingga Rp 6.500," *Merdeka.com*, 26 Agustus, 2015 <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-habibie-mampu-turunkan-harga-dolar-hingga-rp-6500.html>

307 "Krisis Keuangan Asia di Indonesia," Indonesia Investment, t.t., diakses pada 25 Oktober 2016 dari <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246>

saat ini. Rangkaian demonstrasi yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto disertai dengan berbagai kerusuhan yang menjadikan keturunan etnis Tionghoa sebagai sasaran amuk masyarakat. Dalam peristiwa kelam tersebut, diperkirakan ratusan etnis Tionghoa meninggal atau terluka, puluhan perempuan etnis Tionghoa diperkosa, serta ratusan toko dan rumah milik warga etnis Tionghoa dijarah dan dibakar. Akhirnya, banyak dari mereka yang selamat pergi dari Indonesia beserta jutaan dolar kapital yang dimilikinya. Peristiwa tersebut menjadi latar belakang sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam konteks hubungan Indonesia-Tiongkok.³⁰⁸

Peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa sentimen anti-etnis Tionghoa di Indonesia tidak pernah benar-benar hilang dari beberapa kalangan masyarakat dan memuncak pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dunia internasional mengecam kejadian tersebut, termasuk dari Hong Kong dan Taiwan. Sementara di Tiongkok sendiri, mahasiswa turun ke jalan melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, dan mendesak pemerintah mereka untuk menekan Indonesia.³⁰⁹ Demonstrasi mahasiswa terhadap KBRI tersebut menunjukkan adanya ikatan antara warga negara Tiongkok dan etnis Tionghoa di luar Tiongkok (*overseas Chinese*).

Respons dari Pemerintah Tiongkok adalah menganggap peristiwa tersebut sebagai urusan domestik Indonesia. Respons yang tidak terlalu keras tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan Indonesia-Tiongkok yang masih cukup sensitif di tahun kedelapan setelah melakukan normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1990. Namun, desakan dari dalam negeri membuat Pemerintah Tiongkok mengambil sikap yang lebih jelas, yakni menyesali kejadian tersebut dan mendesak Indonesia untuk meinginvestigasi pemerkosaan dan menegakkan hukum yang adil.³¹⁰ Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh

308 International Crisis Group (ICG), *Indonesia's Crisis: Chronic but Not Acute* (ICG Report I No.2, 2000), 19.

309 C. Hughes, "Beijing Rides a Nationalist Cyber-Tiger," *Wall Street Journal*, 21 September 2000 <https://www.wsj.com/articles/SB969481844862316960>

310 "China Speaks Out on Indonesian Riots," *BBC News*, 19 November, 1998 http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/indonesia/latest_news/215153.stm

dua pejabat tinggi Tiongkok pada waktu yang berbeda, dan relatif terlambat. *Pertama*, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Tang Jiaxuan, ketika bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, pada forum ASEAN tanggal 28 Juli 1998 di Manila.³¹¹ *Kedua*, disampaikan oleh Presiden Jiang Zemin ketika bertemu Presiden B.J. Habibie pada November 1998. Penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia tetap ditunjukkan pemerintah Tiongkok dengan penggunaan terminologi “Yinni Huaren” (etnis Tionghoa Indonesia), ketimbang “Huaqiao” (*overseas Chinese*), dalam pernyataan-pernyataannya.³¹²

Pemerintah Indonesia tidak menanggapi secara keras pernyataan Tiongkok. Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, bukan permasalahan etnis.³¹³ Menurut Rizal Sukma, setidaknya terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan sikap Indonesia tersebut.³¹⁴ *Pertama*, meskipun mengeluarkan pernyataan resmi, strategi Tiongkok ketika itu adalah meminimalisasi dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap hubungan baik kedua negara secara keseluruhan. Tiongkok secara konsisten menekankan bahwa masalah tersebut adalah domain internal Indonesia dan penyelesaiannya harus dari Pemerintah Indonesia itu sendiri.³¹⁵ *Kedua*, Pemerintah Tiongkok ingin menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Habibie mempersilakan Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong mengirim utusan untuk berpartisipasi dalam investigasi kasus pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998.³¹⁶

Komitmen Tiongkok untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia pada masa itu, kemudian ditunjukkan melalui beberapa

311 D. Zha, “China and the May 1998 Riots of Indonesia: Exploring the Issues,” *Pacific Review* 13, no.4 (2000): 563. <https://doi.org/10.1080/095127400455323>

312 Sukma, “Indonesia-China,” 599.

313 I. J. Storey, “Indonesia’s China Policy in the New Order and Beyond: Problems and Prospects,” *Contemporary Southeast Asia* 22, no. 1 (2000): 156. <https://www.jstor.org/stable/25798482>

314 Sukma, “Indonesia-China,” 599.

315 Zha, “China and the May 1998,” 564.

316 Zha, “China and the May 1998,” 567.

kebijakan yang bertujuan membantu Indonesia yang tengah dilanda krisis ekonomi dan menghormati integritas teritorial Indonesia dalam konflik Timor Timur. Tiongkok ikut berkontribusi finansial sebanyak 500 juta dolar AS dalam skema bantuan 43 miliar dolar AS dari IMF terhadap Indonesia. Tiongkok juga setuju untuk menjual 50.000 ton beras kepada Indonesia, serta menyediakan hibah 3 juta dolar AS untuk obat-obatan. Dalam rangka menjaga performa ekspor Indonesia, Tiongkok memberikan bantuan kredit ekspor sebesar 500 juta dolar AS dan sepakat untuk tidak akan menvaluasi mata uang Yuan yang bisa merugikan Indonesia.³¹⁷

Dalam konflik Timor Timur, Tiongkok memberikan dukungan diplomatik kepada Indonesia dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Tiongkok menunjukkan sensitivitasnya akan kedaulatan Indonesia. Melalui utusan tetap Tiongkok di PBB, Qin Huasun, Tiongkok menyatakan keprihatinannya terhadap konflik Timor Timur dan berpendapat bahwa pasukan perdamaian PBB hanya bisa dikerahkan atas perintah Dewan Keamanan PBB dan permintaan dari Indonesia.³¹⁸ Tiongkok tidak mendukung pembentukan International Force for East Timor (INTERFET) oleh PBB, yang dipromotori oleh Australia. Di kemudian hari, pada tahun 2000, setelah Timor Leste berdiri sebagai negara merdeka, barulah Tiongkok mengirimkan pasukan perdamaian ke Timor Leste dalam payung United Nations Mission in East Timor (UNAMET).³¹⁹

2. Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001)

Sebagaimana halnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie, isu pemulihan ekonomi pascakrisis moneter dan keutuhan Negara

317 Storey, "Indonesia's China Policy," 156.

318 M. Lanteigne, "A Change in Perspective: China's Engagement in the East Timor UN Peacekeeping Operations," *International Peacekeeping* 18, no.3 (2011): 319. <https://doi.org/10.1080/13533312.2011.563093>

319 P. Yining, "Growing into global role, peace by peace," *Telegraph*, t.t. diakses pada 25 Oktober 2016 dari <http://www.telegraph.co.uk/sponsored/china-watch/politics/11894547/china-un-peacekeepers.html>

Kesatuan Republik Indonesia juga masih menjadi kepentingan nasional pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Wahid menyampaikan arah dan tujuan strategis politik luar negeri yang hendak dicapai pemerintahannya. Tujuan dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahannya tidak banyak berubah dari kebijakan presiden sebelumnya. *Pertama*, mempertahankan integritas teritorial. *Kedua*, mengembalikan wibawa Indonesia di dunia internasional. *Ketiga*, mengakselerasi pemulihan ekonomi.³²⁰

Rumusan politik luar negeri tersebut tidak terlepas dari kondisi domestik Indonesia pada saat itu. Adanya potensi disintegrasi bangsa melatarlakangi program Presiden Wahid untuk mempertahankan integritas teritorial. Di berbagai provinsi muncul sentimen anti-pemerintah pusat. Aspirasi beberapa provinsi, seperti Provinsi Aceh, Irian Jaya, Maluku dan Riau, untuk merdeka juga menjadi ancaman pecahnya kesatuan Indonesia. Disintegrasi Timor Timur menjadi pengalaman yang tidak ingin diulang oleh Presiden Wahid. Akibat ketergantungan Indonesia terhadap suntikan dana dari negara maupun lembaga donor asing dan lepasnya Timor Timur yang sedikit banyak dipengaruhi tekanan asing, membuat wibawa Indonesia turun di kalangan internasional. Isu perbaikan ekonomi menjadi salah satu isu kunci pemerintahannya. Legitimasi dan keberhasilan pemerintahannya dilihat dari bagaimana ia mengatasi permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia sejak krisis moneter tahun 1997. Politik luar negeri sebagai instrumen mencapai kepentingan nasional, dimainkan dengan tujuan menarik dukungan finansial dari dunia internasional. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab mengakui Indonesia tidak dapat mengabaikan strategi menggunakan sumber ekonomi asing untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional, dengan cara menemukan dan menembus pasar-pasar baru dan meningkatkan hubungan perdagangan yang telah ada.³²¹

320 R. Sukma, "Indonesia's Perception of China: The Domestic Bases of Persistent Ambiguity," dalam *The China Threat: Perceptions, Myths and Reality*, ed. H. Yee dan I. Storey (New York: RoutledgeCruzon, 2002), 195.

321 "Pernyataan Pers Akhir Tahun 2000 Menteri Luar Negeri RI Dr. Alwi Shihab,"

Presiden Wahid memiliki gaya diplomasi yang cukup eksentrik. Ia sangat intensif melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Pada 40 hari pertama menjabat, Wahid menghabiskan 23 hari melakukan kunjungan ke luar negeri.³²² Dalam 20 bulan pemerintahannya, Wahid tercatat melakukan delapan puluh kali lawatan luar negeri.³²³ Meskipun pada satu sisi dapat dikatakan Presiden Wahid memiliki perhatian yang besar terhadap politik luar negeri, namun pada sisi lain gaya diplomasi tersebut dinilai negatif. Wahid dinilai memboroskan anggaran pemerintah dan tidak sensitif, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum pulih.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara dan lembaga keuangan Barat serta munculnya sentimen anti-Barat di dalam negeri, Presiden Wahid mendeklarasikan kebijakan luar negeri “*Asia First*”. Kebijakan tersebut dibuktikan dengan munculnya terminologi-terminologi yang belakangan terbukti hanya menjadi retorika, seperti poros Indonesia-Tiongkok-India dan poros ekonomi Indonesia-Singapura-Tiongkok-Jepang-India. Selain itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri atas Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, Australia, dan Selandia Baru, yang tujuan strategisnya untuk meredam dukungan internasional terhadap gerakan separatis di Provinsi Papua.³²⁴

Presiden Wahid memiliki posisi yang spesial di kalangan etnis Tionghoa Indonesia karena menerapkan beberapa kebijakan monumental yang mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. Pengakuan hak sipil dan politik bagi masyarakat Tionghoa menandai babak baru kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa, dan mengikis hambatan yang

Kementerian Luar Negeri, diakses pada 25 Oktober 2016 <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Pers-Akhir-Tahun-2000-Menteri-Luar-Negeri-RI-Dr.-Alwi-Shihab-Departemen-Luar-Negeri-Repub.aspx>

322 B. Shambazy, “Politik Luar Negeri Gus Dur,” *Kompas*, 2 Januari, 2010 <http://teknokompas.com/read/2010/01/02/0253398.politik.luar.negeri.gus.dur>

323 A. N. Alami, “Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru,” *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 2 (2011): 174. <https://doi.org/10.14203/jpp.v8i2.459>

324 Shambazy, “Politik Luar Negeri.”

sebelumnya menjadi ganjalan dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Walaupun sudah ada di Nusantara selama ratusan tahun, pengakuan resmi dari negara terhadap agama Kong Hu Cu baru diresmikan pada masa pemerintahannya di tahun 2000.³²⁵ Selain memberikan pengakuan, Wahid juga membebaskan masyarakat Kong Hu Cu, yang merupakan mayoritas keturunan Tionghoa, untuk menjalankan ibadah agamanya secara terbuka dan merayakan hari keagamaan mereka. Kebijakan baru lainnya adalah menghapus larangan penggunaan bahasa dan impor publikasi-publikasi berbahasa mandarin, dan mendeklarasikan Hari Imlek, tahun baru bagi masyarakat Tionghoa, sebagai hari libur nasional.³²⁶ Ia juga menghapuskan larangan kunjungan ke Tiongkok dan larangan bagi aparat Pemerintah Tiongkok masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut kemudian telah meningkatkan lalu-lintas perjalanan dan pertukaran wisatawan di antara kedua negara.³²⁷

Pada tahun pertama kepemimpinan Wahid, hubungan Indonesia-Tiongkok meningkat secara signifikan. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tiga permasalahan utama, sebagaimana disampaikan sebelumnya, yang menjadi kepentingan Indonesia. Dalam kerangka tujuan tersebut, Tiongkok merupakan negara pertama sebagai tujuan kunjungan kenegaraannya. Hal ini juga disambut Tiongkok dengan menekankan kebijakan “*good neighbour*”. Ketika melakukan kunjungan ke Beijing pada Desember 1999, Presiden Wahid meminta dukungan Tiongkok terhadap pemerintah Indonesia dalam hal menjaga kesatuan, keutuhan, dan integritas teritorial Indonesia. Kedua negara juga mencapai konsensus untuk membangun hubungan bilateral yang stabil, saling percaya dan kerja sama di berbagai bidang. Indonesia-Tiongkok

325 “Pengakuan negara atas Kong Hu Cu,” *BBC*, 7 April, 2011 http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong.shtml

326 “China Mourns Death of Indonesian Former President Wahid”, *Xinhua*, 31 December, 2009 <http://id.china-embassy.org/eng/gdxw/t649792.htm>

327 R. Burhani, “Gus Dur Buka Kran Positif Wisata Indonesia-China”, *Antara*, 2 Januari, 2010 <https://www.antaranews.com/berita/168034/gus-dur-buka-kran-positif-wisata-indonesia-china>

berhasil menandatangani pernyataan bersama mengenai arah hubungan bilateral kedua negara dan membentuk *intergovernmental joint committee*. Dalam pertemuan tersebut, Tiongkok juga bersedia untuk memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit, termasuk disepakatinya kerja sama keuangan, teknologi, perikanan, pariwisata, serta *counter trade* di bidang energi, yaitu menukar LNG Indonesia dengan produk-produk Tiongkok.³²⁸

Di bidang ekonomi, hubungan bilateral kedua negara terus meningkat terutama dalam perdagangan pada periode 1999–2000. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor Tiongkok ke Indonesia tahun 2000 sebesar 3,06 miliar dolar AS, naik sebesar 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 906 juta dolar AS. Untuk tahun 2001 sampai bulan September sebesar 2,12 miliar dolar AS turun 6,19%, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,18 miliar dolar AS. Neraca perdagangan Indonesia selama ini menunjukkan surplus untuk Indonesia, yang pada tahun 2000 mencapai nilai sebesar 1,34 miliar dolar AS. Tahun 2000, Indonesia merupakan negara urutan ke-14 sebagai negara tujuan ekspor Tiongkok, dan urutan ke-13 sebagai negara sumber impor Tiongkok.³²⁹

Pada kesempatan melakukan kunjungan balasan ke Jakarta medio Juli 2000 dan bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, Hu Jintao Wakil Presiden Tiongkok menawarkan dukungan lebih jauh, dan menyatakan pemerintahnya akan selalu mendukung pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menjaga integritas dan kedaulatan nasional, khususnya dalam menghadapi intervensi dari negara-negara besar. Hu Jinto juga mengapresiasi kebijakan “*ze*”. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan dan saling mendukung satu sama lain dalam hal menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Komitmen penguatan kerja sama juga dilakukan dalam ranah multilateral, dengan

328 S. Hadi, “Hubungan Indonesia-China di era Pasca-Orde Baru: Perspektif Indonesia” dalam *Merangkus China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, ed. I. Wibowo dan S. Hadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 111.

329 N. Huda dan Zulihar, “Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009,” *Dikta Ekonomi* 6, no.3 (2009): 187.

melakukan konsultasi dan kerja sama di PBB, dan berupaya bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Kedua negara juga berhasil menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.³³⁰

3. Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004)

Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden pada 2001, setelah Abdurrahman Wahid digulingkan oleh MPR, masih memiliki prioritas yang sama dengan pendahulunya, yaitu pemulihan ekonomi. Megawati meneruskan langkah kebijakan strategis dalam melakukan kebijakan luar negeri *multi-directions*. Ia berupaya mencari dukungan dari negara-negara selain Amerika Serikat dan sekutunya.

Hubungan Indonesia-Tiongkok pada masa pemerintahan Megawati diwarnai nostalgia hubungan Indonesia-Tiongkok pada era Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno yang merupakan ayahnya, ketika Indonesia dan Tiongkok menjadi sahabat yang begitu dekat. Sebagaimana Wahid, Megawati juga menjadikan Tiongkok sebagai tujuan pertama ketika melakukan lawatan ke beberapa negara Asia. Pada kunjungannya ke Beijing tahun 2002, Megawati berdansa bersama dengan Presiden Jiang Zemin, yang menunjukkan keakraban kedua pemimpin.³³¹ Dalam kunjungan tersebut, Indonesia membawa serta delegasi bisnisnya dalam jumlah cukup besar. Hal ini ditujukan untuk menarik investor dari Tiongkok, sementara pada saat itu investor Barat cenderung memberikan banyak persyaratan dalam perjanjian penanaman modal mereka.³³² Kebijakan “*One China Policy*”

330 “Vice-President Hu Jintao Meeting with Indonesian Vice-President Megawati,” Chinese Foreign Ministry, diakses pada 25 Oktober 2016 <http://wcm.fmprc.gov.cn/pub/eng/topics/3755/3791/3803/t19435.htm>

331 T. Enoch, “Hubungan RI-China: Secara Historis dan Dinamis!,” dalam *Merangkus China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, ed. I. Wibowo dan S. Hadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009): 43.

332 N. Hamilton-Hart dan D. McRae, *Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence* (Sydney: United States Studies Centre at the University of Sydney, 2015) 8.

dipraktikkan secara konsisten ketika Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menolak permintaan kunjungan Presiden Taiwan, Chen Shuibian, pada tahun 2002.

Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia berhasil meningkatkan kerja sama bilateral di semua sektor, terutama perdagangan dan energi. Perdagangan bilateral naik menjadi 8 miliar dolar AS pada tahun 2002, sementara total investasi Tiongkok naik dua puluh lima kali menjadi 8,8 miliar dolar AS pada akhir tahun 2003.³³³ Tiongkok bersedia memberikan pinjaman 400 juta dolar AS.³³⁴ Kerja sama di bidang energi menjadi fokus utama hubungan kedua negara. Pada April 2002, Petro China mengakuisisi enam ladang minyak dari Devon Energy. *China National Offshore Corporation* (CNNOC) juga melakukan akuisisi aset di sektor minyak dan gas Indonesia. Megawati merupakan fitur kunci yang membawa misi penjualan Gas Alam (LNG) ke Provinsi Guangdong Tiongkok, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Indonesia mensuplai gas LNG ke Tiongkok, yang dikenal dengan LNG Tangguh.

Meskipun demikian, penjualan LNG ke Tiongkok tersebut menimbulkan kritik tajam di dalam negeri. Indonesia sepakat dengan kontrak jangka panjang penjualan LNG ke Fujian selama 25 tahun. Harga jual LNG dinilai terlalu murah dan merugikan Indonesia, yakni hanya 2,4 dolar AS per mmbtu dan kenaikannya dipatok maksimal 3,35 dolar AS per mmbtu.³³⁵ Padahal, tahun 2014 harga ekspor LNG sudah mencapai 18 dolar AS per mmbtu.³³⁶ Dalam orasi ilmiah di Universitas Padjajaran Bandung pada 25 Mei 2016, Megawati menjelaskan bahwa saat itu suplai minyak internasional masih melimpah dan tidak ada

333 H. Soesastro, "China-Indonesia Relations and the Implications for the United States," *USINDO Report*, 7 November 2003.

334 "China Pledges \$400 M to Indonesia," *BBC News*, 24 Maret, 2002 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1891007.stm>

335 S. Rizal, "Didesak Ekspor LNG Tangguh Dihentikan," *Sinar Harapan*, 19 Februari, 2014, <http://www.sinarharapan.co/news/read/32677/didesak-ekspor-lng-tangguh-dihentikan->

336 "Ini Sejarah Penjualan as Murah Tangguh Papua ke Tiongkok," *Detik Finance*, 1 Juli, 2014 <http://finance.detik.com/energi/d-2623898/ini-sejarah-penjualan-gas-murah-tangguh-papua-ke-tiongkok>

satu pun negara yang mau membeli gas Indonesia, dan harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang sudah berencana membangun pipa gas ke negara tersebut. Saat itu, Megawati melakukan lobi diplomatik “Lenso Bengawan Solo” secara langsung dengan Presiden Jiang Zemin.³³⁷ Akhirnya, Tiongkok membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia dan memilih membeli LNG dari Indonesia.

B. MEMPERKOKOH FUNDAMEN HUBUNGAN DI ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004–2014)

Setelah Megawati lengser, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, yakni tahun 2004–2009 dan 2009–2014. Ia adalah Presiden Indonesia pertama pasca-Reformasi, yang dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat.

Selama pemerintahan SBY, ada beberapa isu di dalam negeri yang memengaruhi dan menjadi kepentingan nasional dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu demokratisasi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, penanggulangan terorisme, dan menguatkan posisi Indonesia di dunia internasional. Kepentingan nasional ini merupakan refleksi dari dinamika politik domestik dan politik internasional pada saat itu. Di dalam negeri, Indonesia terus melanjutkan proses demokratisasi ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang demokratis, desentralisasi melalui otonomi daerah, pelaksanaan *good governance* dan pemberantasan praktik korupsi. Di dunia internasional, Indonesia yang dianggap sebagai *emerging power* dituntut untuk berkontribusi lebih bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.³³⁸ Indonesia sebagai negara muslim terbesar menjadi “*role model*” bagi keselarasan

337 R. N. Hakim, “Orasi Ilmiah, Megawati Bicara Sipadan dan Ligitan hingga Proyek LNG Tangguh,” *Kompas*, 25 Mei, 2016 <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/14275831/orasi.ilmiah.megawati.bicara.sipadan.dan.ligitan.hingga.projek.lng.tangguh>

338 A. Acharya, *Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power* (Singapore: World Scientific, 2015), 3.

demokrasi dan Islam. Isu terorisme juga menjadi fokus utama dunia, pasca-terjadinya peristiwa 9/11 dan menjamurnya kelompok jaringan terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia. Masalah gerakan separatis di Aceh dan Papua juga masih menjadi fokus pemerintahan Presiden SBY.

Pada masa ini, demokratisasi begitu dominan dalam mewarnai kehidupan politik nasional. Pemilihan umum 2004 menjadi titik awal konsolidasi demokrasi di era Presiden SBY. Demokratisasi ini juga berpengaruh terhadap proses perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, secara proses dan substansi. Dalam hal proses, perumusan kebijakan luar negeri menjadi terdifusi, banyak pihak yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, serta keterlibatan publik yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga legislatif, memiliki peran penting dalam politik luar negeri Indonesia. Beberapa kebijakan yang akan diambil oleh presiden memerlukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR sebagai konsekuensi adanya revisi konstitusi di Indonesia, misalnya dalam pengangkatan duta atau konsul, pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik, dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dalam hal substansi, dampak demokratisasi dapat terlihat dari dukungan Indonesia yang semakin besar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di dunia internasional.

Pada pidato pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden pada 2004, SBY menegaskan bahwa akan tetap berpegang pada politik luar negeri bebas-aktif. Di panggung internasional, Indonesia secara konsisten akan menyuarakan perdamaian, kesejahteraan, dan membela keadilan. Indonesia akan tetap tumbuh menjadi bangsa yang demokratis, terbuka, modern, dan toleran.³³⁹ Selain itu, politik luar negeri Indonesia pada periode pertamanya sebagai Presiden, SBY berusaha mengubah kekurangan menjadi peluang, misalnya

339 "Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Istana Negara Tanggal 20 Oktober 2004," Arsip Nasional, diakses pada 26 Oktober 2016 https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/susilo21.pdf

Indonesia yang kerap disebut “sarang teroris” oleh dunia internasional, memosisikan dirinya sebagai “*hub of counter-terrorism*”³⁴⁰

Pada periode kedua pemerintahannya (2009–2014), SBY berusaha untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih mapan di dalam percaturan politik internasional. Upaya tersebut tecermin dalam pidatonya, ia mengatakan “*Indonesia is no longer a nation in waiting.... Indonesia is a nation whose time has come, and we are seizing the moment with determination and hard work*”³⁴¹ Hal ini dilatarbelakangi oleh kesuksesan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup konstan dan transformasi demokrasi yang stabil. Di lain sisi, perhatian dunia internasional terhadap kawasan Asia-Pasifik mulai meningkat. SBY menyebut politik luar negeri Indonesia dengan slogan “*a thousand friends- zero enemy*”. Slogan politik luar negeri ini tentu saja untuk meningkatkan hubungan dengan semua negara, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Hal ini juga bertujuan untuk mempromosikan keadilan dan ketertiban di arena internasional, kebijakan investasi yang lebih baik untuk pembangunan ekonomi, demokrasi dan konsolidasi dalam integrasi kawasan, melindungi warga negara Indonesia khususnya buruh migran, dan menjaga persatuan nasional. Jiang Zhida menyebut diplomasi yang dilakukan Presiden SBY sebagai “*Confidence Diplomacy*”, yang diimplementasikan melalui memperkuat peran Indonesia di ASEAN, meningkatkan hubungan dengan *great powers*, melakukan diplomasi multilateral, serta mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara demokratis, plural dan damai.³⁴²

Politik luar negeri selama pemerintahan SBY tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internasional. Rivalitas Amerika

340 Acharya, *Indonesia Matters*, 8.

341 “Sambutan Presiden RI pada Konferensi Overseas Private Investment Corporation, Jakarta 4 Mei 2011,” Kementerian Sekretariat Negara, diakses pada 26 Oktober 2016, https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_pada_konferensi_overseas_private_investment_corporation_jakarta_4_mei_2011

342 J. Zhida, “Indonesia’s “Confidence” Diplomacy under the Yudhoyono Government,” *China Institute of International Studies*, 31 Desember, 2012. http://www.ciis.org.cn/english/2012-12/31/content_5638110.htm

Serikat (AS) dan Tiongkok, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, menjadi isu utama dinamika politik regional. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi peningkatan anggaran militer yang melesat, membuat Tiongkok menjadi *major power* di kawasan, dan semakin membuat tatanan politik internasional menjadi multi-polar. Dalam merespons hal tersebut, “*a thousand friends- zero enemy*” dioperasionalisasi dengan menempatkan Indonesia sebagai “*dynamic equilibrium*” di antara *major powers*, yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa pada 2011. “*Dynamic equilibrium*” menawarkan pendekatan yang lebih kooperatif dalam menjadi penyeimbang di antara negara-negara besar, sementara konsep *balance of power* lebih kental dengan nuansa konfliktual.³⁴³

Perhatian terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok pada awal pemerintahan SBY masih menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Konstruksi hubungan Indonesia dan Tiongkok mengikuti kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok sebagai *rising power* di kawasan Asia-Pasifik sehingga memperluas kerja sama tidak hanya di level bilateral, tetapi juga multilateral. Kepentingan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok tidak hanya bertujuan untuk pemahaman bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga untuk memodernisasi pembangunan dengan meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penguatan kerja sama dengan Tiongkok dapat digunakan untuk menyukseskan demokratisasi dan desentralisasi, yang ditopang oleh fondasi industri dan stuktur finansial yang sehat untuk menjaga roda pembangunan.³⁴⁴

Kerja sama kedua negara dengan cepat terjadi pada berbagai bidang, tidak hanya dalam sektor perdagangan. Pada 25 April 2005, Presiden SBY dan Presiden Hu Jintao menandatangani kesepakatan

343 D. F. Anwar, “An Indonesian Perspective on the U.S. Rebalancing Effort toward Asia,” *The National Bureau of Asian Research*, 26 Februari, 2013. <http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=320#.UyIk887DWrc>

344 “Towards harmony among civilizations,” Pidato di The John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 29 September 2009, <http://sby.kepastakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/pidato/2005/05/19/332.html>, diunduh 26 Oktober 2016.

Strategic Partnership. Kesepakatan ini memperkuat fundamen kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok yang mulai membaik pasca-Orde Baru. Tiga bulan setelahnya, pada Juli 2005 dalam kunjungan ke Beijing, SBY menyepakati beberapa kesepakatan penting, tidak hanya perdagangan dan investasi, tetapi juga kerja sama di bidang teknologi keamanan dan pertahanan.

Pada periode kedua pemerintahannya, hubungan dekat kedua negara semakin diperkuat dengan ditandatanganinya deklarasi *The Future Direction of Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnership* oleh Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping pada Oktober 2013. Deklarasi tersebut menekankan kebutuhan akan hubungan kerja sama yang lebih erat di antara kedua negara dan kepercayaan yang tumbuh antara Indonesia-Tiongkok harus ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional kedua negara. Dengan kesepahaman ini, Indonesia dan Tiongkok akan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas politik internasional, yang merupakan landasan bagi terciptanya kesejahteraan.³⁴⁵ Bersamaan dengan deklarasi tersebut, juga ditandatangani enam kesepakatan kerja sama, yang meliputi kerja sama ekonomi dan perdagangan, perumahan, maritim dan perikanan, pariwisata, meteorologi dan klimatologi, dan juga eksplorasi antariksa. Presiden Xi Jinping membawa serta sekitar dua ratus pengusaha Tiongkok, yang dipertemukan dengan enam ratus pengusaha Indonesia, dalam rangkaian kunjungan tersebut.³⁴⁶

Kedua kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan bahwa hubungan yang kondusif begitu penting bagi kedua negara. Dengan payung kerja sama yang begitu komprehensif menjadikan kerja sama Indonesia-Tiongkok memiliki basis institusi yang kokoh. Selanjutnya dibahas mengenai kerja sama Indonesia-Tiongkok di masa pemerintahan SBY, dalam bidang keamanan dan pertahanan, ekonomi, energi, dan sosial budaya.

345 "Future Direction Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnerhips." Kementerian Luar Negeri, <http://kemlu.go.id/Documents/RI-RRT/Joint%20Statement%20Comprehensive%20Strategic%20Partnership.pdf>, diunduh 26 Oktober 2016.

346 "Indonesia, China Forge Comprehensive Strategic Partnership in Various Field," *Antara*, 7 Oktober, 2013. <http://www.antaraneews.com/en/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>

a. Kerja Sama Keamanan dan Pertahanan

Kemitraan Strategis yang ditandatangani pada 2005 menempatkan kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pertahanan sebagai salah satu sektor prioritas. Kerja sama tersebut meliputi konsultasi pertahanan antar pejabat pemerintah, penjualan senjata, latihan bersama, teknologi pertahanan, pembangunan industri pertahanan, dan kerja sama penegak hukum dan intelijen untuk memberantas kejahatan transnasional. Kedua negara memulai konsultasi pertahanan di antara pejabat pemerintah pada 2006, dan sejak saat itu pertemuan pejabat tinggi di bidang pertahanan di antara kedua negara meningkat intensitasnya. Pada Desember 2013 misalnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bertemu dengan mitranya Menteri Pertahanan Tiongkok, Chang Wanquan, sebagai tindak lanjut *Comprehensive Strategic Partnership* yang mengamanatkan peningkatan kerja sama pertahanan.

Indonesia banyak membeli persenjataan, khususnya rudal dari Tiongkok. Pada 2005, Indonesia membeli C-802 Anti-Ship Missiles (ASM) dengan harga 11 juta dolar AS, dan pada 2006 memesan 130 *portable surface-to-air missiles*.³⁴⁷ Indonesia juga membeli C-705 ASM untuk mempersenjatai *guided missile ship* yang diproduksi secara lokal. Pembelian persenjataan berlanjut, Indonesia memesan delapan belas Giant Bow twin 23-mm untuk pertahanan udara pada 2008.³⁴⁸

Berdasarkan *Strategic Partnership* Indonesia-Tiongkok tahun 2005, kedua negara juga sepakat untuk mendukung industri pertahanan nasional masing-masing negara. Beberapa bulan setelah penandatanganannya, SBY mengunjungi Tiongkok untuk menandatangani MoU mengenai kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan antara *China's Commission of Science, Technology, and Industry for National Defense* dan Kementerian

347 J. Grevatt, "Indonesia Fits Chinese ASM but with an Eye to the West," *Jane's Navy International*, 22 April, 2008.

348 "Navy Launches 2nd Guided Missile Boat," *The Jakarta Post*, 16 Februari, 2012, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/17/navy-launches-second-locally-made-guided-missile-boat.html>

Riset dan Teknologi RI. Terkait MoU tersebut, Menteri Pertahanan RI menyatakan bahwa kesepakatan tersebut menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan *propulsion and guidance systems* untuk rudal jarak dekat dan menengah.³⁴⁹ Pada pertemuan konsultatif pertahanan yang kedua pada April 2007 disepakati draft perjanjian mengenai kerja sama teknologi pertahanan, dan pada November 2007, draf tersebut ditandatangani oleh menteri pertahanan kedua negara.

Meskipun demikian, kerja sama teknologi pertahanan di antara kedua negara berjalan cukup lambat. Hal ini disebabkan keengganan pihak Tiongkok untuk melakukan transfer teknologi. Keinginan Indonesia yang hendak meningkatkan industri pertahanan dan membeli persenjataan dari Tiongkok mencerminkan strategi Indonesia untuk mendiversifikasi sumber alutsista, setelah diembargo oleh Amerika Serikat (AS). Alutsista Indonesia yang bersumber dari Tiongkok hanya mencapai 1% dari alutsista Indonesia.³⁵⁰ Hanya terdapat beberapa kerja sama teknologi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok. Pada Januari 2008, Indonesia dan Tiongkok mencapai kesepakatan untuk memproduksi kendaraan dan pesawat transportasi militer,³⁵¹ dan peluncur roket.³⁵² Pada awal 2012, kedua negara dilaporkan sedang melakukan negosiasi untuk co-produksi C-705 ASM, yang merupakan lanjutan dari konsultasi pertahanan bilateral Indonesia-Tiongkok pada Juli 2012.³⁵³

Kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang pertahanan juga dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas personil militer

349 S. Donnan, "Jakarta in Missile Deal with Beijing," *Financial Times*, 1 Augustus, 2005 <https://www.ft.com/content/b08524e4-01f7-11da-9481-00000e2511c8>

350 "China, Indonesia expand military cooperation," *Defense Update*, 29 July, 2012 https://defense-update.com/20120729_china-indonesia-military-cooperation.html

351 "RI, China to Conduct Joint Military Training," *The Jakarta Post*, 17 January, 2008.

352 "Indonesia Strengthens Defense Cooperation with China and Malaysia," *Jane's Defence Industry*, 25 January, 2010.

353 "RI, China Solidify C-705 Anti-Ship Technology Transfer Mechanism," *Antara*, 10 April, 2012 <http://www.antaraneews.com/en/news/90341/indonesia-china-discuss-c-705-missile-technology-transfer>,

kedua negara. Latihan bersama, yang dinamai “Sharp Knife” antara Kopassus dan *People’s Liberation Army* (PLA), yang dilaksanakan di Bandung pada 2011, menandai rangkaian *operational military-to-military contacts*. “Sharp Knife” dilaksanakan selama dua hari dan berisikan latihan anti-terorisme.³⁵⁴ Latihan ini kemudian menjadi agenda tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan *People’s Liberation Army* (PLA). “Sharp Knife” yang kedua pada 2012 dilaksanakan di Provinsi Shandong dipimpin oleh perwira tinggi dari masing-masing negara.³⁵⁵ Pada 2013, latihan bersama “Sharp Knife” yang dilakukan selama satu minggu ini melibatkan dua ratus personel pasukan khusus TNI Angkatan Udara dan PLA Air Force. Latihan serupa kembali dilakukan pada 2014 di Tiongkok.³⁵⁶ Latihan militer kedua negara diperluas dengan melibatkan angkatan laut. Pada akhir tahun 2013, menteri pertahanan kedua negara mengumumkan bahwa Indonesia dan Tiongkok akan melaksanakan latihan di Laut Tiongkok Selatan, dan TNI AU akan mengirim personel untuk mengurus penerbangan untuk dapat mengoperasikan simulator pesawat tempur Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 di Beijing.³⁵⁷

Kerjasama militer Indonesia-Tiongkok juga dilakukan dalam skema regional. Pada 2014, Panglima TNI Jenderal, Moeldoko melakukan lawatan ke Tiongkok, untuk mengundang partisipasi Tiongkok dalam latihan bersama “Komodo” di Natuna dan menegaskan ekspetasi peningkatan *military to military contacts*, yang menunjukkan Indonesia siap untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas di kawasan. Dalam latihan yang juga diikuti oleh negara-negara ASEAN, Rusia, Korea Selatan, Jepang dan India, PLA mengirimkan *amphibious*

354 E. Syafputri, “Militer China Puji Kehebatan Kopassus,” *Antara*, 6 Juni, 2011 <https://www.antaranews.com/berita/261734/militer-china-puji-kehebatan-kopassus>

355 “China, Indonesia Airborne Troops Complete Antiterrorism Exercise,” *Xinhua/Chinadaily*, 11 November, 2013 https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-11/12/content_17097461.htm

356 H. Purwanto, “Special Air Force Troops Conduct Anti-Terror Exercise in China,” *Antara*, 27 Oktober, 2014 <https://en.antaranews.com/news/96267/special-air-force-troops-conduct-anti-terror-exercise-in-china>

357 “China, Indonesia Launch United Training for Special Forces,” *Xinhua/China.org.cn*, 7 Juni, 2011 http://www.china.org.cn/world/2011-06/07/content_22728260.htm

dock landing ship, dua helikopter, satu detasemen medik, dan satu detasemen teknik penanggulangan bencana.³⁵⁸

b. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama di bidang ekonomi merupakan penopang kerja sama bilateral kedua negara. Pada 2004, di awal pemerintahan Presiden SBY, Tiongkok merupakan mitra perdagangan Indonesia terbesar kelima, dan ekspor Indonesia ke Tiongkok naik 23% dari tahun 2003, mencapai 12,6 miliar dolar AS. Total volume perdagangan mengalami kenaikan kembali menjadi 16,6 miliar dolar AS pada 2005.³⁵⁹ Kerja sama bilateral kedua negara juga mencakup pemberian bantuan senilai 490 juta dolar AS untuk pembangunan Jembatan Suramadu yang terbentang sepanjang 5,4 km sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Hal tersebut merupakan simbol kuatnya hubungan kerja sama kedua negara. Jepang sempat ingin mendanai pembangunan jembatan tersebut dua puluh tahun lalu, tetapi hal tersebut tidak kunjung terwujud, dan Tiongkok mengambil peran tersebut dengan konkret.³⁶⁰

Tiongkok cukup masif dalam mengalirkan dana investasi infrastruktur di Indonesia. Indonesia memang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Pada 2011, Tiongkok menawarkan investasi senilai 5 juta dolar AS untuk proyek pembangunan rel kereta api, khususnya jalur kereta untuk mengangkut batu bara di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, jalur kereta di Bandara Soekarno-Hatta, dan jalur kereta Jakarta-Solo. Tiongkok merealisasikan investasi senilai 1,3 juta dolar AS untuk pembangunan jalur kereta lintas Sumatra sepanjang 300 km, dari Muara Enim ke Lampung. Perusahaan *China Railways* juga

358 "Chinese Warship Participates in 'Komodo' Multilateral Humanitarian Rescue Exercise," Ministry of National Defence PRC, 24 Maret, 2014 <http://eng.mod.gov.cn>

359 "China, Indonesia Agree to Intensify Economic Cooperation," *Xinhua*, 10 Oktober, 2006. <http://english.sina.com/china/1/2006/1006/91073.html>

360 A. Jayakarna, "Suramadu Bridge to Open in April," *The Jakarta Post*, 14 Januari 2014 <http://www.thejakartapost.com/news/2009/01/14/suramadu-bridge-open-april.html>

melakukan investasi senilai 2,3 juta dolar AS pada pembangunan jalur kereta sepanjang 185 km antara Cahu-Bangkuang di Kalimantan.³⁶¹

Sebenarnya, karakter ekonomi Indonesia dan Tiongkok tidaklah komplementer. Tiongkok memiliki beberapa produk andalan ekspor yang mirip dengan produk unggulan Indonesia, misalnya tekstil, mainan anak, dan sepatu olahraga. Pada 2007, sempat terjadi konflik dagang antara Indonesia dan Tiongkok, meskipun dalam skala yang kecil. Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis temuan bahwa beberapa produk makanan, kosmetik, minuman dan mainan anak-anak dari Tiongkok mengandung bahan kimia formalin yang membahayakan kesehatan.³⁶² Dua hari berselang, pemerintah Tiongkok mengeluarkan larangan impor produk hasil laut Indonesia. Konflik dagang ini mereda setelah rombongan pemerintah Indonesia berkunjung ke Tiongkok untuk membicarakan standarisasi produk makanan dan non-makanan.

Pembangunan yang secara masif terjadi di Tiongkok menjadikan negara ini membutuhkan banyak sumber daya energi, khususnya minyak, agar roda pembangunan tetap berjalan. Perhatian Tiongkok kepada Indonesia sebagai salah satu negara pemasok energi baru dimulai pada tahun 2002, diawali dengan penyelenggaraan Forum Energi di antara kedua negara. Forum ini menjadi payung resmi kerja sama kedua negara di bidang energi dan diselenggarakan pada 2006 di Shanghai. Pada pertemuan ketiga pada 2008, Forum dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang yang secara jelas menunjukkan betapa pentingnya forum ini bagi Tiongkok.

Dalam mengatasi kebutuhan energi yang cukup banyak, Tiongkok setidaknya menerapkan dua strategi, yaitu mendirikan perusahaan minyak negara yang bertaraf global dan membangun strategi cadangan, yang dikenal dengan *Strategic Petroleum Reserve*

361 A. Jeffreys, *The Report Indonesia, 2013: Economy, Banking, Energy, Transport, Infrastructure, Tourism, Real Estate, Telecoms & IT, Industry, Capital Markets, Construction, Interviews*, (London: Oxford Business Group, 2013).

362 "Ketua DPR Desak BPOM Awasi Ketat Peredaran Susu China," *Kompas*, 24 September, 2008 <https://ekonomi.kompas.com/read/2008/09/24/10435631/~Kesehatan~Health%20Info~News>

(SPR). Tiongkok mendirikan tiga perusahaan minyak negara, yang masing-masing memiliki ruang gerak yang berbeda. Pertama, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) yang bergerak di sisi hulu mengendalikan seluruh eksplorasi minyak dan gas. Kedua, *China National Petrochemical Corporation* (Sinopec), yang bermain di sisi hilir menjalankan industri petrokimia seperti penyulingan minyak mentah, manufaktur produk kimia, pupuk kimia, dan karet sintetis. Ketiga, *China National Offshore Oil Company* (CNOOC), yang beroperasi pada eksplorasi ladang minyak lepas pantai.³⁶³ Ketiga perusahaan tersebut saham terbesarnya dimiliki oleh negara, tetapi tetap terdaftar di pasar saham dengan mendirikan anak perusahaan, misalnya CNPC mendirikan PetroChina, Sinopec mendirikan Sinopec Corp., dan CNOOC mendirikan CNOOC Ltd.³⁶⁴ Partai Komunis Tiongkok (PKT) memegang kendali dalam pengangkatan, promosi jabatan, dan pemecatan pemimpin tinggi perusahaan.³⁶⁵ Sementara itu, Tiongkok memerlukan SPR untuk mengurangi kerentanan Tiongkok terhadap gangguan terhadap cadangan minyak dunia, yang disebabkan faktor politik maupun non-politik.

Pada masa pemerintahan Presiden SBY perusahaan minyak Tiongkok semakin menanamkan jangkarnya di Indonesia. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa Tiongkok berinvestasi energi di Indonesia. *Pertama* adalah murni keuntungan bisnis karena investasi di Indonesia lebih murah dari pada berinvestasi di Afrika, dengan nilai tambah keadaan politik yang lebih stabil. Alasan *kedua* adalah *oil diplomacy*, selain soal keuntungan berinvestasi di Indonesia juga memberi peluang bagi Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan politik. Melalui investasi di bidang energi, Indonesia akan lebih dekat

363 I. Wibowo dan D. Kusuma, "Melumasi Hubungan Indonesia-China: Kerja Sama Minyak," dalam *Merangkus China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, ed. I. Wibowo dan S. Hadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009): 174.

364 E. S. Dowe, "Business Interest Groups in Chinese Politics: The case of the Oil Companies," dalam *China Changing Political Landscape*, ed. C. Li (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008), 123.

365 I. Wibowo, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik rakyat China*, (Jakarta: Gramedia, 2000).

secara politik dengan Tiongkok, dan mengimbangi pengaruh AS di Indonesia. Pada 2004, PetroChina mendapatkan hak beroperasi di ladang minyak Sukowati. Setelah pada 2002 memastikan akan memperoleh pasokan LNG selama 25 tahun dari ladang gas di Tangguh, CNOOC meningkatkan kepemilikan saham di proyek tersebut menjadi 17%, dengan membeli saham BC Groups, Plc. senilai 100 juta dolar AS pada 2004. Selain itu, pada 2007 CNNOOC menginvestasikan dana sebesar 5,5 miliar dolar AS dalam rangka menghasilkan biofuel berbahan sawit, tebu, dan singkong, bekerja sama dengan PT. SMART (anak perusahaan Sinarmas), di atas lahan 1 juta ha di Kalimantan dan Papua.³⁶⁶ Selanjutnya, CNOOC membeli saham Husky Energy senilai 125 juta dolar AS untuk membangun ladang gas lepas pantai di Selat Madura pada 2008.³⁶⁷

Penjualan LNG dari proyek Tangguh yang sempat menjadi berita hangat di tahun 2002 kembali mencuat di akhir pemerintahan Presiden SBY, dengan proses renegotiasi harga jual LNG dari Tangguh. Proses renegotiasi sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2006, ketika pemerintah berhasil menaikkan harga jual LNG dari 2,7 dolar AS per mmbtu menjadi 3,3 dolar AS per mmbtu. Pada 2010, pemerintah gagal melakukan renegotiasi harga, dan baru empat tahun kemudian berhasil dilakukan dengan mengubah mekanisme penentuan harga. Dengan cara penghitungan lama, Indonesia hanya berpotensi mendapat 5,2 miliar dolar AS sampai 2034. Sementara itu, dengan cara penghitungan hasil renegotiasi, jika asumsi harga minyak dunia 100 dolar AS, maka Indonesia berpotensi memperoleh 20,9 miliar dolar AS atau Rp251 triliun hingga tahun 2034 atau setiap tahun negara dapat Rp12,5 triliun.³⁶⁸ Keberhasilan ini semakin menaikkan kredibilitas Presiden SBY di dalam negeri.

366 "CNOOC, SMART, Hong Kong Energy Investasi BBN US\$ 5,5 M," *Detik Finance*, 9 Januari, 2007 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-728279/cnooc-smart-hong-kong-energy-investasi-bbn-us-55-m>

367 "Husky/CNOOC Complete Agreement for Joint Development in Indonesia," Husky Energy, diakses pada 28 Oktober, 2016 https://www.ckh.com.hk/upload/attachments/en/pr/1995_eng.pdf

368 P. E. Wicaksono, "Cerita di Balik Kesuksesan RI Renegosiasi Harga LNG Tangguh,"

C. Kerja Sama Sosial Budaya

Jika dibandingkan dengan kerja sama di bidang ekonomi dapat dikatakan bahwa kerja sama di bidang sosial budaya, kerja sama Indonesia-Tiongkok masih sangat minim. Kerja sama di bidang sosial merupakan bagian dari strategi diplomasi publik kedua negara. Kerja sama sosial budaya antara lain dilaksanakan lewat beberapa jalur, yaitu jalur bantuan kemanusiaan, pariwisata, pendidikan dan institut konfusius, budaya populer, kerja sama pers, partai politik, kerja sama *sister city* atau *sister province*, dan organisasi etnis Tionghoa.³⁶⁹

Citra Tiongkok sebagai *rising power* yang damai meningkat pada waktu terjadi bencana tsunami yang melanda Provinsi Aceh dan negara-negara di sekitar Samudra Hindia, pada Desember 2004. Tiongkok merespons dengan cepat, mengucurkan bantuan dana darurat sebesar 3 juta dolar AS, dan berkomitmen untuk membantu proses rekonstruksi jangka panjang. Pada pertemuan dengan Presiden SBY, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao menyampaikan komitmen untuk mengirim tim kesehatan, dan membangun kembali jalan, jembatan dan pembangkit listrik yang rusak. Pada April 2005, Menteri Perdagangan Bo Xinlai mengumumkan bahwa Tiongkok akan menyediakan tambahan 2 juta dolar AS berupa barang dan dana siap pakai, yang menjadikan total bantuan dana pemulihan tsunami dari Tiongkok sebesar 25 juta dolar AS.

Hubungan *people to people* di antara kedua negara cenderung lambat berkembang. Salah satu hambatan utama adalah kendala bahasa, jumlah orang Indonesia yang mampu berbahasa mandarin jumlahnya sangat terbatas, begitu pula dengan orang Tiongkok yang mampu berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Di bidang pendidikan jumlah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok, meskipun cenderung meningkat tetapi masih tertinggal jauh

Liputan 6, 1 Juli, 2014 <http://bisnis.liputan6.com/read/2071299/cerita-di-balik-kesuksesan-ri-renegosiasi-harga-Ing-tangguh>

369 N. Soebago, "Tebar Pesona di Indonesia: Cara China Mengambil Hati Indonesia," dalam *Merangkus China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, ed. I. Wibowo dan S. Hadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009): 101-134.

dari beasiswa yang ditawarkan negara-negara lain, seperti Australia, Amerika Serikat atau Inggris.³⁷⁰ Padahal, minat mahasiswa Indonesia untuk mengenyam pendidikan di Tiongkok terus meningkat, pada tahun 1998 tercatat hanya 1.000 pelajar Indonesia di Tiongkok, sementara data tahun 2012 mencatat terdapat 15.000 pelajar Indonesia di Tiongkok.³⁷¹

C. FONDASI HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK YANG LEBIH KOKOH

Indonesia telah bertransformasi menjadi negara *middle power* seiring dengan proses reformasi yang dilaksanakan pasca kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Di awal Era Reformasi, Indonesia berjuang untuk memulihkan kondisi politik dan ekonomi domestik, sementara di ranah internasional, Indonesia berusaha untuk mengembalikan kewibawaannya di dunia internasional. Demokratisasi yang berjalan dengan cukup baik merupakan modal penting bagi Indonesia dalam memapankan posisinya di tatanan politik internasional. Menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara yang menerapkan demokrasi, merupakan modalitas tersendiri bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, membawa Indonesia menjadi negara dengan GDP terbesar ke 16 di dunia. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Seiring dengan perubahan yang terjadi pasca-peristiwa 1998, hubungan Indonesia-Tiongkok menunjukkan kecenderungan adanya penguatan relasi di antara kedua negara. Kebijakan fundamental, khususnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, menjadi fondasi yang baik bagi hubungan Indonesia-Tiongkok di masa pemerintahan setelahnya. Sejak saat itu, sentimen negatif terhadap

370 "Chinese government offering scholarships to Indonesian students," *The Jakarta Post*, 10 May, 2011.

371 P. RH, "Indonesian students in China set up association," *Antara*, 29 October, 2012
<https://en.antaranews.com/news/85291/indonesian-students-in-china-set-up-association>

etnis Tionghoa di dalam negeri, yang kerap menjadi ganjalan hubungan kedua negara, cenderung berkurang. Tiongkok menjadi salah satu mitra kerja sama utama Indonesia. Penandatanganan *Strategic Partnership* dan *Comprehensive Strategic Partnership* mengokohkan rangka bangun kerja sama kedua negara. Dengan kerangka tersebut, kerja sama dan komunikasi Indonesia-Tiongkok tidak hanya dilakukan di level pejabat tertinggi, tetapi sudah mengakar ke level operasional dan bahkan di level masyarakat.

Hubungan Indonesia-Tiongkok pada era Reformasi sedikit banyak telah berkontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Hal yang paling menonjol adalah kontribusinya dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Tiongkok menjadi salah satu mitra perdagangan utama Indonesia, Tiongkok juga menjadi salah satu sumber investor asing, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun, masih ada bidang-bidang kerja sama yang masih perlu ditingkatkan, seperti bidang sosial budaya, kerja sama militer, dan teknologi. Selain itu, hubungan Indonesia dan Tiongkok juga harus dilihat dengan cermat. Ada beberapa dampak negatif dari hubungan Indonesia-Tiongkok yang perlu diantisipasi, misalnya banjirnya produk Tiongkok di Indonesia, pekerja asing ilegal yang masuk seiring investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia, dan masalah-masalah keamanan non-tradisional. Dengan demikian, kerja sama Indonesia-Tiongkok akan menguntungkan bagi kedua negara.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok pada Era Joko Widodo: Memperkuat Kemitraan, Menjaga Otonomi Strategis

“We are not super power in the world, but surely we are a great power in the region”

(Xu Liping, 2016)³⁷²

Pada saat Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2014, hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok semakin menguat. Dalam periode sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berhasil membangun fundamen hubungan kokoh dua negara yang tecermin melalui penandatanganan dua perjanjian penting, yaitu Kemitraan Strategis pada 25 April 2005 yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2 Oktober 2013. Sejak itu hubungan kedua negara mengalami pendalaman dan perluasan baik di bidang politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Hubungan erat kedua negara juga ditunjukkan pada berbagai forum internasional, seperti

372 Wawancara akademisi, Beijing, 18 Mei 2016.

dalam penetapan *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) pada 2002, *Guidelines for the Implementation of DoC* pada 2011 dan penandatanganan protokol *Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) pada 2011. Pada masa pandemi Covid-19, kedua negara secara aktif melakukan kerja sama dalam pencegahan dan pengendalian pandemi. Salah satu hasil dari kerja sama ini Indonesia menerima hibah 4 juta dosis vaksin Sinovac dari Pemerintah Tiongkok.³⁷³ Kerja sama *dose sharing* ini merupakan implementasi nyata dari kemitraan strategis komprehensif kedua negara, terutama dalam bersama-sama menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Hubungan baik Indonesia-Tiongkok yang diwarisi Jokowi dari pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden SBY (2004–2014) menjadi modal pemerintahan barunya untuk menjalin hubungan yang semakin kokoh dengan negara Tirai Bambu ini. Harapan akan adanya hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara inilah yang selanjutnya menjadi dasar pilihan Jokowi memilih Tiongkok sebagai negara tujuan kunjungan luar negerinya yang pertama sebagai presiden pada 8–11 November 2014.

Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian mengadakan beberapa kali pertemuan, baik melalui mekanisme saling kunjung kenegaraan maupun pertemuan sela di antara pertemuan-pertemuan regional dan multilateral yang mereka hadiri bersama, seperti *East Asia Summit*, APEC, dan G20. Intensitas pertemuan yang mereka lakukan tersebut menggarisbawahi kesepakatan bersama akan pentingnya pengembangan hubungan kedua negara. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila pada masa pemerintahan Jokowi, hubungan kedua negara terlihat semakin menguat dan menyeluruh. Fokus hubungan tidak saja pada penguatan kerja sama ekonomi, politik dan pertahanan, melainkan juga bidang kerja sama lainnya, termasuk budaya. Kerja sama kedua negara pun mengalami peningkatan, di

373 P. Yue, "Pertukaran Humaniora dan Kerja Sama Tiongkok-Indonesia dalam Periode Pasca-pandemi", dalam *Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok*, ed. P. R. Yuniarto dan T. J. Lan (Surabaya: Airlangga, 2021), 61–74; B. Mufarida, "2 Juta Dosis Vaksin Sinovac Bantuan China Tiba di Indonesia," SINDOnews.com, 21 Desember 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/634903/15/2-juta-dosis-vaksin-sinovac-bantuan-china-tiba-di-indonesia-1640074371>

mana pada masa SBY dari kemitraan strategis yang biasa saja (*'normal' strategic partnership*) menjadi 'kemitraan strategis yang komprehensif' (*'comprehensive' strategic partnership*) pada 2013, dan kemudian oleh Jokowi setelah satu tahun pemerintahannya kemitraan strategis yang komprehensif tersebut diperkuat melalui *"Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and The Republic of Indonesia* pada 2015.³⁷⁴

Indonesia memiliki kepentingan nasional yang besar untuk tetap menjaga dan menjalin relasi tetap baik dengan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya merupakan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan daya kekuatan ekonomi maupun proyeksi kekuatan militernya. Kebijakan luar negeri Jokowi tentang Poros Maritim Dunia dan konektivitas tol laut yang didengungkan sejak masa kampanye pemilihan Presiden tampaknya juga turut memberikan andil dalam penguatan hubungan kedua negara. Apalagi kebijakan ini tampaknya juga sejalan dengan strategi global Tiongkok akan *One Belt One Road* (OBOR) yang juga dikenal dengan sebutan *Belt Road Initiative* (BRI) yang merupakan visi pembangunan konektivitas lintas benua, melalui jalur darat dan laut.

Hubungan bilateral kedua negara yang berhasil dibangun hangat pada masa pemerintahan Jokowi ini senyatanya juga tidak terlepas dari tantangan dan kendala, salah satunya munculnya kekhawatiran bahwa kedekatan hubungan kedua negara akan menyebabkan kompleksitas pelaksanaan politik luar negeri atas dasar prinsip bebas aktif, kedaulatan dan kemandirian bangsa yang berulang kali didegunkan oleh pemerintahan Jokowi. Kondisi ini sangat penting untuk diketahui apalagi ada realitas ketidakseimbangan dalam kekuatan, yaitu kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai negara besar didukung oleh kapasitas ekonomi dan politik yang sangat besar, sementara Indonesia

374 "Indonesia, China Forge Comprehensive Strategic Partnership in Various Field". *Antara News*, 7 Oktober 2013. <http://www.antaraneews.com/en/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>; "Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and The Republic of Indonesia," Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 26 Maret, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201503/t20150327_679397.html

berada pada posisi sebagai negara kekuatan menengah. Kekhawatiran negara Tirai Bambu ini akan menggunakan seluruh kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimilikinya sebagai instrumen dari negara besar untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam hubungan bilateralnya dengan Indonesia pada akhirnya menjadi suatu persoalan serius dan menarik perhatian domestik politik di Indonesia. Kondisi ini salah satunya tecermin, misalnya, melalui pernyataan tegas Susilo Bambang Yudhoyono pada Acara Wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia pada 28 Agustus 2016, bahwa “Jangan Indonesia yang dikontrol Tiongkok”³⁷⁵ Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran dalam asimetri hubungan kedua negara yang tidak berimbang antara Indonesia dan Tiongkok.

Munculnya kekhawatiran ini tampaknya juga bisa dipahami terkait dengan kecenderungan penguatan paradigma pragmatisme yang diusung oleh Jokowi dalam kebijakan luar negerinya. Sejak awal kemerdekaannya, kebijakan luar negeri Indonesia dikenal dengan prinsip dasarnya yaitu bebas aktif. Artinya, Indonesia memiliki hak untuk menentukan sikap dan tujuan sendiri dalam hubungan internasional, di samping juga ikut berupaya untuk mengambil peran penting di pentas internasional dengan cara ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan global. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Jokowi juga mempertimbangkan pragmatisme dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Latar belakangnya sebagai pengusaha furniture tampaknya memengaruhi pola pikir dan tindakan yang cenderung pada pertimbangan untung rugi. Tidak mengherankan jika kemudian Jokowi berpandangan bahwa kebijakan luar negeri juga harus menguntungkan bagi kepentingan Indonesia.³⁷⁶ Persoalannya adalah kemudian bagaimanakah pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Jokowi tersebut tidak menumpulkan pilar utama lainnya dalam

375 “SBY Kritik Jokowi: “Jangan Indonesia yang Dikontrol Tiongkok” *Akurat News*. 29 Agustus 2016 <http://www.akurat.id/2016/08/sby-kritik-jokowi-jangan-indonesia-yang.html>

376 M. Rosyidin (.). *Gaya Diplomasi Jokowi dan Arah Politik Luar Negeri RI*. *Detiknews*, 10 Oktober 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4740964/gaya-diplomasi-jokowi-dan-arah-politik-luar-negeri-ri>

kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu kedaulatan negara. Apalagi, Indonesia hingga saat ini masih memiliki perbedaan pandangan atas klaim teritorial Tiongkok akan *nine-dash-nine* di Laut China Selatan (LCS) yang tumpang tindih dengan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Isu LCS yang akhirnya menyeret persoalan saling perebutan pengaruh antara Tiongkok dan kekuatan-kekuatan negara besar lainnya telah menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan luar negeri dalam memosisikan kepentingan Indonesia di kawasan, khususnya dengan ASEAN dan negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat. Bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan yang memicu konflik terbuka di LCS. Sekalipun tidak terlibat secara langsung dalam tumpang tindih klaim di LCS, Indonesia tidak menginginkan itu terjadi. Jika hal ini terjadi, Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan LCS juga akan terkena dampak. Tidak hanya Indonesia memiliki kepentingan akan stabilitas dan keamanan kawasan untuk dapat terus melaksanakan pembangunan, konflik terbuka di LCS juga akan mengubah citra kawasan ASEAN yang selama ini aman dan damai.

Tulisan ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok, khususnya pada masa pemerintahan Jokowi (2014–2021). Sebelum menganalisis lebih lanjut, bab ini terlebih dahulu mendeskripsikan secara singkat mengenai arah kebijakan luar negeri Jokowi. Pada subbab berikutnya mengkaji implementasi kebijakan tersebut. Sebelum ditutup, bab ini membahas strategi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah mengapitalisasi kemitraannya dengan Tiongkok agar Indonesia dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya.

A. ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JOKOWI

Joko Widodo adalah Presiden RI yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum dan dilantik pada 20 Oktober 2014. Sebagai Presiden yang harus menjalankan amanat konstitusi, Jokowi mencanangkan

visi pembangunan nasional untuk lima tahun masa pemerintahannya (2014–2019), yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari tujuh Misi Pembangunan tersebut, terlihat bahwa Indonesia di dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negerinya memiliki misi yang ke-3, yaitu “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Jokowi selanjutnya telah menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan dalam lima tahun pemerintahannya. Kesembilan agenda prioritas itu selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Nawacita, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

- 2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita memberikan kejelasan akan politik luar negeri sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam pemerintahan Jokowi. Soal bagaimana arah kebijakan politik luar negeri tersebut dilakukan, pemerintahan Jokowi sudah mencantumkannya secara jelas dalam butir Nawacita yang pertama, yaitu Jokowi ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Ini dilakukan dengan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Pernyataan visi, misi, dan Nawacita telah memberikan gambaran jelas tentang arah dan komitmen lima tahun pemerintahan Jokowi akan politik luar negerinya yang akan diperjuangkan di kancah pergaulan internasional. Ada tiga hal pokok yang dapat disarikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada era Jokowi. *Pertama* adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tersusun dengan

prinsip bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. *Kedua* adalah mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. *Ketiga* adalah memperkuat diplomasi ekonomi untuk mewujudkan kemandirian, produktivitas dan daya saing ekonomi.

Garis besar arah kebijakan luar negeri Jokowi memperlihatkan adanya kesinambungan dan perubahan di dalam politik luar negeri Indonesia, terutama dengan era pemerintahan SBY sebelumnya. Yang dimaksudkan dengan kesinambungan ini, menurut pandangan Roseanau, merujuk pada pola-pola kebijakan luar negeri yang cenderung tidak berubah. Sementara konsep perubahan mengacu pada fenomena kebijakan luar negeri yang mengalami banyak perubahan mulai dari tingkatan gaya kepemimpinan hingga sampai restrukturisasi mendasar dari kebijakan luar negeri suatu negara.³⁷⁷ Dalam konteks ini, kesinambungan yang paling terlihat nyata antara Jokowi dan SBY adalah kedua pemimpin dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri tetap menggunakan acuan norma yang sama, yaitu prinsip bebas aktif.

Hanya saja prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri pada pelaksanaannya terlihat mengalami perbedaan pemaknaannya. Pada masa SBY, politik luar negeri yang bebas-aktif dijalankan dengan pendekatan *all-directions foreign policy*. Pada tataran praktis, hubungan dan kerja sama yang baik eton: negara diimplementasikan dengan semangat *a million friends, zero enemy*. Pendekatan ini dipertajam dengan fokus Indonesia untuk menjadi *norms setter, consensus builder, peace maker* dan jembatan penghubung (*bridge builder*)³⁷⁸ atas berbagai kepentingan dan posisi dalam kancah internasional, sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

377 J. N. Rosenau, *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity* (Princeton: Princeton University Press, 1990).

378 S. B. Yudhoyono, "Indonesia's Role as Regional and Global Actor". *Pidato* (London: Wilton Park, 2 November 2012).

Pada tataran dunia internasional, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan sebagai negara kekuatan menengah, yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada fora internasional. Peran Indonesia yang diarahkan untuk menjadi *part of the solution* bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri RI telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan internasional, utamanya di ASEAN, PBB, G-20, APEC, ARF, GNB, OKI, ASEM, FEALAC dan D-8. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu perdamaian dunia, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, kerja sama Selatan-Selatan, lingkungan hidup, serta pemajuan demokrasi dan HAM.

Berbeda dengan SBY, Jokowi memaknai bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Politik luar negeri yang bebas-aktif bukan hanya semata dijalankan dengan pendekatan *a million friends, zero enemy*, melainkan dalam pandangan Jokowi harusnya bebas aktif ini dimaknai sebagai “menjalin hubungan dengan negara-negara lain yang dapat memberikan kemanfaatan bagi Indonesia”. Bagi Jokowi, “untuk apa menjalin hubungan jika pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa”.³⁷⁹

Di samping itu, politik luar negeri Indonesia di era Jokowi ini juga memperlihatkan adanya lompatan perubahan signifikan. Yang paling menonjol adalah adanya perubahan paradigmatis dalam politik luar negeri yang menitikberatkan pada jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Sementara hal ini merupakan realitas geopolitik yang terabaikan pada pemerintahan sebelumnya, Jokowi dalam pemerintahannya, terutama pada periode pertama pemerintahannya

379 A. Widiatmaji dan U. Albab, “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional,” *Jurnal Politica* 10 No. 1 (Mei 2019), 86.

telah memberikan komitmen politik untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai “Negara Maritim”, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang menandai keberadaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain di dunia.

Dengan paradigma barunya, Jokowi memberikan perhatian lebih serius pada pengelolaan wilayah laut di Indonesia. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, pengembangan konektivitas antarpulau, perbaikan transportasi laut, dan pertahanan keamanan maritim merupakan program-program utama dalam pemerintahan Jokowi untuk mengimplementasikan gagasan strategisnya akan jati diri Indonesia sebagai negara maritim.³⁸⁰ Untuk itu, dapat dimengerti bila kemudian aktivitas berkaitan dengan lautan, selat, dan teluk dikedepankan, infrastruktur kelautan dikembangkan, pelabuhan-pelabuhan laut dibangun dan direvitalisasi, pengelolaan potensi laut dilakukan lebih serius, hingga pengetatan penjagaan keamanan maritim.

Kebaruan visi politik luar negeri dengan Indonesia sebagai negara maritim ini bahkan telah ditekankan Jokowi sejak masa kampanye pemilihan presiden. Dalam acara debat calon presiden pada tanggal 22 Juni 2014, misalnya, ketika menyinggung soal kebijakan luar negeri, Jokowi berpandangan bahwa Indonesia harus mampu mewujudkan fungsi sebagai poros maritim dunia (*global maritime axis*).³⁸¹ Setelah terpilih sebagai Presiden, Jokowi menegaskan kembali tekadnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam pidato kenegaraannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014, sebagai berikut:

Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia dan harapan saya tentang

380 *Rencana Strategis 2014-2019* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2014).

381 A.A. Connelly, *Foreign Policy Under President Jokowi* (Sydney: Lowy Institute for International Policy, October 2014), 6.

peran KTT Asia Timur ke depan...Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.³⁸²

Selanjutnya konsep Poros Maritim Dunia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (2014–2019). Gagasan strategis tersebut dituangkan ke dalam lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia. Kelima pilar tersebut adalah *pertama*, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia mengelola samudra. *Kedua* adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. *Ketiga* adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. *Keempat* adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Indonesia harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. *Kelima* adalah Indonesia berkewajiban membangun pertahanan maritim karena sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra. Hal ini diperlukan tidak saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim yang melewati perairan laut Indonesia.³⁸³

382 "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", t.t., diakses pada 4 Oktober 2016, dari <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>

383 "Indonesia Sebagai".

Di samping memiliki nilai strategis dan geopolitik, Poros Maritim Dunia ini juga sangat kental kandungan aspek geoekonomi. Indonesia bertekad memainkan peran lebih asertif dengan menjadi pusat dan penghubung baru (*center* dan *hub*) di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, khususnya penguasaan jalur transportasi laut dan aktivitas ekspor impor yang melibatkan pelabuhan-pelabuhan penting di kawasan ini. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia mengingat negara ini berada di daerah khatulistiwa, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudra Pasifik dan Hindia, serta di antara negara-negara Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan tekad sebagai Poros Maritim Dunia ini, titik berat politik luar negeri Indonesia yang selama ini cenderung ke arah kawasan Samudra Pasifik, pada masa Jokowi diimbangi juga dengan hubungan yang semakin substansial ke arah kawasan Samudra Hindia. Artinya, politik luar negeri Indonesia juga memberikan perhatian yang lebih besar kepada negara-negara, seperti Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, India, dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dan Barat Daya. Kawasan Samudra Hindia ini sangat strategis karena merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Di samping itu, kawasan ini juga dipandang memiliki potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerja sama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.³⁸⁴ Pentingnya kawasan ini dalam politik luar negeri Indonesia selanjutnya dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Pada tahun 2016 Indonesia menggantikan Australia sebagai pimpinan IORA, dimana organisasi regional ini diibaratkan sebagai “APEC for the Indian Ocean”.³⁸⁵ Indonesia juga menduduki posisi strategis dalam struktur organisasi IORA dengan

384 Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 32.

385 Connelly, *Foreign Policy*, 7.

terpilihnya Duta Besar Salman Al Farisi sebagai Sekretaris Jenderal IORA pada 2022–2024.

Pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia yang sedang terjadi dari Barat ke Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir ini juga menjadi momentum baik yang dapat menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai sebuah gagasan strategis yang diwujudkan dengan Indonesia sebagai *center* dan *hub* jalur transportasi laut dan perdagangan antara dua samudra, tentu Indonesia juga memandang penting negara-negara Asia Timur. Bagi Indonesia, sebagaimana dikemukakan Jokowi dalam KTT Asia Timur, negara-negara Asia Timur sangat strategis bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan.

Dalam konteks ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini, yaitu pergeseran kekuatan dan pertumbuhan ekonomi dari barat (Atlantik) ke Asia Timur, terutama Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat (AS). Perkembangan pesat kekuatan ekonomi dan peningkatan kemampuan militer Tiongkok ini realitasnya telah menggoyang konfigurasi peta kekuatan internasional dan regional pasca Perang Dingin yang didominasi oleh kekuatan unilateral AS. Banyak para ekonom yang memberikan prediksi negara tirai bambu ini tidak hanya menggoyang, tetapi akan menggeser posisi AS sebagai adidaya kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tiongkok, misalnya, pernah diprediksi menyalip AS pada 2020. Artikel “Top 10 Largest Economies in 2020” di *The Euromonitor International* tanggal 7 Juli 2010, mengatakan bahwa “by 2020 there will be a major shift in the global balance of economic power compared to 2010....Emerging economies will rise in importance and China will have overtaken the USA to lead the list of the world’s top ten largest economies by GDP measured in PPP terms.”³⁸⁶ Meskipun perkiraan ini meleset, PDB Tiongkok mencapai sekitar 15,6 triliun dolar AS,

386 A. Jemadu, “Hubungan Indonesia – China Dalam Dinamika Politik, Pertahanan, Keamanan dan Ekonomi di Asia Tenggara,” (*Presentasi Focus Group Discussion* Kelompok Penelitian Polugri P2P LIPI: Hubungan Indonesia-China, Jakarta, 11 Oktober 2011), 5

dibanding Amerika Serikat 23,2 triliun dolar AS pada 2021. Margin ini sebagian memprediksi dapat dilampaui dalam kurun waktu dua tahun ke depan.³⁸⁷ Namun, ada juga yang memperkirakan Tiongkok membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Cebr, Konsultan Inggris, misalnya, menyatakan Tiongkok akan menjadi negara ekonomi terbesar dunia pada 2030.³⁸⁸

Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak menafikan akan fakta terjadinya pergeseran kekuatan global ke Asia Timur dengan kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok. Fenomena ini tentu menjadi salah satu determinan penting di dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok pada masa Jokowi. Kapabilitas material besar yang dimiliki Tiongkok, baik dari kemampuan besar ekonomi, jumlah penduduk terbesar di dunia, maupun kekuatan militernya, menjadikan hubungan dengan Tiongkok terlalu penting untuk diabaikan bagi Indonesia.

Pentingnya negara tirai bambu ini dalam garis kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi antara lain dapat dilihat dalam pernyataannya ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok atas undangan Presiden Xi Jinping pada tanggal 26 Maret 2015. Jokowi menyatakan di Balai Agung Rakyat (*The Great Hall of People*), Beijing, bahwa “Tiongkok merupakan teman dekat Indonesia, Tiongkok merupakan sahabat Indonesia, dan Tiongkok merupakan mitra strategis yang komprehensif yang saling melengkapi satu dengan yang lain.”³⁸⁹ Pada level geo-strategis dan geo-ekonomi, Indonesia tentu sadar akan pentingnya untuk terus memanfaatkan peluang kerja sama

387 Syarifudin, “Jadi Negara Terkaya Dunia, Ekonomi China Resmi Salip AS,” *IDX Chanel*, 17 November 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/jadi-negara-terkaya-dunia-ekonomi-china-resmi-salip-as#:~:text=PDB%20China%20diperkirakan%20mencapai%20USD15,sudah%20melampaui%20AS%20saat%20ini>.

388 C. G. Asmara, “Top! Ekonomi China Mengamuk Lagi, Siap Menyalip AS?,” *CNBC Indonesia*, 27 Desember 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211226212501-4-302171/top-ekonomi-china-mengamuk-lagi-siap-menyalip-as>

389 Humas Sekretariat Kabinet RI, “Sebut sebagai Sahabat, Presiden Jokowi Ajak RRT Kerja sama Berantas Korupsi dan Minta Bebas Visa,” *Sekretariat Kabinet RI*, 27 Maret 2015. <https://setkab.go.id/sebut-sebagai-teman-presiden-jokowi-ajak-rrt-kerjasama-berantas-korupsi-dan-minta-bebas-visa/>

dengan Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong Jokowi untuk lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati pemerintahan sebelumnya, SBY, dengan “*Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia*” pada tahun 2015.³⁹⁰

Kesepakatan bersama ini juga menambah fondasi kuat peningkatan hubungan kedua negara karena telah memiliki beberapa kesepakatan sebelumnya yang berfungsi sebagai payung hukum untuk peningkatan kerja sama lebih lanjut. Dalam perdagangan dan investasi, kedua negara memiliki kesepakatan perdagangan bebas. Dalam konteks regional melalui ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Agreement*, ACFTA) yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 dan mulai berlaku sejak Januari 2010.

Kedua negara juga sepakat menandatangani 7 (tujuh) dokumen kerja sama berupa *Memorandum of Understanding* (MOU) dalam kunjungan Jokowi ke Beijing pada Maret 2015. MOU tersebut adalah:

- 1) MoU Kerja sama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT;
- 2) MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN;
- 3) MoU Antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung;
- 4) MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI dan Menteri Transportasi RRT;

390 “Indonesia, China Forge Comprehensive Strategic Partnership in Various Field” *Antara News*, 7 Oktober 2013, <http://www.antaraneews.com/en/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>; “Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia,” Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, 26 Maret, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201503/t20150327_679397.html

- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah RI dan RRT untuk pencegahan pajak berganda;
- 6) MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Antariksa Nasional RRT; dan
- 7) MoU antara Menteri BUMN dan *China Development Bank Corporation* (CDBC).

Dapat dikatakan bahwa pada masa kepemimpinan Jokowi, kemitraan komprehensif strategis diperkuat dengan upaya kedua negara untuk mengembangkan hubungan menyeluruh, baik di bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya.

Mengembangkan relasi yang baik dengan Tiongkok menjadi bagian dari kepentingan strategis dalam politik luar negeri Indonesia. Tiongkok sebagai negara adidaya yang didukung dengan kekuatan besar ekonomi dan politik globalnya tentu sangat penting untuk diabaikan Indonesia bagi kepentingan nasionalnya. Apalagi kebijakan Jokowi tentang Poros Maritim Dunia dan konektivitas tol laut juga tampaknya memiliki arah sejalan dengan strategi global Tiongkok mengenai *One Belt One Road* (OBOR) atau juga dikenal dengan *Belt Road Initiative* (BRI), yang merupakan visi pembangunan konektivitas lintas benua, melalui jalur darat dan laut. Dalam visi Pemerintah Tiongkok, Jalur Sutra Baru ini terdiri dari Sabuk Ekonomi Jalur Sutra yang akan menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa (khususnya kawasan Baltik) melalui jalur darat, dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang akan menghubungkan jalur perdagangan laut mulai dari pesisir Tiongkok hingga Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia di satu sisi, dan sisi lainnya dari pesisir Tiongkok hingga kawasan Pasifik Selatan melalui Laut Tiongkok Selatan.³⁹¹ Melalui inisiatif yang digagas Tiongkok pada tahun 2013 tersebut, Indonesia sebagaimana negara-negara lain yang berada

391 National Development and Reform Commission (NDRC), *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*, Beijing: 2015. https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/2015zt/xjpcxpayzt2015nnh/201503/t20150328_705553.html

dalam jalur perdagangan Sutra tersebut berharap akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi timbal-balik. Pembangunan infrastruktur ini antara lain juga akan difasilitasi dengan Bank Infrastruktur Asia (AIIB) yang didirikan atas inisiasi Presiden Xi Jinping pada awal Januari 2016.

Dalam menjalin hubungan bilateral kedua negara tidak lepas dari tantangan, seperti antara lain terkait soal isu pekerja asing Tiongkok di Indonesia, tertundanya penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung, dan intrusi nelayan-nelayan Tiongkok di perairan Laut Natuna Utara, namun hubungan Indonesia-Tiongkok terus terjalin hangat pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi (2019–2024). Salah satu indikasinya terlihat jelas pada masa pademi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020, Indonesia menjadi negara penerima vaksin pertama Tiongkok dan sekitar 80% vaksin di Indonesia juga berasal dari Tiongkok.³⁹² Tiongkok juga akan membantu Indonesia untuk membangun pusat produksi vaksin regional.³⁹³ Ini menjadi satu bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang arah prioritas diplomasi untuk tahun 2021 yaitu “Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional”.³⁹⁴ Kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, termasuk dengan Tiongkok, menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia untuk memberantas Covid-19, mencegah dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi tersebut dan memperkuat ketahanan kesehatan global.

392 “Xi Jinping Tiba-tiba Telepon Jokowi, Ada Apa?”. *CNBC Indonesia*, 14 Januari 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220114072600-4-307229/xi-jinping-tiba-tiba-telepon-jokowi-ada-apa>,

393 V. T. Margono, N. Irawan, dan J. Graciella, “Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi COVID-1,” *Jurnal Sentris*, (11 Oktober 2021), 287.

394 “Menlu RI Sampaikan Capaian Politik Luar Negeri Indonesia 2020 dan Prioritas Diplomasi 2021,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021, <https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luarnegeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: PELUANG DAN TANTANGAN

Arah kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi secara jelas telah menempatkan Tiongkok sebagai negara mitra penting bagi Indonesia. Perspektif yang sama juga sering kali dinyatakan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping bahwa Indonesia ditempatkan sebagai negara yang mendapatkan prioritas dalam politik luar negeri Tiongkok. Penegasan tersebut salah satunya disampaikan Presiden Xi Jinping pada saat menerima kunjungan kehormatan Presiden Jokowi yang sedang menghadiri pertemuan puncak ke-11 G20 di Hangzhou pada awal September 2016. Menurut Xi Jinping, “Indonesia dan [Tiongkok] akan selalu menjadi tetangga, sekaligus mitra yang baik untuk membangun saling percaya serta memperkuat hubungan sebagai mitra strategis yang komprehensif”.³⁹⁵ Tidak saja dari aspek geo-ekonomi, Indonesia secara geo-politik juga dipandang sangat penting bagi Tiongkok dengan posisi geostrategis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, keberadaan ALKI yang penting bagi dunia, kekuatan utama di kawasan dan ASEAN.³⁹⁶

Adanya komitmen politik yang kuat dari dua pemimpin ini pada akhirnya telah mampu mendorong hubungan kedua negara yang semakin hangat, bahkan sebagian kalangan menyatakan Indonesia-Tiongkok saat ini sedang mengalami masa “bulan madu”.³⁹⁷ Hanya dalam kurun waktu enam bulan setelah dilantik sebagai Presiden pada tanggal 4 Oktober 2014, pemimpin kedua negara telah mengadakan tiga kali pertemuan, yaitu pada waktu kunjungan kenegaraan Xi Jinping ke Indonesia, dan disela-sela pertemuan KTT APEC dan perayaan 50 tahun KAA di Bandung. Indonesia-Tiongkok saat ini juga menyelenggarakan banyak pertemuan, termasuk tiga pertemuan

395 “Presiden Xi Ingin Hubungan Indonesia-China Semakin Erat”, *Antara*, 2 September 2016, http://www.antaranews.com/berita/582322/presiden-xi-ingin-hubungan-indonesia-china-semakin0erat?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news.

396 Hal yang sama juga disampaikan oleh akademisi, Beijing, 28 Mei 2016.

397 Wawancara diplomat, Beijing, 17 Mei 2016.

dialog tingkat menteri untuk membahas persoalan yang terkait dengan bidang ekonomi, keamanan dan hubungan antarmasyarakat. Format dialog tersebut dikenal dengan sebutan: (1) *high level economic dialogue*; (2) *high level on security affairs*; dan (3) *high level dialogue on people to people dialogue*. Pada akhir Mei 2015, kedua negara menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi pertama bidang kebudayaan dan hubungan antarmasyarakat yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Wakil PM Tiongkok Liu Yandong.³⁹⁸ Terkait dengan format tiga dialog tersebut, Xu Li Ping, salah seorang akademisi dari *Chinese Academy on Social Sciences* (CASS) (2016), menyatakan bahwa terselenggaranya tiga format tersebut merupakan suatu bentuk capaian yang luar biasa dalam hubungan kedua negara. Hal ini karena Tiongkok tidak memiliki tiga tingkatan tersebut dengan negara lain, terkecuali dengan Amerika Serikat dan Rusia.³⁹⁹ Makna implisit dari fakta ini menegaskan pentingnya Indonesia bagi Tiongkok.

1. Kerja Sama Ekonomi

Kedua negara yang sama-sama saling menganggap mitra penting satu sama lain, kemudian dioperasionalkan melalui berbagai kerja sama konkret yang dilakukan di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, pertahanan, maupun sosial. Hanya saja, dalam implementasinya hubungan baik yang terjalin antara pemimpin negara dan kerja sama kedua negara belum memberikan hasil optimal sebagaimana yang diharapkan. Asimetri dalam hubungan kedua negara terlihat lebih menguntungkan pihak Tiongkok. Dalam hal kerja sama ekonomi, misalnya, neraca perdagangan bilateral antara Indonesia-Tiongkok menunjukkan negatif selama lima tahun sejak 2011.⁴⁰⁰ Defisit

398 X.Liping, "Dasar Hubungan Antarmasyarakat Indonesia-Tiongkok dan Prospeknya", dalam *65 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok Kemitraan Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan: Pemikiran dan Pengalaman Tokoh-Tokoh Kerjasama Indonesia - Tiongkok* (Beijing: KBRI China, 2015), 104.

399 Wawancara akademisi, 18 Mei 2016.

400 Disampaikan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan

perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok pada tahun 2014 mencapai 14,4 miliar dolar AS dan kemudian sedikit meningkat 14,6 miliar dolar AS pada tahun 2015.⁴⁰¹

Ketidakseimbangan perdagangan ini terjadi sebagai akibat dari nilai total ekspor (migas dan nonmigas) Indonesia ke Tiongkok jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor dari Tiongkok pada periode yang sama. Menurut Atase Perdagangan RI di Tiongkok, penurunan nilai ekspor Indonesia tersebut paling banyak disumbang dari sektor pertambangan, khususnya batu bara. Pada tahun 2011–2012 permintaan batu bara masih cukup tinggi, namun mulai tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup tajam sekitar 40–50%. Penyebabnya bersumber dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ini terkait dengan munculnya pemain baru Australia sebagai pemasok permintaan domestik batu bara Tiongkok. Indonesia harus bersaing keras untuk mendapatkan pasar batu bara di Tiongkok karena kualitasnya lebih baik dibandingkan milik Indonesia. Selain itu, kedua negara juga telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada tahun 2014 yang menyebabkan pajak batu bara dari Australia ke Tiongkok 0%. Di samping itu, penurunan ekspor tambang Indonesia di Tiongkok juga terkait dengan semakin meningkatnya perhatian Tiongkok terhadap energi ramah lingkungan. Hal ini diindikasikan dengan kebijakan Tiongkok tentang energi, di mana pemerintah menargetkan pemotongan 50% penggunaan batu bara pada tahun 2015, dan menggantinya dengan LNG pada tahun 2016.⁴⁰²

Penurunan ekspor hasil pertambangan Indonesia ke Tiongkok juga disebabkan oleh faktor internal di dalam negeri Indonesia. Ekspor batu bara menurun semakin tajam pada tahun 2014, terutama setelah Presiden SBY mengeluarkan kebijakan terkait mineral, yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun

Republik Indonesia, Arlinda di Nanning Tiongkok pada 12 September 2016 di “RI-Tiongkok Harus Saling Menguntungkan”, *Kompas*, 3 September 2016, 18.

401 Wawancara dengan diplomat, Beijing, 17 Mei 2016.

402 Wawancara dengan diplomat, Beijing.

2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Peraturan yang ditetapkan pada 11 Januari 2014 ini mengatur bahwa hingga tiga tahun aturan ini berlaku, tidak boleh ada lagi ekspor mineral tanpa hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.⁴⁰³

Walaupun demikian, kondisi penurunan tersebut sedikit demi sedikit mulai menunjukkan trend perbaikan memasuki tahun 2016. Tiongkok mulai meminta produk mineral olahan dari Indonesia, seperti *veal alloy* (ekspor Indonesia naik 2%), dan batu bara cair yang hingga bulan Maret 2016 dari sebelumnya hanya 105 juta dolar AS menjadi 200 juta dolar AS.⁴⁰⁴ Di samping batu bara, produk utama ekspor Indonesia lainnya ke Tiongkok adalah kelapa sawit, karet olahan, dan bubuk kayu.⁴⁰⁵ Sementara produk utama ekspor Tiongkok ke Indonesia ada tiga, yaitu elektronik/komputer, mesin-mesin berat untuk industri/garmen, dan bawang putih.⁴⁰⁶ Dengan demikian, secara keseluruhan terlihat bahwa perdagangan Indonesia dengan Tiongkok masih didominasi pada tahap penjualan barang mentah daripada barang jadi. Artinya, produk Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan Tiongkok bila Indonesia tidak bisa memberikan nilai tambah atas barang-barang mentah eksportnya. Bila ini terjadi, dikhawatirkan ketidakseimbangan dalam perdagangan kedua negara akan semakin melebar.

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 memberikan perubahan dalam pola perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok yang pada akhirnya membuka peluang untuk mempersempit gap neraca dagang kedua negara. Pelemahan aktivitas perekonomian domestik Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19 menekan permintaan produk-produk impor asal Tiongkok, yang sebagian besar merupakan produk-produk manufaktur, baik kelompok barang modal, konsumsi,

403 Wawancara Atase Perdagangan. "Pemerintah Diminta Konsisten: Relaksasi Ekspor Mineral Ditolak", *Kompas*, 12 Oktober 2016, 17.

404 Wawancara diplomat, Beijing.

405 Wawancara diplomat, Beijing.

406 Wawancara diplomat, Beijing.

ataupun bahan baku penolong. Menurut Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan RI, Kasan Muhri, pada tahun 2020, impor Indonesia dari Tiongkok terkoreksi 11,79% secara tahunan, ekspor ke Tiongkok tumbuh 13,66%, dan bahkan ekspor nonmigas pertumbuhannya 15,61% secara tahunan. Pada masa pemulihan, pertumbuhan ekspor ke Tiongkok tetap lebih tinggi dari pada impor. Hal ini tecermin pada kinerja sepanjang semester I/2021 di mana ekspor ke Tiongkok tumbuh 62,86% yoy dan impor tumbuh 39,77% yoy. Hal ini menyebabkan terjadinya perbaikan neraca dagang kedua negara, di mana pada semester I/2021, defisit neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok turun dari 4,58 miliar dolar AS menjadi 3,21 miliar dolar AS.⁴⁰⁷

Pada saat yang sama, peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok juga telah memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Apakah fenomena kenaikan ekspor ke Tiongkok selama pandemi Covid-19 akan terus mengalami pertumbuhan ke depannya? Bagaimana jika, misalnya sistem *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara, penerapan protokol kesehatan yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman logistik, adanya larangan ekspor dan impor beberapa komoditas tertentu seperti pangan dan kesehatan, gangguan yang terjadi pada supply dan demand, juga rantai pasokan global tidak ada lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu mendapatkan perhatian terutama sebagaimana disampaikan di bagian awal Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung perekonomian, seperti peralatan mesin, dan peralatan IT. Barang-barang ini bisa menggerakkan ekonomi karena merupakan bagian dari investasi.

Di samping itu, kekhawatiran akan ketahanan ekonomi Indonesia juga berasal dari adanya impor Tiongkok yang merupakan barang-barang konsumsi, seperti makanan, minuman, dan produk industri

407 I.FTimorria, "Pertumbuhan Ekspor RI ke China Bisa Lebih Tinggi dari Impor", *Bisnis.com*, 26 Agustus 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210826/12/1434542/pertumbuhan-ekspor-ri-ke-china-bisa-lebih-tinggi-dari-impor>

garmen, yang bisa juga diproduksi dan tersedia di Indonesia. Membanjirnya barang-barang tersebut merupakan ancaman terhadap ketahanan ekonomi lokal Indonesia.⁴⁰⁸ Potensi ancaman tersebut terutama terletak pada persaingan produk yang tidak seimbang, baik dari aspek harga, rasa, maupun tampilan. Hasil penelitian CSIS di Provinsi Sumatra Utara (2019) menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas produk Tiongkok yang lebih menarik dan lebih murah telah menyaingi industri lokal yang belum kompetitif. Hal ini dapat berimplikasi pada tidak lakunya barang dan bahkan mematikan industri di provinsi tersebut. Masyarakat Sumatra Utara, khususnya masyarakat Kota Medan, juga khawatir tentang potensi masuknya pekerja Tiongkok ke wilayah tersebut, yang menurut mereka dapat memicu konflik dengan pekerja lokal.⁴⁰⁹

Apabila kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan Tiongkok akan semakin berpeluang untuk menggenggam hegemoni pada ekonomi domestik Indonesia, yang pada gilirannya menyebabkan Indonesia dalam posisi rentan.⁴¹⁰ Pembangunan ekonomi Indonesia juga tidak terlepas dari ikatannya dengan Tiongkok yang tecermin melalui realitas negara ini sebagai negara pemasok utang bilateral kelima terbesar ke Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), nilai utang Indonesia terhadap Tiongkok adalah sebesar Rp 12,36 triliun dari total Rp 347,18 triliun pinjaman bilateral per Mei 2016.⁴¹¹ Kekhawatiran ini muncul terkait dengan potensi

408 R.Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties," dalam *Indonesia and China: The Politics of Troubled Relationship*, ed.R.Sukma (London: Routledge, 2009), 152.

409 Y.R Damuri, dkk., "Perspectives and Readiness of Indonesia towards The Belt and Road Initiative" (Jakarta: CSIS, 2019), 27, https://www.csis.or.id/uploads/attachments/post/2019/05/23/CSIS_BRI_Indonesia_r.pdf.

410 R. Amanda, "Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok," *Jurnal Pamator* 14, No 1 (April 2021): 34–39.

411 Hingga Mei 2016, utang pemerintah pusat Indonesia Rp3.323,36 triliun atau setara 244,10 miliar dolar AS berasal dari pinjaman senilai Rp760,06 triliun atau 55,83 miliar dolar AS dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp2.563,29 triliun atau setara 188,27 miliar dolar AS. Pinjaman senilai Rp760,06 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp755,64 triliun (bilateral Rp347,18 triliun, multilateral Rp358,23

Tiongkok menggunakan kekuatan ekonomi yang dimilikinya untuk memaksakan kepentingan ekonomi dan politik nasionalnya terhadap Indonesia. Kekhawatiran ini bahkan muncul di antara elite-elite politik di kawasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abraham Denmark. Menurut Denmark, ada kekhawatiran di antara elite-elite politik di kawasan bahwa pengaruh ekonomi Tiongkok akan membuat Indonesia lebih rentan terhadap tekanan politik dari Beijing.⁴¹²

Di samping perdagangan, hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok juga dapat dilihat dari sektor investasi. Indonesia mengharapkan Tiongkok dapat berfungsi sebagai negara investor besar karena kekuatan ekonominya menduduki posisi terbesar kedua di dunia. Namun, dalam kurun waktu lima tahun dari 2011 hingga 2016, investasi asing Tiongkok belum signifikan. Negara ini masih menduduki peringkat ke-10 sebagai negara yang melakukan investasi asing langsung di Indonesia. Komitmen investasi negara tirai bambu ke Indonesia tersebut mencapai 52,8 miliar dolar AS. Namun, realisasinya baru mencapai 3 miliar dolar AS pada 2016⁴¹³, 4,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp69,7 triliun pada 2020, dan periode Januari–September 2021 investasi dari Tiongkok tercatat 2,3 miliar dolar AS.⁴¹⁴

Belum optimalnya realisasi investasi Tiongkok di Indonesia tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pada satu sisi, hal ini bukan hanya menunjukkan ketidaksesuaian komitmen Tiongkok

triliun, komersial bank Rp50,08 triliun, dan *suppliers* Rp0,15 triliun) serta pinjaman dalam negeri Rp4,42 triliun. Lihat F. Ariyanti, “10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia,” *liputan6.com*, 21 Juni 2016, <http://bisnis.liputan6.com/read/2536315/10-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia>

412 J. Brown, “Jakarta’s Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific,” *Foreign Policy Analysis The Centre for Independent Studies*, No. 5 (3 Februari 2011): 7. <https://www.cis.org.au/wp-content/uploads/2015/07/fpa5.pdf>

413 Data disampaikan Deputy Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba P. Hutapea, “Investasi: Realisasi Komitmen Tiongkok baru 5 Persen,” *Kompas*, 14 September 2016, 19.

414 Disampaikan Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun pada diskusi yang diselenggarakan FPCI, 31 Maret 2021, dalam S. Nurhaliza, “Perdagangan Indonesia dan China Tembus Rp1,1 Triliun,” *IDX Channel*, 1 April 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/perdagangan-indonesia-dan-china-tembus-rp11-triliun>.

yang menempatkan Indonesia sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya, melainkan juga dengan diplomasi ekonomi Indonesia yang juga menjadi agenda penting dalam kebijakan luar negeri Jokowi. Pada sisi lain, dalam konteks investasi ini, ada hal menarik yang juga perlu mendapatkan catatan bahwa fakta investasi Tiongkok di Indonesia ternyata juga lebih rendah dibandingkan investasi negara ini di negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.⁴¹⁵ Realitas ini mengindikasikan bahwa diplomasi ekonomi yang menjadi salah satu pilar dalam kebijakan luar negeri Jokowi belum berjalan dengan optimal. Padahal diplomasi ekonomi pemerintahan Jokowi menitikberatkan pada investasi.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia selanjutnya adalah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kemudahan berinvestasi yaitu dengan membangun infrastruktur dan kebijakan-kebijakan deregulasi ekonomi, seperti 12 paket kebijakan ekonomi yang berisi 203 deregulasi kebijakan pada November 2015, penghapusan peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih dan menghambat investasi, gerakan nasional nasional penghapusan pungutan-pungutan liar di kementerian dan instansi pemerintah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekalipun demikian, realisasi investasi nasional masih rendah, yaitu hingga kuartal kedua tahun 2016 baru mencapai Rp545 triliun atau 30% dari komitmen Rp1.852 triliun.⁴¹⁶ Berbagai kebijakan tersebut juga belum mampu menarik modal asing Tiongkok sebagaimana terlihat dari realisasi investasinya di Indonesia yang masih kecil dibandingkan dengan komitmen yang diberikan.

Ada beberapa faktor kendala internal dan eksternal yang menghambat realisasi investasi Tiongkok di Indonesia, salah satunya dukungan kesiapan dalam negeri yang belum cukup memadai di Indonesia. Indonesia masih dianggap sebagai negara yang tidak mudah untuk melakukan usaha. Hal ini tecermin melalui posisi Indonesia dalam indeks *Ease of Doing Business* (EODB) Bank Dunia yang juga

415 Nurhaliza, "Perdagangan Indonesia".

416 "Deregulasi Morat Marit". *Tempo*, 17 Juli 2016, 25.

tidak menjadi lebih baik. Meskipun Indonesia sudah naik 18 poin dari tahun 2015, namun Indonesia masih berada di peringkat ke-92 dari 189 negara yang disurvei pada tahun 2016 di bawah Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam.⁴¹⁷ Peringkat EODB Indonesia membaik berada pada peringkat ke-73 di dunia pada 2018 dan peringkat tersebut tetap sama pada tahun 2019.⁴¹⁸

Upaya Jokowi melalui 12 paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah investasi dalam realisasinya juga dinilai tidak terfokus, dan terlepas satu sama lain. Akibatnya paket tersebut terkesan tidak terintegratif dan kurang koordinasi. Paket pembukaan daftar negatif investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 merupakan salah satu contoh yang menggambarkan persoalan tersebut. Beberapa detail peraturan ini justru dianggap akan mematikan pengusaha dalam negeri. Pandangan ini diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, yang mendukung daftar negatif tetap diberlakukan. Namun, pandangan ini tidak mendapatkan dukungan dari pembantu presiden lainnya. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, misalnya, memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Luhut mendukung adanya pengkajian larangan tersebut dengan melihat potensi sektor perikanan yang besar tetapi belum digarap serius di Indonesia.⁴¹⁹ Sementara UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 yang salah satu tujuannya adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan mempermudah perijinan investasi hingga saat ini juga masih menghadirkan pro dan kontra.⁴²⁰ Perbedaan pandangan ini menunjukkan belum ada soliditas diantara pembantu Presiden sendiri dalam melaksanakan kebijakan Presiden.

417 “Deregulasi”; “Upaya Perbaikan Pemerintah Tuai Hasil”, (2016, 26 Oktober), *Kompas*, 1.

418 “Ease of Doing Business in Indonesia” (t.t). Trading economics.com. Diakses 29 Februari 2022 dari <https://tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business>

419 “Menjadi Tuan di Laut Sendiri”. *Majalah Tempo*, 22 Agustus 2016, <https://majalah tempo.co/read/opini/151323/menjadi-tuan-di-laut-sendiri>

420 B. Sadono dan L. R. Rahmaji, “Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No.3 (2021): 601–620.

Kondisi-kondisi tidak kondusif tersebut tentu menyebabkan munculnya nuansa ketidakpastian usaha yang pada akhirnya menjadi faktor yang tidak menarik untuk investor, termasuk yang berasal dari Tiongkok, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi Tiongkok juga memiliki kekhawatiran akan keamanan modalnya di Indonesia. Hal ini terkait erat dengan kesenjangan informasi di Tiongkok mengenai di Indonesia. Dalam jajak pendapat tentang 10 negara ASEAN yang dilakukan oleh *Chinese Daily* pada tahun 2013/2014, misalnya, Indonesia dinilai oleh responden sebagai negara yang masuk dalam negara yang tidak disukai dan tidak bersahabat. Persepsi ini muncul sebagai akibat adanya distorsi gempuran berita yang dibuat oleh media barat tentang Indonesia yang digambarkan sebagai negara tidak aman dengan adanya bom Bali dan mayoritas penduduknya muslim.⁴²¹

2. Kerja Sama Keamanan Pertahanan

Selain kerja sama di bidang ekonomi, Indonesia dan Tiongkok juga sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan-keamanan. Untuk itu, ada beberapa kerja sama yang telah dilakukan, antara lain meliputi konsultasi/dialog pertahanan dan keamanan, pertemuan pembicaraan kerja sama antara kedua Angkatan Laut (*Navy To Navy Cooperation Talk*, NTNCT), dan *working group* antara kedua Kementerian Pertahanan. Dalam konteks ini pula pada tahun 2015 kedua negara berhasil menyelenggarakan konsultasi/dialog pertahanan-keamanan ke-6, dan NTNCT yang ke-2 di Indonesia, serta *working group* antara Kementerian Pertahanan kedua negara ke-3 di Beijing. Di samping itu, kedua negara juga telah melakukan latihan militer bersama, baik dilakukan oleh AU maupun AD. Pada tahun 2011–2014 dilakukan latihan bersama antara Korpaskhas dan PLA Air Force One dengan sandi “Airborne Sharp Knife”.⁴²² Hanya kemudian,

421 Wawancara akademisi, Beijing, 19 Mei 2016.

422 “Tiongkok Berharap Kerjasama Pertahanan dengan RI Terus Dijaga,” *JakartaGreater.com*, 9 Maret 2015, <http://jakarta.greater-com/tiongkok-berharao-kerjasama-pertahanan=dengan-ri-terus-terjaga>.

latihan bersama antar-AU tersebut belum terlihat kelanjutan hingga saat ini.⁴²³ Demikian pula yang terjadi terhadap latihan bersama AD kedua negara antara Kopassus dan pasukan khusus PLA Ground yang terhenti setelah tahun 2011 dan 2012 dengan sandi “Sharp Knife”.⁴²⁴

Di samping itu, kedua negara juga sepakat dalam pengembangan relasi pertahanan, termasuk pertukaran pendidikan dan belajar bahasa. Pada tahun 2016 tercatat ada satu personel militer yang sedang belajar bahasa Mandarin di Shanghai. Tiga personel militer masing-masing dari AL dan AU serta tiga orang dari Lemhanas juga sedang mengikuti pendidikan setingkat sekolah komando di Beijing.⁴²⁵

Teknologi militer Tiongkok yang berkembang dengan sangat pesat juga dimanfaatkan oleh Indonesia. Sekalipun teknologi maju militer Tiongkok masih tertinggal dibanding dengan Amerika Serikat dan Rusia, namun Indonesia tetap tertarik untuk melakukan beberapa pembelian senjata dari negara tira bambu ini. Senjata yang dimaksud adalah senjata pendukung untuk Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) seperti rudal kapal AL, anti rudal, dan simulator AU.⁴²⁶ Pembelian ini dilakukan karena Tiongkok dinilai sangat terbuka untuk transfer teknologi militer dibandingkan dengan dua negara adidaya tersebut.⁴²⁷

Komitmen untuk meneguhkan kerja sama pertahanan keamanan Indonesia-Tiongkok juga tetap terjaga meskipun tidak begitu signifikan pada masa dua tahun pemerintahan Jokowi. Relasi kerja sama pertahanan kedua negara juga dicoba diperluas, khususnya di bidang Cyber Defence dan bidang kelautan. Kesepakatan kerja sama ini tercapai dalam kunjungan Menteri Koordinator Politik Keamanan, Luhut Panjaitan ke Beijing pada akhir April 2016. Kerja sama ini meliputi penyelesaian masalah ikan di Laut China Selatan, kerja sama penangkapan ikan, dan pembangunan pabrik ikan. Melalui kerja sama

423 Wawancara diplomat, Beijing, 18 Mei 2016.

424 “Tiongkok Berharap”

425 Wawancara diplomat, Beijing.

426 Wawancara diplomat, Beijing.

427 Wawancara diplomat, Beijing.

ini diharapkan bisa menurunkan tensi Indonesia-Tiongkok yang sempat memanas karena isu kelautan terutama yang terjadi perairan laut Natuna.⁴²⁸

Kedua negara telah memperlihatkan komitmen untuk memperkuat relasi Indonesia-Tiongkok sebagai wujud kemitraan strategis komprehensif melalui berbagai kerja sama di berbagai bidang. Sekalipun demikian, kedua negara juga masih menghadapi sejumlah persoalan yang tidak jarang menjadi sandungan dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Bukan rahasia lagi kalau saat ini hubungan kedua negara diuji dengan tindak laku Tiongkok di Laut China Selatan dan di perairan kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang berada di ujung paling selatan dari Laut China Selatan. Dalam beberapa kesempatan, pejabat tinggi kedua negara sama-sama menegaskan pengakuan mereka atas kedaulatan masing-masing⁴²⁹ dan Tiongkok juga tidak mengklaim Natuna seperti pulau-pulau di sekitar Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia, namun Beijing telah menyatakan klaim atas perairan wilayahnya “*nine dash line*” yang menjangkau hingga wilayah yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ketegangan diplomatik kedua negara sering kali merebak seiring dengan terjadinya beberapa kali pelanggaran wilayah kedaulatan karena kapal-kapal Tiongkok menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, terutama kawasan perairan Natuna. Pada Januari–Oktober 2016, misalnya, tercatat ada tiga kali insiden penangkapan kapal asal Tiongkok oleh pihak aparat pertahanan keamanan Indonesia di perairan tersebut, yaitu: (1) insiden penangkapan delapan anak buah kapal (ABK) kapal ikan KM Kway Fey 10078 oleh kapal patroli RI (KP Hiu 11) pada 19 Maret 2016; (2) insiden penangkapan delapan anak buah kapal (ABK) asal Tiongkok oleh KRI Imam Bonjol 383 pada Mei 2016; dan (3) insiden penangkapan kapal nelayan Tiongkok pada 17 Juni 2016. Insiden terakhir ini sebagaimana dua insiden sebelumnya

428 Angga Sukma Wijaya, “Menteri Luhut: Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Pertahanan,” *Tempo.co*, 28 April 2016, <https://nasional.tempo.co/read/766929/menteri-luhut-indonesia-china-perkuat-kerja-sama-pertahanan>

429 Lihat dalam kunjungan Luhut Panjaitan di Beijing April 2016, misalnya.

memiliki pola yang sama yaitu melibatkan kapal patroli Indonesia, baik dari TNI AL maupun Kementerian Kelautan dan kapal patroli Tiongkok yang mencoba menghalangi upaya penegakan hukum atas pencurian ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Ketiga insiden tersebut telah menyebabkan gejolak dalam hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Hal ini karena kedua negara memiliki tanggapan yang saling berbeda atas insiden tersebut. Pada satu sisi, pemerintah Indonesia menyatakan protes keras atas pelanggaran wilayah perairan Indonesia. Atas kejadian kapal Fey, misalnya, Menteri Luar Negeri RI memanggil Kuasa Usaha Tiongkok di Indonesia dan sekaligus menyampaikan nota protes terkait aksi kapal penjaga pantai Tiongkok yang membuntuti kapal Fey yang memasuki perairan kawasan Natuna dan menabrakkan badan kapal tersebut agar tidak ditangkap oleh kapal patroli Indonesia.⁴³⁰ Dalam insiden kedua, sikap pemerintah Indonesia tegas dengan pernyataan yang berasal dari Istana Kepresidenan. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, menyatakan bahwa Presiden menginstruksikan TNI dan segenap unsur pertahanan dan keamanan lainnya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. "Kedaulatan adalah nomor satu, harga mati. Meskipun menjaga hubungan baik itu juga perlu".⁴³¹ Menanggapi insiden ketiga yang terakhir, Jokowi langsung menggelar rapat kabinet di atas kapal perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol bersama Menko Polkam, Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan tiga kepala staf TNI.⁴³² Rapat ini dapat diartikan sebagai sebuah simbol akan posisi Indonesia yang tidak bisa ditawar atas kedaulatan wilayahnya.

430 P. L. E. Priatna, "RI-Tiongkok dan Kepercayaan yang Rapuh," *Kompas*, 2 April 2016.

431 "Istana: Kedaulatan Negara Harga Mati, tetapi Hubungan Baik Perlu Dijaga," *Kompas*, 20 Juni 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/20/17371771/istana.kedaulatan.harga.mati.tetapi.hubungan.baik.perlu.dijaga>

432 A. Fitriyani, "Panelis: Insiden Natuna pengakuan Indonesia bermasalah dengan Tiongkok," *Antara News*, 17 September 2016, http://www.antaraneews.com/berita/584918/panelis-insiden-natuna-pengakuan-indonesia-bermasalah-dengan-tiongkok?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news.

Sementara itu, pada sisi lain, atas tiga insiden tersebut Tiongkok memberikan tanggapan yang sama, yaitu penyangkalan. Pada kasus yang pertama Pemerintah Tiongkok dengan argumentasi bahwa kapal Kway Fey tersebut berada dalam *traditional fishing zone* Tiongkok. Negara tirai bambu ini bahkan menuntut Indonesia untuk membebaskan anak buah kapal tersebut yang ditangkap.⁴³³ Atas respons Tiongkok tersebut, Menteri Koordinator Politik Keamanan Luhut Panjaitan pun dengan tegas menyatakan bahwa klaim Tiongkok tersebut tidak mendasar karena tidak ada doktrin wilayah perairan perikanan tradisional.⁴³⁴ Penyangkalan atas pelanggaran di batas ZEE Indonesia di perairan kawasan Natuna atas dugaan penangkapan ikan ilegal juga disampaikan kembali oleh pihak Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyatakan sikapnya bahwa 8 ABK dan kapal mereka beroperasi secara sah di wilayah yang sah pula. Menurut Hua, “Para nelayan China melakukan kegiatan menangkap ikan seperti biasa di perairan tersebut”⁴³⁵

Sikap arogan Tiongkok menyikapi insiden tiga kapal tersebut jelas menimbulkan kekecewaan publik Indonesia di tengah bulan madu upaya peningkatan kerja sama kedua negara. Belum lagi rendahnya realisasi investasi Tiongkok di Indonesia tentu menimbulkan berbagai pertanyaan akan arah hubungan Indonesia-Tiongkok, di mana kedua negara secara deklatori menyatakan sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya.

Insiden yang terjadi di perairan Natuna sudah seharusnya menjadi titik pengakuan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki masalah dengan Tiongkok.⁴³⁶ Pengakuan ini menjadi sangat penting untuk menyusun dan menentukan strategi-strategi dalam kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi Tiongkok. Tiongkok yang sedang bangkit sebagai sebuah kekuatan negara besar akan melakukan apa

433 P.L.E. Priatna, “RI-Tiongkok”.

434 Priatna, “RI-Tiongkok”.

435 “Beijing Memprotes Indonesia atas penangkapan 8 nelayan China di Natuna” (31 Mei 2016). *Kompas*. <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/09463021/beijing.memprotes.indonesia.atas.penangkapan.8.nelayan.china.di.natuna>.

436 Fitriyani, “Panelis: Insiden Natuna”

yang dikehendaki sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan dukungan kekuatan material besar ekonomi, politik dan militer yang dimilikinya. Ketidakpatuhan Tiongkok atas keputusan mengingat *International Court of Justice* (ICJ) atas konflik wilayahnya dengan Filipina di Laut China Selatan menjadi salah satu buktinya. ICJ memutuskan kepemilikan pulau yang disengketakannya diserahkan ke Filipina, namun hingga saat ini Tiongkok tetap bertahan di wilayah tersebut tidak menggubris keputusan ICJ yang memiliki kekuatan hukum. Akibat belum terselesaikannya tumpang tindih klaim tersebut telah mengundang negara lain untuk terlibat, seperti Amerika Serikat melalui kebijakan pivot di Asia. Keterlibatan negara besar dalam konflik Laut China Selatan ini tentu akan menjadikan masalah di wilayah tersebut menjadi semakin kompleks dengan berbagai kepentingan yang saling berebut pengaruh atas wilayah yang sangat strategis untuk pelayaran perdagangan internasional dan yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang besar. Untuk itu Indonesia harus siap untuk menghadapinya karena memiliki kepentingan atas stabilitas dan keamanan regional.

C. KEKUATAN MENENGAH DAN KAPITALISASI KEMITRAAN

Harus diakui bahwa dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, hubungan Indonesia dan Tiongkok berjalan hangat. Hal ini antara lain didorong oleh adanya faktor relasi personal kedua pemimpin yang terbangun dengan baik sebagaimana yang tecermin melalui saling kunjungan kenegaraan kedua pemimpin dan beberapa pertemuan tingkat tinggi yang mereka lakukan di sela-sela forum multilateral, seperti KTT Non-Blok, APEC, East Asian Summit, dan G20. Faktor lainnya adalah Indonesia dan Tiongkok sama-sama mengakui akan pentingnya posisi geo-strategis yang dimiliki oleh masing-masing mitranya. Indonesia memiliki kapabilitas material, seperti jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, posisi strategis geografis dan kekayaan alam yang melimpah, yang bisa menjadi modalitas dan daya tawar dalam menghadapi Tiongkok.

Indonesia sebagai negara terbesar dan *natural leader* di ASEAN juga menjadi suatu realitas posisi dan peran strategis Indonesia yang tidak bisa diabaikan oleh Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Tiongkok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis komprehensif, sementara Indonesia melihat hubungannya dengan Tiongkok menjadi suatu hal yang harus dilakukan dengan fakta Tiongkok sebagai negara besar yang mengontrol 18% ekonomi global. Oleh karenanya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menyatakan, “So, you like it or not, happy or not happy, China is a world power that cannot be ignored”⁴³⁷

Meskipun Indonesia-Tiongkok memiliki hubungan hangat pada masa Jokowi, hubungan kedua negara senyatanya belum ditopang oleh fondasi kokoh. Hubungan tidak seimbang kedua negara masih terlihat nyata terutama dalam relasi kerja sama ekonomi dan pertahanan. Pada satu sisi, tak dapat disangkal bahwa Indonesia dan Tiongkok mengalami peningkatan hubungan ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, perdagangan Indonesia ke Tiongkok terus meningkat dari sekitar 60 miliar dolar AS (2017) menjadi 120 miliar dolar AS (2021), meningkat 54,03% dari tahun 2020.⁴³⁸

Beberapa produk unggulan Indonesia yang mengalami peningkatan nilai ekspor ke Tiongkok hingga lebih dari 100% adalah bahan bakar mineral, produk turunan nikel, produk industri penggilingan, produk keramik, logam mulia, sayuran olahan, mutiara alam, mutiara budi daya, dan olahan daging ikan. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ketiga mitra dagang Tiongkok pada tahun 2022, naik peringkat dibandingkan tahun 2019 dan 2020 masing-masing peringkat kelima dan keempat.⁴³⁹ Dari

437 M. Z. Rakhmat, “Growing Ties between Indonesia and China May Hurt US-Indonesia Relationship,” *The Conversation*, 26 October 2020, <https://theconversation.com/growing-ties-between-indonesia-and-china-may-hurt-us-indonesia-relationship-148532>

438 D. F. Rahman, “Perdagangan Indonesia-Tiongkok Tumbuh 54,03% pada 2021,” *Katadata*, 11 Juli 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/11/perdagangan-indonesia-tiongkok-tumbuh-5403-pada-2021>

439 M. Nafi, “Indonesia dan China Bisa Sinergikan Poros Maritim Dunia,” *Katadata*, 22 November 2022, <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/indonesia-dan-china-bisa-sinergikan-poros-maritim-dunia/ar-AA14f5f> M. Nafi, “Indonesia dan China”.

sisi investasi, realisasi arus investasi juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2021 mencapai 4,6 miliar dolar AS dan pada 2022 hingga September 5,2 miliar dolar AS. Tiongkok kini menjadi investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura.⁴⁴⁰ Sekalipun ada penguatan hubungan perdagangan dan investasi, namun pada sisi lain, kekhawatiran akan keberlanjutannya masih tinggi. Tidak saja ketidakpastian geopolitik kawasan dengan keberlanjutan rivalitas AS-Tiongkok, isu Taiwan dan Laut China Selatan, realitas yang dihadapi Indonesia adalah utang luar negerinya terhadap Tiongkok cukup besar. Negara tirai bambu ini juga menempati peringkat ke-5 terbesar daftar negara pemberi utang bilateral ke Indonesia per Mei 2016.⁴⁴¹ Sementara itu, kedua negara juga belum memperlihatkan kerja sama pertahanan yang signifikan, yang dapat diindikasikan dari masih rendahnya, misalnya dalam hal latihan bersama militer, pembelian senjata, transfer teknologi persenjataan dan lain-lain.

Kondisi-kondisi tersebut tidak menghentikan Indonesia untuk terus mendorong upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Di bidang ekonomi, peluang Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya dengan Tiongkok masih sangat dimungkinkan. Apalagi kedua negara telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas secara regional dalam kerangka ASEAN, yaitu *ASEAN-China Free Trade Agreement* tahun 2010 dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP yang ditandatangani pada 15 November 2020 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 merupakan perjanjian bebas antara 10 negara anggota ASEAN dengan 5 negara penandatanganan *Free Trade Agreement* (FTA) lainnya dengan ASEAN, yaitu Jepang, China, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru. Perjanjian bebas ini seharusnya merupakan instrumen yang paling efektif untuk memasarkan produk-produk unggulan dalam negeri menjadi lebih mudah masuk ke pasar domestik Tiongkok. Selain itu harga produk tersebut juga akan menjadi lebih murah, disebabkan adanya pengurangan atau penghapusan bea masuk.

440 M. Nafi, "Indonesia dan China".

441 Ariyanti, "10 Negara Pemberi Utang."

Terbukanya peluang tersebut sudah seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan daya saing perekonomian nasional. Tiongkok memiliki penduduk begitu besar yaitu 1,3 miliar jiwa merupakan potensi pasar yang menggiurkan. Sebagai perbandingan, total jumlah penduduk di 10 negara anggota ASEAN hanya 650 jiwa. Sebanyak 250 juta jiwa atau sekitar 38% di antaranya berada di Indonesia. Oleh karena itu, akan saling menguntungkan bila dapat dijalin berbagai kerja sama sektor ekonomi, apalagi Tiongkok memiliki kemampuan investasi yang tinggi, dan negara ini juga membutuhkan bahan baku dan bahan modal untuk menggerakkan sektor industrinya. Di samping itu, Tiongkok juga merupakan salah negara di dunia yang perkembangan ekonominya sangat pesat dan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya sehingga posisi ekonomi Tiongkok saat ini cukup tinggi dalam perekonomian global. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2016 dan 2017 adalah sekitar 6,6%, di mana angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi global yang hanya sebesar 3,1% dan 3,4% masing-masing pada tahun 2016 dan tahun 2017.⁴⁴² Pada masa pandemi Covid-19, Tiongkok juga terbukti mampu mempertahankan kenaikan pertumbuhan GDP nya, yaitu sekitar 8,0% pada 2021 dan diperkirakan pada 2022 sekitar 5,2%.⁴⁴³

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini pada gilirannya telah memberikan perbaikan dalam tingkat kesejahteraan penduduknya. Tingkat kehidupan yang semakin baik menyebabkan tingkat kebutuhan tidak lagi pada tataran kebutuhan yang sifatnya primer yaitu sandang, papan dan pangan, melainkan juga kebutuhan tersier yang sifatnya *leisure*. Adanya fenomena peningkatan kebutuhan tersier ini terindikasi, misalnya, dengan adanya peningkatan jumlah

442 “RI-Tiongkok Harus Saling Menguntungkan” (13 September 2016). *Kompas*, 18.

443 The World Bank, China Economic Update-December 2021, 22 December 2021, <https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-december-2021>

wisatawan Tiongkok ke mancanegara. Pada tahun 2015, ada 117 juta orang Tiongkok yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan 17 juta di antaranya mengunjungi negara-negara ASEAN. Angka ini mengalami kenaikan 30% karena pada tahun sebelumnya hanya 12 juta. Sekalipun mengalami peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok, namun faktanya Indonesia tetap tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menarik wisatawan Tiongkok tersebut, yaitu Thailand (8 juta orang), Singapura, dan Malaysia.⁴⁴⁴

Potensi sektor pariwisata ini sesungguhnya masih sangat terbuka luas untuk lebih dikembangkan di Indonesia. Pemandangan alam yang indah dan penduduknya yang ramah merupakan beberapa hal yang bisa menjadi faktor penarik minat wisatawan Tiongkok lebih banyak lagi untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini sebagaimana tecermin pada hasil sebuah survei yang dilakukan oleh Huang Mengjiao, seorang mahasiswi di *Beijing Foreign Studies Universities*, pada 9 Oktober 2015.⁴⁴⁵ Meskipun survei ini secara metodologi mungkin masih lemah dan belum merepresentasikan pandangan seluruh masyarakat Tiongkok karena hanya dilakukan secara terbatas untuk 115 orang yang belum pernah ke Indonesia, namun survei ini paling tidak bisa menjadi sebuah awal untuk melihat gambaran sepintas pengetahuan masyarakat Tiongkok terhadap Indonesia. Secara mayoritas, mereka mengetahui Indonesia karena faktor keindahan alamnya (62%), budaya adat istiadatnya (74%), dan juga tempat dilaksanakan KAA Bandung (75%). Keterikatan sejarah kedua negara yang dirajut melalui KAA Bandung tersebut ini cukup kuat karena konferensi negara-negara berkembang pada tahun 1955 tersebut juga selalu diajarkan di sekolah dasar di Tiongkok.⁴⁴⁶

Sementara itu, peluang untuk menarik investasi Tiongkok ke Indonesia juga masih bisa dilakukan. Seperti halnya inisiasi *Belt Road Initiative* (BRI) yang diinisiasi Tiongkok, Jokowi juga memiliki kebijakan untuk memperkuat dan mengintegrasikan konektivitas

444 Wawancara diplomat, Beijing, 19 Mei 2016.

445 Wawancara mahasiswa Tiongkok, Beijing, 18 Mei 2016.

446 Wawancara mahasiswa Tiongkok, Beijing.

ekonomi Indonesia melalui tol maritim. Oleh karena itu insiasi negara tira bambu untuk membangun konektivitas darat dan laut dari jalur sutera maritim Tiongkok disambut dengan baik oleh Indonesia karena memberikan peluang untuk meningkatkan tingkat daya saing Indonesia yang selama ini terhambat oleh tingginya biaya transportasi sebagai akibat buruknya kondisi infrastruktur. Pandangan yang sama ini akan konektivitas ini diharapkan mampu mendorong Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan laporan *The Economist* tentang *ASEAN Connections* (2016), Indonesia berpotensi menjadi penerima manfaat terbesar dari insiasi OBOR Tiongkok di Asia Tenggara yaitu sekitar 87 miliar dolar AS untuk proyek-proyek investasi infrastruktur.⁴⁴⁷

Potensi lain yang masih belum tergarap dengan serius adalah upaya menarik investasi Tiongkok yang berasal dari investasi properti. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada kecenderungan baru para investor Tiongkok untuk membeli properti di luar negeri. Hasil laporan riset dari Property Guru Group menyatakan Indonesia termasuk dalam daftar 10 besar negara tujuan investor Tiongkok untuk membeli properti di luar negeri.⁴⁴⁸ Para investor beralih ke properti di luar negeri untuk investasinya karena adanya faktor kebijakan pemerintah Tiongkok sendiri. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah Tiongkok melarang para investor propertinya untuk membeli properti secara bebas di negaranya. Artinya, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk membeli properti di area tertentu. Investor asal Kota Shanghai, misalnya, tidak bisa membeli properti di Kota Beijing karena tidak terdaftar sebagai penduduk di kota tersebut. Akibat ketatnya peraturan tersebut, investor properti Tiongkok kemudian tertarik untuk memilih negara-negara yang menawarkan keuntungan menarik bagi investasi propertinya. Menurut laporan riset tersebut, ada beberapa motivasi yang mendorong investor properti

447 "ASEAN Connections: How mega -regional trade and investment initiatives in Asia will shape business strategy in ASEAN and beyond". (April 2016). *The Economist*, 1-34.

448 M.D Gayatri, "Riset: Indonesia 10 besar negara tujuan investor Tiongkok", 25 Agustus 2016, http://www.antaranews.com/berita/580796/riset-indonesia-10-besar-negara-tujuan-investor-tiongkok?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

Tiongkok menanamkan modalnya di luar negeri, yaitu pendidikan, imigrasi, investasi yang dianggap lebih menguntungkan daripada Tiongkok sendiri, dan gaya hidup/pesiar.

Salah satu upaya harus dilakukan pemerintah saat ini untuk menarik investasi yang semakin besar dari Tiongkok adalah pengenalan secara luas tentang Indonesia ke investor-investor Tiongkok, dan sebaliknya. Survei tentang Indonesia tersebut mengindikasikan jelas akan ketidakpahaman sebagian besar masyarakat Tiongkok berimplikasi lanjut pada ketidaktahuan mereka akan iklim investasi dan usaha di Indonesia, demikian pula sebaliknya. Salah satu ilustrasi menarik yang bisa dicatat akan ketidaktahuan Indonesia akan iklim usaha di Tiongkok adalah dalam hal ekspor kopi Indonesia di Tiongkok. Sebagaimana dinyatakan oleh Atase Perdagangan RI di Tiongkok, dalam rangka meningkatkan ekspor, Indonesia selanjutnya mencoba untuk mengeksport variasi produk termasuk salah satunya kopi sebagai komoditas unggulan karena Indonesia memiliki berbagai macam kopi lokal yang berkualitas. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil sukses. Ketidakberhasilan tersebut bukannya disebabkan oleh faktor kualitas kopi, melainkan lebih terletak pada ketidakpahaman eksportir Indonesia akan budaya masyarakat Tiongkok yang lebih cenderung pada minum teh daripada kopi. Kopi adalah “budaya baru” yang mulai semakin marak setelah diselenggarakannya Olimpiade di Beijing tahun 2008. Mereka baru pada tahap “mengenal” belum “penikmat” kopi. Oleh karenanya, mereka lebih menyukai kopi putih, seperti Cappucino dan Caffe Late yang memiliki aroma rasa tidak terlalu kuat dibandingkan kopi pahit premium Indonesia.⁴⁴⁹

Pemahaman lebih luas akan hubungan kerja sama ekonomi yang tidak hanya melingkupi aspek-aspek hitungan ekonomi semata sebagaimana diilustrasikan sebelumnya tentu menjadi tantangan dalam diplomasi ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi telah menyadari pentingnya diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri, yaitu dengan pembentukan *Task Force* (Satuan Tugas, Satgas) Diplomasi Ekonomi

449 Wawancara diplomat, Beijing.

yang dikoordinir oleh Wakil Menteri Luar Negeri pada tahun 2015.⁴⁵⁰ Pada hakikatnya Satgas ini melakukan koordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis dan kerja sama pembangunan, serta kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain, termasuk dengan Tiongkok, dapat segera ditindaklanjuti. Dalam kerangka ini, Satgas sudah seharusnya dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada di negara lain juga dengan melakukan pendekatan yang komprehensif, termasuk juga budaya.

Dalam kerangka membangun relasi ekonomi yang semakin kuat dengan Tiongkok, Satgas Diplomasi Ekonomi perlu juga mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya, seperti kementerian/lembaga, pengusaha dan kantor perwakilan RI di Tiongkok. Dalam konteks kantor perwakilan ini, Indonesia memiliki satu kantor kedutaan besar di Beijing yang dibantu oleh 3 (tiga) Konsulat Jenderal (Konjen). Dengan mempertimbangkan posisi geoekonomi dan geografi Tiongkok, keberadaan tiga Konjen tersebut sangat memadai untuk menggarap secara optimal peluang ekonomi di Tiongkok secara optimal. Sementara Atase Perdagangan RI juga memiliki keterbatasan terutama dengan keterbatasan jumlah staf pendukung yang juga masih sangat terbatas. Bila keberadaan Konjen dan sumber daya manusia pendukungnya yang sangat terbatas ini menjadi representasi keseriusan pemerintah untuk menjalin relasi ekonomi yang lebih kuat dengan Tiongkok, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah belum serius untuk hal tersebut. Indonesia masih sangat tertinggal dengan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia, misalnya, memiliki 6 (enam) Konjen, Thailand 8 (delapan) Konjen, dan menariknya Singapura yang merupakan negara relatif kecil dibandingkan Indonesia pun memiliki 7 (tujuh) Konjen.⁴⁵¹

Pendirian kantor Konjen di kota-kota negara lain pada umumnya dilatarbelakangi oleh alasan-alasan khusus dan strategis untuk memenuhi kepentingan negara asal, seperti ekonomi, sosial budaya

450 Y. Arisandy, "Kemlu Akan Bentuk Satgas," *Antara*, 8 Januari 2015, <https://www.antaraneews.com/berita/472935/kemlu-akan-bentuk-satgas-diplomasi-ekonomi>

451 Wawancara diplomat senior, Beijing, 20 Mei 2016.

dan lain-lain. Untuk lebih memperkuat hubungan kedua negara, Indonesia tampaknya perlu untuk menambah keberadaan jumlah Konjen di Tiongkok. Salah satu wilayah Tiongkok yang sangat potensial untuk dibukanya Konjen baru Indonesia adalah di wilayah Tiongkok Tengah. Berbeda dengan tiga Konjen yang sudah ada saat ini yang cenderung fokus pada pengembangan kerja sama ekonomi kedua negara, konjen baru di wilayah tersebut, seperti di Provinsi Ning Xia, misalnya yang sebagian masyarakatnya beragama Islam ini sangat potensial untuk bisa dikembangkan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama dengan mengacu Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya muslim dan bertatanan demokrasi berjalan dengan baik.⁴⁵²

Sebagaimana halnya kerja sama di bidang ekonomi, di tengah kendala dan hambatan Indonesia juga terus berupaya untuk memperteguh hubungan di bidang politik-keamanan. Pada level geostrategis Tiongkok sebagai negara besar, Indonesia tentu sadar untuk terus memanfaatkan peluang kerja sama dengan Tiongkok di bidang pertahanan keamanan. Meskipun demikian, ketidakseimbangan kekuatan dalam konteks tersebut faktanya tidak menghalangi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, yaitu kedaulatan wilayah negaranya. Untuk itu, dapat dipahami bahwa Indonesia selalu bersikap tegas terkait pelanggaran perairan wilayah Indonesia yang berulang kali dilakukan oleh kapal-kapal ilegal milik nelayan asing di Laut Natuna Utara, termasuk yang berasal dari Tiongkok. Pemerintah Jokowi tidak hanya secara retorik menyatakan “kedaulatan negara harga mati”,⁴⁵³ tetapi juga diimplementasikan dengan meningkatkan kehadiran negara di Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan patroli pengawasan wilayah perairan tersebut, pergelaran rapat kabinet terbatas Presiden Jokowi, dan melaksanakan latihan tempur angkasa Yudha 2016 di wilayah tersebut dengan melibatkan sejumlah pesawat tempur dan

452 Wawancara diplomat senior, Beijing.

453 “Istana: Kedaulatan Negara Harga Mati, tetapi hubungan baik perlu dijaga “. (20 Juni 2016). *Kompas*. <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/20/17371771/istana.kedaulatan.harga.mati.tetapi.hubungan.baik.perlu.dijaga>

pesawat angkut. Latihan yang berlangsung pada 6 Oktober 2016 dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan masing-masing skuadron untuk meningkatkan kesiagaan dan pengawasan wilayah perbatasan tersebut.⁴⁵⁴

Meskipun Jokowi memiliki garis kebijakan luar negeri yang tegas menyangkut kedaulatan wilayah dengan Tiongkok di perairan Natuna, Pemerintah Indonesia tampaknya menginginkan bahwa hal tersebut tidak mengganggu upaya membangun hubungan yang baik antara Indonesia dan Tiongkok.⁴⁵⁵ Sebagai kekuatan ekonomi besar, Tiongkok tentu dipandang sangat strategis untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Jalan perekonomian Jokowi melalui pilihan prioritas pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk membuka konektivitas guna meningkatkan daya saing. Pada masa lima tahun pemerintahannya (2014–2019), percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan membangun 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta api.⁴⁵⁶ Anggaran sangat besar tentu sangat dibutuhkan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Tiongkok telah memberikan perannya cukup besar yang diindikasikan dengan peringkatnya yang ke 5 dari 10 negara pemasok utang bilateral Indonesia terbesar senilai Rp12,36 triliun per Mei 2016.⁴⁵⁷

Di samping itu, kebijakan luar negeri Indonesia dalam praktiknya juga tidak dimaksudkan untuk tidak menambah kompleksitas persoalan kedua negara atas Natuna di tengah upaya yang dilakukan Indonesia dalam kontribusinya mencari penyelesaian masalah Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan termasuk negara yang ikut terlibat dalam tumpang tindih klaim 6 negara (Tiongkok, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darusalam) dalam konflik

454 B. Prasetyo, "Presiden Jokowi ke Natuna tinjau Latihan Angkasa Yudha". *Antaranews*, 6 Oktober 2016, http://www.antaranews.com/berita/588638/presiden-jokowi-ke-natuna-tinjau-latihan-angkasa-yudha?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diunduh 19 Oktober 2010.

455 "Istana: Kedaulatan Negara."

456 A. T. Prasetonio, "Jalan Ekonomi Presiden Jokowi". *Kompas*, 25 Oktober 2019.

457 Ariyanti, "10 Negara Pemberi Utang."

Laut China Selatan, namun konflik wilayah ini menarik perhatian Indonesia, karena utama pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan kawasan. Upaya multi-track diplomasi yang dilakukan hingga saat belum memberikan hasil. Meskipun pada *first track diplomacy*, pendekatan regional oleh ASEAN telah berhasil menyetujui Deklarasi Tata Perilaku Pihak-Pihak di Laut Tiongkok Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*), dan *second track diplomacy* yang digagas oleh Indonesia dengan *workshop* “Managing Potential Conflicts in the South China Sea” cukup berhasil dalam mengelola sengketa, pendekatan *multi-track* tersebut belum dapat mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan. Tiongkok tampaknya tetap bertahan pada posisi semula akan konflik klaimnya dengan Filipina atas sebagian gugusan kepulauan karang di Laut China Selatan meskipun *International Court of Justice* pada 2016 dalam keputusannya memenangkan gugatan Filipina.

Agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan yang ditopang oleh kebangkitan ekonomi dan militernya telah mendorong upaya penyeimbangan kembali (*Rebalancing Asia Pacific*) oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tentu memunculkan perkembangan geo-politik baru di kawasan dengan keterlibatan negara-negara. Perluasan kekuatan AS di kawasan tidak saja melalui pertahanan dan keamanan dengan menggelar lebih banyak armada (khususnya angkatan laut) di Kawasan Asia Pasifik, melainkan juga membentuk aliansi kekuatan militer dalam menggalang keikutsertaan negara-negara aliansinya di kawasan Indo-Pasifik dalam *the Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD) dan AUKUS.

Untuk kepentingan nasionalnya, politik luar negeri Indonesia tidak harus berada pada posisi memilih salah satu di antara dua negara adidaya AS dan Tiongkok tersebut. Prinsip bebas aktif memberikan independensi bagi Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dengan demikian, kedekatan Indonesia dengan Tiongkok tidak perlu diantagoniskan dengan AS,⁴⁵⁸ dan Indonesia tentu membutuhkan AS sebagai kekuatan penyeimbang dalam menghadapi

458 Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemlu RI, “Hubungan Indonesia-Tiongkok”, 13.

Tiongkok, dan sebaliknya. Indonesia memainkan “*jugling*” untuk menyeimbangkan perebutan pengaruh Tiongkok dan AS atas negaranya karena pada hakikatnya Indonesia dengan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya adalah *dynamic equilibrium*. Dengan konsepsi Indo-Pasifik melalui inisiasinya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), Indonesia memiliki posisi yang jelas dalam kebijakan luar negerinya dalam mengelola tatanan Indo-Pasifik dengan inklusif.

Atas dasar inilah yang mendorong Indonesia juga memperluas jangkar politik luar negerinya dalam konflik Laut China Selatan pada forum multilateral ASEAN dan menarik gerbong negara besar lainnya di kawasan untuk mencari penyelesaian damai ketegangan di jalur pelayaran internasional penting tersebut. Pakta mengenai pengalihan peralatan dan teknologi pertahanan Jepang ke Indonesia yang disepakati dalam pembicaraan keamanan “dua plus dua” di Tokyo yang melibatkan menteri-menteri luar negeri dan pertahanan Indonesia dan Jepang pada 17 Desember 2015 mungkin dapat dibaca dalam konteks tersebut.⁴⁵⁹ Secara strategis, adu permainan ini tentu tidak hanya demi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga kepentingan yang lebih luas, terutama keamanan dan perdamaian di kawasan.⁴⁶⁰

D. MEMPERKUAT KEMITRAAN TANPA MENJADI KETERGANTUNGAN

Hubungan Indonesia-Tiongkok selama dua tahun pemerintahan Jokowi telah berlangsung hangat, dan bahkan sebagian kalangan menyatakan sebagai masa bulan madu. Pemerintahan Jokowi memandang keberadaan Tiongkok memiliki arti geo-ekonomi dan geo-strategis yang sangat penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong pemerintahan

459 “Jepang Tawari Indonesia Peralatan Pertahanan untuk Menangkis Pengaruh China di Asia,” *VoA Indonesia*, 18 Desember 2015, <http://www.voaindonesia.com/a/jepang-tawari-indonesia-peralatan-pertahanan-untuk-menangkis-pengaruh-china-di-asia/3107166.html>

460 Brown, “Jakarta’s Jugling Act,” 3–11; “China Struts Larger on World Stage,” *The Jakarta Post*, 25 Mei 2011.

Jokowi untuk memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif yang telah disepakati pada pemerintahan SBY.

Walaupun demikian, hubungan hangat yang terjalin dengan baik sesungguhnya kurang memiliki fondasi yang kuat. Kemitraan Komprehensif Strategis yang seharusnya memberikan peluang lebar untuk semakin memperkokoh kemitraan kedua negara tampaknya masih sebatas pada retorik karena dalam realitasnya belum optimal. Kerja sama di bidang ekonomi tampak jauh lebih baik dibandingkan kerja sama dalam bidang pertahanan keamanan. Hubungan kedua negara juga berulang kali terganjal dengan persoalan pelanggaran kedaulatan wilayah laut Indonesia di perairan Natuna oleh Tiongkok.

Meskipun masih menghadapi tantangan, peluang peningkatan kerja sama Indonesia-Tiongkok terbentang. Kedua negara memandang penting posisi masing-masing dalam kebijakan luar negerinya. Ketidakseimbangan hubungan keduanya diimbangi Indonesia dengan kekuatan material yang dimilikinya sebagai daya tawar dalam *bargaining* menghadapi Tiongkok. Prinsip bebas aktif dan perspektif Indonesia tentang stabilitas dan keamanan kawasan dengan pendekatan inklusif agar ada keseimbangan dinamis antarnegara kekuatan besar di kawasan menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan yang tidak mungkin diabaikan dalam politik luar negeri Indonesia.

Ketimpangan Kekuatan dan Strategi Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok

A. KONDISI UMUM

Pada tahun 1989, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mencairkan kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok setelah membeku selama 24 tahun.⁴⁶¹ Dalam konteks eksternal, perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok tersebut dipengaruhi dinamika lingkungan strategis regional dan global. Presiden Soeharto saat itu berpandangan bahwa stabilitas kawasan merupakan suatu prasyarat terlaksananya pembangunan nasional dengan baik. Terkait dengan hal itu, normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dipandang sebagai kondisi yang kondusif untuk terciptanya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, perubahan sikap Indonesia terhadap Tiongkok saat itu juga dipengaruhi oleh kepentingan internasional Indonesia. Pada waktu itu, Indonesia di bawah Soeharto berambisi menjadi pimpinan Gerakan Non-Blok dan normalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok dipandang sebagai kebijakan penting untuk mewujudkan ambisinya tersebut.

461 E. Rukmo, "Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-China," (Jakarta: CSIS, 1989), 1, diakses pada 25 Mei 2022, <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=38118>

Secara internal, pada masa itu, Soeharto menggunakan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dalam hal isu hubungan Indonesia-Tiongkok yang berbeda pandangan dengan sebagian kalangan domestik, khususnya dari kalangan militer. Oleh karenanya, pilihan kebijakan Soeharto atas Tiongkok tersebut tidak mendapat dukungan utuh sehingga wajar jika upayanya tersebut pada awalnya berkembang lamban. Hubungan Indonesia-Tiongkok tersebut tampak semakin berkembang pesat pasca-lengsernya Soeharto tahun 1998, yaitu pada era Reformasi. Hal ini antara lain karena perubahan politik di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan menuntut Indonesia lebih terbuka dalam pergaulan internasional, termasuk dengan Tiongkok. Sikap Indonesia yang sebelumnya mencurigai Tiongkok sebagai pendukung bahaya laten Komunis berubah menjadi negara mitra strategis dan mitra komprehensif. Sikap pragmatis dalam mencapai kepentingan nasional mendorong pemerintahan di era Presiden Soeharto dan era Reformasi untuk membuka kembali dan kemudian mengakselerasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Dalam perkembangannya, pemerintahan di era Reformasi mulai dari B.J. Habibie hingga Joko Widodo saat ini, memiliki orientasi baru dengan menempatkan Tiongkok dalam posisi penting sebagai mitra strategis pembangunan nasional. Penguatan fundamen hubungan Indonesia-Tiongkok dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014) dengan penandatanganan dua perjanjian penting, yaitu *Strategic Partnerships* (2005) dan *Comprehensive Strategic Partnerships* (2013). Melalui dua perjanjian tersebut, Tiongkok menjadi mitra Strategis dan sekaligus mitra komprehensif dari Indonesia. Pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, hubungan bilateral semakin kokoh yang ditandai dengan bergabungnya Indonesia dalam lembaga keuangan yang diinisiasi Tiongkok, yaitu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dengan harapan bisa memperoleh pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Artinya, di masa pemerintahan Presiden SBY pelaksanaan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok sudah

mendapatkan dasar legal hubungan yang kokoh, dan selanjutnya implementasi kerja sama ditingkatkan lebih cepat dan maksimal pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, Presiden Jokowi perlu cerdas dalam mengimplementasikan kemitraan strategis dan komprehensif dengan Tiongkok. Di satu sisi, Indonesia berkepentingan memanfaatkan tawaran-tawaran kerja sama dari Tiongkok untuk mengisi proyek-proyek pembangunan nasional. Namun, pada sisi lain, dalam menerima tawaran kerja sama ini juga tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan Nawacita yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya Indonesia.

Dalam hal ini, masyarakat Indonesia mendukung kemitraan strategis Indonesia dengan Tiongkok, sejauh dalam tingkat pelaksanaan sejalan dengan prinsip bebas-aktif. Ketidakseimbangan kekuatan, baik dalam hal kekuatan ekonomi, pertahanan, maupun sosial budaya, tidak harus membuat hubungan kedua negara menjadi tidak setara. Sebagai negara kekuatan menengah di kawasan, Indonesia memiliki kapasitas sebagai salah satu negara besar di kawasan dengan antara lain kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, penduduk terbesar keempat di dunia, negara mayoritas muslim terbesar di dunia dan posisi geografis yang strategis, yang bisa menjadi posisi tawar dalam hubungannya dengan Tiongkok.

Oleh karenanya, hubungan kemitraan dua negara tidak seharusnya membuat Indonesia menjadi bagian dari persaingan politik Tiongkok dengan negara lain, atau dengan kata lain kemitraan ini jangan membuat Indonesia menjadi sekutu dari Tiongkok yang menyebabkan posisinya menjadi negara eksklusif di dalam pergaulan internasional. Hal ini perlu digarisbawahi karena sejarah mencatat, hal demikian pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945–1966). Pada masa itu, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok sangat dekat dan tampaknya kedua negara punya kepentingan nasional yang sama. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi bagian dari persekutuan Tiongkok dan membangun Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Akibatnya, Indonesia bersama-sama dengan Tiongkok

berseteru dengan negara-negara “Barat” di era Perang Dingin dengan argumentasi perang melawan imperialisme dan kapitalisme global.

Selanjutnya, jika tidak berhati-hati, pemerintahan Jokowi dalam membangun kerja sama bilateral dengan Tiongkok bisa membuat Indonesia kehilangan kedaulatan politik. Tiongkok sebagai negara yang lebih besar dalam dimensi politik, militer, dan ekonomi, tentu saja memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sebaliknya Indonesia sebagai negara yang lebih kecil memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dalam kondisi hubungan yang tidak seimbang seperti ini, Tiongkok berpotensi untuk memanfaatkan pengaruhnya guna mencapai kepentingannya di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu selalu menjaga posisinya sebagai negara yang mengedepankan kedaulatan politik sehingga Tiongkok dalam bekerja sama dengan Indonesia tetap menghormati kedaulatan. Uji coba (*test case*) terkait dengan hal ini bisa dilihat pada kasus konflik Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pulau Natuna. Dalam hal ini, posisi Presiden Jokowi dipandang sudah benar terhadap konflik tersebut yang ditandai dengan menghadiri latihan gabungan TNI di kawasan tersebut pada awal Oktober 2016.⁴⁶² Ini bisa dimaknai sebagai dukungan Presiden Jokowi terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal-hal yang juga perlu diperhatikan adalah jangan sampai kerja sama di berbagai sektor pembangunan dapat mengurangi kemandirian Indonesia secara ekonomi. Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai mitra untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, tetapi juga tetap perlu memperhatikan jangan sampai Indonesia hanya tergantung pada bantuan kerja samanya dengan Tiongkok. Untuk menghindari ketergantungan itu, Indonesia perlu melaksanakan strategi diversifikasi kebijakan dengan membuka diri terhadap negara lain yang juga berminat untuk melaksanakan kerja sama di sektor infrastruktur tersebut. Indonesia perlu mengembangkan kemitraan dengan negara selain Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain,

462 D. Hartini. “Jokowi Hadiri Latihan Perang PPRC TNI di Natuna,” *KompasTV*, 19 Mei 2017, <https://www.kompas.tv/article/4933/jokowi-hadiri-latihan-perang-pprc-tni-di-natuna>,

Pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap jangan sampai investor Tiongkok memonopoli proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lebih jauh untuk mengurangi ketergantungan Indonesia juga perlu mengupayakan program alih teknologi dalam setiap kesepakatan pembangunan infrastruktur tersebut. Artinya, sumber daya manusia Indonesia diupayakan dapat menggantikan sumber daya manusia dari Tiongkok dan mampu menguasai perangkat lunak dari teknologi proyek-proyek infrastruktur tersebut seandainya proyek-proyek tersebut memuat kandungan teknologi tinggi.

Sektor infrastruktur kebetulan menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang ingin membangun kereta api cepat Jakarta Bandung, tol laut, jalan kereta api di Papua, dan tol lintas Pulau Jawa. Tiongkok menjadi pilihan dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Apalagi, Indonesia sejak tahun 2016 juga sudah menjadi bagian dari the Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) yang berkedudukan di Beijing.⁴⁶³ Akibatnya, Tiongkok punya peluang besar untuk menjadi mitra utama Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, namun jangan sampai menutup kesempatan negara lain untuk melakukan hal serupa di Indonesia, sejauh secara kualitas produk dan harga bersaing. Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa bisa menjadi pengimbang keberadaan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam konteks regional, kepemimpinan AS di bawah Presiden Joe Biden mengembangkan Indo-Pasifik ke arah kerja sama ekonomi, tidak seperti di era Presiden Trump yang memfokuskan kepada soal pertahanan dan militer. AS menginisiasi kerja sama militer dengan sekutu-sekutunya di kawasan untuk membendung pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik, yaitu dengan pembentukan AUKUS yang terdiri dari Australia, United Kingdom, dan USA pada 15 September 2021. Di samping itu, upaya menghadirkan kerja sama ekonomi di Indo-Pasifik ini ditandai dengan dideklarasikan *the Indo-Pacific Economic*

463 Dedy Afrianto. "Ini Alasan Indonesia Bergabung AIIB", Okefinance, 14 Januari 2016, <https://economy.okezone.com/read/2016/01/14/20/1288059/ini-alasan-indonesia-bergabung-aiib>,

Framework for Prosperity di Jepang pada 23 Mei 2022.⁴⁶⁴ Tujuan pembentukan ini jelas untuk merangkul kembali negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan untuk mengimbangi *Belt Road Initiative* (BRI) Tiongkok yang sudah merambah kawasan sebagai akibat kebijakan geo-ekonomi Tiongkok yang masif. Oleh karena itu, agar tidak terjebak pada persaingan kekuatan besar tersebut, jalan terbaik bagi Indonesia adalah bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya untuk memperkuat *ASEAN Centrality on Indo-Pacific*.

B. STRATEGI INDONESIA

Seperti disebutkan pada bab terdahulu bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok bersifat asimetris atau bercirikan ketidakseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, Indonesia dan negara ASEAN perlu mengembangkan strategi tertentu untuk menghadapinya. Menurut Cheng-Chwee Kuik, setidaknya ada tiga pilar kebijakan yang bisa dilakukan untuk menghadapi Tiongkok, yang sebenarnya lebih mencerminkan pola *hedging* yang mengarah kepada *bandwagoning*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pragmatisme ekonomi.

Kebijakan ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang ekonomi secara maksimal dengan menjalin kerja sama secara langsung;

- 2) Aliansi terbatas.

Kebijakan ini dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan politik dengan kerja sama keamanan terbatas dan selektif dengan negara lain, khususnya negara-negara besar. Meskipun demikian, aliansi ini tetap menghindari kerja sama yang bersifat subordinasi;

- 3) Merapat kepada negara-negara besar.⁴⁶⁵

464 T. Hunnicutt dan E. Lies, "Biden's Asia Economic Talks Include 13 Countries and Not China," *Reuter/EC*, 24 Mei, 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bidens-asian-economic-talks-include-13-countries-no-china-2022-05-23/>

465 C. C. Kuik, "How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China," diakses pada 25 Mei 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=QaVpkdMAAAAJ&hl=en>,

Kebijakan ini ditempuh untuk memperoleh keuntungan diplomatik yang dilakukan dengan merapat kepada negara besar baik melalui forum bilateral maupun multilateral. Hal ini berfungsi untuk membangun saluran komunikasi dan mempertahankan *status quo* dari kecenderungan persaingan politik yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.

Implementasi strategi tiga pilar kebijakan sebenarnya secara implisit sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN, hanya belum dilakukan secara komprehensif dan terencana. Misalnya, strategi pragmatis ekonomi umumnya sudah dilakukan. Seperti disinggung pada bab terdahulu bahwa “Kebangkitan Tiongkok” memiliki arti sebagai peluang ekonomi dan sekaligus ancaman keamanan bagi negara-negara tetangganya, khususnya sejumlah anggota ASEAN. Tiongkok punya arti sebagai peluang ekonomi karena “Kebangkitan Tiongkok” telah mendorong negara-negara tetangganya menjadi mitra ekonomi, perdagangan dan investasi. Salah satu bentuk kebijakan pragmatism ekonomi adalah disepakatinya pasar bersama Tiongkok-ASEAN atau *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*. Kerja sama perdagangan kedua pihak ini diharapkan memberi kemudahan kepada mobilitas barang dan jasa antara kedua pihak, serta mengurangi hambatan, baik berupa pajak maupun regulasi. Namun demikian, hal ini juga perlu dilihat secara bijak jangan sampai pasar bebas ini hanya menjadikan negara-negara ASEAN sebagai tujuan pasar dari produk Tiongkok semata dan membiarkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan ini “tumbang” satu demi satu, karena tidak mampu bersaing menghadapi produk Tiongkok. Jadi, pragmatisme ekonomi yang dilakukan tetap harus memperhatikan keberpihakan kepada rakyat, khususnya UKM.

Strategi aliansi terbatas sebenarnya juga sudah ditempuh oleh beberapa negara ASEAN. Beberapa negara ASEAN adalah anggota persemakmuran dari Inggris. Rupanya forum ini tidak hanya berupaya membangun kesejahteraan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada anggotanya. Misalnya *Five Power Defence Arrangements (FPDA)* adalah

kerja sama pertahanan multilateral lima negara yang meliputi Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura berdiri tahun 1971. Kerja sama ini bertujuan membangun forum konsultasi jika terjadi ancaman kepada salah satu anggotanya. Berikutnya, *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) adalah forum pertemuan tahunan antara Indonesia dan Amerika Serikat dan bertujuan untuk mendiskusikan isu keamanan berdiri tahun 2002. Kemitraan komprehensif Indonesia-AS tahun 2010 salah satu tujuannya mengembangkan kerja sama di bidang pertahanan. Selanjutnya, perjanjian kerja sama Rusia-Vietnam di bidang kebijakan anti-korupsi, perdagangan, dan pertahanan tahun 2015. Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, ekonomi, dan pertahanan dari kedua negara. Keberadaan berbagai forum kerja sama tersebut bisa dipandang sebagai kebijakan aliansi terbatas antara sejumlah anggota ASEAN dan negara-negara di dunia. Oleh karena itu, hal ini juga bisa dilihat sebagai strategi untuk menghadapi potensi ancaman negara lain, termasuk di dalamnya Tiongkok.

Terakhir, strategi merapat kepada negara besar juga sudah dilakukan oleh ASEAN. Sejak tahun 1994, ASEAN sudah mendirikan ASEAN Regional Forum (ARF). Forum ini dimaksudkan untuk mendorong dialog dan konsultasi untuk isu politik dan keamanan bersama. Di samping itu, forum ini bertujuan memberi kontribusi nyata kepada upaya membangun kepercayaan dan langkah-langkah diplomasi di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara mitra dialognya dapat mendiskusikan berbagai isu politik dan keamanan di Asia-Pasifik, dalam hal ini termasuk mendiskusikan potensi ancaman keamanan oleh Tiongkok pada konflik di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Dengan demikian, sebenarnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, anggota ASEAN lainnya, dan ASEAN secara langsung dan tidak langsung sudah melaksanakan strategi tiga pilar tersebut. Persoalannya adalah bagaimana memaksimalkan hal itu agar lebih berdaya guna sehingga dapat menjadi strategi yang efektif menghadapi Tiongkok yang relatif lebih “*powerful*”.

Untuk menghadapi ketidakseimbangan hubungan Indonesia-Tiongkok secara tidak langsung sudah terdapat strategi yang melekat pada Indonesia maupun ASEAN, tetapi memang masih dihadapkan peluang dan kendala untuk mengimplementasikannya. Peluang untuk menghadapi Tiongkok setidaknya bisa diidentifikasi sebagai berikut: (1) Indonesia bisa memanfaatkan ASEAN sebagai sandaran untuk menghadapi Tiongkok. ASEAN dengan segala kelebihan dan kekurangannya termasuk organisasi regional yang disegani di dunia internasional; (2) Mekanisme dari strategi kebijakan tiga pilar itu sebagian besar sudah berjalan, jadi tinggal menyempurnakan dan menyinergikan satu sama lain; dan (3) Indonesia dan ASEAN punya posisi tawar yang penting di hadapan Tiongkok. Jadi, Indonesia dan ASEAN tinggal memanfaatkannya sebaik mungkin dalam diplomasi menghadapi Tiongkok.

Meskipun demikian, Indonesia masih juga dihadapkan kendala dalam menghadapi Tiongkok, antara lain: (1) Indonesia belum maksimal memanfaatkan posisinya sebagai negara yang dipandang penting oleh Tiongkok, akibatnya posisi tersebut belum memiliki nilai tambah dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok; (2) ASEAN belum satu pandangan dalam menghadapi Tiongkok, melainkan masih lebih didominasi pertimbangan kepentingan nasional masing-masing. Konsekuensinya, pandangan ASEAN menjadi tidak utuh dalam menghadapi Tiongkok sehingga ASEAN menjadi sulit dalam mencapai tujuan bersama dalam hubungannya dengan Tiongkok.

Indonesia juga perlu menempuh strategi eksternal lainnya, yaitu mengembangkan kemitraan strategis dengan negara-negara sesama kekuatan menengah, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral, untuk sama-sama memperkuat stabilitas dan perdamaian di Asia-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara menengah perlu mengidentifikasi negara-negara kekuatan menengah lainnya yang memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia-Pasifik.

Selain dari hal tersebut, Indonesia secara sosial ekonomi juga perlu mengembangkan strategi internal dalam bentuk pembenahan regulasi

dan penguatan infrastruktur untuk kepentingan penguatan kapasitas untuk menarik investasi dan konektivitas di Indonesia. Tiongkok bagi Indonesia sebagai negara investor di bidang infrastruktur. Di sisi lain, Indonesia juga sedang berbenah diri membangun untuk menciptakan iklim kondusif bagi investor. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antara berbagai kawasan untuk memudahkan siklus ekonomi masyarakat. Konektivitas atau keterhubungan ini juga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa di berbagai kawasan di Indonesia. Jika proses distribusi barang dan jasa berjalan baik menuju pasar di dalam maupun luar negeri, pada gilirannya rangkaian mata rantai ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya itu, strategi internal lain yang perlu dilakukan Indonesia adalah peningkatan kapasitas dalam berdiplomasi. Kapasitas diplomasi Indonesia menghadapi Tiongkok perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan kualitas diplomasi Indonesia terhadap Tiongkok dilakukan dengan cara penguatan sumber daya manusia. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan perjuangan kepentingan nasional menghadapi Tiongkok di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, maupun keamanan. Dengan demikian, penguasaan pengetahuan diplomasi tahap mahir dan bahasa mandarin bagi diplomat Indonesia yang bertugas di Tiongkok menjadi suatu keutamaan jika ingin sukses dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya menghadapi Tiongkok.

Sementara itu, peningkatan kuantitas institusi diplomasi Indonesia di Tiongkok juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Indonesia sebagai negara yang dipandang strategis oleh Tiongkok perlu mengimbangnya dengan cara meninjau struktur Kantor Perwakilan Indonesia di negara tersebut. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan jumlah institusi diplomasinya di luar Kota Beijing, misalnya Indonesia sebagai negara besar dan strategis di hadapan Tiongkok perlu meningkatkan jumlah kantor Konsulat Jenderal di Tiongkok. Saat penulisan buku ini dilakukan, Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura yang memiliki Konsulat Jenderal lebih banyak dibandingkan Indonesia yang hanya

ada tiga, yaitu di Guangzhou, Hong Kong, dan Shanghai. Penambahan infrastruktur diplomatik ini diperlukan agar pelayanan kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat lebih ditingkatkan lagi, dan pada gilirannya akan membantu pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Daftar Singkatan

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AFTA	ASEAN Free Trade Area
AIIB	Asian Infrastructure and Investment Bank
AMBDC	ASEAN Mekong Basin Development Cooperation
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
APT	ASEAN Plus Three
ARF	ASEAN Regional Forum
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association Southeast Nations
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	Badan Pusat Statistik
BRICS	Brazil, Rusia, India, China, South Africa
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEPEA	Comprehensive Economic Partnership in East Asia
CSCE	Conference on Security and Cooperation in Europe
CNNOC	China National Offshore Corporation
Deplu	Departemen Luar Negeri

DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DoD	Department of Defense
EAFTA	East Asia Free Trade Area
FOIPS	Free and Open Indo Pacific Strategy
FTAAP	Free Trade Area on the Asia Pacific
GFC	Global Financial Crisis
GMF	Global Maritime Fulcrum
GMS-ECP	Greater Mekong Sub Region -Economic Cooperation Program
Golkar	Golongan Karya
GWOT	Global War on Terror
HAM	Hak-Hak Azasi Manusia
IMF	International Monetary Fund
INTERFET	International Force for East Timor
Jokowi	Joko Widodo
Kadin	Kamar Dagang dan Industri
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
NSS	National Security Strategy
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKT	Partai Komunis Tiongkok
PLA	People's Liberation Army
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership
RRC	Republik Rakyat China
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SCO	Shanghai Cooperation Organization
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPP	Trans Pacific Partnership
UNAMET	United Nations Mission in East Timor

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nurjannah. “Implikasi Kebijakan Tetangga Baik (Good Neighbor Policy), China pada masa Presiden Hu Jintao di Great Menkong Sub-Region,” *Hassanuddin Journal of International Affairs* 1, no.1, (2020), 101–113.
- Abe, S. “Asia’s Democratic Security Diamond,” *Project Syndicate*, 27 Desember, 2012. <https://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accessreg>.
- Acharya, A. *Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power*. Singapore: World Scientific, 2015.
- Aditya, A. “Jokowi: ‘Bank Dunia’ China Sukses Dukung Infrastruktur RI.” *CNBC*, 12 Maret, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180312100040-4-6901/jokowi-bank-dunia-china-sukses-dukung-infrastruktur-ri>
- Afrianto, D. “Ini Alasan Indonesia Bergabung AIIB”, *Okefinance*, 14 Januari, 2016. <https://economy.okezone.com/read/2016/01/14/20/1288059/ini-alasan-indonesia-bergabung-aib>
- Agastia, I. G. B. D. “Understanding Indonesia’s Role in the ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific’: A Role Theory Approach.” *Asia &*

- The Pacific Policy Studies* 7, no. 3 (2020), 293–305. <https://doi.org/10.1002/app5.308>
- Akaha, T. dan K. Hirata. “US Bilateralism Under Trump, Power Shift in East Asia, and Implications for Regional Security and Prosperity: A Theoretical Analysis of Japan’s Strategic Adjustment,” dalam *Trump’s America and International Relations in the Indo-Pacific*. Diedit oleh T. Akaha, J. Yuan, & W. Liang, 19–52. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75925-4_2
- Alami, A. N. “Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru.” *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 2 (2011), 163–181. <https://doi.org/10.14203/jpp.v8i2.459>
- Amanda, R. “Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok.” *Jurnal Pamator* 14, no 1 (April 2021), 34–39.
- Anwar, D. F. “An Indonesian Perspective on the U.S. Rebalancing Effort toward Asia.” *The National Bureau of Asian Research*, 26 Februari, 2013. <http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=320#.UyIk887DWrc>
- Anwar, D. F. *Indonesia at Large: Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratisation*. Jakarta: The Habibie Center, 2005.
- Anwar, D. F. “Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” *International Affairs* 96, Issue 1, (2020), 111–129. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.
- APEC.org, “Annex A-The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of the FTAAP” *APEC*, 2014. https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa
- Arisandy, Y. “Kemlu Akan Bentuk Satgas Diplomasi Ekonomi”. *Antara*, 8 Januari, 2015. <https://www.antaranews.com/berita/472935/kemlu-akan-bentuk-satgas-diplomasi-ekonomi>
- Ariyanti, F. “10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia.” *Liputan6.com*, 21 Juni, 2016. <http://bisnis.liputan6.com/read/2536315/10-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia>

- Asmara, C. G. “Top! Ekonomi China Mengamuk Lagi, Siap Menyalip AS?” *CNBC Indonesia*, 27 Desember, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211226212501-4-302171/top-ekonomi-china-mengamuk-lagi-siap-menyalip-as>
- Aulia, Luki. “Misi Ganda Diplomasi Jokowi ke China.” *Kompas.id*, 26 Juli, 2022. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/25/misi-ganda-diplomasi-jokowi-ke-china>
- Buzan, B. dan O. Waever. *Regions and Powers: the Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Bader, J. A. *Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia Strategy*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2001.
- Bader, J. A. *Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia Strategy*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2012. <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt6wpd6d>.
- Beeson, M. dan S. Breslin. “Regional and Global Forces in East Asia's Economic Engagement with International Society.” Dalam *Contesting International Society in East Asia*, diedit oleh B. Buzan & Y. Zhang, 93–118. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139939447>
- Beeson, M. “Developmental States in East Asia: A Comparison of the Japanese and Chinese Experiences,” *Asian Perspective* 33, no. 2, (2009), 5–39. <http://www.jstor.org/stable/42704671>.
- Beeson, M. “Middle Powers in the International Political Economy,” dalam *The Palgrave handbook of contemporary international political economy*. Diedit oleh T. M. Shaw, L. C. Mahrenbach, R. Modi, dan Y. C. Xu, 201–215. London: Palgrave Macmillan, 2019. https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-45443-0_13
- Beeson, M. dan R. Higgott, “The Changing Architecture of Politics in the Asia-Pacific: Australia's Middle Power Moment?” *International Relations of the Asia-Pacific* 14, no. 2, (2014), 215–237. <https://doi.org/10.1093/irap/lct016>

- Beeson, M. *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and Beyond*. New York: Routledge, 2008.
- “Beijing Memprotes Indonesia atas penangkapan 8 nelayan China di Natuna.” *Kompas*, 31 Mei, 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/31/09463021/beijing.memprotes.indonesia.atas.penangkapan.8.nelayan.china.di.natuna>
- Bisley, N. “Infrastructure, Order, and Contested Asia: How BRI Will Influence Asia’s Emerging International Order,” dalam *The Belt and Road Initiative and the Future of Regional Order in the Indo-Pacific*. Diedit. M. Clark, M. Sussex, dan N. Bisley, 1–17. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2020.
- Bradner, E. “Trump’s TPP Withdrawal: 5 Things to Know,” *CNN*, 23 Januari, 2017. <https://edition.cnn.com/2017/01/23/politics/trump-tpp-things-to-know/index.html>
- Brown, J. “Jakarta’s Juggling Act: Balancing China and America in the Asia Pacific.” *Foreign Policy Analysis Centre for Independent Studies* 5 (3 Februari 2011), 1–16. <https://www.cis.org.au/wp-content/uploads/2015/07/fpa5.pdf>
- Burhani, R. “Gus Dur Buka Kran Positif Wisata Indonesia-China.” *Antara*, 2 Januari, 2010. <https://www.antaraneews.com/berita/168034/gus-dur-buka-kran-positif-wisata-indonesia-china>
- “Cadangan Devisa.” *Trading Economics*, diakses pada 11 Februari, 2016. <http://id.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves>.
- Calmes, J. “Obama’s Trip Emphasizes Role of Pacific Rim.” *The New York Times*, 18 November, 2011. http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/asia/obamas-trip-sends-message-to-asian-leaders.html?_r=0, diunduh 12 Agustus 2016.
- Camroux, D. “Regionalism in Asia as Disguised Multilateralism: A Critical Analysis of the East Asia summit and the Trans-Pacific Partnership,” *The International Spectator*, 47, no.1 (2012), 97–115. <https://doi.org/10.1080/03932729.2012.655010>
- Chacko, Priya. “India and the Indo-Pacific from Singh to Modi: Geopolitic and Geoeconomic Entanglements.” Dalam *New*

- Regional Geopolitics in the Indo-Pacific*. Priya Chacko (Ed.). New York: Routledge, 2016.
- Chan, Lai Ha. "Can China's the Belt and Road Initiative Build Peaceful Regional Order?" Dalam *The Belt and Road Initiative and the Future of Regional Order in the Indo-Pacific*, diedit oleh Michael Clarke. New York: Lexington Books, 2020.
- Chan, S. *Looking for Balance: China, the United States, and Power Balancing in East Asia*. California: Stanford University Press, 2012. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqsdp1m>
- Chen, Z. "China's Power from a Chinese Perspective (II): Back to the Center Stage," dalam *Assessing China's Power*. Diedit oleh J. H. Chung, 271–189. New York: Palgrave Macmillan, 2015. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137534613_13
- China Daily, "制度性话语权 (zhiguxing huayuquan): Greater Say in Global Governance," *China Daily*, 23 November, 2015. http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-11/23/content_22510054.htm.
- "China Foreign Aid," *Information Office of the State Council the People's Republic of China*. Diakses pada 30 Agustus, 2016, <http://news.xinhuanet.com>
- "China Mendapat Banyak Persepsi Buruk." *Kompas*, 11 Desember, 2013. <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/11/0825579/China.Mendapat.Banyak.Persepsi.Buruk>
- "China Mourns Death of Indonesian Former President Wahid." *Xinhua*, 31 Desember, 2009. <http://id.china-embassy.org/eng/gdxw/t649792.htm>
- "China Pledges \$400 M to Indonesia." *BBC News*, 24 Maret, 2002. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1891007.stm>
- "China Speaks Out on Indonesian Riots." *BBC News*, 19 November, 1998. http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/indonesia/latest_news/215153.stm
- "China, Indonesia Agree to Intensify Economic Cooperation." *Xinhua*, 10 Oktober, 2006. <http://english.sina.com/china/1/2006/1006/91073.html>

- “China, Indonesia Airborne Troops Complete Antiterrorism Exercise.” *Xinhua/Chinadaily*, 11 November, 2013. https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-11/12/content_17097461.htm
- “China, Indonesia Expand Military Cooperation.” *Defense Update*, 29 Juli, 2012. https://defense-update.com/20120729_china-indonesia-military-cooperation.html
- “China, Indonesia Launch United Training for Special Forces.” *Xinhua/China.org.cn*, 7 Juni, 2011. http://www.china.org.cn/world/2011-06/07/content_22728260.htm
- “Chinese Dream to Shape Global Landscape: Experts.” *Chinadaily*, 7 Desember, 2013. https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-12/07/content_17159585.htm
- “Chinese Government Offering Scholarships to Indonesian Students.” *The Jakarta Post*, 10 Mei, 2011.
- “Chinese Warship Participates in ‘Komodo’ Multilateral Humanitarian Rescue Exercise.” *Ministry of National Defence PRC*, 24 Maret, 2014. <http://eng.mod.gov.cn>
- Christensen, Thomas J. “More Actor, Less Coordination? New Challenges for the Leaders of Rising China.” Dalam *China’s Foreign Policy: Who Make it and How is it Made*, Gilbert Rozman (Ed.). Princeton: Plagrave Macmillan, 2012.
- “CNOOC, SMART, Hong Kong Energy Investasi BBN US\$ 5,5 M.” *Detik Finance*, 9 Januari, 2007. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-728279/cnooc-smart-hong-kong-energy-investasi-bbn-us-55-m>
- Connelly, A. A. *Foreign Policy Under President Jokowi*. Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2014.
- Connelly, A. L. “Congress and Asia-Pacific Policy: Dysfunction and Neglect,” *Lowy Institute for International Policy*, 2015. <http://www.jstor.org/stable/resrep10140>
- Cook, M. “Southeast Asia’s Developing Divide.” Dalam *International Relations and Asia’s Southern Tier: ASEAN, Australia, and India*. Diedit oleh G. Rozman & J. C. Liow,

- 63–76. Singapore: Springer, 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3171-7_5
- Crouch, H. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- Damuri, Y. R., V. Perkasa, Atje, dan R. Hirawan. “Perspectives and Readiness of Indonesia Towards the Belt and Road Initiative.” *CSIS Paper* (Jakarta: CSIS, 2019). https://www.csis.or.id/uploads/attachments/post/2019/05/23/CSIS_BRI_Indonesia_r.pdf.
- De Rougé, G. “The Political Economy of the US Rebalance: Revisiting the “Web of Linkages” between National Security and Economic Prosperity,” dalam *Origins and evolution of the US rebalance toward Asia: Diplomatic, Military, And Economic Dimensions*. Diedit oleh H. Meijer, 107–123. New York: Palgrave MacMillan, 2015. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137440372_5
- “Deregulasi Morat Marit.” *Tempo*, 17 Juli, 2016.
- Dewabrata, Wisnu. “Pencarian Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia.” *Kompas*, 26 Juni, 2015.
- Djafar, Zainuddin. *Rethinking the Indonesian Crisis*. Bandung: Pustaka Jaya, 2006.
- Donnan, S. “Jakarta in Missile Deal with Beijing.” *Financial Times*, 1 Agustus, 2005. <https://www.ft.com/content/b08524e4-01f7-11da-9481-00000e2511c8>
- Dosch, J. “The United States in the Asia Pacific: Still the Hegemon?” Dalam *The New Global Politics of the Asia-Pacific: Conflict and Cooperation in the Asian Century*. Diedit oleh M. K. Connors, R. Davison, dan J. Dosch, 32–46. New York: Routledge, 2018.
- Dowe, E. S. “Business Interest Groups in Chinese Politics: The Case of the Oil Companies.” Dalam *China Changing Political Landscape*, diedit oleh C. Li. Washington DC: Brookings Institution Press, 2008.
- Doyle, T. dan D. Rumley. *The Rise and Return of the Indo-Pacific*. Oxford: Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198739524.001.0001>

- E. A. Laksmna. “Flawed Assumptions: Why the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific is Defective.” *AsiaGlobal Online*, 19 September, 2019. <https://www.asiaglobalonline.hku.hk/flawed-assumptions-why-theasean-outlook-on-the-indo-pacific-is-defective/>
- “Ease of Doing Business in Indonesia.” *Trading Economics*, diakses pada 29 Februari, 2022. <https://tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business>
- Economy, E. *The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Enoch, T. “Hubungan RI-China: Secara Historis dan Dinamis!” Dalam *Merangkum China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, diedit oleh I. Wibowo dan S. Hadi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Eto, N. “Japan-China Strategic Communications Dynamics Under the Belt and Road Initiative: The Case of ‘Third Country Business Cooperation.’” *Asian Perspective* 45, no. 3 (2021), 533–558. doi:10.1353/apr.2021.0026.
- Ferrantino, M. J., M. Maliszewska, dan S. Taran. “Actual and Potential Trade Agreements in the Asia-Pacific.” *Working Paper* 9496. Washington DC: World Bank Policy Research, 2020, 6.
- Fitriyani, A. “Panelis: Insiden Natuna Pengakuan Indonesia Bermasalah dengan Tiongkok.” *Antara*, 17 September, 2016. http://www.antaraneews.com/berita/584918/panelis-insiden-natuna-pengakuan-indonesia-bermasalah-dengan-tiongkok?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news.
- Fukuoka, Y. “Indonesia–China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges.” Dalam *Chinese Global Production Networks in ASEAN*, diedit oleh Y. C. Kim. Springer International Publishing, 53–75. Switzerland: Springer, 2016.
- “Future Direction Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnerships,” Kementerian Luar Negeri. <http://kemlu.go.id/Documents/RI-RRT/Joint%20Statement%20>

- Comprehensive%20Strategic%20Partnership.pdf, diunduh 26 Oktober 2016.
- Garnaut, R. "Indonesia's Resources Boom in International Perspective: Policy Dilemmas and Options for Continued Strong Growth." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, No. 2 (2015), 189–212. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061910>
- Gayatri, M. D. "Riset: Indonesia 10 Besar Negara Tujuan Investor Tiongkok." *Antaraneews.com*, 25 Agustus, 2016. http://www.antaraneews.com/berita/580796/riset-indonesia-10-besar-negara-tujuan-investor-tiongkok?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news
- "GDP Ranking Table 2014." *World Bank*, diakses pada 26 Maret, 2015. <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>
- Gilley, B. dan A. O'Neil. ed. *Middle Powers and the Rise of China*. Washington D.C: Georgetown University Press, 2014.
- Gilpin, R. "Sources of American-Japanese Economic Conflict." Dalam *International Relations Theory and the Asia-Pacific*, diedit oleh J. G. Ikenberry & M. Mastanduno, 299–322. New York: Columbia University Press, 2003.
- "Global Competitiveness Report 2014." World Economic Forum. Diakses pada 27 Maret, 2015. <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>
- "Global Diplomacy Index 2019." Lowy Institute for International Policy. Diakses pada 17 Januari, 2022. <https://www.lowyinstitute.org/global-diplomacy-index/#>
- "Comparisons of China and Indonesia Military Strength (2022)." *Global Fire Power*, diakses pada 17 Januari, 2022. <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=china&country2=indonesia>
- Glosserman, Brad. "China's Grand Strategy Disaster." *The National Interest*, 20 Mei 2014. <https://nationalinterest.org/feature/chinas-grand-strategy-disaster-10492>
- Golley, J. dan M. Wesley. "The Geoeconomics of The Belt and Road Initiatives." Dalam *The Belt and Road Initiative and the Future*

- of *Regional Order in the Indo-Pacific*, diedit oleh M. Clark, M. Sussex, & N. Bisley, 91–114. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2020.
- “Gross National Income 2014, Atlas Method.” *World Bank*, diakses pada 11 Februari, 2016. <http://data.worldbank.org/data-catalog/GNI-Atlas-method-table>
- Gupta, A. “Global Strike vs Globalization: The US-China Rivalry and the BRI.” Dalam *The Belt and Road Initiative: An Old Archetype of a New Development Model*, diedit oleh F. J. B. S. Leandro & P.A.B. Duarte, 46–60. Singapura: Palgrave Macmillan, 2020. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2564-3_3
- Hadi, S. “Hubungan Indonesia-China di era Pasca-Orde Baru: Perspektif Indonesia.” Dalam *Merangkum China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, diedit oleh. I. Wibowo & S. Hadi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Haggard S. dan R. R. Kaufman. *Development, Democracy, and Welfare States*. Princeton: Princeton University Press, 2020. <https://muse.jhu.edu/book/75002>
- Haggard, S. *The Political Economy of the Asian Financial Crisis*. Washington: Peterson Institute, 2000.
- Hakim, R. N. “Orasi Ilmiah, Megawati Bicara Sipadan dan Ligitan hingga Proyek LNG Tangguh.” *Kompas*, 25 Mei, 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/14275831/orasi.ilmiah.megawati.bicara.sipadan.dan.ligitan.hingga.proyek.lng.tangguh>
- Hamilton-Hart, N. dan D. McRae. *Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence*. Sydney: United States Studies Centre at the University of Sydney, 2015.
- Handel, Michael I. *Weak States in the International System*. London: Taylor and Francis, 1990.
- Harrington, C. dan A. Waddan. *Obama v. Trump: The Politics of Presidential Legacy and Rollback*. Edinburg: Edinburgh University Press, 2020. <https://doi.org/10.1515/9781474447027>

- Hartini, D. "Jokowi Hadiri Latihan Perang PPRC TNI di Natuna." *Kompas TV*, 19 Mei, 2017. <https://www.kompas.tv/article/4933/jokowi-hadiri-latihan-perang-pprc-tni-di-natuna>
- Hasugian, Maria Rita. "Narapidana Terakhir Peristiwa Tiananmen 1989 Segera Bebas." *Tempo*, 4 Mei, 2016. <https://dunia.tempo.co/read/768430/narapidana-terakhir-peristiwa-tiananmen-1989-segera-bebas>
- He, K. "Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia," *European Journal of International Relations* 14, no. 3 (2008), 489–518. <https://doi.org/10.1177/1354066108092310>
- He, K. *Institutional Balancing in the Asia Pacific: Economic Interdependence and China's Rise*. New York: Routledge, 2009.
- He, Kai, dan Menjiang Li. "Understanding Dynamic of Indo-Pacific: US-China Strategy Competition, Regional Actor and Beyond." *International Affairs Content* 96, No. 1 (2020), 1–4.
- Hemmer, C., dan Katzenstein, P. J. "Why is there no NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism." *International organization* 56, No. 3, (2002), 575–607. <https://doi.org/10.1162/002081802760199890>
- Hermansyah, A. "China Likely Biggest Investor in Indonesia." *The Jakarta Post*, 25 Januari, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/25/china-likely-biggest-investor-indonesia.html>
- Hiketani, T. "Trump's Gift to Japan: Time for Tokyo to Invest in the Liberal Order." *Foreign Affairs* 96, No. 5 (2017), 21–27.
- "Hingga 2020, Ekonomi China Diprediksi Sulit Tembus 6.5%." *Kompas.com*, 11 Januari 2016 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/11/131824126/Hingga.2020.Ekonomi.China.Diprediksi.Sulit.Tembus.6.5.Persen>
- "History of AIIB." *Asian Infrastructure Investment Bank*, diakses pada 22 Agustus 2016. www.aiib.org/html/aboutus/introduction/history/?show=0
- Hong, Zhao. "China-Indonesia Economic Relations: Challenges and Prospects." *Perspective* No. 42 (2013).

- Huaguang, Huang dan Jianzhang, Luan. *Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21 st-Century Maritime Silk Road*. Beijing: Foreign Language Press & Co, 2013.
- Huda N. dan Zulihat. “Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009.” *Dikta Ekonomi* 6, no.3 (2009), 183–198
- Hughes, C. (2000, 21 September). Beijing Rides a Nationalist Cyber-Tiger. *Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/articles/SB969481844862316960>
- Humas Sekretariat Kabinet RI. “Sebut sebagai Sahabat, Presiden Jokowi Ajak RRT Kerja sama Berantas Korupsi dan Minta Bebas Visa,” *Sekretariat Kabinet RI*, 27 Maret, 2015. <https://setkab.go.id/sebut-sebagai-teman-presiden-jokowi-ajak-rrt-kerjasama-berantas-korupsi-dan-minta-bebas-visa/>
- Hunnicutt, T dan Lies, E. “Biden’s Asia Economic Talks Include 13 Countries and Not China,” *Reuter/EC*, 24 Mei, 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bidens-asian-economic-talks-include-13-countries-no-china-2022-05-23/>
- “Husky/CNOOC Complete Agreement for Joint Development in Indonesia.” Husky Energy, diakses pada 28 Oktober, 2016. https://www.ckh.com.hk/upload/attachments/en/pr/1995_eng.pdf
- Hutapea, T. P. “Investasi: Realisasi Komitmen Tiongkok baru 5 Persen,” *Kompas*, 14 September 2016.
- Ikenberry, G. John, “The Rise of China and the future of the West: Can the Liberal System Survive?.” *Foreign Affairs*, 1 Januari 2008. www.Foreignaffairs.com/article/asia/2008-01-01/rise-china-future-west
- “‘Indo-Pacific’ over ‘Asia-Pacific’ Reflects India’s Rise: US Official.” *The Economic Times*, 11 Juli, 2018. <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indo-pacific-over-asia-pacific-reflects-indias-rise-us-official/articleshow/61519684.cms?from=mdr>
- “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.” Presiden Republik Indonesia, diakses pada 27 Juli 2016. <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>,

- “Indonesia Strengthens Defense Cooperation with China and Malaysia,” *Jane’s Defence Industry*, 25 Januari, 2010.
- “Indonesia to Join China-led Asia Infrastructure Investment Bank,” *The Economic Times*, 5 November, 2014. www.article.economictimes.Indiatimes.com/2014-11-05/news/55798371-lasia-ifastructure-investment-bank/aibb,
- “Indonesia, China Forge Comprehensive Strategic Partnership in Various Field,” *Antara News*, 7 Oktober, 2013, <http://www.antaranews.com/en/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>
- “Indonesia: The Post Soeharto Crisis.” *Human Rights Watch*, 4 Juni, 1998. <https://www.hrw.org/news/1998/06/04/indonesia-post-Soeharto-crisis>
- “Ini Sejarah Penjualan Gas Murah Tangguh Papua ke Tiongkok.” *Detik Finance*, 1 Juli, 2014. <http://finance.detik.com/energi/d-2623898/ini-sejarah-penjualan-gas-murah-tangguh-papua-ke-tiongkok>
- International Crisis Group (ICG). “Indonesia’s Crisis: Chronic but Not Acute.” *ICG Report I*, No. 2, (2000).
- “Istana: Kedaulatan Negara Harga Mati, tetapi Hubungan Baik Perlu Dijaga.” *Kompas*, 20 Juni, 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/20/17371771/istana.kedaulatan.harga.mati.tetapi.hubungan.baik.perlu.dijaga>
- “Isu-Isu Politik Lebih Menonjol.” *Kompas*, 27 Mei 2016.
- Jain, Purnendra dan Harimoto, Takenori. “Japan and the Indo-Pacific.” Dalam *New Regional Geopolitics in the Indo-Pacific*, diedit oleh Priya Chacko. New York: Routledge, 2016.
- Jayakarna A. “Suramadu Bridge to Open in April.” *The Jakarta Post*, 14 Januari, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2009/01/14/suramadu-bridge-open-april.html>
- Jeffreys, A. *The Report Indonesia, 2013: Economy, Banking, Energy, Transport, Infrastructure, Tourism, Real Estate, Telecoms & IT, Industry, Capital Markets, Construction, Interviews*. London: Oxford Business Group, 2013.

Jemadu, A. “Hubungan Indonesia–China Dalam Dinamika Politik, Pertahanan, Keamanan dan Ekonomi di Asia Tenggara,” *Presentasi Focus Group Discussion* Kelompok Penelitian Polugri P2P LIPI: Hubungan Indonesia-China, Jakarta: LIPI, 11 Oktober 2011.

“Jepang Tawari Indonesia Peralatan Pertahanan untuk Menangkis Pengaruh China di Asia.” *VOA Indonesia*, 18 Desember, 2015. <http://www.voaindonesia.com/a/jepang-tawari-indonesia-peralatan-pertahanan-untuk-menangkis-pengaruh-china-di-asia/3107166.html>

“Jet tempur Rafale buatan Prancis dan rencana Indonesia untuk perkuat alutsista, apa istimewanya?” *BBC News Indonesia*, diakses pada 11 Februari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60343367>

Johnson, C.. *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*. California: Stanford University Press, 1986.

Johnston, A. I. “How New and Assertive Is China’s New Assertiveness?” *International Security* 37, No. 4 (2013), 7–48.

“Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia.” *Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China*, 26 Maret, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/201503/t20150327_679397.html

Kaarbo, Juliet, Jeffrey S. Lantis, and Ryan K. Beasle, “The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspectives, dalam Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*, diedit oleh Michael T. Snarr. United Kingdom: CQ Press, 2013.

Kahin, G. McT. “Malaysia and Indonesia.” *Pacific Affairs* 37, no. 3 (1964), 253–270.

Kedutaan Besar Republik Indonesia. *Keterangan Dasar Republik Tiongkok*. Beijing: KBRI, 2016.

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, “Siaran Pers: Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, 28 Juli 2016.” Kemenko Maritim dan Investasi RI, 28 Juli, 2016. <https://maritim.go.id/serah-terima-jabatan-menteri-koordinator-bidang-kemaritiman-jakarta-28-juli-2016/>
- Kementerian Luar Negeri RI. *Rencana Strategis 2014-2019*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2014.
- Kent, A. “China’s Changing Influence on the Multilateral System: From Adaptation to Assertion,” dalam, *Assessing China’s Power*. Diedit oleh J. H. Chung, 139–161. New York, Palgrave Macmillan, 2015. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137534613_7
- Keohane, Robert O. “Lilliputians’s Dilemmas: Small States in International Politics”. *International Organization* 23, no. 02 (1969).
- Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Penggantian Istilah Tionghoa/Tiongkok menjadi Tjina.
- Kerry, J. F. “John Kerry on Forging a Pacific Future.” *Los Angeles Times*, 18 Oktober 2013. <https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-kerry-asia-20131018-story.html>
- “Ketua DPR Desak BPOM Awasi Ketat Peredaran Susu China.” *Kompas*, 24 September, 2008. <https://ekonomi.kompas.com/read/2008/09/24/10435631/~Kesehatan~Health%20Info~News>
- Keyes, C. “G William Skinner and The Study of Chinese in Thailand and The Study of Thai Society.” *Makalah* dipresentasikan pada Workshop: The Legacy of G. William Skinner’s Field Research: China and Southeast Asia, University of Washington, Amerika Serikat, 27 Mei, 2011.
- “Konflik di Myanmar Makin Tidak Manusiawi, Anak-Anak Dibantai secara Keji.” *Jawa Post News Network (JPNN)*, 25 Desember, 2021. <https://www.jpnn.com/news/konflik-di-myanmar-makin-tidak-manusiawi-anak-anak-dibantai-secara-keji?page=2>

- “Konflik di Perairan Natuna, Arahan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomatik Damai”, Sekretariat Kabinet RI, 5 Januari 2020, <https://setkab.go.id/konflik-di-perairan-natuna-arahan-presiden-pemerintah-tegas-sekaligus-prioritaskan-diplomatik-damai/>
- “Krisis Keuangan Asia di Indonesia,” *Indonesia Investment*, diakses pada 25 Oktober 2016 dari <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246>
- Kuik, C. C. “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states’ alignment behavior towards China,” *Journal of Contemporary China*, (2016). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=QaVpkdMAAAAJ&citation_for_view=QaVpkdMAAAAJ:PVjk1bu6vJQC
- Lanteigne, M. “A Change in Perspective: China’s Engagement in the East Timor UN Peacekeeping Operations.” *International Peacekeeping* 18, no.3 (2011), 313–327. <https://doi.org/10.1080/13533312.2011.563093>
- Lanteigne, M. *Chinese foreign policy: an introduction*. New York: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9780429437908>
- Leifer, M. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Li, Mingjiang. “The Belt and Road Initiative.” *International Affairs Content* 96, No.1 (2020), 177.
- Li, X. dan Zheng, X. “Understanding China’s “One Belt and One Road” Initiative: An ‘International Public Goods’ Approach,” dalam *The Belt and Road Initiative: An Old Archetype of a New Development Model*. Diedit oleh F.J.B.S. Leandro & P.A.B. Duarte, 85–109. Singapura: Palgrave Macmillan, 2020. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2564-3_5
- Liji, Liang. *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012.
- Ling, J. “The New Silk Road Initiative: China’s Marshall Plan,” *China International Study* 50, (2015), 70–83.

- Liping, X. “Dasar Hubungan Antarmasyarakat Indonesia-Tiongkok dan Prospeknya”, dalam *65 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok Kemitraan Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan: Pemikiran dan Pengalaman Tokoh-Tokoh Kerjasama Indonesia - Tiongkok*. Beijing: KBRI China, 2015.
- Liu, F. “The recalibration of Chinese assertiveness: China’s responses to the Indo-Pacific challenge.” *International Affairs* 96, No. 1, (2020), 9–27. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz226>
- Liu, H. “Constructing a China Metaphor: Soekarno’s Perception of the PRC and Indonesia’s Political Transformation,” *Journal of Southeast Asian Studies* 28, no. 1 (1997), 27–46. <https://doi.org/10.1017/S0022463400015162>
- Liu, Tony Tai-ting. “Public Diplomacy: China’s Newest Charm Offensive.” *E-International Relations*, 30 Desember, 2018. <https://www.e-ir.info/2018/12/30/public-diplomacy-chinas-newest-charm-offensive/>
- Ljunggren, B. “From Obama to Trump, and Beyond: Washington’s Painful Search for a Credible China Policy.” Dalam *The United States in the Indo-Pacific: Obama’s Legacy and the Trump Transition*, diedit oleh O. Turner & I. Parmar, 195–209. Manchester: Manchester University Press, 2020. <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00021>
- Lobell, Steven E., Neal G. Jesse, and Kristen P. Williams. “Why Secondary States Choose to Support, Follow or Challenge?” *International Politics* 52, No. 2 (2005).
- Manicom, J., & J. Reeves. “Locating Middle Powers in International Relation Theory.” Dalam *Middle powers and the rise of China*, diedit oleh B. Gilley & A. O’Neil, 23–44. Washington: Georgetown University Press, 2014. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.6>.
- Manicom, James, dan J. Reeves. “Locating Middle Powers in International Relations Theory and Power Transitions”. dalam *Middle Powers and the Rise of China*, diedit oleh Bruce Gilley

- and Andrew O’Neil. Washington DC: Georgetown University Press, 2014.
- Mares, David R. “Middle Powers under Regional Hegemony: To Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement”. *International Studies Quarterly* 32, No. 4 (1988).
- Margono, V. T, N. Irawan, J. Graciella, V. I. P. Calista, dan H. K. Setiawan. “Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi COVID-1,” *Jurnal Sentris*. Edisi Khusus (11 Oktober 2021), 285–306.
- Mas’oed, M. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Mashad, Dhuroruddin. “Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi.” Dalam *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, diedit oleh Ganewati Wuryandari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mastanduno, M. “A Grand Strategic Transition? Obama, Trump and the Asia Pacific Political Economy.” Dalam *The United States in the Indo-Pacific: Obama’s Legacy and the Trump Transition*, diedit oleh O. Turner & I. Parmar, 177–192. Manchester: Manchester University Press, 2020. <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00021>
- Mattis, J. *Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America*. Washington DC: Department of Defense, 2018. <https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>
- Meijer, H. “Introduction: The Reconfiguration of American Primacy in World Politics: Prospects and Challenges for the US Rebalance toward Asia.” Dalam *Origins and evolution of the US rebalance toward Asia: Diplomatic, Military, And Economic Dimensions*, diedit oleh H. Meijer, 1–27. New York: Palgrave MacMillan 2015. <https://link.springer.com/book/10.1057/9781137440372>
- “Mengejar Investasi Negeri Tirai Bambu,” Kementerian Investasi/BKPM, diakses pada 11 September, 2016, <https://www.bkpm>.

- go.id/id/publikasi/detail/berita/mengejar-investasi-negeri-tirai-bambu
- “Menjadi Tuan di Laut Sendiri.” *Majalah Tempo*, 22 Agustus 2016. <https://majalah.tempo.co/read/opini/151323/menjadi-tuan-di-laut-sendiri>
- “Menlu RI Sampaikan Capaian Politik Luar Negeri Indonesia 2020 dan Prioritas Diplomasi 2021”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021, <https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luarnegeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>.
- Wijaya, Angga Sukma. “Menteri Luhut: Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Pertahanan.” *Tempo*, 28 April 2016. <https://nasional.tempo.co/read/766929/menteri-luhut-indonesia-china-perkuat-kerja-sama-pertahanan>
- Mie, O. “Signing of the RCEP and the Future Asian Order.” *The Diplomat*, 20 Desember 2020. <https://thediplomat.com/2020/12/signing-of-the-rcep-and-the-future-asian-order/2>
- “Military Expenditure Database.” *SIPRI*, diakses pada 26 Maret, 2015. http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database,
- Ministry of Foreign Affairs of Japan, “‘Confluence of the Two Seas’ Speech by H. E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India.” Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 22 Agustus, 2007. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
- Morsion, E. Charles. *Asia Pacific Security Outlook 1998*. Washington.D.C. : Brooking Institution Press, 2012
- Muas, R T. N. M. E. *Diplomasi Tanpa Kehilangan Muka*. Jakarta: Serat Alam Media, 2015.
- Mufarida, B. “2 Juta Dosis Vaksin Sinovac Bantuan China Tiba di Indonesia.” *SINDOnews.com*, 21 Desember, 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/634903/15/2-juta-dosis-vaksin-sinovac-bantuan-china-tiba-di-indonesia-1640074371>
- Murphy, A. M. “China’s Grand Strategy toward Southeast Asia Assessing the Response and Efficacy.” Dalam *China’s Grand*

- Strategy: A Roadmap to Global Power?*, diedit oleh D. B. H. Denoon, 121–145. New York: NYU Press, 2021. <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479804085.003.0006>
- Murphy, A. M. “Indonesia Responds to China’s Rise.” Dalam *Middle Powers and the Rise of China*, diedit oleh B. Gilley & A. O’Neil, 126–148. Washington: Georgetown University Press, 2014. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.11>.
- Mushtaq, S., dan I. A. Choudhry. “Conceptualization of Foreign Policy an Analytical Analysis.” *Berkeley Journal of Social Science* 3, (2013), 1–21.
- Nabs-Keller, G. “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership.” *Contemporary Southeast Asia* 35, no. 1 (2013), 56–82.
- Nafi, M. “Indonesia dan China Bisa Sinergikan Poros Maritim Dunia.” *Katadata*, 22 November, 2022. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/6376b62908996/indonesia-dan-China-bisa-sinergikan-poros-maritim-dunia>
- National Development and Reform Commission (NDRC). *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*. Beijing, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/2015zt/xjpcxbayzlt2015nnh/201503/t20150328_705553.html
- “Navy Launches 2nd Guided Missile Boat.” *The Jakarta Post*, 17 Februari, 2012. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/17/navy-launches-second-locally-made-guided-missile-boat.html>
- “Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang.” Kementerian Perdagangan RI, diakses pada 11 Februari, 2016. <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>
- Norman, Jim. “Four Nations Top U.S.’s Greatest Enemy List, 22.” *Gallup*, 22 Februari, 2016. <https://news.gallup.com/poll/189503/four-nations-top-greatest-enemy-list.aspx?version=print>

- Norris, W. J. "China's Post-Cold War Economic Statecraft: A Periodization," *Journal of Current Chinese Affairs* 50, No. 3 (2021), 304. <https://doi.org/10.1177/18681026211058186>
- Novotny, D. "Indonesian Foreign Policy: A Quest for the Balance of Threats. The Role and Relevance of Elite Perceptions in Explaining Indonesian Foreign Policy Outcomes." *Disertasi*, University of New South Wales, 2007. <https://unsworks.unsw.edu.au/bitstreams/568aefd6-7eba-4ed9-a3e2-a7d97781f4d4/download>
- Nurhaliza, S. "Perdagangan Indonesia dan China Tembus Rp1,1 Triliun", *IDX Channel*, 1 April 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/perdagangan-indonesia-dan-china-tembus-rp11-triliun>
- Nurita, D. "Tiga Pernyataan Menteri Jokowi soal Polemik Kapal China di Natuna." *Tempo*, 5 Januari, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1291270/tiga-pernyataan-menteri-jokowi-soal-polemik-kapal-china-di-natuna>
- Nurita, D. "TKA China Jadi Polemik, Luhut: Jangan Asal Ngomong Kalau Enggak Ngerti Masalahnya." *Tempo*, 6 Juli, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1480420/tka-china-jadi-polemik-luhut-jangan-asal-ngomong-kalau-enggak-ngerti-masalahnya>
- "Secretary of Defense Ash Carter Asia-Pacific Remarks McCain Institute, Arizona State University Monday, April 6 2015." *The White House President Barrack Obama*, 6 April, 2015. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/asia-pacific_speech_asu_asdelivered.pdf
- The White House Office of the Press Secretary. "Remarks by the President in State of the Union Address, January 20, 2015." Washington DC: Office of the Press Secretary, 2015. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-address-january-20-2015>
- Pain, R. "Globalized Fear? Towards an Emotional Geopolitics." *Progress in Human Geography* 33, No. 4 (2009), 466–486.

- Panda, J. P. "India's Approach to the "Quad" and the Salience of China." Dalam *Conflict and cooperation in the Indo-Pacific: New geopolitical realities*, diedit oleh A. Rossiter dan B. J. Cannon, 12–38. New York: Routledge, 2020.
- Pang, E. S. "Embedding Security into Free Trade: The Case of the United States-Singapore Free Trade Agreement." *Contemporary Southeast Asia* 29, no. 1 (2007), 1–32. <http://www.jstor.org/stable/25798812>
- Paradise, J. F. "Changing Power Dynamics in Asia: Implications for the US-ROK Alliance." Dalam *Trump's America and International Relations in the Indo-Pacific*, diedit oleh T. Akaha, J. Yuan, & W. Liang, 53–76. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-75925-4_1
- Parameswaran, P. "China is Now One of Indonesia's Top Ten Investors." *The Diplomat*, 29 April, 2015. <http://thediplomat.com/2015/04/china-is-now-one-of-indonesias-top-ten-investors/>
- Patience, A. *Australian Foreign Policy in Asia: Middle Power or Awkward Partner?* New York: Palgrave Macmillan, 2018. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-69347-7>
- Pattiradjawane, R. L. "The Indonesian Perspective Toward Rising China: Balancing the National Interest." *Asian Journal of Comparative Politics* 1, no. 3 (2016), 1–23.
- Peerenboom, R. dan B. Bugaric. "The Emerging Post Washington, Post Beijing Consensus: Prospects and Pitfalls." *UCLA Journal International Law & Foreign Affairs* (11 Juni 2013). <https://ssrn.com/abstract=2277427>.
- "Pemerintah Diminta Konsisten: Relaksasi Ekspor Mineral Ditolak." *Kompas*, 12 Oktober, 2016.
- "Pengakuan Negara atas Kong Hu Cu," *BBC*, 7 April, 2011, http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong.shtml
- "Pernyataan Pers Akhir Tahun 2000 Menteri Luar Negeri RI Dr. Alwi Shihab," *Kementerian Luar Negeri*. Diakses pada 25 Oktober 2016, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/>

- Pernyataan-Pers-Akhir-Tahun-2000-Menteri-Luar-Negeri-RI-Dr.-Alwi-Shihab-Departemen-Luar-Negeri-Repub.aspx
- “Pertumbuhan Ekonomi China Terlamban dalam 25 Tahun Terakhir.” *BBC*, 19 Januari, 2016. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160118_majalah_China_pertumbuhan_ekonomi
- “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Tanggal 20 Oktober 2004,” *Arsip Nasional*, diakses pada 26 Oktober, 2016, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/susilo21.pdf
- Piesse, M. “The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean.” *Future Direction International*, 30 Januari, 2015. <https://navalinstitute.com.au/indonesian-maritime-doctrine-realising-potential-of-the-ocean/>
- “Population Ranking Table 2014.” *World Bank*, diakses pada 27 Maret, 2015, <http://data.worldbank.org/data-catalog/Population-ranking-table>
- Prasetyono, A. T. “Jalan Ekonomi Presiden Jokowi.” *Kompas*, 25 Oktober, 2019.
- Prasetyo, B. “Presiden Jokowi ke Natuna Tinjau Latihan Angkasa Yudha.” *Antaranews*, 6 Oktober, 2016. http://www.antaranews.com/berita/588638/presiden-jokowi-ke-natuna-tinjau-latihan-angkasa-yudha?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
- Pratomo, Y. “Sepak Terjang Habibie Mampu Turunkan Harga Dolar hingga Rp 6.500.” *Merdeka.com*, 26 Agustus, 2015. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-habibie-mampu-turunkan-harga-dolar-hingga-rp-6500.html>
- “Presiden Xi Ingin Hubungan Indonesia-China Semakin Erat.” *Antara*, 2 September 2016. http://www.antaranews.com/berita/582322/presiden-xi-ingin-hubungan-indonesia-china-semakin0erat?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news

- “President Jokowi Discusses Infrastructure Projects with President Xi Jinping.” *Sekretariat Kabinet RI*, 15 Mei, 2017. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-discusses-infrastructure-projects-with-president-xi-jinping/>
- “President Xi Jinping’s Speech at Opening Ceremony of 2018 FOCAC Beijing Summit.” *The Forum on China–Africa Cooperation (FOCAC)*, diakses pada 21 Januari, 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/03/c_137441987.htm
- Priatna, P. L. E. “RI-Tiongkok dan Kepercayaan yang Rapuh.” *Kompas*, 2 April, 2016.
- Primadhita, S. “Investor China Hanya Pintar Janji, Minim Realisasi Investasi.” *CNN Indonesia*, 26 Oktober, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161026160658-92-168171/investor-china-hanya-pintar-janji-minim-realisasi-investasi>
- Pudjiastuti, T. N. “Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru”, dalam *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, diedit oleh Ganewati Wuryandari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Purwanto, H. (2014, 27 Oktober). Special air force troops conduct anti-terror exercise in China. *Antara*. <https://en.antaranews.com/news/96267/special-air-force-troops-conduct-anti-terror-exercise-in-china>
- Putra, T. D. “Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran China di Natuna,” *Journal of International Relations* 5, no. 2 (2019), 323–331.
- Rahman, D. F. “Perdagangan Indonesia-Tiongkok Tumbuh 54,03% pada 2021.” *Katadata*, 11 Juli, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/11/perdagangan-indonesia-tiongkok-tumbuh-5403-pada-2021>
- Rakhmat, M. Z. “Growing Ties between Indonesia and China May Hurt US-Indonesia Relationship.” *The Conversation*, 26 Oktober, 2020. <https://theconversation.com/growing->

ties-between-indonesia-and-china-may-hurt-us-indonesia-relationship-148532

- Ramo, J. C. *The Beijing Consensus*. London: The Foreign Policy Centre, 2004.
- Redaksi Asiatoday. "China Kerahkan Milisi Maritim, Unit Elite Militer dari Nelayan di Laut China Selatan." *Asia Today.id*, 10 Juni 2021. <https://asiatoday.id/read/china-kerahkan-milisi-maritim-unit-elite-militer-dari-nelayan-di-laut-china-selatan>
- Revida, E. "Interaksi Sosial Masyarakat Etnik China dengan Pribumi di Kota Medan Sumatera Utara." *Jurnal Harmoni Sosial* 1, no. 1 (2006), 23–27.
- RH, P. "Indonesian students in China set up association." *Antara*, 29 Oktober, 2012. <https://en.antaranews.com/news/85291/indonesian-students-in-china-set-up-association>
- "RI, China Solidify C-705 Anti-Ship Technology Transfer Mechanism." *Antara*, 10 April, 2012. <http://www.antaranews.com/en/news/90341/indonesia-china-discuss-c-705-missile-technology-transfer>
- "RI, China to Conduct Joint Military Training." *The Jakarta Post*, 17 Januari, 2008.
- "Ribuan Buruh China Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Menaker." *Tempo*, 31 Agustus, 2015. <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/31/093696421/ribuan-buruh-china-masuk-indonesia-ini-penjelasan-menaker>
- "RI-Tiongkok Harus Saling Menguntungkan." *Kompas*, 13 September, 2016.
- Rizal, S. "Didesak Ekspor LNG Tangguh Dihentikan." *Sinar Harapan*, 19 Februari, 2014. <http://www.sinarharapan.co/news/read/32677/didesak-ekspor-lng-tangguh-dihentikan>
- Rosenau, J. N., G. Boyd, dan K. W. Thompson. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, 1976.
- Rosenau, J. N. *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

- Rosyidin, M. “Gaya Diplomasi Jokowi dan Arah Politik Luar Negeri RI.” *Detiknews*, 10 Oktober, 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4740964/gaya-diplomasi-jokowi-dan-arah-politik-luar-negeri-ri>
- Rozie, F. “Deretan Jabatan Luhut Binsar Panjaitan Sepanjang Pemerintahan Jokowi.” *Liputan 6*, 9 April, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4934574/deretan-jabatan-luhut-binsar-panjaitan-sepanjang-pemerintahan-jokowi>
- Hunnicutt, Trevor dan Elaine Lies. “Biden’s Asia Economic Talks Include 13 Countries and not China,” *Reuter*, 24 Mei, 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bidens-asian-economic-talks-include-13-countries-no-china-2022-05-23/>
- Rukmo, E. *Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-China*. Jakarta: CSIS, 1989. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/38118-Csis18-89-004.pdf>
- Sadono, B., dan L. R. Rahmiaji. “Pro Kontra terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021), 601–620.
- Salazar-Xirinachs, J. M., I. Nübler, dan R. Kozul-Wright. “*Transforming Economies Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development*.” Geneva: ILO, 2014. https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_242878/lang--en/index.htm
- “Sambutan Presiden RI pada Konferensi Overseas Private Investment Corporation, Jakarta 4 Mei 2011.” *Kementerian Sekretariat Negara*, 4 Mei, 2011. https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_ri_pada_konferensi_overseas_private_investment_corporation_jakarta_4_mei_2011
- “SBY Kritik Jokowi: Jangan Indonesia yang Dikontrol Tiongkok.” *Akurat News*, 29 Agustus, 2016. <http://www.akurat.id/2016/08/sby-kritik-jokowi-jangan-indonesia-yang.html>
- Schneider, F. “Actors and Agency in China’s Belt and Road Initiative: An introduction.” Dalam *Global Perspectives on China’s Belt and*

- Road Initiative: Asserting Agency Through Regional Connectivity* diedit oleh F. Schneider, 11–30. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021.
- Schneider, F. ed. *Global Perspectives on China's Belt and Road Initiative: Asserting Agency Through Regional Connectivity*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/45948>
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. “Hingga 2020 Ekonomi China Diprediksi Sulit Tembus 6,5%.” *Kompas.com*, 11 Januari, 2016. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/11/131824126/Hingga.2020.Ekonomi.China.Diprediksi.Sulit.Tembus.6.5.Persen>
- Shambazy, B. “Politik Luar Negeri Gus Dur.” *Kompas*, 2 Januari 2010. <http://tekno.kompas.com/read/2010/01/02/0253398/.politik.luar.negeri.gus.dur>
- Shearer, A. “Quad redux: A new agenda for Asia's maritime democracies.” *The Interpreter* 10 (2017), <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/quad-redux-new-agenda-asia-maritime-democracies>.
- Shutter, Robert, dan Chin-hao Huang. “China-Southeast Asia Relations: China's Toughness on the South China Sea-Year II.” *Comparative Connections* (2013).
- Sinaga, L. C. “The Dynamics of Indonesia–China Relations in Politics, Defence-Security, and Economy in Southeast Asia: An Indonesian Perspective.” Dalam *Six Decades of Indonesia-China Relations*, diedit oleh L. C. Sinaga, 1–15. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. and Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Press, 2018.
- Sitepu, Mehulika. “Kegaduhan Timbul antara Menko Luhut dan Menteri Susi soal Penenggelaman Kapal.” *BBC Indonesia*, 9 Januari, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42616683>
- Smith, S., A. Hadfield, dan T. Dunne. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

- “Soal Natuna, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Tawar-Menawar Soal Kedaulatan.” *Sekretariat Kabinet RI*, 5 Januari, 2020. <https://setkab.go.id/soal-natuna-presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada-tawar-menawar-soal-kedaulatan/>
- Soebagjo, N. “Tebar Pesona di Indonesia: Cara China Mengambil Hati Indonesia.” Dalam dalam *Merangkum China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, diedit oleh I. Wibowo & S. Hadi, 101–134. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Soeharto, B. dan S. S. Gitosardjono. *Pendobrak Kebekuan Hubungan Diplomatik RI-RRT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Soesastro, H. “China-Indonesia Relations and the Implications for the United States.” *USINDO Report*, 7 November 2003.
- Sorongan, T. P. “Awat Angin Ribut, Biden Bikin Genk Baru Serbu China di LCS,” *CNBC Indonesia*, 16 September, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210916071227-4-276665/awat-angin-ribut-biden-bikin-genk-baru-serbu-china-di-lcs>.
- Sorongan, Tommy Patrio. “China dan Filipina Panas di LCS, Biden Siap Turun Tangan.” *CNBC Indonesia*, 19 November, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211119183633-4-292987/china-dan-filipina-panas-di-lcs-biden-siap-turun-tangan>
- Sriyanto, N. “65 Years of Bilateral Relations between Indonesia and China: Strengthening and Building Constructive Relations Through People to People Relations (Volume 2).” *Pusat Riset Politik BRIN*, 4 Desember, 2015. <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/65-years-of-bilateral-relations-between-indonesia-and-china-strengthening-and-building-constructive-relations-through-people-to-people-relations-volume-2/>
- Staples, A. *ASEAN Connections: How mega -regional trade and investment initiatives in Asia will shape business strategy in ASEAN and beyond*. The Economist Corporate Network, April 2016. http://ftp01.economist.com.hk/ECN_papers/ASEANConnections
- Strategy Page. “Indonesia Buys the Missile Factory From China.” *RP Defence* (blog). 24 Maret, 2012. <http://rpdefense.over->

blog.com/article-indonesia-buys-the-missile-factory-from-china-102170094.html

- Storey, I. J. "Indonesia's China Policy in the New Order and Beyond: Problems and Prospects." *Contemporary Southeast Asia* 22, no. 1 (2000), 145–174 <https://www.jstor.org/stable/25798482>
- Suetong, Yan, "The Rise of China in Chinese Eyes." *Journal of Contemporary China*, 10, No. 26 (2001).
- Sukma, R. "Indonesia's Perception of China: The Domestic Bases of Persistent Ambiguity." Dalam *The China Threat: Perceptions, Myths and Reality*, diedit oleh H. Yee & I. Storey. New York: Routledge Cruzon, 2002.
- Sukma, R. "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties." Dalam *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, diedit oleh J. Tsunekawa, 139–155. Tokyo: The National Institute for Defense Studies, 2009.
- Sukma, R. "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties". Dalam *Indonesia and China: The Politics of Troubled Relationship*, diedit oleh R. Sukma, 135–155. London: Routledge, 2009.
- Sukma, R. "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement." *Asian Survey* 49, no. 4 (2009), 591–608.
- Sukma, R. *Indonesia and China: The Politics of Troubled Relationship*. London: Routledge, 1999.
- Sukma, Rizal. "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-Engagement". *Asian Survey*, (2009).
- Sun, Xin. "Selective Enforcement of Land Regulation; Why Large Scale Violator Succeed." *The China Journal* 74, (2015).
- Sundararaman, Shankari. "Understanding the Indo-Pacific: Why Indonesia Will be Critical?" Chairperson Center for Indo-Pacific Studies, New Delhi, School of International Studies, JNU, 2018.
- Sutter, R. "Obama, Trump and US politics and diplomacy towards Asia." Dalam *The United States in the Indo-Pacific: Obama's*

- Legacy and the Trump Transition*, diedit oleh O. Turner & I. Parmar, 143–160. Manchester: Manchester University Press, 2020. <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00021>
- Sutter, R. “China’s Rise, Southeast Asia, and the United States: Is a China-Centered Order Marginalizing the United States?” Dalam *China, the United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics*, diedit oleh R. Sutter, E. Goh, dan S. Simon, 109–124. New York: Routledge, 2008. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203946060-16/china-rise-southeast-asia-united-states-china-centered-order-marginalizing-united-states-robert-sutter>
- Sutter, Robert. G. *China’s Rise in Asia-Promise, Prospect and Implication for United States of America*. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2005.
- Syafputri, E. “Militer China Puji Kehebatan Kopassus.” *Antara*, 6 Juni 2011. <https://www.antaraneews.com/berita/261734/militer-china-puji-kehebatan-kopassus>
- Syarifudin. “Jadi Negara Terkaya Dunia, Ekonomi China Resmi Salip AS.” *IDX Chanel*, 17 November 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/jadi-negara-terkaya-dunia-ekonomi-china-resmi-salip-as#:~:text=PDB%20China%20diperkirakan%20mencapai%20USD15,sudah%20melampaui%20AS%20saat%20ini>
- Szell, P. Gyorgy. “Changing Labour Relation in China.” *Indian Journal of Industrial Relation* 45, No. 4 (2010).
- T. J. Pempel. “Asia’s Lesser Powers Confront US–China Threat to the Regional Order.” *Issues & Studies* 56, No. 02 (2020), 2040005-1-2040005-21. <https://doi.org/10.1142/S1013251120400056>
- Tang, S. *Introduction: Understanding Living with China. Living with China; Regional States and China through Crises and Turning Points*. New York: Pargrave Macmillan, 2009.

- Teruaki, A. "Decoding Japan's Free and Open Indo-Pacific Concept," Dalam *Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific*, diedit oleh Rossiter & Brendon J. Cannon. New York: Routledge, 2020.
- "China Struts Larger on World Stage." *The Jakarta Post*, 25 Mei, 2011.
- The White House Office of the Press Secretary. "Remarks by President Barack Obama at Suntory Hall." *The White House President Barrack Obama*, 14 November 2009. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-suntory-hall>
- The White House Office of the Press Secretary. "Remarks By President Obama to the Australian Parliament," *The White House President Barrack Obama*, 17 November, 2011. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>
- The White House. *National Security Strategy of the United States of America (NSS) 2017*. Washington DC: Office of the Press Secretary, 2017. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>
- The World Bank. "China Economic Update-December 2021." *The World Bank*, 22 Desember, 2021. <https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-december-2021>
- Tiezzi, S. "China 'New Silk Road' Vision Revealed." *The Diplomat*, 9 Mei 2014. <http://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/>
- Timorria, I. F. "Pertumbuhan Ekspor RI ke China Bisa Lebih Tinggi dari Impor", *Bisnis.com*, 26 Agustus, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210826/12/1434542/pertumbuhan-ekspor-ri-ke-china-bisa-lebih-tinggi-dari-impor>
- "Tiongkok Berharap Kerjasama Pertahanan dengan RI Terus Dijaga." *JakartaGreater*, 9 Maret, 2015. <http://jakarta.greater-com/tiongkok-berharao-kerjasama-pertahanan=dengan-ri-terus-terjaga>

- “Towards Harmony Among Civilizations.” Pidato di The John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 29 September 2009. <http://sby.kepustakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/pidato/2005/05/19/332.html>
- Trinugroho, Tomy. “AUKUS Aliansi untuk Peran.” *Kompas*, 20 September 2021, http://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/20/aucus-aliansi-untuk-perang?track_source=baca&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fopini%2F2021%2F09%2F20%2Faucus-aliansi-untuk-perang&status=sukses_login&status_login=login
- Trump, D. J. “Donald Trump: Disappearing Middle Class Needs Better Deal on Trade. Job-killing Trans-Pacific Partnership Must be Stopped,” *The USA Today*, 14 Maret, 2016. <https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/03/14/donald-trump-tpp-trade-american-manufacturing-jobs-workers-column/81728584/>
- U.S. Senate, Subcommittee On East Asian And Pacific Affairs, Committee On Foreign Relations. “Rebalance to Asia Iv: Economic Engagement in the Asia–Pacific Region.” Washington DC: U.S. Government Printing Office; 18 Desember, 2013. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/121813_Transcript_Rebalance%20to%20Asia%20IV%20Economic%20Engagement%20in%20the%20Asia%20Pacific%20Region.pdf
- Ulya, F. N. “Apa Saja yang Terjadi Saat Resesi Ekonomi 1998?” *Kompas*, 6 Agustus, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/082004526/apa-saja-yang-terjadi-saat-resesi-ekonomi-indonesia-tahun-1998?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>
- “Upaya Perbaikan Pemerintah Tuai Hasil.” *Kompas*, 26 Oktober, 2016.
- US Department of Defense. *Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*. Washington: US Department

- of Defense, 2012. https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/defense_guidance-201201.pdf
- Van der Kroef, J. M. "Normalizing" Relations with China: Indonesia's Policies and Perceptions," *Asian Survey* 26, no. 8 (1986), 909–934.
- Van der Westhuizen, J., dan S. Grimm. "South Africa's Middle Power Ambitions: Riding the Dragon or Being its Pet?" Dalam *Middle Powers and the Rise of China*, diedit oleh B. Gilley & A. O'Neil, 171–191. Washington: Georgetown University Press, 2014. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.13>
- "Vice-President Hu Jintao Meeting with Indonesian Vice-President Megawati." *Chinese Foreign Ministry*, diakses pada 25 Oktober 2016. <http://wcm.fmprc.gov.cn/pub/eng/topics/3755/3791/3803/t19435.htm>
- VietnamNet. "Businesses Believe APEC's Free Trade Agreement will Bring Few Benefits," *Bilaterals.org*, 9 November 2014. <https://www.bilaterals.org/?businesses-believe-apec-s-free>
- Wade, R. H. "The American Paradox: Ideology of Free Markets and the Hidden Practice of Directional Thrust." *Cambridge Journal of Economics* 41, No. 3 (2017), 859–880.
- Warren, A., dan A. Bartley. *US Foreign Policy and China: Security Challenges During the Bush, Obama, and Trump Administrations*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021. <https://edinburghuniversitypress.com/book-us-foreign-policy-and-china.html>
- Wei, L. "Developmental Peace in East Asia and Its Implications for the Indo-Pacific." *International Affairs* 96, No. 1, (2020), 189–209. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz230>
- Wei, Lu Shi. "China's Diplomacy in the New Period: Changes and Consistency." *China Institute of International Studies* 3, (2006).
- Weinstein, F. B. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Soekarno to Soeharto*. Singapura: Equinox Publishing Edition, 2007.

- Weinsten, Franklin B. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Soekarno to Soeharto*. Singapore: Equinox Publishing, 2007.
- Wibisono, Makarim. "Indonesia and Global Competitiveness." *The Jakarta Post*, 10 Oktober 2011.
- Wibowo I. *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat China*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Wibowo, I., dan D. Kusuma. "Melumasi Hubungan Indonesia-China: Kerja Sama Minyak." Dalam *Merangkum China: Hubungan Indonesia-China Pasca-Soeharto*, diedit oleh I. Wibowo dan S. Hadi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Wicaksana, I. G. W., dan A. Wardhana. "Populism and Foreign Policy: The Indonesian Case." *Asian Politics & Policy* 13 (2021), 408–425.
- Wicaksono, P. E. "Cerita di Balik Kesuksesan RI Renegosiasi Harga LNG Tangguh." *Liputan 6*, 1 Juli, 2014. <http://bisnis.liputan6.com/read/2071299/cerita-di-balik-kesuksesan-ri-renegosiasi-harga-lng-tangguh>
- Widiatmaji, A., dan U. Albab. "Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional," *Jurnal Politica* 10, no. 1 (Mei 2019), 77–93.
- Wilkins, T. S. "Australia: A Traditional Middle Power Faces the Asian Century." Dalam *Middle powers and the rise of China*, diedit oleh B. Gilley dan A. O'Neil, 149–170. Washington: Georgetown University Press, 2014. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zswkb.12>
- Williamson, J. "What Washington Means by Policy Reform." Dalam *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, Diedit oleh J. Williamson, 90–120. Washington, DC: Institute for International Economics, 1990.
- Wilson, J. D. "Mega-regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing between the TPP and RCEP?" *Journal of Contemporary Asia* 45, No. 2 (2015), 345–353.

- Wirawan, U." Memprediksi Masa Depan Hubungan AS-Tiongkok." *Berita Satu*, 1 Januari, 2022. <https://www.beritasatu.com/internasional/873809/memprediksi-masa-depan-hubungan-as-tiongkok>
- Wolf, M. "China's Struggle for A New Normal". *Financial Times*, 22 Maret, 2016. <https://www.ft.com/content/28ea640e-ef62-11e5-aff5-19b4e253664a>
- Wu, Fuzuo. "China's Puzzling Energy Diplomacy Toward Iran." *Asian Perspective*, (Januari–Maret 2015).
- Wuryandari, G. ed., *Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007.
- Wuryandari, G. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Wuryandari, G. "Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama." Dalam *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, diedit oleh Wuryandari, Ganewati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- "Xi Jinping Tiba-tiba Telepon Jokowi, Ada Apa?" *CNBC Indonesia*, 14 Januari, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220114072600-4-307229/xi-jinping-tiba-tiba-telepon-jokowi-ada-apa>
- "Xi Jinping's Speech at High-level Meeting to Mark UN's 75th Anniversary." *China Global Television Network (GGTN)*, 22 September, 2020. <https://news.cgtn.com/news/2020-09-22/Full-text-Xi-Jinping-addresses-high-level-meeting-for-UN-anniversary-TYvH4vvVDO/index.html>
- Xia, Ming. "China Threat or a Peaceful Rise of China?" *New York Times*, diakses pada 11 Mei, 2016. <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html?scp54&sq5china>
- Xiaoming, Zhang. "Rise of China and Community Building in East Asia", *Asian Perspective* 30, No. 3 (2006).

- Huaxia. ed. "Belt and Road Initiative the Most Popular Public Goods." *Xinhuanet*, 8 Maret, 2017. http://www.xinhuanet.com/english/2017-03/08/c_136112178.htm
- Zhancheng, Ma. "Xi Jinping Attended the Central Foreign Affairs Work Conference and Delivered an Important Speech." *Xinhuanet*, 29 November, 2014. http://www.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm
- Xu Liping, Wang Jun Sen, dan Yang Danzhi, Center of Southeast Asian Studies, Department of Asia-Pacific Social and Cultural Studies, National Institute of International Strategy (CASS). Focus Group Discussion Tim Polugri P2P LIPI: Hubungan Indonesia-China. Beijing, 28 Mei 2016.
- Yani, Y. M. "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy," *Jurnal Sosio Humaniora* 11, no.1 (2009), 1–16.
- Yining, P. "Growing into Global Role, Peace by Peace," *Telegraph*, diakses pada 25 Oktober, 2016. <http://www.telegraph.co.uk/sponsored/china-watch/politics/11894547/china-un-peacekeepers.html>
- Yuan, J., T. Akaha, dan W. Liang. "Conclusion." Dalam *Trump's America and International Relations in the Indo-Pacific*, diedit oleh T. Akaha, J. Yuan, dan W. Liang, 171–197. Cham: Springer International Publishing, 2021. <https://link.springer.com/content/pdf/bbm:978-3-030-75925-4/1>
- Yudhoyono, S. B. "Indonesia's Role as Regional and Global Actor." Pidato. London: Wilton Park, 2 November 2012.
- Yue, P. "Pertukaran Humaniora dan Kerja Sama Tiongkok-Indonesia dalam Periode Pasca Pandemi". Dalam *Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok*, diedit oleh P. R. Yuniarto dan T. J. Lan, 61–74. Surabaya: Airlangga, 2021.
- Zha, D. "China and the May 1998 Riots of Indonesia: Exploring the Issues." *Pacific Review* 13, no.4 (2000), 557–574. <https://doi.org/10.1080/095127400455323>

- Zhang, Jian. "China 's foreign policy under Xi Jinping: toward's Peaceful Rise 20.?" *Global Change, Peace & Security*. Vol.27, No.1 .(2015).
- Zhida, J. (2012, 31 Desember). "Indonesia's "Confidence" Diplomacy under the Yudhoyono Government." *China Institute of International Studies*, . (2012, 31 Desember). http://www.ciis.org.cn/english/2012-12/31/content_5638110.htm
- Zhou, J. "China's Core Interests and Dilemma in Foreign Policy Practice." *Pacific Focus*, Vol. 34, No. 1 (2019), 31--54. <https://doi.org/10.1111/pafo.12131>

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tentang Penulis



Ganewati Wuryandari

Penulis adalah peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2W-LIPI) dan Plt. Kepala Pusat Riset Kewilayahan, BRIN (2016–2021). Penulis yang mendapatkan gelar Prof Riset di bidang Hubungan Internasional ini lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mendapatkan gelar M.A. di bidang International Relations, Department of Politics, Monash University, serta Ph.D dari Department of Asia Studies, University of Western Australia. Hingga saat ini masih aktif sebagai Sekretaris Jenderal International Federation of Social Sciences Organization (IFSSO), Eminent Person Group (EPG) RI di ASEAN Regional Forum (ARF), anggota Klirens Etik Sosial Humaniora BRIN dan dewan redaksi/mitra bestari beberapa jurnal nasional. Minat akademiknya di bidang hubungan internasional, khususnya mengenai Indo Pasifik, perbatasan dan politik luar negeri Indonesia.

Banyak karya ilmiah telah diterbitkan dalam bentuk buku, dan jurnal. Publikasi terakhirnya adalah *Politik Luar Negeri Era Reformasi: Kebangkitan Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah dalam*

Percaturan Regional dan Global (Penerbit BRIN, 2022); “The Widening Global Network of Indonesian Diaspora Scholars in Malaysia” (*Journal Diaspora Studies*: 2022, *co-authors*); “Hubungan Antarwarga dalam Relasi Indonesia-Tiongkok di Tengah Perubahan Politik Domestik” dalam buku *Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok* (Penerbit Erlangga: 2021, *co-authors*); “Tbukota Baru Indonesia: Sudut Pandang Politik Luar Negeri dan Geopolitik” dalam buku *Perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan* (Penerbit Universiti Malaysia Sabah: 2021, *co-authors*). *E-mail*: gane_002@brin.go.id



Mario Surya Ramadhan

Peneliti pada Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Menyelesaikan pendidikan sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar Master dari National Security College, Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian Politik Luar Negeri PRP-BRIN. Penulis memiliki ketertarikan pada kajian keamanan internasional, politik luar negeri Indonesia, dan dinamika Indo-Pasifik.

Beberapa publikasi terakhir, di antaranya artikel jurnal “Local Leadership Amidst COVID-19: Responses, Policies, and Political Stages”, yang dipublikasikan di *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 17, No. 2 Desember 2020 (*co-author*), artikel prosiding pada *The 1st International Conference on Political, Social, and Humanities Sciences 2020*, Universitas Jenderal Soedirman, dengan judul “Indonesia’s Counter-Violence Extremism Policy Against ISIS Propaganda in Social Media”, dan *book chapter* (*co-author*) berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam Isu Keamanan pada Era Reformasi”, dalam *buku Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Amerika Serikat: Mengelola Hubungan di tengah Perubahan Tatanan Global* (Suluh Media 2018). *E-mail*: mario.surya.ramadhan@brin.go.id



Nanto Sriyanto

Memperoleh gelar Master studi hubungan internasional, The University of Queensland dan peneliti madya pada Pusat Riset Politik, BRIN. Saat ini sedang menempuh studi S3 di La Trobe University, Australia. Bergabung di BRIN sejak tahun 2004, penulis mendalami politik luar negeri Indonesia dan kajian kawasan dan politik negara besar. Penulis juga memberikan perhatian besar pada pendekatan negara kekuatan menengah yang menjadi perhatiannya dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Bergabung dalam tim kajian politik luar negeri, fokus penelitiannya terletak pada peran negara-negara non-kekuatan besar dalam membentuk tatanan internasional. Penelitian hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok ini merupakan bagian dari perspektif serupa yang diterapkan dalam kerangka hubungan dua negara. Publikasi karya tulisnya telah terbit di media nasional, jurnal dan penerbit nasional dan penerbit internasional.

Salah satu karya akademik terakhirnya adalah “Ibukota Baru Indonesia: Sudut Pandang Politik Luar Negeri dan Geopolitik” dalam buku *Perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan* (Penerbit Universiti Malaysia Sabah: 2021, co-authors). Selain itu, ia juga aktif memberikan pendapat dalam wawancara dan seminar nasional dan internasional terkait isu-isu tersebut. *E-mail*: nantosriyanto@gmail.com



R. A. Rizka Fiani Prabaningtyas

Penulis adalah peneliti pada Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Meraih gelar S1 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan S2 dari program Master of International Relations (Advanced) dari Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian Politik Luar Negeri

PRP BRIN sejak 2014 dan tim Kajian Migrasi Paksa pada 2022. Minat riset penulis meliputi kajian politik internasional, diplomasi dan politik luar negeri, isu migrasi paksa, dan pengungsi internasional. Beberapa publikasinya yang terkini, antara lain artikel jurnal “Diplomasi Wolf Warrior China dan Relasi China-Australia di Masa Pandemi Covid-19” (*co-author*) yang diterbitkan dalam *Intermestic Journal of International Studies* Vol. 6 No. 2 (2022), artikel jurnal “Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok pada Masa Pandemi Covid-19” (*co-author*) yang diterbitkan dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 17 No. 2 (2020), artikel jurnal “Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection” yang diterbitkan dalam *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 9 No. 2 (2019); dan *book chapter* berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat pada Isu-isu Ekonomi di era Reformasi” dalam buku *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Amerika Serikat: Mengelola Hubungan di tengah Perubahan Tatanan Global* (Suluh Media, 2018). *E-mail*: prabaningtyas.rizka@gmail.com.



Siswanto

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) sejak tahun 2000 sampai sekarang. Penulis mendapatkan gelar Prof. Riset di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Bidang kepakaran penulis adalah politik global Amerika Serikat dan hubungan internasional. Penulis merupakan alumnus Program Doktor Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, tahun 2008. Karya tulis ilmiah perseorangan yang dihasilkan, antara lain buku berjudul *Terobosan John F. Kennedy dalam Kemelut Irian Barat* (Gading Inti Prima, 2015); buku *Dekolonisasi Versus Status Quo: Sejarah Diplomasi Papua* (Gagas Nusantara, 2018); buku *Kontroversi Kepemimpinan Donald Trump* (Gagas Nusantara, 2018), buku *Indonesia dan Diplomasi Irian Barat 1949-1962: Memanfaatkan Perang Dingin*

(LIPI Press, 2020); dan buku orasi Profesor Riset *Pengembangan Model Mediator Rasional berbasis Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dan Aksi Mediasi dalam Sengketa Irian Barat*” (Penerbit BRIN, 2021).
E-mail: Javanese62@gmail.com, sish_jakarta@yahoo.com

Buku ini tidak diperjualbelikan

Indeks

- Abdurrahman Wahid, 97, 103, 159,
160, 163, 179
- Aliansi terbatas, 17, 230
- Amerika Serikat
AS, 110, 113, 121, 128
- Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI), 94
- APEC, 112, 120, 127, 138, 140, 141,
240, 242, 271
- AS, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 32, 33,
35, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 62,
74, 75, 76, 80, 104, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 121, 122, 123,
125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148,
154, 155, 158, 162, 164, 168,
170, 171, 173, 174, 176, 177,
193, 199, 200, 201, 203, 204,
213, 216, 222, 229, 232, 237,
241, 268, 273
- ASEAN, 109, 110, 111, 112, 113, 116,
117, 118, 119, 120, 123, 126,
127, 141, 144, 145, 147, 148,
239, 240, 242, 244, 246
- ASEAN plus Three, 113, 116
- ASEAN Regional Forum
ARF, 120
- Asia Rebalance, 125, 128, 130, 131, 135
- balancing, 110, 114, 116, 118, 130, 243,
249
- bandwagoning, 110, 114
- bebas aktif, 148
- Beijing Consensus, 114, 115, 116, 135,
260, 263
- Belt Road Initiative (BRI), 12, 13, 31,
47, 183, 195, 216, 230
- B.J. Habibie, 152, 153, 154, 155, 157
- BRI, 110, 111, 112, 121, 132, 133, 134,
135, 139, 145, 147, 242, 248
- BRICS, 111, 134
- bridge builder, 111
- Demokrasi, 85
- Deng Xiaoping, 12, 33, 34, 37, 43
- departemen luar negeri, 95
- Dinamika internal, 23
- Dinasti Ming, 46
- Diplomasi, 3, 6, 9, 57, 68, 107, 119, 184,
196, 197, 218, 240, 241, 245,
256, 257, 264, 280
- dynamic equilibrium, 168

- EAEC, 116
- EAS, 14, 15, 113, 116, 121, 123, 143
- East Asian Economic Caucus
EAEC, 116
- East Asian Summit
EAS, 113
- Ekspor, 136, 164, 199, 200, 201, 260,
263, 269
- Filipina, 15, 16, 46, 61, 63, 117, 136,
141, 208, 211, 221, 222, 266
- G-20, 111
- Global Maritime Fulcrum, 92, 93, 105,
238
- Habibie, 85, 91, 102, 103, 240
- Hillary Clinton, 123
- Hubungan bilateral, 4, 6, 28, 183
- Hu Jintao, 12, 64, 119, 125, 162, 163,
168, 239, 271
- Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 41, 47,
49, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 75,
78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 116, 117, 120,
123, 136, 140, 144, 147, 148,
149, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 233, 234, 235,
237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 277, 278, 279, 280, 281
- Indo-Pasifik, 109, 110, 112, 113, 121,
126, 135, 139, 140, 147
- Jepang, 32, 33, 45, 46, 47, 48, 60, 61, 73,
74, 109, 114, 115, 116, 119, 127,
128, 135, 139, 140, 141, 143,
147, 148, 160, 173, 214, 222,
223, 229, 230, 252
- Joe Biden, 16, 229
- Jokowi, 5, 9, 12, 20, 27, 47, 71, 72, 74,
78, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 105,
106, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 194, 195, 196, 197, 204,
205, 208, 210, 212, 216, 218,
220, 221, 223, 227, 228, 229,
238, 239, 241, 244, 249, 250,
259, 261, 262, 264, 266, 273
- Joko Widodo, 90, 91, 92, 98, 103
- KAA Bandung, 216
- Kebangkitan Tiongkok, xv, 15, 23, 31,
39, 40, 52, 79, 110, 144, 145,
146, 183, 231
- Kedaulatan, 99, 209, 210, 220, 251, 266
- Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi,
98, 253
- Menteri, 98
- Kemitraan komprehensif, 232
- Kemitraan Strategis Komprehensif, 181
- kepentingan inti, 124
- Kepentingan nasional, 54, 165
- Ketidakseimbangan kekuatan, 6, 227
- Konfrontatif, 52, 58
- Kooperatif, 52, 55

- Latihan militer, 172
- Laut China Selatan, 4, 5, 13, 15, 16, 21, 24, 31, 33, 46, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 79, 80, 103, 106, 121, 124, 185, 208, 211, 213, 221, 222, 232, 263
- Lingkungan Strategis, 189, 272
- Li Peng, 3, 41
- Mao Zedong, 12, 33, 82
- Megawati, 85, 97, 103
- Megawati Soekarno Putri, 153, 162, 163
- middle power, 112, 115, 146, 148, 241, 271, 272
- militer, 81, 84, 85, 94, 95, 96, 101, 106
- Modernisasi, 44
- nasionalisme, 85, 92
- Natuna, 4, 63, 75, 94, 99, 100, 106, 172, 185, 196, 208, 209, 210, 211, 220, 221, 223, 228, 242, 246, 249, 254, 259, 261, 262, 266
- Nawacita, 186, 187, 227
- Negara kekuatan menengah, 22
- negara pembangunan, 114, 115, 149
- Obama, 15, 16, 75, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 145, 146, 241, 242, 248, 255, 256, 259, 267, 268, 269, 271
- One China Policy, 162, 163
- Orde Baru, 84, 85, 89, 94, 95, 96, 101, 102
- Pan-Asianisme, 84
- Partai Komunis Tiongkok, 14, 32, 33, 36, 37, 39, 59, 60, 74, 175, 238
- Pelaku bisnis, 106
- pemerintahan, 12, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 54, 59, 72, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 135, 140, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 194, 196, 197, 204, 208, 218, 223, 226, 227, 228, 264
- people to people, 177
- Perang dagang, 52
- Perdagangan, 11, 70, 107, 117, 120, 126, 136, 140, 162, 164, 177, 199, 200, 201, 204, 213, 217, 219, 250, 258, 259, 262
- Pertumbuhan ekonomi, 168, 178, 215
- Politik Domestik, 83, 90, 273
- Poros Maritim Dunia, 12, 69, 98, 105, 183, 190, 191, 195, 213, 250, 258
- Pragmatisme ekonomi, 17, 230
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 152
- Qian Qichen, 3
- RCEP, 15, 26, 72, 73, 74, 128, 129, 140, 141, 142, 147, 214, 238, 257, 272
- Rebalancing Asia Pacific, 222
- Reformasi, 85, 97, 108
- Regional, 13, 14, 18, 21, 48, 50, 56, 72, 73, 112, 114, 120, 128, 132, 133, 139, 144, 145, 188, 189, 214, 232, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 248, 249, 251, 256, 265, 268, 272, 274, 277, 278
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 72, 73
- RPJMN, 190
- Sejarah, 83
- Sepenanggungan, 64
- Soeharto, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 95, 101,

102, 106, 251, 266, 271
 Soekarno, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91,
 92, 108, 255, 271
 Strategic Patnership, 152
 Strategi Indonesia, 230
 Strategi tiga pilar, 17
 Sumber Masyarakat, 100
 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 91,
 103

 Tiongkok, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
 115, 116, 118, 119, 120, 121,
 123, 124, 125, 128, 129, 130,
 131, 132, 133, 134, 135, 136,
 137, 139, 140, 142, 143, 144,
 145, 146, 147, 148, 149
 TPP, 26, 74, 118, 127, 128, 129, 137,
 138, 140, 141, 142, 146, 238,
 242, 272

 Trans-Pacific Patnership TPP, 118
 Treaty of Amity and Cooperation, 116
 Trump, 13, 16, 21, 47, 50, 51, 52, 118,
 124, 128, 131, 137, 138, 139,
 140, 141, 142, 143, 144, 145,
 146, 147, 229, 240, 242, 248,
 249, 255, 256, 260, 267, 268,
 270, 271, 274, 280

 Vietnam, 10, 15, 38, 46, 74, 77, 78, 116,
 136, 137, 138, 140, 141, 204,
 205, 208, 221, 232

 Washington Consensus, 114, 146

 Xiaoming, 39, 40, 41, 273
 Xi Jinping, 123

 zero enemy, 167, 168

Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan memaparkan bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok dilihat dari perspektif relasi kekuatan masing-masing negara. Ditulis oleh para periset bidang politik dan hubungan internasional, kedalaman pembahasan dalam buku ini akan membawa pembaca melihat bagaimana Indonesia menempatkan kepentingannya dalam koridor kerja sama dengan Tiongkok, yang sudah terjalin sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Tiap-tiap babnya akan membawa pembaca memahami strategi yang dilakukan Indonesia saat kekuatan Tiongkok bangkit dan mendorong perubahan arah kebijakan luar negerinya.

Buku ini akan cocok untuk pembaca yang ingin memahami dinamika tersebut. Selamat membaca!

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 3,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.758



ISBN 978-623-8372-58-4



9 786238 372584